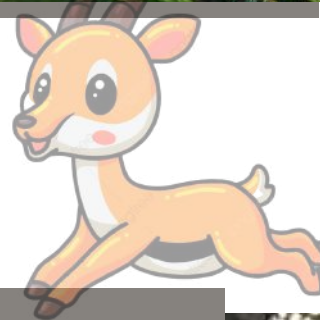




LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT



TAHUN 2022





TANAH LAUT
BERINTERAKSI



H. SUKAMTA
Bupati Tanah Laut

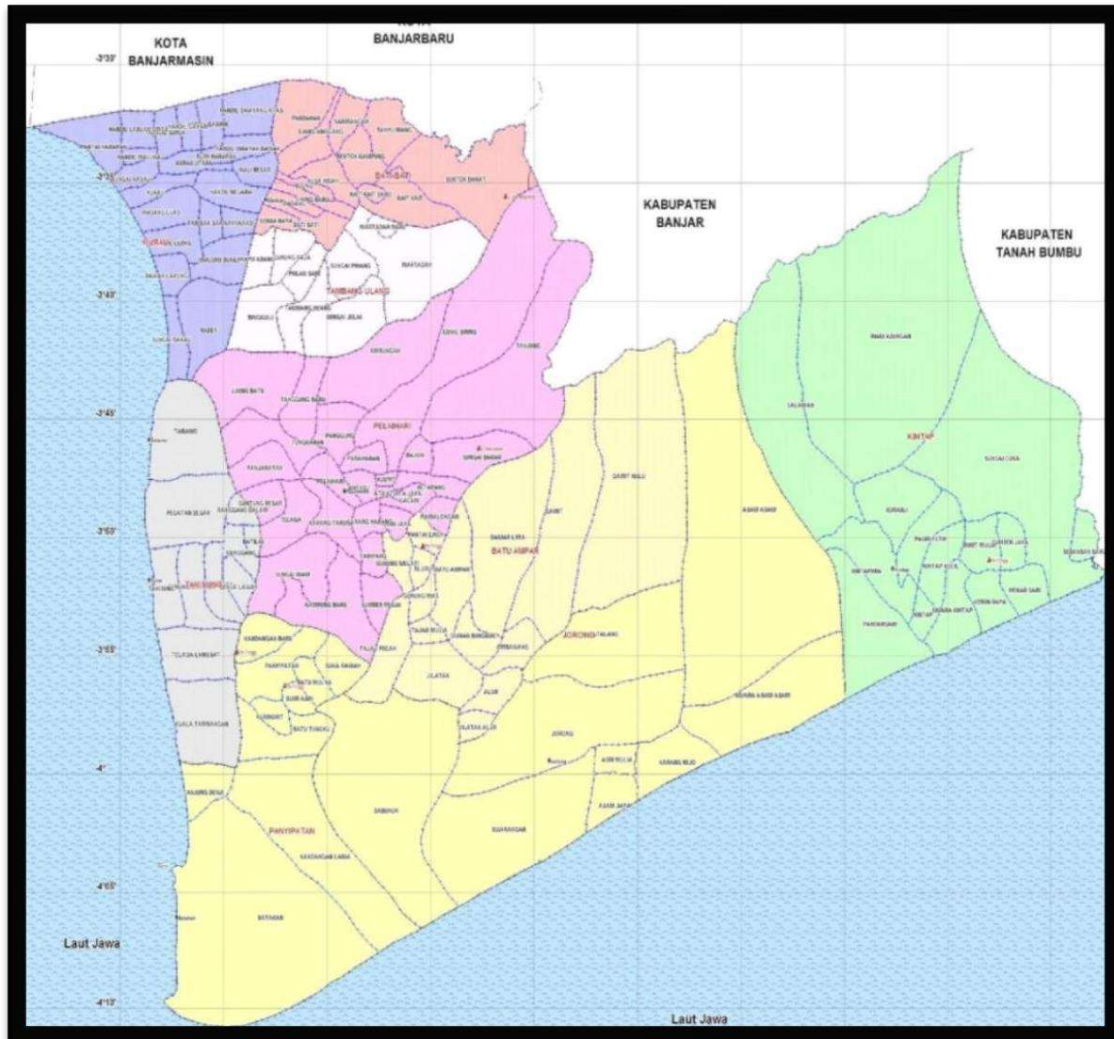


ABDI RAHMAN
Wakil Bupati Tanah Laut



TANAH LAUT
BERINTERAKSI

PETA KABUPATEN TANAH LAUT





LAMBANG DAERAH



MAKNA LAMBANG DAERAH

1. Lambang berbentuk perisai mengandung pengertian kekuatan mempertahankan daerah ini dari serangan musuh yang ingin mengganggu ketentraman.
2. Warna coklat dan biru pada bagian atas lambang dengan tulisan Tanah Laut melambangkan cakupan wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi wilayah daratan dan lautan.
3. Warna hijau dan kuning pada tubuh lambang, melambangkan Kabupaten Tanah Laut memiliki kesuburan alam dan kekayaan bahan tambang.
4. Garis miring hitam yang membelah pinang pada pertengahan lambang menunjukkan arah angin, yaitu tenggara dan barat laut yang memiliki pengertian bahwa Tanah Laut mengalami dua musim yakni, musim kemarau dan musim hujan, disamping merupakan garis pertautan abadi antara hasil tambang dengan kesuburan alamnya.
5. Belanga yang berada ditengah lambang adalah pedaringan atau tempat beras, yang melambangkan kekayaan alam Tanah Laut yang disimpan di dalam belanga untuk lebih dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat.
6. Bintang bersudut lima berada di atas belanga melambangkan Pancasila, disamping juga melambangkan jumlah kecamatan pada awal pembentukan Kabupaten Tanah laut yang berjumlah lima Kecamatan.



7. Setangkai padi dan seikat purun di dalam lengkungan belanga melambangkan kemakmuran dan persatuan daerah Tanah Laut, yang juga merupakan salah satu hasil daerah yang berbentuk anyaman.
8. Perahu layar dan laut melambangkan bahwa Tanah Laut merupakan daerah nelayan yang kaya dengan hasil laut selain itu lambang ini juga memiliki pengertian ketabahan dalam menghadapi rintangan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 21384 Pelaihari

PERNYATAAN TELAH DIREVIU APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pelaihari, 15 Februari 2023


Inspektur,
INSPEKTORAT

Drs. Joko Wuryanto, M. Si
Kepala Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650116 199203 1 008



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wujud pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada masyarakat yang semakin mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023. Laporan kinerja dibuat setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, yang sekaligus juga menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Laporan Kinerja ini juga menguraikan keberhasilan - keberhasilan serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang serta menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcomes*).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut ini disusun semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan datang.

Pelaihari, Maret 2023

Bupati Tanah Laut,

H. SUKAMTA

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja keempat RPJMD 2018 – 2023. Selain media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan urusan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 21 sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 31 indikator, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis di atas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dapat dikatakan **Sangat Baik/Sangat Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran target terhadap pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan dan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2022 dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2022. Hasil pengukuran secara mandiri



(*self assessment*) menginformasikan secara ringkas tingkat capaian kinerja atas 21 (dua puluh satu) sasaran strategis dan 31 indikator kinerja utama yaitu 184,39% dengan rincian **23 (dua puluh tiga)** indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan** dengan rentang capaian lebih dari 90%, **3 (tiga)** indikator dengan tingkat capaian **Memuaskan** dengan rentang capaian di atas 80% s.d 90%, **2 (dua)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Sangat Baik** dengan rentang capaian di atas 70% s.d 80%, **1 (baik)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Baik** dengan rentang capaian di atas 60% s.d 70%, dan **2 (dua)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Cukup** dengan rentang capaian di atas 50% s.d 60%.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun pada tahun 2023 dan seterusnya akan terus di tingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Maret 2023
Bupati Tanah Laut,

H. SUKAMTA



DAFTAR ISI

MAKNA LAMBANG DAERAH.....	i
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Laut	3
C. Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	6
D. Aparatur Sipil Negara	8
E. Isu Strategis	10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)	13
B. Indikator Kinerja Utama	25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja	45
B. Akuntabilitas Keuangan	318

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	341
B. Strategi Peningkatan Kinerja	341



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala daerah bertanggungjawab melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah disusun.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Bupati menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah



diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Bupati kepada masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

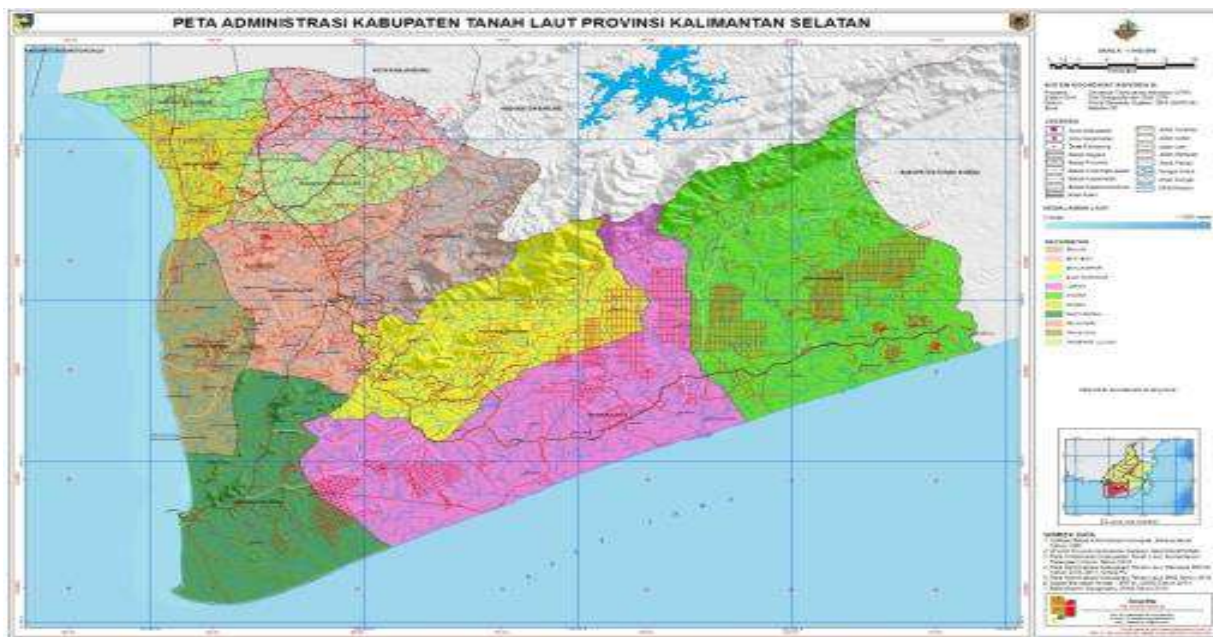
Tujuan pelaporan kinerja yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Pelaihari. Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut berada di bagian selatan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30'20" sampai 115°23'31" Bujur Timur dan 3°30'33" sampai 4°11'38" Lintang Selatan. Sedangkan secara administrasi, wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km² atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 (sebelas) wilayah Kecamatan yang terbagi dalam 130 Desa dan 5 Kelurahan.

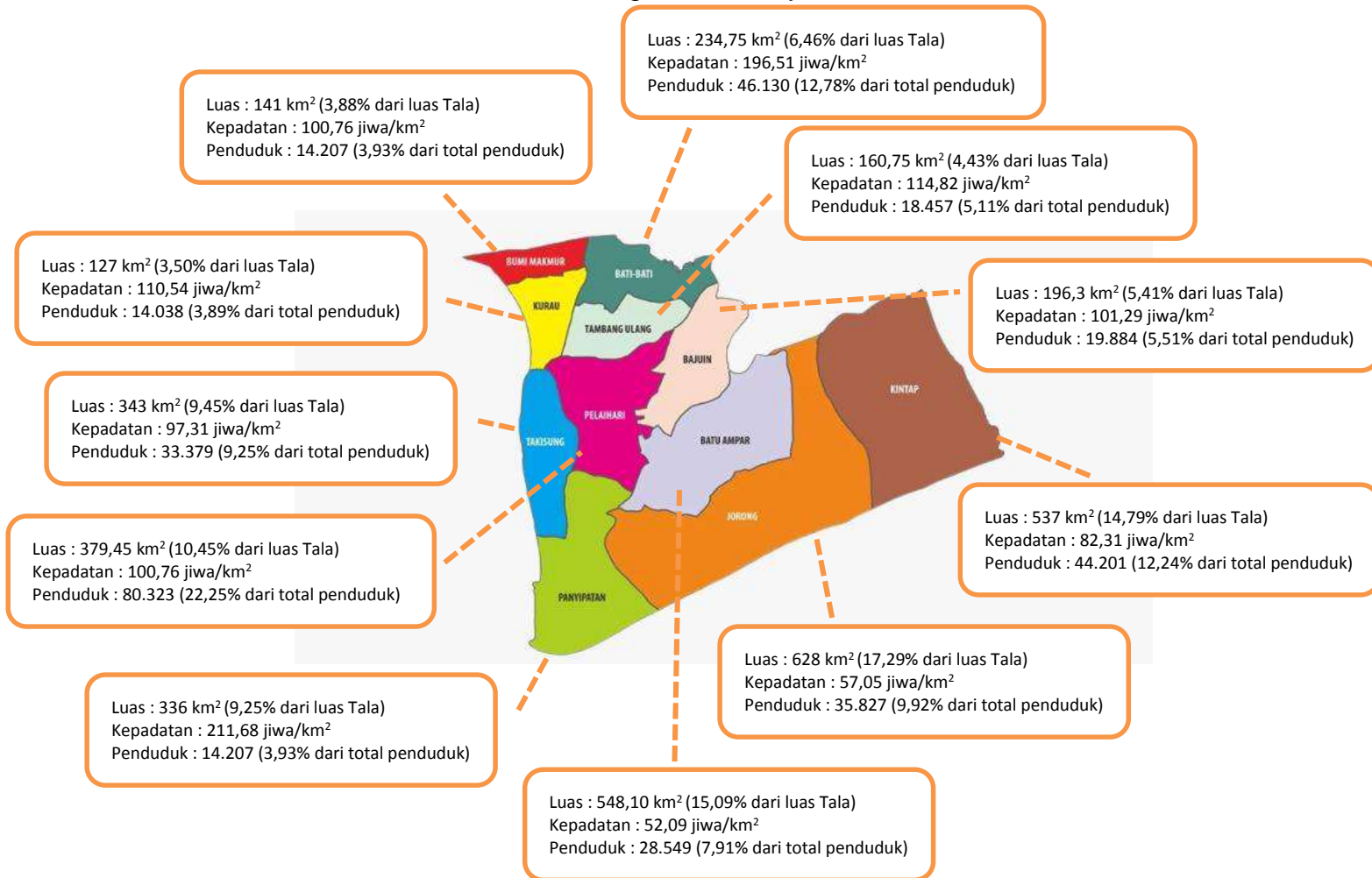
Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km². Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut: Utara Kota Banjarbaru, Selatan Laut Jawa, Timur Kabupaten Tanah Bumbu dan sebelah barat Laut Jawa.

Gambar 1.1
Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut, 2022



Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau,

Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km².



Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, secara keseluruhan terdapat 135 desa dan kelurahan, untuk wilayah yang memiliki jumlah Desa dan Kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 Kelurahan), Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kintap dengan jumlah masing-masing 14 Desa, sedangkan Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bajuin dengan jumlah masing-masing 9 desa.

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan November - April dengan curah hujan rata-rata 322,5 dan bulan-bulan relative kering antara bulan Mei - Oktober dengan curah hujan rata-rata 79,16. Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspirasi bulanan, maka Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance*-nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Curah hujan sebagai faktor fisik bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimasukkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh kedua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi tindakan budidaya baik terhadap teknik pengolahan tanah maupun pemilihan jenis komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

Jika dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023 (pertengahan tahun/Juni) sebesar 361.044 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,42 persen dari tahun 2021. Rasio jenis kelamin pada tahun 2022 sebesar 105,18 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan atau dari 100 perempuan terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Pelaihari dimana sekitar 22 persen penduduk Kabupaten Tanah Laut tinggal di kecamatan ini. Kecamatan ini juga merupakan kecamatan paling padat penduduk dengan kepadatan sekitar 211 jiwa per km². Kecamatan Kurau merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 14.038 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling sedikit adalah kecamatan Batu Ampar dengan kepadatan sekitar 50 jiwa per km².

1. Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Tanah Laut mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah melalui pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Untuk melaksanakan urusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

1) Susunan Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka pada Tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih tetap menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Umum dan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Penanggulangan Bencana.

Adapun nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang urusan pemerintahan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.1
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA SKPD	NOMOR PERDA	TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	No. 6 Tahun 2016	Tipe A



2	SEKRETARIAT DPRD	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
3	INSPEKTORAT KABUPATEN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
5	DINAS KESEHATAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
8	DINAS SOSIAL	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
14	DINAS PARIWISATA	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
18	DINAS PERHUBUNGAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN.	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe B



22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
23	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	No. 6 Tahun 2016	Tipe C
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	No. 10 Tahun 2013	-
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	No. 10 Tahun 2013	Tipe B
30	KECAMATAN PELAIHARI	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
31	KECAMATAN KINTAP	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
32	KECAMATAN JORONG	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
33	KECAMATAN BARU AMPAR	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
34	KECAMATAN PANYIPATAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
35	KECAMATAN TAKISUNG	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
36	KECAMATAN TAMBANG ULANG	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
37	KECAMATAN BATI-BATI	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
38	KECAMATAN BUMI MAKMUR	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
39	KECAMATAN KURAU	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
40	KECAMATAN BAJUIN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A

Sumber Data : Diolah

2) Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka melaksanakan Pemerintahan Daerah, salah satu unsur terpenting adalah Aparatur Sipil Negara. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Data Simpeg Tahun 2022 adalah 4765 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 1982 orang dan perempuan sebanyak 2783 orang.

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI (ORANG)	PEREMPUAN (ORANG)	JUMLAH (ORANG)
1	SD/SEDERAJAT	28	2	30
2	SLTP/SEDERAJAT	42	14	56
3	SLTA/SEDERAJAT	267	178	445
4	DIPLOMA I, II, III, IV	449	770	1219
5	STRATA I	1032	1723	2755
6	STRATA II	163	96	259
7	STRATA III	1	0	1
	JUMLAH	1982	2783	4765

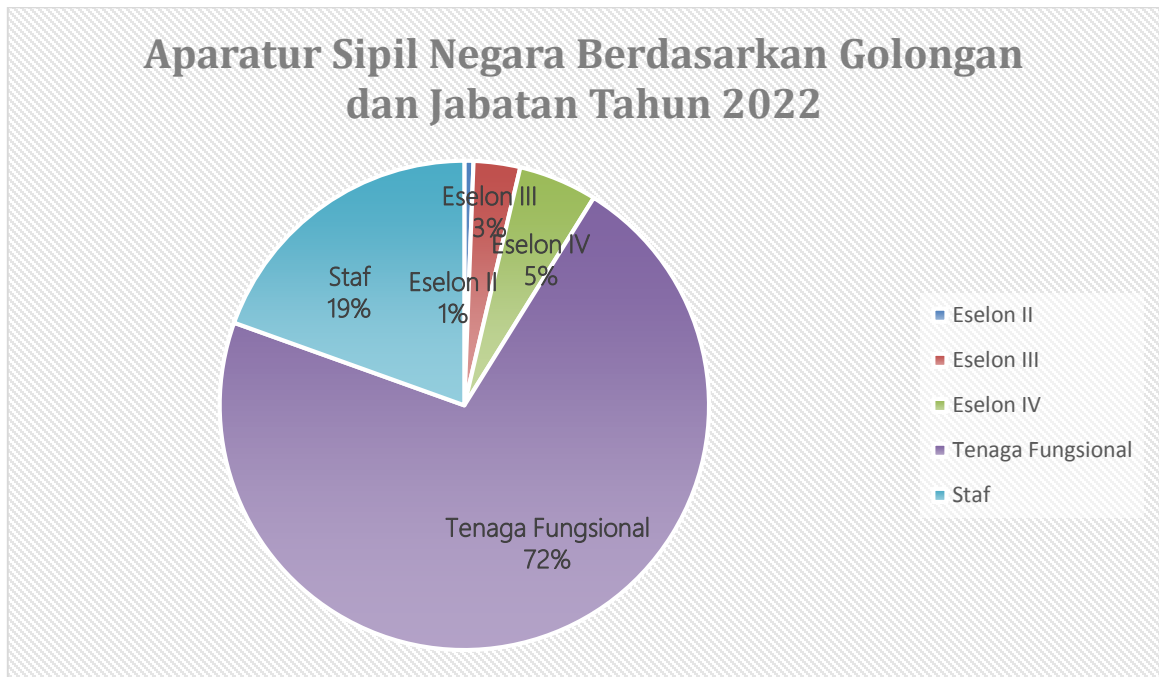
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 1.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Berdasarkan Golongan Tahun 2022

NO	GOLONGAN/RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	GOLONGAN I	33	4	37
2	GOLONGAN II	325	299	624
3	GOLONGAN III	1078	1945	3023
4	GOLONGAN IV	546	535	1081
	JUMLAH	2057	2783	4765

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Grafik 1.1
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan dan Jabatan Tahun 2022



C. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Isu strategis Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan RPJMD 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
2. Kawasan Industri Jorong
3. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata
6. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan
7. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan

8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
9. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal
10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Selain Isu-isu strategis tersebut, Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan juga harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman yaitu adanya Revolusi Industri 4.0. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif “Making Indonesia 4.0” untuk mengimplementasikan strategi dan Peta Jalan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Peta Jalan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan. Peta Jalan Making Indonesia 4.0 ini akan memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berikut beberapa strategi kedepan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 tersebut :

1. Mengintegrasikan kebijakan antar lini pemerintah dalam mendukung implementasi Making Indonesia 4.0 terutama terkait perindustrian, ketenagakerjaan, teknologi informasi dan sektor-sektor terkait dalam mengantisipasi perubahan ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian daerah di masa yang akan datang dan melindungi kelompok rentan – terutama tenaga kerja perempuan.
2. Mengoptimalkan 5 (lima) Sektor Manufaktur Making Indonesia 4.0 dan sektor lain sesuai potensi daerah untuk menyerap angkatan kerja produktif.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai Standard Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Meningkatkan literasi keuangan petani/nelayan dan pelaku UMKM dengan mempermudah akses dana/modal dan sarana prasarana teknologi informasi untuk mengembangkan pasar, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal.
5. Memperkuat keberadaan kelembagaan ekonomi melalui peningkatan peran masjid, pesantren dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat.
6. Menyempurnakan kurikulum pendidikan yang adaptif serta merevitalisasi sekolah menengah dan vokasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar melalui kolaborasi antara pemerintah dan industri.



7. Membentuk ekosistem inovasi digital dan mengembangkan inkubasi bisnis/*technopark* yang ada di daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan membentuk dan menumbuhkembangkan *start up/creative hub* dan menjadikan perguruan tinggi sebagai *center of excellence and innovation*.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

**“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA,
RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI
(BERINTERAKSI)”**

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

B E R K A R Y A

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

I N O V A S I

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan.

TERTATA

Aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS

Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan



digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

2. Misi

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

- BERKARYA** : diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- INOVASI** : diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

- TERTATA** : diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- RELIGIUS** : diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- AKTUAL dan SINERGI** : diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Agenda Pembangunan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Tanah laut tahun 2018-2023 sebagai salah satu tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah laut tahun 2005-2025, maka dapat disusun agenda pembangunan sebagai berikut :

- Agenda 1 : Penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
- Agenda 2 : Peningkatan daya saing ekonomi.
- Agenda 3 : Reformasi birokrasi
- Agenda 4 : Peningkatan religiusitas kehidupan bermasyarakat.
- Agenda 5 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi serta kriteria pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan sebagai penjabaran atau operasionalisasi dari pernyataan visi dan misi yang bersangkutan yang wajib dijadikan pegangan dalam pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang antara lain terdiri dari :

- 1) Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- 2) Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- 3) Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

- 4) Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik.
- 5) Peningkatan inovasi di masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- 6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 9) Terwujudnya pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas.
- 10) Peningkatan kinerja unit usaha sektor unggulan daerah.
- 11) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 12) Peningkatan upaya membina desa dan menata kota.

5. Sasaran

- 1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan
- 2) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan
- 3) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya
- 4) Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga
- 5) Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi
- 6) Meningkatnya inovasi pelayanan publik
- 7) Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian
- 8) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
- 9) Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik
- 10) Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama
- 11) Meningkatnya wawasan kebangsaan
- 12) Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi
- 13) Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah
- 14) Menurunnya tingkat pengangguran
- 15) Meningkatnya perlindungan masyarakat
- 16) Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas
- 17) Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah
- 18) Meningkatnya ketahanan pangan
- 19) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup



- 20) Meningkatnya pembinaan desa
- 21) Meningkatnya cakupan penataan perkotaan

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Tanah Laut

VISI		“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI (BERINTERAKSI)”																		
MISI		SASARAN STRATEGIS																		
		URAIAN	INDIKAT OR KINERJA	DATA AWAL	2019			2020			2021			2022			2023			
					TARG ET	REAL ISASI	CAPAI AN(%)	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN(%)	TARG ET	REAL ISASI	CAPA IAN(%)	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN(%)	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN(%)	
1	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi sosial dan budaya	1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,37	7.97	7.64	95.86	8.06	7.88	97.77	9	7.89	87.67	8.05	7.9	98.14	12,00		
				Harapan lama sekolah (tahun)	11,82	12.05	11.96	99.25	12.1	12.01	99.26	12.12	12.31	101.57	13.19	12.32	93.40	12.18		
		2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,76	68.9	69.31	100.60	69.1	69.45	100.51	69.3	69.59	100.42	69.6	69.86	100.37	69,80		
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	70	82.73	118.19	75	84.59	112.79	76.5	84.53	110.50	77.5	85.65	110.52	80				
4	Meningkatnya	Cakupan Pelestaria	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			



			pelestarian /pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	n dan Pengembangan Budaya Daerah (%)															
			Jumlah Atlet yang berprestasi	83	62	98	158.06	68	61	89.70	74	128	172.97	81	315	388.89	89		
		5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	1	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	0	1	5	500	2	5	250	2	6	300	2	10	500	2 inovasi	
		2	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	0	5 Unit Usaha	10	200	10 Unit Usaha	25	250	15 Unit Usaha	103	686.67	20 Unit Usaha	134	670	25 Unit Usaha	
3	Membangun tata kelola	1	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai Sistem Akuntabilitas	B (60,06)	BB (71.00)	B (64.89)	91.39	BB (74,00)	B(66,88)	90.38	BB (77,00)	B(66,11)	85.85	A (81)	B(67,28)	83.06	A (81)	



	pemerintah an yang baik (Good Governanc e)	s kinerja pemerintah an dan reformasi pelayanan publik	as Kinerja Daerah (kategori)															
			Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelola an Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	
		2	Meningkat nya transparan si penyeleng garaan pelayanan publik	-	11.9	16	134.45	23.81	54.375	228.37	35,71	55,87	156.4 5	47.62	58.98	123.86	59,52	
4	Meningkat kan kuantitas dan kualitas relegiusita s dalam penyeleng garaan pemerintah Daerah dan kehidupan masyaraka t	1	Meningkat nya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	0	0	0	100	0	3	0	0	0	100	0	0	100	0	
		2	Meningkat nya wawasan kebangsaa n	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	
5	Membangu n sinegritas yang baik antartingka	1	Meningkat nya Pertumbuh an Ekonomi	4,64	4.85	3.72	76.70	4,9	-1.95	0.00	3.5	3.47	99.14	4	5.12	128	5,05	



	t pemerintah an dalam rangka meningkat kan kesejahter aan masyaraka t																			
				Indeks Gini (skor)	0,259	0.257	0.271	94.83	0.256	0.25	102.40	0.255	0.232	109.91	0.254	0.263	96.58	0,253		
				PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	28,57	31.5	30.4	96.51	33.07	29	88.42	11.6	29.68	255.86	36.81	30.62	83.18	39,02		
		2	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)	87,75	88.25	86.96	98.54	88.5	87.19	98.52	88.75	86.86	97.87	89,00	87.28	98.07	89,50		
		3	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,70	3.3	3.41	96.77	3	3.57	84.03	4	3.52	113.64	3.4	4.17	81.53	2,5		
		4	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	160 (Tinggi)	150 (Tinggi)	178 (Tinggi)	84.26	135 (Sedang)	178 (Tinggi)	75.84	130 (Sedang)	178 (Tinggi)	73.03	125 (Sedang)	156.33 (Tinggi)	79.95	120 (Sedang)		
				Persentase PMKS yang menjadi	9.5	12.5	4.26	34.08	15	2.54	16.93	20	49.01	245.05	25	13.32	53.28	30,00		



			mandiri (%)															
	1	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70	70.5	51.95	73.69	70.75	53	74.91	71	43.13	60.75	89	58.12	65.30	73,00	
	1	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Pertumbuhan sektor Petanian	3,50	3.5	3.42	97.71	3,51	-0.30	0.00	3.52	1.81	51.42	3.53	2.70	76.49	3,57	
			Pertumbuhan sektor Industri olahan	7.56	7.56	2.51	33.20	7,57	-4.27	0.00	7.58	5.01	66.09	7.69	3.86	50.20	7,60	
			Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (ribu orang)	275	280,000	346,366	123.70	285,000	330,241	115.87	285,000	193,671	67.95	300,000	579,878	193.29	350	
	2	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95	95	83.3	87.68	95	82.8	87.16	95	84.1	88.53	95	90.7	95.47	95,00	
	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	-	60	58.06	96.43	60.58	69.82	115.24	60.960	68.7	112.70	71.27	67.78	95.10	61,712	



				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	60,00	70	74.19	105.99	78	82.66	105.97	87	87	100	92	97	105.43	98,00		
		1	Meningkatnya Pembinaan Desa	Persentase Desa Kategori Maju	16	20	19.23	96.15	22	21.54	97.91	24	33.08	137.83	26	46.15	177.50	28		
				Jumlah Desa di bina berciri khas	0	5	5	100	5	5	100.00	5	6	120.00	5	7	140.00	5		
		2	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	15	12	0.45	2666.667	10	0.44	2272.727	7	0.33	2121.21	3	0.21	1428.571	1,00		

6. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tahun Anggaran 2022 ini dapat dikatakan begitu banyak dinamika eksternal seperti rilisnya aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian oleh semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Penyesuaian-penyesuaian tersebut membuat kinerja mau tidak mau mengalami penurunan akselerasi karena harus menyesuaikan dengan kondisi dan aturan-aturan baru.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut 126 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Minimum 0 tahun, maksimal 15 tahun (sesuai standar global)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
			$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun telah bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun yang mendapatkan ijazah}}$
		2 Harapan lama sekolah (tahun)	$HSL_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{p_i^t}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Keterangan :</p> <p>HSL_a^t = Harapan Lama Sekolah Pada Umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>p_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i = Usia (a,a+1,.....,n)</p> <p>FK = Faktor Koreksi Pesantren</p> </div>
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	Rata-rata harapan hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah IKM SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$
4	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1 Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	$\frac{\text{Jumlah budaya daerah yang dikembangkan dan dilestarikan}}{\text{Jumlah budaya daerah}} \times 100\%$
		2 Jumlah Atlet yang berprestasi	Jumlah Atlet yang berprestasi dalam kompetisi minimal kompetisi tingkat provinsi
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1 Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	$\frac{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang masuk}} \times 100\%$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN RUMUS
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	Inovasi Pelayanan Publik yang masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan Publik minimal tingkat provinsi
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian SAKIP Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun n
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	Hasil evaluasi keterbukaan informasi publik
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	Diharapkan tidak ada konflik antar umat maupun seagama
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	Diharapkan tidak ada konflik sosial
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{PDRB tahun ke } n - \text{PDRB tahun } (n-1)}{\text{PDRB tahun } (n-1)} \times 100\%$
		2	Indeks Gini (skor)	$G = 1 - \sum_{i=1}^i P_i(Q_i + Q_{i+1})$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
			<p>Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi = Persentase kumulatif total pendapat atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika :</p> <p>G < 0,3 = Ketimpangan rendah</p> <p>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang</p> <p>G > 0,5 = Ketimpangan tinggi</p>
		3	<p>PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)</p> $\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	<p>Indeks Pembangunan Gender (skor)</p> $\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}} \times 100\%$
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</p> $\text{TPP} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - Angkatan kerja = penduduk usia kerja (15+) yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran - Pengangguran = mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa, sudah ada pekerjaan tapi belum mulai bekerja
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	<p>Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)</p> <p>Data Indeks Resiko Bencana Kabupaten pada tahun n</p>
		2	<p>Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)</p> $\frac{\text{PMKS yang mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh PMKS}} \times 100\%$
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	<p>Indeks Pembangunan Infrastruktur</p> <p>((jumlah panjang jalan nasional + jalan provinsi + jalan lokal primer dalam kondisi baik/jumlah panjang jalan keseluruhan x 100%)+((Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik/jumlah panjang irigasi x 35) + (jumlah luas areal yang dilayani irigasi/jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi x 20) +(Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik/jumlah panjang drainase x15)+(Jumlah</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN RUMUS
				kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani/jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun) x 30)) + (((Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik/jumlah gedung kantor x 100%) + (((Jumlah rumah tangga berakses air bersih/Jumlah rumah tanggax100%) + ((Jumlah rumah tangga berakses air limbah/jumlah rumah x 100%))/2) + ((Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah x 100%) + (Luas permukiman kumuh yang ditangani/(luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani x 100%))/2) + (((Panjang jalan bertrottoar di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 100%) + (Panjang jalan berdrainase di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 100%))/2) + (((Jumlah sampah yang tertangani/Jumlah produksi sampah x 100%) + (Jumlah taman dalam kondisi baik /jumlah keseluruhan Taman x 100%))/2)/4) + (((Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik/jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya adax100%) + '(Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik/Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada x 100%)/2))/5
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Petanian	<p>Growth Pertanian=</p> $\frac{\text{PDRB ADHK Pertanian tahun } n - \text{PDRB ADHK Pertanian tahun } (n-1)}{\text{PDRB ADHK Pertanian tahun } (n-1)} \times 100\%$
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	<p>Pertumbuhan sector industry olahan dalam PDRB Growth Industri Olahan (GIO)</p> <p>GIO =</p> $\frac{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } n - \text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)}{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)} \times 100\%$
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun n
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN RUMUS
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	30 % indeks pencemaran air + 30% indeks pencemaran udara + indeks cakupan lahan
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	$\frac{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang Sesuai RTRW}}{\text{Luas Permohonan pemanfaatan ruang}} \times 100\%$
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa Kategori Maju	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	Desa di bina berciri khas
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh di perkotaan}} \times 100\%$

8. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,05	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,19	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	69,60	Sumber Data Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks kepuasan masyarakat	77,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DP2KBP3A Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung Bagian Organisasi Seluruh SKPD
4	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	81	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Sekretariat Daerah Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	20	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	A (81)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Inspektorat
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	47,62	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Kesejahteraan Masyarakat
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	Badan kesatuan Bangsa dan Politik
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	4	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretaria t Daerah
		2	Indeks Gini (skor)	0,254	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	36,81	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,00	Sumber data BPSP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,4	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Dinas Sosial
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	125 (Sedang)	Badan Penanggulangan Bencana daerah Dinas Sosial

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	25,00	Dinas Sosial Sekretariat Daerah
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	89	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,53	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kopdag Seluruh Kecamatan
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,69	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (ribu orang)	300	Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	71.27	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	92,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa kategori Maju	26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	3,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Adanya perubahan target tahun 2022 antara di dokumen RPJMD dan RKPD khususnya pada indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, TPT dll, dikarenakan adanya beberapa indikator yang terealisasi pada Tahun 2021 sudah lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2022 dan ada beberapa indikator yang realisasi pada Tahun 2021 masih sangat jauh dengan target tahun 2022. Berikut daftar indikator yang mengalami perubahan target sesuai RKPD Tahun 2022.

Tabel 2.5

Perubahan Target Kinerja Tahun 2022

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,05	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,19	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	4	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
3	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,4	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Dinas Sosial
4	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	89	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
5	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,69	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	71.27	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 21 sasaran di atas, Pemerintah kabupaten Tanah Laut didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 2.122.153.778.445,00. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
 Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan		126,506,431,779.00
		Program Pengelolaan Pendidikan	125,481,965,023.00
		Program Pembinaan Perpustakaan	844,532,274.00
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	179,934,482.00
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan		200,262,546,747.00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	34,212,567,449.00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	166,049,979,298.00
3			8,213,241,268.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Program Pendaftaran Penduduk	370,088,205.00
		Program Pencatatan Sipil	146,199,310.00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	276,170,566.00
		Program Pengendalian Penduduk	215,934,411.00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,723,341,676.00
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,481,507,100.00
4	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga		16,349,180,758.00
		Program Pengembangan Kebudayaan	45,999,034.00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1,335,927,973.00
		Program Pembinaan Sejarah	341,750,110.00
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	248,544,967.00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,559,026,019.00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12,142,932,655.00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	675,000,000.00
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi		5,473,511,131.00
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	2,420,881,290.00
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	49,971,151.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	49,805,090.00
		Program Aplikasi Informatika	2,952,853,600.00
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	987,671,625,670.00
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian		456,681,529.00
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	338,997,997.00
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	69,598,532.00
		Program Hubungan Industrial	48,085,000.00
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik		296,971,334,171.00
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	33,894,807,823.00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	248,473,769,391.00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9,588,994,567.00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,676,730,461.00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	574,979,700.00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	467,737,810.00
		Program Kepegawaian Daerah	1,314,990,175.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	979,324,244.00
9	Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik		65,910,511,428.00
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	33,894,807,823.00
		Program Perekonomian dan Pembangunan	1,636,958,144.00
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26,231,786,316.00
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	660,776,487.00
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	146,476,998.00
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	650,126,753.00
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	44,236,413.00
		Program Penatagunaan Tanah	2,582,353,615.00
		Program Pengelolaan Arsip	21,960,000.00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	41,028,879.00
10	Meningkatkan toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama		1,979,256,893.00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,587,111,014.00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	145,000,000.00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	247,145,879.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
11	Meningkatkan Wawasan kebangsaan		11,584,574,824.00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	219,458,136.00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	3,449,997,296.00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7,915,119,392.00
12	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		28,510,754,246.00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	619,160,328.00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	154,509,542.00
		Program Penyuluhan Pertanian	1,634,699,687.00
		Program Perizinan Usaha Pertanian	16,721,679.00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,505,537,697.00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14,598,659,882.00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	7,262,351,324.00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	739,301,821.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	20,000,000.00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	329,600,268.00
		Program Pengembangan Ekspor	-
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	43,822,408.00
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-
		Program Pelayanan Penanaman Modal	115,856,646.00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	419,903,600.00
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70,543,892.00
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	468,999,456.00
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	424,167,701.00
		Program Promosi Penanaman Modal	86,918,315.00
13	Meningkatkan Peranan perempuan dalam pembangunan daerah		1,118,191,121.00
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	157,501,937.00
		Program Perlindungan Perempuan	291,711,210.00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	171,170,679.00
		Program Perlindungan Khusus Anak	497,807,295.00
14	Menurunnya tingkat pengangguran		12,109,104,165.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Penempatan Tenaga Kerja	120,333,024.00
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	359,546,040.00
		Program Rehabilitasi Sosial	4,712,818,176.00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6,898,821,492.00
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	17,585,433.00
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat		14,321,456,775.00
		Program Penanggulangan Bencana	682,785,776.00
		Program Penanganan Bencana	195,076,408.00
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	951,784,433.00
		Program Rehabilitasi Sosial	4,712,818,176.00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6,898,821,492.00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	322,592,700.00
		Program Pemberdayaan Sosial	530,011,340.00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	27,566,450.00
16	Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas dan sumberdaya energi		324,292,968,518.00
		Program Penyelenggaraan Jalan	156,636,096,471.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	38,221,067,443.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,727,000,000.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	13,564,829,000.00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	34,375,119,354.00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14,598,659,882.00
		Program Penataan Bangunan Gedung	31,548,655,137.00
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	59,999,400.00
		Program Pengembangan Jasa Kontruksi	562,651,387.00
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	31,939,406,011.00
		Program Pengelolaan Pelayaran	59,484,433.00
17	Meningkat kinerja unit usaha sektor unggulan		10,702,017,128.00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	739,301,821.00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	89,892,611.00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	339,878,035.00
		Program Pemasaran Pariwisata	488,761,957.00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	132,983,236.00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,636,958,144.00
		Program Pengendalian Izin Usaha Insutri Kabupaten/Kota	11,890,000.00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	7,262,351,324.00
18	Meningkatkan ketahanan pangan		192,576,592,852.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	3,195,754,898.00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	442,791,918.00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	51,918,551.00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	83,279,858.00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,596,082,342.00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	166,049,979,298.00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,505,537,697.00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14,598,659,882.00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	619,160,328.00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	154,509,542.00
		Program Perizinan Usaha Pertanian	16,721,679.00
		Program Penyuluhan Pertanian	1,634,699,687.00
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2,066,309,223.00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	328,306,687.00
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	99,898,026.00
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	132,983,236.00
19	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		23,545,117,975.00
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	69,936,000.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2,797,675,167.00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	11,596,474,919.00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	81,789,669.00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19,999,619.00
		Program Pengelolaan Persampahan	5,479,243,172.00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,499,999,429.00
20	Meningkatkan desa membangun		9,319,528,756.00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3,685,636,442.00
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	57,117,234.00
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,446,540,758.00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,596,082,342.00
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	141,854,554.00
		Program Penataan Desa	300,943,946.00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91,353,480.00
21	Meningkatkan cakupan penataan kota		86,470,356,190.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	38,221,067,443.00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,727,000,000.00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,499,999,429.00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	25,928,996,288.00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	739,301,821.00
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	951,784,433.00
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-
		Program Pengembangan Perumahan	100,000,000.00
		Program Kawasan Permukiman	14,302,206,776.00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2022 ini merupakan laporan kinerja tahun keempat RPJMD 2018- 2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 terdapat 21 sasaran dengan 31 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Memuaskan** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 184,39%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut **Nomor 126 Tahun 2019** tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 2019-2023 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis Misi 1

MISI 1						
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8.05	7.9	98.14%
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	13.19	12.32	93.40%
2.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup (tahun)	69.6	69.86	100.37%
3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	77.5	85.65	110.52%
4.	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	100	100	100%
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	81	315	388.89%
5.	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang	100	100	100%

			ditindaklanjuti oleh SKPD (%)			
--	--	--	-------------------------------	--	--	--

Tabel 3.2
Indikator Sasaran Strategis Misi 2

MISI 2 Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
6.	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	10	500%
7.	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	20	134	670%

Tabel 3.3
Indikator Sasaran Strategis Misi 3

MISI 3 Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	A (81)	B(67,28)	83.06%
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	100%
9.	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	47.62	58.98	123.86%

Tabel 3.4
 Indikator Sasaran Strategis Misi 4

MISI 4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
10.	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	100%
11.	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	100%

Tabel 3.5
 Indikator Sasaran Strategis Misi 5

MISI 5 Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
12.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	4	5.12	128%
		2	Indeks Gini (skor)	0.254	0.263	96.58%
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	36.81	30.62	83.18%
13.	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,00	87.28	98.07%
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.4	4.17	81.53%
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	125 (Sedang)	156.33 (Tinggi)	79.95%
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	25	13.32	53.28%

MISI 5 Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	89	58.12	65.30%
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,53	2.70	76.49%
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7.69	3.86	50.20%
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	300.000	579,878	193.29%
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	90.7	95.47%
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	71.27	67.78	95.10%
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	92,00	97	105.43%
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa Kategori Maju (%)	26	46.15	177.50%
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	7	140.00%
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	3,00	0.21	1428.57%

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara RPJMD dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2022. Sesuai dengan dokumen RPJMD 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 5 (lima) misi. Masing-masing misi dijabarkan lebih lanjut dalam 12 (dua belas) tujuan, selanjutnya tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 21 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 31 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Di atas 80% sampai dengan 90	Memuaskan
III	Di atas 70 sampai dengan 80	Sangat Baik
IV	Di atas 60 sampai dengan 70	Baik
V	Di atas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Di atas 30% sampai dengan 50%	Kurang
VII	Kurang dari 30%	Sangat Kurang

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100% Target
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Misi adalah sebagai berikut :

MISI 1

Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 3 tujuan untuk misi 1 yaitu:

1. Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
2. Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
3. Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 2 indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan misi I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	70,10
2	Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	70,10
3	Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80 (Baik)

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan dan bidang pendidikan
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan dan bidang kesehatan
3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya
4. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda

dan olahraga

5. Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,06	7,88	97,76%	9,00	7,89	87,6%	8.05	7.9	98.14%
2	Harapan lama sekolah	Tahun	12,1	12,01	99,25%	12,12	12,31	101,56%	13.19	12.32	93.40%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											95,77%

Tabel 3.1.3
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.05	7.9	98.14%	12	65,83%
2	Harapan lama sekolah	Tahun	13.19	12.32	93.40%	12,18	101,14%

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tanah Laut berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 7,89 tahun di tahun 2021 menjadi 7,90 tahun di tahun 2022 dengan capaian 98,14% dari target 8,05. Sedangkan berdasarkan target akhir RPJMD pada tahun 2023, realisasi tersebut masih mencapai sebesar 65,83%. Angka 7,90 tahun ini menggambarkan rata-rata jumlah atau lamanya tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, atau dengan kata lain rata-rata

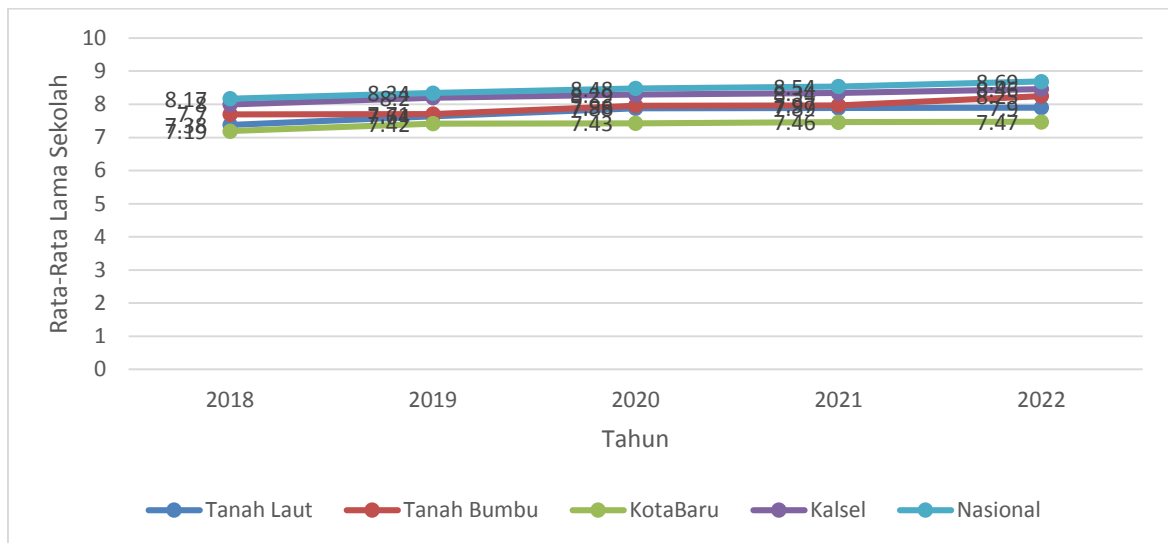
penduduk di Kabupaten Tanah Laut yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP/Sederajat. Angka tersebut juga masih berada dibawah angka provinsi sebesar 8,46 atau terpaut 0,56 tahun dibanding angka Provinsi Kalimantan Selatan dan 0,79 tahun dibawah nasional dengan angka 8,69 tahun.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penuntasan wajib belajar tingkat dasar dan menengah masih belum selesai, sehingga perlu ada upaya yang lebih intens lagi dari berbagai pihak sehingga minimal wajib belajar 12 tahun dapat tercapai. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan pendidikan diantaranya adalah tersedianya SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai. Dengan adanya faktor tersebut diharapkan program pemerintah tentang wajib belajar akan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pelayanan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut sudah cukup memadai secara kuantitas. Berdasarkan data Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga telah dipublikasikan pada Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2022, pada tahun ajaran 2021/2022 terdapat 243 SD baik negeri maupun swasta, dengan jumlah guru sebanyak 2.511 orang. Pada tingkat SMP terdapat 57 sekolah dan guru sebanyak 787 orang, Sedangkan tingkat SMA, jumlah sekolah dan guru sebanyak 18 sekolah dan 415 orang. Data ini belum termasuk sekolah yang berada dibawah Kementerian Agama. Tentunya jika ditambah akan semakin memperbesar angka-angka di atas.



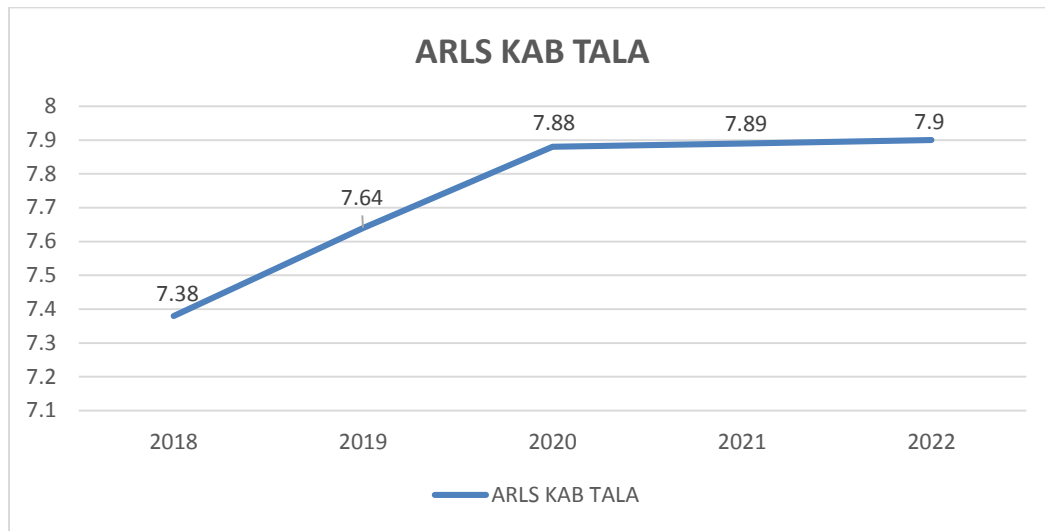
Grafik 3.1.1
ARLS Kab. Tanah Laut 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Angka rata-rata lama sekolah tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena salah satunya masih banyak penduduk di wilayah Tanah Laut yang berada di bawah garis kemiskinan, angka putus sekolah juga mempengaruhi meski angka putus sekolah di wilayah Tanah Laut tergolong rendah dengan realisasi jenjang SD 0,56 % jenjang SMP 0,45 % dan pada jenjang SMA 0,17%, SMK 0,03% dan yang selanjutnya yang paling mempengaruhi adalah minat dari penduduk tersebut apalagi yang sudah berusia 40 tahun keatas yang memiliki pemahaman bahwa wajib belajar tidak manfaat dan pengaruh lagi untuk diri mereka baik untuk meningkatkan taraf hidup ataupun untuk bekerja.

Grafik 3.1.2
ARLS Kab. Tanah Laut 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Dilihat dari grafik di atas, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, artinya masyarakat semakin sadar dan memahami pentingnya arti sekolah bagi masa depan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya upaya untuk meningkatkan angka rata – rata lama sekolah dengan menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan yaitu melalui kegiatan paket A, B dan paket C yang siap menampung penduduk yang putus sekolah maupun penduduk yang tidak bersekolah melalui Pendidikan Non Formal, pemberian BOP Kesetaraan, Pendidikan keluarga melalui program unggulan Desa Sahabat Keluarga yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak dini pentingnya peran serta orang tua dalam dunia pendidikan yang akan berdampak semakin menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya minat masyarakat putus sekolah untuk kembali bersekolah dan membangun pemahaman bersama bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan orang tua.

Selain itu juga banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung melalui perbaikan prasarana dan sarana, pembangunan infrastruktur pendidikan terus dilakukan baik penambahan maupun rehabilitasi sarana/ prasarana proses belajar mengajar. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyiapkan berbagai kebijakan untuk terlaksananya pendidikan secara menyeluruh di Tanah Laut, diantaranya dengan

Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang difokuskan untuk SMP Negeri. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengalokasikan sebesar Rp. 522.572.058.830 untuk pengembangan pendidikan di Tanah Laut.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, disamping itu juga berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.

Selain itu disediakan dana bantuan untuk pelajar Tanah Laut agar bisa menyelesaikan pendidikan sekolah tanpa dipungut biaya. dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meluncurkan Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) yang ditujukan untuk tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan menengah ke atas.

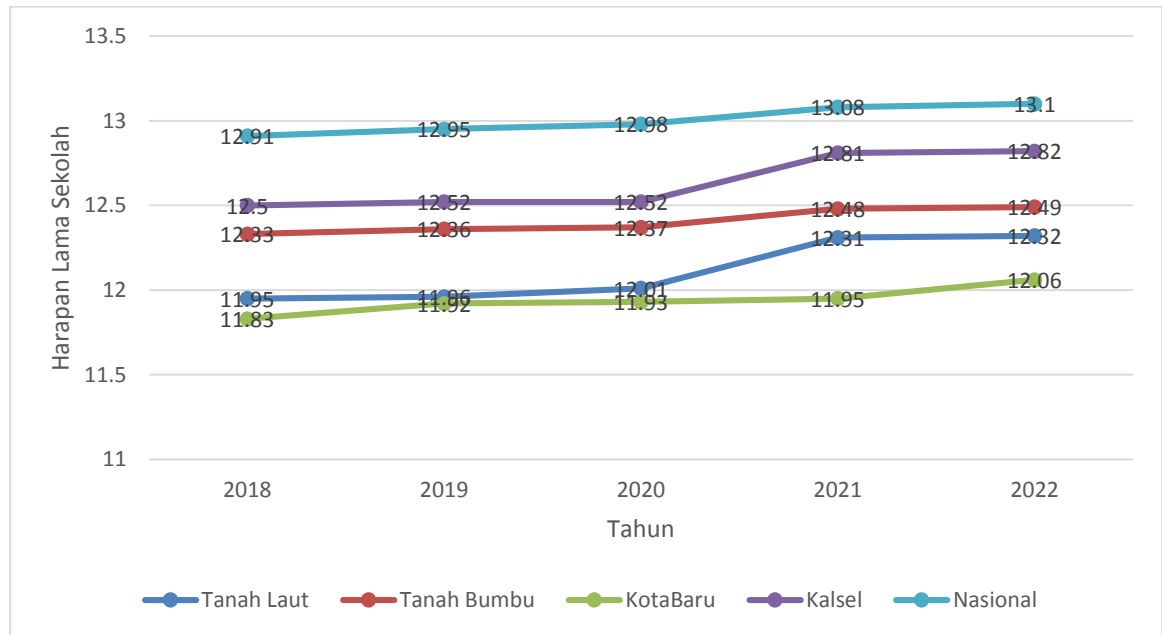
Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah

1. Pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
2. Pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana prasarana PAUD dan PNF.

b. Harapan Lama Sekolah

Pada tingkat nasional, HLS Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 13,10 tahun. Angka ini menggambarkan angka perkiraan lama tahun bersekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas di Indonesia hingga mengenyam pendidikan setara dengan perguruan tinggi. Pada tahun 2022, harapan lama sekolah Kabupaten Tanah Laut sebesar 12,32 tahun. Angka tersebut sedikit meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 12,31 tahun pada 2021. Dari realisasi tersebut, capaian terhadap target tahun 2022 yaitu 13,19 tahun telah mencapai 93,40%. Sedangkan terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 12,18 tahun telah mencapai 101,14%. Peningkatan angka harapan lama sekolah menunjukkan bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat. Akan tetapi, angka tersebut juga masih berada di bawah angka provinsi yang sebesar 12,82 tahun atau terpaut 0,5 tahun dari angka Provinsi Kalimantan Selatan.

Grafik 3.1.3
HLS Kab. Tanah Laut 2018 – 2022

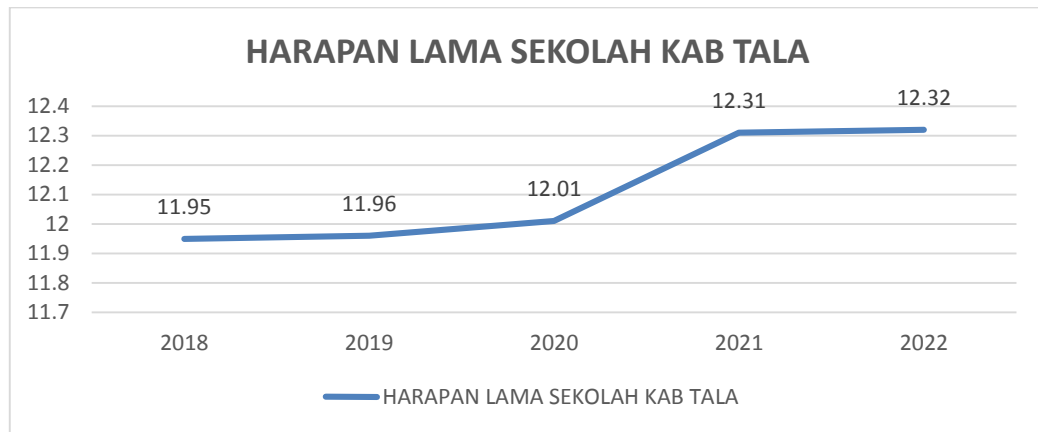


Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 untuk **harapan lama sekolah Kabupaten Tanah Laut dengan angka 12,32 tahun** lebih tinggi dari Kabupaten Kotabaru namun berada di bawah Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka 12,49 tahun. Jika dibandingkan **dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 12,82 tahun** maka lebih rendah 0,5 tahun dan **lebih rendah 0,78 tahun** jika di bandingkan dengan angka harapan hidup **Indonesia dengan angka 13,1 tahun**.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Grafik 3.1.4
HLS Kab. Tanah Laut 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Bagi suatu daerah, pendidikan merupakan sektor yang fundamental karena pendidikan mampu memberikan manfaat positif bagi pembangunan meskipun manfaatnya baru dapat dirasakan beberapa tahun ke depan.

Pada tahun 2022 HLS pada angka 12,32 tahun menggambarkan angka perkiraan lama tahun bersekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas di Kabupaten Tanah Laut hingga mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Peningkatan angka harapan lama sekolah menunjukkan bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah belum tercapai sesuai target tercapai karena dipengaruhi beberapa hal yaitu masyarakat di Tanah Laut yang mayoritasnya adalah muslim memilih kecenderungan menyekolahkan anak pada pondok pesantren dan masalah timbul ketika penduduk usia sekolah kita bersekolah di pondok pesantren dengan model salafiyah yaitu pondok pesantren yang tidak melaksanakan wajib belajar yang berakibat tidak terdata pada aplikasi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang membuat penduduk usia sekolah tersebut memiliki status ATS (Anak Tidak Sekolah) sehingga begitu mempengaruhi harapan lama sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Masalah selanjutnya adalah penduduk usia sekolah yang bermukim di wilayah pesisir yang memiliki orang tua berprofesi sebagai seorang nelayan yang sering berpindah pindah mengikuti musim penangkapan ikan mereka tercatat sebagai penduduk usia sekolah yang berada di wilayah Tanah Laut sementara mereka bersekolah tidak di wilayah Tanah Laut. Penduduk usia sekolah bermukim diperbatasan antara Tanah Laut dengan wilayah Kota Banjarbaru yang mana juga cenderung melanjutkan pendidikan di wilayah kota banjarbaru karena orang tua terutama anak mereka memiliki opini bahwa bersekolah di Kota Banjarbaru memiliki kualitas pendidikan, sarana dan prasarana yang lebih baik. Usia sekolah pada jenjang sekolah dasar di wilayah Tanah Laut masih ada yang berusia di bawah 7 Tahun karena sebagian orang tua memiliki kebanggaan bahwa anak mereka mampu bersekolah di jenjang sekolah dasar meski masih memiliki usia belum genap 7 Tahun.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk meningkatkan harapan lama sekolah dengan cara sekolah gratis melalui kegiatan pemberian dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), sosialisasi melalui program Desa Sahabat Keluarga bahwa selain pentingnya ilmu agama, ilmu pengetahuan umum juga penting.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 122 ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp. 126,506,431,779.00 dan terealisasi Rp. 102,094,029,834.00 atau sebesar 80,70%.

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengelolaan Pendidikan	125,481,965,023,00	101,264,617,202,00
2	Program Pembinaan Perpustakaan	844,532,274,00	787,850,632,00
3	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	179,934,482,00	41,562,000,00
Jumlah		126,506,431,779.00	102,094,029,834.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan

Meningkatnya akses dan pelayanan bidang kesehatan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.5
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

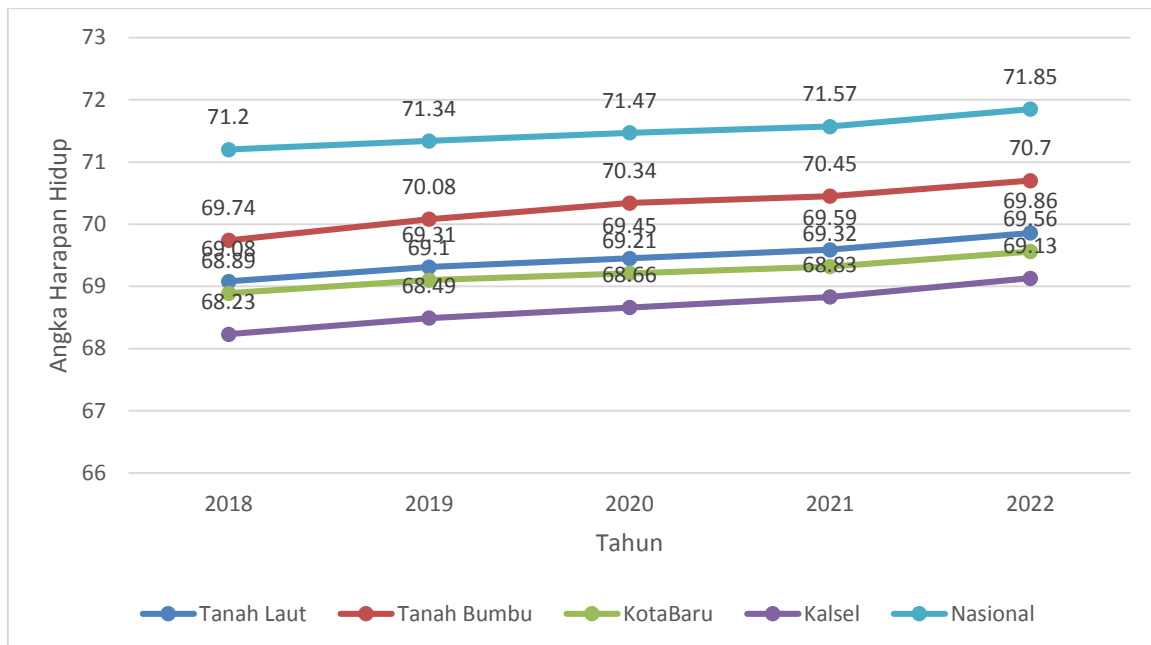
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,10	69,45	100,51%	69,30	69,59	100,42%	69,60	69,86	100,37%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											100,37%

Tabel 3.1.6
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,60	69,86	100,37%	69,80	100,08%

Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2022 yaitu pada angka 64,82 di tahun 2013 menjadi 69,86 di tahun 2022. Realisasi tersebut berdasarkan target tahun 2022 telah mencapai 100,37%, sedangkan berdasarkan target akhir RPJMD tahun 2023 telah mencapai 100,08%. Angka tersebut menggambarkan bahwa perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 diharapkan mencapai umur 69,86 tahun hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Peningkatan umur harapan hidup pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat. Angka tersebut juga masih berada di atas angka Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 69,13 atau terpaut 0,73 di bawah angka Kabupaten Tanah Laut namun dibawah angka Nasional yaitu 71,85 untuk AHH Indonesia.

Grafik 3.1.5
Angka harapan hidup Kab/Kota di Kalimantan Selatan dan Nasional

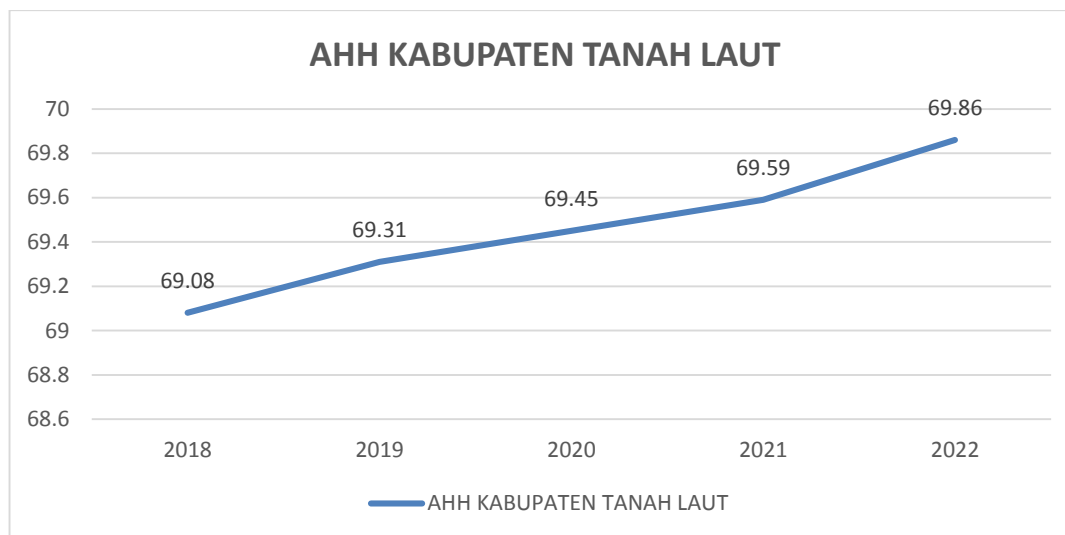


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat secara fisik maupun non fisik. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk, di mana salah satu indikator utama untuk mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah dengan melihat Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir atau yang sebelumnya biasa disebut Angka Harapan Hidup.

Trend peningkatan angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2018-2022 dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.1.6
 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2018 -2022



Sumber: BPS Kabupaten tanah Laut

Angka Harapan Hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi, jika kematian bayi jumlahnya besar, umur harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya daerah yang Angka Harapan Hidupnya tinggi pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi yang menggambarkan peningkatan status kesehatan masyarakatnya yang diukur dengan indikator sesuai tabel dibawah.

Tabel 3.1.7
 Data kematian ibu dan bayi serta prevelensi gizi stunting
 Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	46,2	122,8	267	51
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	7,4	9,5	11,3	12,3
3	Prevalensi Gizi stunting (%)	15,66 %	10,67%	6,41%	5,4%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Data diatas menunjukkan capaian AKI per tahun cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021, jumlah kematian ibu mencapai 3 (tiga orang) pada tahun 2019, di tahun 2020 bertambah 8 (delapan) kematian dan pada

tahun 2021 menjadi 17 (tujuh belas) kematian. AKI pada Tahun 2022 terjadi penurunan dibandingkan AKI pada Tahun 2021 dan bila dibandingkan dengan target RPJMN Tahun 2022 yaitu 205 per 100.000 kelahiran hidup, AKI Kabupaten Tanah Laut masih jauh lebih rendah yaitu 51 per 100.000 Kelahiran Hidup dan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 terjadi peningkatan yang mencapai 12,3 per 1000 Kelahiran Hidup akan tetapi juga masih lebih rendah dari target RPJMN tahun 2022 yaitu 18,6 per 1000 Kelahiran Hidup .

Angka harapan hidup erat kaitannya dengan angka kematian bayi. Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian pada usia di bawah satu tahun. Menurut BPS (2016) secara teori menurunnya angka kematian bayi dapat meningkatkan angka harapan hidup di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan bayi sangat rentan terhadap penyakit dan pengaruh dari lingkungan lainnya seperti lingkungan sosial, ekonomi dan lingkungan fisik.

Meskipun demikian banyak faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup, berikut ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama / Penyebab panjangnya umur manusia, tergantung dari beberapa faktor (Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, ahli gizi Institut Pertanian Bogor) yaitu:

- 1) Pola makan
- 2) Penyakit bawaan dari lahir/penyakit degeneratif
- 3) Lingkungan tempat tinggal
- 4) Stress/tekanan

Faktor-faktor kesehatan yang mempengaruhi dan berhubungan dengan umur harapan hidup terdiri atas:

- 1) Gizi
- 2) Merokok
- 3) Manepause
- 4) Osteoporosis/tulang keropos







Indeks Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah 83,242 (Mutu Pelayanan Baik), oleh karenanya meskipun AKI dan AKB Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan akan tetapi Angka Harapan Hidup mengalami

peningkatan dari 69 tahun, 59 hari (tahun 2021) menjadi 69 tahun, 86 hari (tahun 2022) meningkat 27 hari, hal ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Tanah Laut.

Angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai melebihi target dikarenakan:

- 1) Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada peningkatan pelayanan kesehatan yang bisa diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 diperoleh pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,242 dimana dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat pada kisaran Baik.
- 2) Kesehatan juga bisa diukur dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dimana Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 capaian AKI adalah 50,5 per 100.000 Kelahiran Hidup sudah baik karena angka kematian ibu lebih rendah dari target RPJMN yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup dan target SDGs yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut mencapai 12,3 per 1000 Kelahiran Hidup lebih rendah dari target RPJMN yaitu 18,6 per 1000 Kelahiran Hidup dan SDGs sebesar 12 per 1000 Kelahiran Hidup lebih.
- 3) Keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sampai tahun 2022 ini dapat dikatakan telah memadai. seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kabupaten Tanah Laut dari rumah sakit sampai dengan polindes. saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah memiliki 2 buah rumah sakit daerah yaitu Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari dan Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap. Selain itu kita juga mendapat dukungan dari beberapa rumah sakit swasta yaitu Rumah Sakit Borneo Citra Medika, Rumah Sakit Khusus RSIA Ibunda dan RSIA Ainun, Klinik Utama Ammariz, Klinik-Klinik Perusahaan serta beberapa Klinik Pratama lainnya yang kesemuanya berada di wilayah kabupaten Tanah Laut.
- 4) Layanan kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Tanah Laut tersebar merata di seluruh kecamatan sebanyak 21 buah, dengan 2 buah adalah puskesmas rawat inap yaitu puskesmas tajau pecah dan kurau. sampai tahun 2022 ini hasil

penilaian akreditasi puskesmas adalah:

-  7 puskesmas mendapat predikat utama, meliputi puskesmas kurau, asam-asam, sungai cuka, pelaihari, bati-bati, tambang ulang dan sungai riam.
 -  11 puskesmas mendapat predikat madya, yakni puskesmas padang luas, bumi makmur, kintap, jorong, tajau pecah, tanjung habulu, tirta jaya, batakan, panyipatan, kait-kait, dan angsau.
 -  1 puskesmas mendapat predikat dasar yakni puskesmas Takisung
 -  Sementara, 3 puskesmas baru yang dibangun dan dioperasikan pada Desember 2021 proses akreditasinya akan dilaksanakan pada tahun 2022/2023.
 -  Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala atau diakreditasi ulang 3 (tiga) tahun sekali. Dari pelaksanaan akreditasi perdana maka pada tahun 2019/2020 seharusnya telah dilakukan re akreditasi pada 5 puskesmas yang diakreditasi pada tahun 2017, pada tahun 2021 ini seharusnya dilakukan re akreditasi pada 6 puskesmas yang diakreditasi pada tahun 2018, namun karena kondisi pandemi covid-19 kegiatan ini menjadi tertunda, sehingga pada tahun 2021 ada sebanyak 11 Puskesmas yang rencana akan diakreditasi ulang. Pada tahun 2022 tidak dilaksanakan re akreditasi pada 8 puskesmas yang diakreditasi pada tahun 2019 dikarenakan belum terbitnya Peraturan tentang Re Akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Untuk itu perlu kita persiapkan pelaksanaan akreditasi ulang (Re Akreditasi) untuk Puskesmas-Puskesmas dan kembali dikuatkan komitmen re akreditasinya.
 -  Puskesmas yang telah mendapatkan predikat dasar, madya dan utama direncanakan akan dire-akreditasi dan diharapkan akan meningkat menjadi puskesmas predikat utama dan paripurna.
- 5) Peningkatan manajemen puskesmas dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada semua puskesmas, 21 puskesmas yang telah di BLUD

kan pada tahun 2022.

- 6) Penempatan Bidan Desa di semua desa dan kelurahan (135 desa dan 5 Kelurahan) yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, disamping itu juga Dinas Kesehatan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil terutama yang berisiko tinggi dengan mendatangkan dokter spesialis kebidanan secara berkala di Puskesmas yang ditunjuk. Upaya tersebut dilakukan untuk mendekatkan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan serta menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak.
- 7) Pelaksanaan program *Universal Health Coverage (UHC)* dengan cakupan sebagai berikut:

Tabel 3.1.8
Terkait Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk menurut Jenis Jaminan
Kabupaten/ Kota Tahun 2022










No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	Persentasi
1	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)		
	PBI APBN	96.625	27,36
	PBI APBD	121.100	34,29
	Sub Jumlah PBI	221.975	61,65
2	NON PBI		
	Pekerja Penerima Upah (PPU)	79.732	22,57
	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri	40.375	11,43
	Bukan Pekerjaan	3.740	1,06
	Sub Jumlah NON PBI	123.847	35,06
	Jumlah (Kab / Kota)	341.572	96,71





- 8) Pencegahan terhadap penyakit akan berpengaruh pada angka kesakitan dengan sendirinya juga akan mempengaruhi Angka Harapan Hidup, pelayanan pencegahan terhadap penyakit, Dinas Kesehatan telah melakukan upaya-upaya seperti pelayanan imunisasi dan Vaksinasi di tahun 2022 hal ini dampak adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat *Physical Distancing* dan

kebijakan Bupati Tanah Laut untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Dinas Kesehatan juga melaksanakan pelayanan penyuluhan penyakit menular dan tidak menular dimana pencegahan penyakit sangat diutamakan, di masa Pandemi COVID-19 saat ini fokus utama Dinas Kesehatan adalah pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2022 jumlah kasus COVID-19 yang positif sebanyak 9.381 orang, yang sembuh sebanyak 6.433 orang dan meninggal 250 orang.






Untuk pencapaian target vaksinasi covid 19 sampai dengan 31 Desember 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic corona Virus Disease 2019 dan Berdasarkan Surat Edaran Ditjen P2P Kemenkes RI nomor SR.01.02/C.IV/2428/2022 perihal perubahan sasaran vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut, maka setiap Fasyankes melaksanakan kegiatan vaksinasi berdasarkan Juknis-Juknis yang telah ditetapkan dengan jumlah sasaran yang berbeda berdasarkan kategori, tenaga Kesehatan, Masyarakat Umum, Lansia, Petugas Publik, Ibu hamil dan remaja dengan total keseluruhan sasaran adalah 308.028 sasaran.

- 9) Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipengaruhi oleh faktor lokasi, yaitu mudahnya untuk dijangkau atau tidak. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 11 Kecamatan yaitu 2 (dua) Rumah sakit Umum Daerah, 21 (dua puluh satu) Puskesmas, 1 (satu) Instalasi Gudang Farmasi, 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Daerah, 62 (enam puluh dua) Puskesmas Pembantu, 135 (seratus tiga puluh lima) Poskesdes/Polindes, 19 (sembilan belas) Ambulan, 22 (dua puluh dua) Puskesmas Keliling, dan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Posyandu.
- 10) Memberikan bentuk pelayanan kesehatan yang tidak hanya terbatas pada fasilitas pelayanan saja akan tetapi juga meliputi tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terdiri dari ;

-  Dokter Spesialis sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang yang terdiri dari 27 orang dokter spesialis di RSUD H. Boejasin Pelaihari dan 3 orang Dokter Spesialis di RSUD K.H Mansyur Kintap.
-  Dokter Umum sebanyak 90 (Sembilan Puluh) orang terdiri dari 22 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 12 orang di RSUD K.H Masyur Kintap, 9 Orang di RSBCM Pelaihari, 1 orang di RSIA Ainun, 2 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing - masing.
-  Dokter Gigi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, terdiri dari 3 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 4 orang di RSUD KH. Mansyur Kintap, 12 dan sisanya tersebar di UPT Puskemas masing – masing.
-  Dokter Sub Specialis sebanyak 1 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari.
-  Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 43 orang terdiri dari 7 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 8 orang di RSUD. K.H. Mansyur Kintap sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing masing.
-  Tenaga Kesehatan Lingkungan sebanyak 53 orang yang terdiri dari 7 Orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 2 orang di RSUD.K.H. Mansyur Kintap, 1 orang di RSBCM Pelaihari dan sisanya tersebar di UPT puskesmas masing masing.
-  Tenaga Nutrisi sebanyak 53 orang terdiri dari 22 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 5 orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 2 orang di RSBCM Pelaihari dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing masing.
-  Perawat sebanyak 664 orang terdiri dari 269 di RSUD H. Boejasin pelaihari, 55 orang di KH Mansyur Kintap, 88 orang di RSBCM Pelaihari, 1 orang di RSIA Ainun, 6 Orang di RSIA ibunda dan sisanya tersebar di Puskemas masing – masing.
-  Bidan sebanyak 484 orang terdiri dari 94 di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 37 Orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 37 orang di RSBCM pelaihari, 10 Orang di RSIA Ainun, 19 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing-masing.

-  Tenaga Ahli Laboratorium Medik sebanyak 81 orang terdiri dari 23 Orang di RSUD H. Boejasin pelaihari, 8 orang di RSUD K.H Mansyur Kintap, 7 Orang, di RSBCM pelaihari, 3 orang di RSIA Ibunda, dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing-masing.
 -  Tenaga Teknik Bio Medika lainnya sebanyak 19 Orang terdiri dari 14 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 2 Orang di KH. Masyur Kintap, 2 orang di RSBCM pelaihari, dan sisanya di UPT Puskesmas.
 -  Tenaga Keterampilan Fisik sebanyak 6 orang di RSUD. H. Boejasin Pelaihari,
 -  Tenaga Keteknisian Medis sebanyak 68 orang terdiri dari 17 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 7 orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 5 Orang di RSBCM Pelaihari, dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas Masing Masing.
- 11) Meningkatnya perilaku masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat. Tidak hanya mengenai kesehatan yang menunjang angka harapan hidup pada suatu wilayah, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat turut mempunyai pengaruh dan peranan yang besar terhadap derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidaknya lingkungan, kesehatan individu, keluarga dan masyarakat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Untuk mengubah perilaku masyarakat tidaklah mudah namun sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2022 adalah 53% (dari 9.338 jumlah rumah tangga yang dilakukan Survey PHBS terdapat 4.951 rumah tangga yang ber PHBS) capaian ini belum mencapai target renstra pada tahun 2022 (60%) tetapi angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 (49,78%). Dari capaian PHBS tahun 2022 diketahui rumah tangga yang berPHBS yaitu sebanyak 53%, berarti masih ada 47% masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang belum berperilaku hidup bersih dan sehat salah satu indikator yang membuat capaian PHBS tidak tercapai adalah masih banyak masyarakat yang merokok dalam rumah yaitu sebesar 47%. Untuk memperkecil terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sebagai akibat dari lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui 5 Pilar STBM yaitu

pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan, dimana masyarakat diajak untuk melihat permasalahan lingkungan dan perilaku yang tidak sehat dan memecahkan sendiri permasalahannya yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan. 5 pilar STBM yaitu:

-  Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS),
-  Mencuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air mengalir (CTPS),
-  Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM RT),
-  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga,
-  Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

- 12) Secara kumulatif desa yang sudah melaksanakan STBM sampai dengan tahun 2022 sebanyak 135 (seratus tiga puluh) desa/kelurahan atau mencapai 120% dari target 2022 sebanyak 114 (seratus empat belas) desa/kelurahan, dan sudah melebihi target renstra Dinas kesehatan di tahun 2022 (84,6%). Akan tetapi untuk pilar pertama yaitu Stop Buang Besar Sembarangan (BABS) sampai tahun 2022 masih 19,3 % desa/kelurahan (26 Desa dari 135 Desa/Kelurahan) yang sudah di nyatakan desa ODF (Open Defecation Free) artinya Desa yang sudah bebas buang air besar sembarangan yang mana dinyatakan melalui deklarasi desa ODF melalui verifikasi sebelumnya.
- 13) Pelaksanaan Layanan *On Call PSC 119*. Bermula dengan adanya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013 Pemda Tanah Laut memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membentuk Layanan Publik (PSC 119), Serta adanya Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, akhirnya Terbentuklah **Layanan Public Safety Center 119**. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional **12 November 2019** yang dilaksanakan di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, yang diresmikan Langsung Bapak Bupati Sukamta, Dewan DPRD Tanah Laut, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Layanan *On Call* atau Layanan *Public Safety Center*. Layanan on Call merupakan salah satu program unggulan Bupati tanah Laut yang beralamat pada Jalan H.Boejasin Kelurahan Angsau.

Hambatan:

- 1) Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara ekonomi dan sosial, serta sebagai salah satu cara mengatasi kesenjangan dalam upaya mencapai kesetaraan dan mewujudkan hidup makmur. Pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, diharapkan seseorang akan semakin mudah dalam menyerap, memilih, beradaptasi atau mengembangkan segala bentuk informasi dan pengetahuan baru untuk kehidupannya.
- 2) Faktor ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat akan menunjukkan kemampuan seseorang terhadap daya beli maupun menunjukkan pendapatan dari masing-masing personal dengan didapatkannya alat pembayaran. Hampir semua yang ada di dunia memerlukan alat pembayaran untuk memperolehnya, baik sandang, pangan, ataupun papan. Angka harapan hidup itu sendiri yang menjadi ukuran kesehatan dan keberhasilan dalam indeks pembangunan manusia pasti memerlukan berbagai macam biaya untuk mencapainya. Oleh karena itu, faktor perekonomian suatu individu atau daerah menjadi penting. Perekonomian daerah erat kaitannya dengan produk domestik regional bruto yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup kabupaten atau kota.
- 3) Faktor pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Jika pendapatan per kapita (PDRB) meningkat maka akan mengurangi angka kematian bayi dan angka harapan hidup akan meningkat.
- 4) Kurangnya respon masyarakat terhadap akses kesehatan.

Solusi :

- 1) Terus memperluas akses kesehatan masyarakat melalui program *Universal Health Coverage (UHC)* atau hak jaminan kesehatan cakupan semesta yang dimaksudkan untuk memastikan masyarakat memiliki akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial

melalui program jaminan kesehatan nasional-kartu indonesia sehat (JKN-KIS) dijamin pada layanan kesehatan kelas III.

- 2) Lebih meningkatkan upaya-upaya yang sudah baik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan berbagai bidang lain.
- 3) Memberikan penyuluhan pengetahuan tentang pentingnya angka harapan hidup itu sendiri dikarenakan tidak banyak yang tahu terkait pentingnya angka harapan hidup, terutama kalangan dengan pendidikan yang relatif rendah.
- 4) meningkatkan Umur harapan Hidup tidak hanya bidang kesehatan, dan sangat diperlukan kerjasama di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, Sosial, Ekonomi dan lain lain.
- 5) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 572 ASN pada Dinas Kesehatan dan di dukung oleh 2 Program dengan Pagu Rp. 200,262,546,747.00 dan terealisasi Rp. 172,767,328,024.00 atau sebesar 86.27%.

Tabel 3.1.9
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	34,212,567,449,00	23.360.818.620,00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	166,049,979,298,00	149.406.509.404,00
Jumlah		200,262,546,747.00	172,767,328,024.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 3

Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat lainnya

Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat lainnya diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.10
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	84,59	112,78%	76,5	84,53	110,49%	77,5	Baik (85,65)	110,51%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											110,51%

Tabel 3.1.11
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,5	Baik (85,65)	110,51%	80	107,06%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

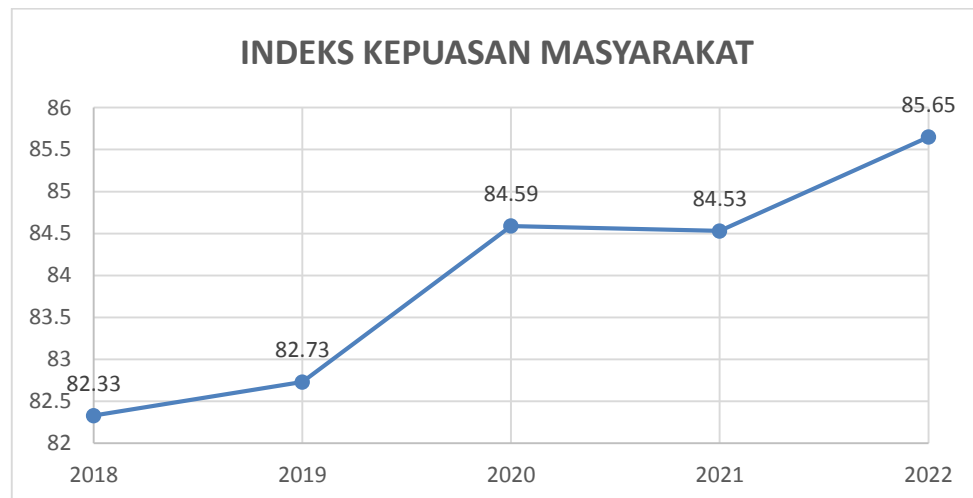
Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat, pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi

berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada SKPD layanan publik.

Realisasi indikator IKM di tahun 2022 adalah **85,65 (Baik)**, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 77,5 (Baik) dengan tingkat capaian 110,51%. mengalami kenaikan 1,12 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 84,53 (Baik).

Secara umum kualitas pelayanan pada SKPD/unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dipersepsikan “**BAIK**” oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh yaitu 85,65 (Kategori B = Baik) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat di seluruh SKPD. Terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2021 yaitu 84,53 (Kategori B = Baik). Dari tahun 2018 indeks kepuasan masyarakat sudah berkategori Baik, peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.1.7
IKM Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2022



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2022 nilai SKM Kabupaten Tanah Laut sebesar 85,65 dengan kategori “**BAIK**”. Rata-rata persentase nilai SKM masing-masing SKPD bisa dikatakan Baik, karena nilai interval yang didapat oleh masing-masing SKPD antara 76,61-88,30.

Dari 40 SKPD yang memperoleh nilai IKM Minimal 80, ada 2 SKPD yang memperoleh nilai dibawah 80 yaitu Dinas Pariwisata (79,31), dan Kecamatan Jorong (79,65), akan tetapi untuk nilai tersebut masih dikatakan BAIK kalau dilihat dari nilai intervalnya.

Pada Tahun 2022 ada 9 SKPD yang kategori nilai SKM nya kategori “**SANGAT BAIK**” yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (94,02), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (94,22), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (91,34), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (91,33), Dinas Sosial (91,48), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (89,51), Dinas P2KBP3A (89,05), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (89,61), dan Kecamatan Bumi Makmur (91,75).

Tabel 3.1.12
 Rekapitulasi SKM Tahun 2020-2022

REKAPITULASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)				
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT				
No	Nama Satuan Kerja	Nilai IKM 2020	Nilai IKM 2021	Nilai IKM 2022
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	81.99	86,73	88,00
2	Sekretariat DPRD	82.75	82,76	81,81
3	Inspektorat	80.07	83,14	83,69
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	79.75	79,81	81,09
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89.32	83,80	85,78
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	93.24	94,16	94,02
7	Badan Pendapatan Daerah	88.76	81,07	81,81
8	Badan Kesbangpol	79.34	85,98	86,98
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.81	83,82	82,42
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	94.22	83,64	94,22



11	Dinas Kesehatan	83.53	83,69	83,24
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	77.39	77,39	80,38
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	87.95	88,04	91,33
14	Dinas Sosial	89.88	87,11	91,48
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	82.28	82,06	84,56
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85.41	89,28	91,34
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	81.50	80,20	87,10
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	95.26	95,72	87,90
19	Dinas Pariwisata	80.67	81,10	79,31
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83.69	83,16	84,69
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87.68	89,54	89,51
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	97.08	88,97	89,05
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	79.95	79,06	80,97
24	Dinas Perhubungan	-	-	-
	UPT Terminal	85.86	83,01	-
	UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	88.76	80,06	82,19
	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	81.46	82,19	82,38
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	86.14	85,64	85,07
26	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	80.59	83,01	80,67
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	83.22	83,52	85,01
28	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	81.59	87,72	89,61

29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	89.52	89,97	83,31
30	Kecamatan Pelaihari	81.90	81,92	87,86
31	Kecamatan Takisung	82.10	82,30	82,34
32	Kecamatan Panyipatan	82.00	88,80	84,73
33	Kecamatan Bajuin	81.33	83,64	88,09
34	Kecamatan Jorong	80.76	80,87	79,65
35	Kecamatan Kintap	81.85	81,85	85,69
36	Kecamatan Batu Ampar	80.14	87,01	87,19
37	Kecamatan Tambang Ulang	80.10	80,26	80,27
38	Kecamatan Bati-Bati	79.33	81,13	87,78
39	Kecamatan Kurau	85.31	85,48	86,28
40	Kecamatan Bumi Makmur	96.40	91,44	91,75
	Total Nilai IKM	84.59	84.53	85,65

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Ada beberapa SKPD/Unit Pelayanan yang unsur pelayanannya dianggap paling memuaskan oleh responden dan mencapai angka 4,00, yang terdapat pada yang terdapat pada Bappeda, BPKAD, BPBD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Bumi Makmur. Sedangkan unsur pelayanan yang kurang memuaskan dengan angka dibawah 3,00 terdapat pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.

Untuk Tahun 2022, pelaksanaan SKM pada seluruh SKPD dilakukan setiap triwulan dengan mengisi link yang sudah disediakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu <https://bit.ly/SurveiKepuasanMasyarakatTriwulan> dimana untuk pengisian setiap triwulan pada akhir link yang ada tulisan Triwulan ditambahkan angka 1 sampai dengan 4 sesuai dengan survei yang dilakukan pada triwulan berapa. Sedangkan hasil survei

yang dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah setiap semester yaitu semester 1 dan paling lambat dilaporkan pada akhir bulan November setiap tahunnya.

Tabel 3.1.13
Rekapitulasi Jumlah Responden SKM Semester 1 Tahun 2022

No	Nama Satuan Kerja	Jumlah Responden
1	Sekretariat Daerah	553
2	Sekretariat DPRD	320
3	Inspektorat	309
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	300
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300
7	Badan Pendapatan Daerah	200
8	Badan Kesbangpol	300
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	300
11	Dinas Kesehatan	4.708
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	300
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	323
14	Dinas Sosial	300
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	315
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	194
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	300
19	Dinas Pariwisata	277



20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	300
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	300
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	270
24	Dinas Perhubungan	
	UPT Terminal	-
	UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	282
	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	313
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300
26	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	300
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	360
28	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	300
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	240
30	Kecamatan Pelaihari	300
31	Kecamatan Takisung	240
32	Kecamatan Panyipatan	300
33	Kecamatan Bajuin	300
34	Kecamatan Jorong	140
35	Kecamatan Kintap	300
36	Kecamatan Batu Ampar	299
37	Kecamatan Tambang Ulang	300
38	Kecamatan Bati-Bati	353
39	Kecamatan Kurau	170

40	Kecamatan Bumi Makmur	320
----	-----------------------	-----

Kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan salah satunya dikarenakan adanya kegiatan **Manunggal Tuntung Pandang yaitu kegiatan bermalam di desa untuk Bupati dan seluruh jajaran** dan Perangkat Daerah. Pada saat manunggal tuntung pandang dilaksanakan, SKPD pemberi layanan misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, DP2KBP3A memberikan layanan kepada seluruh masyarakat. Hal ini juga mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat tanpa mereka harus datang langsung ke Kantor SKPD pemberi layanan.

Gambar 3.1.1
Pemberian pelayanan pada kegiatan manunggal tuntung pandang



Pada akhir tahun 2022, berdasarkan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kabupaten Tanah Laut telah meraih predikat Pelayanan Prima (A) dengan nilai 4,53. Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2022 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, Kabupaten Tanah Laut memperoleh kategori B (kualitas tinggi) dengan nilai kepatuhan 86,61 zonasi Hijau.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat:

Masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami penggunaan aplikasi pelayanan, sehingga yang seharusnya proses layanan dilakukan 1 hari selesai menjadi lebih dari 1 hari selesainya.

Solusi

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi pelayanan.

Rencana aksi

- 1) Dilakukan survei Kepuasan Masyarakat oleh pihak eksternal;
- 2) Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat di SKPD berkelanjutan secara berkala, untuk tahun 2022 telah dilaksanakan per triwulan.
- 3) Pemberian *reward* and *punishment* terhadap SKPD dengan predikat layanan terburuk dan terbaik.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat lainnya di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 55 ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta 68 ASN pada DP2KBP3A dan di dukung oleh 6 Program dengan Pagu Rp 8,213,241,268,00 dan terealisasi Rp. 6,288,758,202.00 atau sebesar 76.57%.

Tabel 3.1.14
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pendaftaran Penduduk	370,088,205,00	325.228.255,00
2	Program Pencatatan Sipil	146,199,310,00	107.936.400,00
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	276,170,566,00	250.335.736,00
4	Program Pengendalian Penduduk	215,934,411,00	176.116.434,00
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,723,341,676,00	4.134.166.576,00
6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,481,507,100,00	1.294.974.801,00
Jumlah		8,213,241,268,00	6,288,758,202,00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 4

Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga

Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.15
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persen	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
2	Jumlah Atlet yang berprestasi	Atlet	68	61	89,70%	74	128	172,97%	81	315	388,89%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											244,44%

Tabel 3.1.16
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persen	100	100	100%	100	100%
2	Jumlah Atlet yang berprestasi	Atlet	81	315	388,89%	89	353,93%

a. Cakupan Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah

Realisasi indikator pelestarian dan pengembangan budaya daerah di tahun 2022 adalah 100%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan tingkat capaian 100%. Capaian indikator cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah tercapai 100% dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Realisasi tersebut juga sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 100%.

Dari 16 cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan ke dalam Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1002-KUM/2021 pada tahun 2022 telah dilakukan pelestarian dan pengembangan seluruhnya. Sedangkan untuk unsur-unsur lain seperti seni music, seni tari dan budaya belum ditetapkan dalam keputusan Bupati namun tetap dilaksanakan pelestarian dan pengembangannya.

Pembangunan kebudayaan sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh konstitusi pada Pasal 32 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tanah Laut juga telah mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025. Meskipun undang-undang khusus tentang pembangunan kebudayaan masih dalam proses, berbagai dokumen kebijakan berulang kali menyebutkan delapan pilarnya, yaitu (1) hak-hak berkebudayaan; (2) jati diridan karakter bangsa; (3) multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya; (5) industri budaya; (6) diplomasi budaya; (7) pranata dan insana kebudayaan; serta (8) sarana dan prasarana budaya. Peran penting yang diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya daerah serta pengembangan interaksi antar budaya.

Adapun Langkah Langkah yang di ambil untuk melestarikan kebudayaan:

- 1) Dengan melaksanakan kegiatan lomba-lomba tradisional, lomba paduan suara, lomba membaca pantun, lomba membaca puisi, lomba menyanyi yang semuanya menggunakan bahasa daerah. Selain itu juga melaksanakan lomba busana sasirangan, lomba tari tradisional dan tari umum.
- 2) Melakukan pendataan sanggar sanggar seni yang ada di Kabupaten agar kebudayaan tetap hidup dan lestari di kabupaten Tanah Laut.
- 3) Melaksanakan Pembuatan Buku sejarah kabupaten Tanah Laut dan kemudian akan dijadikan sebagai buku muatan local agar setiap siswa paham dan mengerti sejarah kabupaten Tanah Laut
- 4) Melakukan Pemeliharaan bangunan bangunan peninggalan bersejarah di

Kabupaten Tanah Laut.

- 5) Melakukan Inventarisasi Barang Peninggalan Bersejarah yang ada diwilayah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk pelestarian budaya lokal Seni Tari Daerah, Seni Musik Daerah, Madihin, Kurung-Kurung, Mandi-Mandi, Batamat Al Qur'an, Bayun Anak, Kuda Lumping, Hadrah / Maulid Habsyi, pelestarian makam-makam yang memiliki potensi cagar budaya di Tahun 2021 yaitu rehab makam keramat datu panjang di Desa Tungkaran, kubah makam keramat lok batu Datu Ahmad Kelurahan Karang Taruna, pembangunan sarana prasarana dan fasilitas bangunan peninggalan bersejarah makam keramat ustana (pangeran datu ahmad) di Kelurahan Karang Taruna, rehab kubah makam keramat habib alwi bin Iderus Bahasyim di Desa Handil Birayang Bawah Bumi Makmur, kubah makam keramat datu pamulutaan Kecamatan Panyipatan.

Menurut Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/ayau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dalam rangka melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya maka Bupati Tanah Laut menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1002-KUM/2021 dengan menetapkan cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Tabel 3.1.17
Daftar cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA	KATEGORI	LOKASI
1	Makam Keramat Datu Bungur	Struktur Cagar Budaya	Desa Simpang 4 Sei Baru Kec. Jorong
2	Makam Keramat Datu Timang	Struktur Cagar Budaya	Desa Jorong Kec. Jorong

3	Makam Keramat Datu Nafis	Struktur Cagar Budaya	Desa Tungkaran Kec. Pelaihari
4	Makam Keramat Istana Pangeran Datu Ahmad	Struktur Cagar Budaya	Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari
5	Makam Keramat Datu Panjang	Struktur Cagar Budaya	Desa Tungkaran Kec. Pelaihari
6	Makam Keramat Lok Batu Datu Ahmad	Struktur Cagar Budaya	Desa Telaga Kec. Pelaihari
7	Makam Keramat KH. Abdussamad Khairi	Struktur Cagar Budaya	Desa Tabanio Kec. Takisung
8	Benteng Tabanio	Situs Cagar Budaya	Desa Tabanio Kec. Takisung
9	Makam Keramat Syekh Abdul Gani Bin Abdurrahim	Struktur Cagar Budaya	Desa Padang Kec. Bati-Bati
10	Makam Keramat Datu Insad	Struktur Cagar Budaya	Desa Sambangan Kec. Bati-Bati
11	Makam Keramat Tuan Datu H. Ismail	Struktur Cagar Budaya	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati
12	Makam Keramat Ahmad Syamhudi	Struktur Cagar Budaya	Desa Padang Luas Kec. Kurau
13	Makam Keramat Datu Pamulutan	Struktur Cagar Budaya	Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan
14	Marcusuar Peninggalan Kolonial Belanda	Bangunan Cagar Budaya	Desa Batakan Kec. Panyipatan
15	Makam Keramat Habib Alwi Bin Idrus Bahasyim	Struktur Cagar Budaya	Ds. Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur
16	Banker Peninggalan Kolonial Jepang	Bangunan Cagar Budaya	Desa Sungai BakarKec. Bajuin

Kendala yang dihadapi dalam pelestarian cagar budaya yaitu Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu, yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Dengan Tidak Tersedianya Tim Ahli

Cagar Budaya (TACB) yang bersertifikat di daerah maka untuk membentuk belum terbentuk yang mengakibatkan daerah tidak bisa menetapkan cagar budaya yang dibina menjadi cagar budaya yang ditetapkan karena tim tersebut yang dapat menilai layak atau tidak layak menjadi cagar budaya.

Daftar Kelompok Seni terdiri dari Seni Tari Daerah Seni Musik Daerah, Madihin, Kurung-Kurung, Mandi Mandi, Batamat Al Qur'an, Baaayun Anak, Kuda Lumping, Hadrah / Maulid Habsyi.

Tabel 3.1.18
 Daftar Kelompok Seni dan Budaya

No	Kecamatan	Nama Kelompok	Jenis Kesenian
1	Kecamatan Bajuin	Al Zahra	Maulid Habsyi
		Al Ikhwan	Maulid Habsyi
		Kifayatul Ghulam	Maulid Habsyi
		Nurul Amanah	Maulid Habsyi
		Babus Syafaah	Maulid Habsyi
		Nurul Hasanah	Maulid Habsyi
		Raudatul Ilimi	Maulid Habsyi
		Ahbabdurasul	Maulid Habsyi
		Syifa Annisa	Maulid Habsyi
		Arraudah	Maulid Habsyi
		Al Ikhlas	Maulid Habsyi
		Mistahussa'adah	Maulid Habsyi
		Hubbun Nabi	Maulid Habsyi
		Turonggo Tri Budoyo	Kuda Lumping
		Samboyo Putro	Kuda Lumping
		Putro Birowo	Kuda Lumping
		Manggala Tri Budoyo	Kuda Lumping
		Turonggo Cipta Bududoyo	Kuda Lumping
		Sanggar Tirta Kesuma	Sanggar Seni Tari
		Rajawali	Seni Beladiri (Kuntau)
2	Kecamatan Bati-Bati	Al - Munawar	Maulid Habsyi
		Darul Hasanah	Maulid Habsyi
		Ar - Raudah	Maulid Habsyi
		Nurul Janah	Maulid Habsyi
		Maulid Al Furqon	Maulid Habsyi
		Raudatul Jannah	Maulid Habsyi
		Habsy Asyiroh	Maulid Habsyi
		Safa Marwah	Maulid Habsyi

	Al Ikhlas	Maulid Habsyi
	Nurul Iman	Maulid Habsyi
	Al - Anshor	Maulid Habsyi
	Asyifa	Maulid Habsyi
	Al - Ikhlas	Maulid Habsyi
	Nurul Huda	Maulid Habsyi
	Az Zahro	Maulid Habsyi
	Turonggo Putro	Kuda Gepang
	Puryo Budoyo	Kuda Gepang
	Darussalim	Sinoman Hadrah
	Yaa Thoiybah	Sinoman Hadrah
	Sanggar 2 Selempang	Seni Tari & Musik Panting
	Jahratun Nisa	Seni Musik
	Nuzhatul Muttaqin	Seni Musik
	Nurul Syafaah	Seni Musik
	Al Barokah	Seni Musik
	Nurul Qolby	Seni Musik
	Nurul Hidayah Putra	Seni Musik
	Nurul Hidayah Putri	Seni Musik
	Pagar Nusa	Seni Musik
	Ar Rumi	Seni Teater
	Pencak Silat	Silat
	Persaudaraan Setia Hati Terate	Bela Diri dan Olah Raga
	Persaudaraan Setia Hati Terate	Bela Diri dan Olah Raga
	Sumardi Wahono	Seni Rupa
	Moh.Thaher Syamsoedin	Seni Rupa

Rencana Aksi kedepan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelestarian budaya daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Menggali potensi cagar budaya baru.
2. Mengikuti uji **sertifikasi** Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)
3. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)
4. Penghargaan seniman dan budayawan
5. Mengadakan Pertunjukan Pentas Seni dan Budaya
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Seni dan Budaya
7. Melakukan Pendataan Kelompok seni dan Budaya
8. Pelaksanaan pemilihan Nanang dan Galuh Kabupaten Tanah Laut Tahun.
9. Pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut.

b. Jumlah Atlet Yang Berprestasi

Realisasi indikator jumlah atlet yang berprestasi di tahun 2022 adalah 315 atlet , telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 81 atlet dengan tingkat capaian 388,89%. mengalami peningkatan sebanyak 187 atlet berprestasi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 128 atlet. Realisasi tersebut sudah melampaui target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 89 atlet.

Tabel 3.1.19
 Daftar Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Medali yang diperoleh Tahun 2022

NO	NAMA	KEJUARAAN DAERAH	CABOR	MENDALI
1	ABDUL KHAIR RAMADANA	POPDA	PENCAK SILAT	PERAK
2	ABDULLAH	FORDA	SILAT BUDAYA	EMAS
3	ACCHYDIA JAGAT	PORPROV	ANGKAT BESI	EMAS
4	ACHMAD BAGAS RIDHO RAMADHAN	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
5	ADELIA INDRI SURYANI	POPDA	PENCAK SILAT	PERUNGGU
6	ADI SURYANTO	PORPROV	VOLI	PERAK
7	ADIANSYAH	PORPROV	ATLETIK	PERAK
8	AGUS SAPUTRA	PORPROV	IODI	EMAS
		FORDA	BIGBOYS	EMAS
		PORPROV	IODI	EMAS
		PORPROV	IODI	EMAS
9	AGUS SETIA BUDI	PORPROV	GULAT	EMAS
10	AGUS WAHYUDI	PORPROV	BILLIARD	PERUNGGU
11	AHLAN KOIRRUDIN	POPDA	PENCAK SILAT	PERAK
12	AHMAD RAIHAN	PESONAS	VOLI	EMAS
13	AHMAD ABDUL AZIZ	PORPROV	VOLI	PERAK
14	AHMAD ALVIN NIZAR	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
		PESONAS	FUTSAL	EMAS
15	AHMAD INSANI	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
16	AHMAD LUTHFI Madyani	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
17	AHMAD MALIKI PRAMUJA	POPDA	BASKET	-
18	AHMAD NASRULLOH YUSUF	PORPROV	KARATE	PERUNGGU



19	AHMAD RIFAI	PORPROV	TINJU	PERAK
20	AHMAD SAYFII	POPDA	VOLI	EMAS
21	AHMAD SUPIYADI	PORPROV	TINJU	PERAK
		POPDA	TINJU	PERUNGGU
22	AISYA	PORPROV	BRIDGE	EMAS
		PORPROV	BRIDGE	PERAK
23	AKHMAD NAJIB KHAIRI	PORPROV	KEMPO	PERAK
24	AKHMAD RAMADHAN	PESONAS	VOLI	EMAS
25	AKHMAD RIYADI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
		POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
26	ALADIN	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
27	ALDI RANGGA	PORPROV	KEMPO	EMAS
28	ALDIAN PRABOWO	PORPROV	ANGKAT BESI	PERAK
29	ALDY	PORPROV	IODI	PERAK
30	ALDYA MUSOUFI	PORPROV	IODI	PERAK
31	ALEXANDRIANUS RISKI	POPDA	PENCAK SILAT	PERAK
32	ALIEF BINTANG RAMADHAN	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
33	ALIFAH NABILAH	PORPROV	KEMPO	EMAS
34	ALPIANOR	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
		POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
35	ANDIKA BAGUS PEBRIANTO	PORPROV	KEMPO	PERUNGGU
36	ANDINI DENO	PORPROV	ANGKAT BESI	EMAS
37	ANNISA AYU ADIBAH	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
38	ANNISA	PORPROV	BRIDGE	EMAS
39	ARBAINAH	PORPROV	MUAYTHAI	PERUNGGU
40	ARISTA KURNIA DEWI	PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
41	ARJUNA ALDILLAH PRIAMBODHO	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
42	ARMANI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
43	ARUM MUSTIKA DEWI	PORPROV	JUDO	EMAS
44	ASDIYASAH	PORPROV	IODI	PERAK
		PORPROV	IODI	PERAK
45	ASMAUL HUSNATI	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
46	AULIA	PESONAS	BASKET	EMAS
47	AZIZAHTUL IQNA	PORPROV	ATLETIK	PERAK



48	BAGUS SETIAWAN	PORPROV	VOLI	PERAK
49	BARIYAH	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS,PERAK,PERUNGGU
		PESONAS	ATLETIK	PERAK
50	BAYU SAPUTRA	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
51	BELLA PUSPITA	PESONAS	ATLETIK	EMAS
52	BERLIAN LAFITRI FANY	PORPROV	MUAYTHAI	PERUNGGU
53	BISMA ZULFIAN PUTRA RAMADHAN	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
54	BONIFASIUS TANDI	PORPROV	FPTI	PERUNGGU
		PORPROV	FPTI	PERUNGGU
55	BUDI SANTOSO	PORPROV	ATLETIK	PERAK
56	CITRA CHELSY OLIVIA	PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
57	DAFFA BAGASKARA	PORPROV	IODI	EMAS
58	DARSIAH	PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
59	DEDY SETIAWAN	PEPARPROV	JUDO	EMAS
60	DELA LUTFIAH	PORPROV	KARATE	EMAS
		PORPROV	KARATE	EMAS
		PORPROV	KARATE	PERAK
61	DESI PUSPITA SARI	PORPROV	SILAT	EMAS
62	DIANDRA PARAMITHA	PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	PERAK
		PORPROV	RENANG	PERUNGGU
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	PERAK
63	DIMAS ARI SUDARIANTO	POPDA	PENCAK SILAT	PERAK
64	DIMAS DAN HENDRA	PORPROV	ESPORT	EMAS
65	DIMAS FERDINAN	PORPROV	ESPORT	EMAS
66	dr. FADILLAH ALMA PUTRA	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERAK
67	DWI ANGGRAINI	PEPARPROV	ATLETIK	PERUNGGU
68	DWI ANGGREANI SAPUTRI	PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS



69	DWI FERDYAN SAPUTRA	POPDA	VOLI	EMAS
70	DWI SUCI RAMADHANI	PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	PERAK
71	DZAKI FATTURAHMAN	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERAK
		PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERAK
72	EDO ALFIANTO WIJAYA	PORPROV	TAKRAW	PERUNGGU
73	EDWIN MARTHA PRADANA	PORPROV	VOLI	PERAK
74	EDY RAHMADI	PORPROV	MUAYTHAI	PERAK
75	EKA PRASANTI	PORPROV	SILAT	PERAK
76	ELFINA NURSANTI	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
77	ENDANG	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
78	ERI ASTUTI	PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
		PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
79	ERVINA	PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
		PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
80	ERVINA DAMAYANTI	PORPROV	SILAT	EMAS
81	FAATIH MUHAMMAD AKMAL	PORPROV	RENANG	PERUNGGU
82	FADILLAH ALMA PUTRA	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERAK
83	FAHRIANSYAH	PESONAS	FUTSAL	EMAS
84	FAKHRI HIDAYATULLAH	PORPROV	HAPKIDO	EMAS
85	FAKHRUDIN	PORPROV	BILLIARD	EMAS
		PORPROV	BILLIARD	PERUNGGU
		PORPROV	BILLIARD	PERUNGGU
86	FATIKAH	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
87	FEBRIAN ALFA REZA	PORPROV	BALAP MOTOR	PERAK
88	FEMAS ADI PRAMANA	POPDA	VOLI	EMAS
		PORPROV	VOLI	PERAK
89	FERDIAN FATHUR ROHMAN	PESONAS	VOLI	EMAS
90	FIRMANSYAH	POPDA	PENCAK SILAT	EMAS



91	FITRI RAHMAYANTI	PESONAS	FUTSAL	PERAK
92	FITRIA RAMADANI	PEPARPROV	CATUR	PERAK
		POPDA	TINJU	EMAS
93	FITRIANOOR	PORPROV	CATUR	EMAS
		PORPROV	CATUR	PERUNGGU
94	FITRIATI	PORPROV	CATUR	PERUNGGU
95	GHOEUR SETIAWANTO	PORPROV	IODI	PERUNGGU
96	GILANG	PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
		PORPROV	ATLETIK	PERAK
97	GITA AMALIA WARDANI	POPDA	TINJU	EMAS
		PORPROV	TINJU	PERAK
98	H. MUSTAFA	PORPROV	CATUR	EMAS
		PORPROV	CATUR	PERUNGGU
99	HADI PUTRO SETIAWAN	PORPROV	VOLI	PERAK
100	HADIYANOOR	PORPROV	CATUR	EMAS
		PORPROV	CATUR	PERUNGGU
101	HAJIMI YANNOOR	PORPROV	ATLETIK	PERAK
102	HANISA MAYRANI	PESONAS	FUTSAL	PERAK
103	HASAN	PEPARPROV	ATLETIK	PERUNGGU
104	HEFNI	PORPROV	KEMPO	PERAK
		PORPROV	KEMPO	PERAK
105	HELMINA SALWA	PORPROV	BRIDGE	EMAS
		PORPROV	BRIDGE	PERUNGGU
106	ANNISA	PORPROV	VOLI	PERAK
107	HENDRA RUSADI	PORPROV	BALAP MOTOR	PERUNGGU
108	HERI MAULANA	PORPROV	BRIDGE	PERUNGGU
109	HUDIYA LAILAN	PORPROV	FPTI	PERUNGGU
110	I MADE PRABAWA DEVA	POPDA	PENCAK SILAT	PERUNGGU
111	IBERAHIM	PEPARPROV	CATUR	PERUNGGU
112	IBRA AL MADINA	POPDA	VOLI	EMAS
113	ILHAM FADILA	PORPROV	VOLI	PERAK
114	IRAYATI NORIWANI	PORPROV	IODI	PERUNGGU
115	IRMA ARANA ZAHRA	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
116	IRVAN ADITIYA	PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
		PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU



117	IRWANSYAH ABDI	PORPROV	MUAYTHAI	PERAK
118	ISNAINI NOR	PORPROV	HAPKIDO	PERUNGGU
119	JULIAN FARICA	PORPROV	IODI	EMAS
120	KHAIRIAN IKBAL	PORPROV	SILAT	PERAK
121	KHAIRIL FADILLAH	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
122	KHAIRUL FADLAN LUBIS	PORPROV	KARATE	PERAK
		PORPROV	KARATE	PERUNGGU
123	KHARISMA NUR HIDAYAH	POPDA	PENCAK SILAT	PERUNGGU
124	LAILA RUSADY	PORPROV	HAPKIDO	EMAS
125	LAILAN NAJAH	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
		PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
		PORPROV	SAMBO	PERAK
126	LAILI DWI	PORPROV	FPTI	PERUNGGU
127	LIA HIDAYAH	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
128	LILIS INDRIANI	PORPROV	SILAT	PERUNGGU
129	LISA NUR HIDAYAH	PORPROV	SAMBO	PERAK
130	LISDA YUSVIANI	PORPROV	BRIDGE	PERAK
		PORPROV	BRIDGE	EMAS
131	LUKMAN HAKIM	PORPROV	MUAYTHAI	PERUNGGU
132	LUKMAN HANAFI	PORPROV	SILAT	PERAK
133	LUKMAN NOOR HAKIM	PORPROV	IODI	PERAK
		PORPROV	IODI	PERAK
134	LUSIANA ANDINKA	POPDA	PENCAK SILAT	PERUNGGU
135	LUTFI GAZALI RAHMAN	PEPARPROV	JUDO	EMAS,PERUNGGU
136	M. ADITYA RAHMAN	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
137	M. ADRIANSYAH	PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
		POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
		PORPROV	ATLETIK	PERAK
138	M. AMIRULLAH ABDUL AZIZ	PORPROV	TINJU	PERAK
139	M. ANUGRAH	PORPROV	SILAT	PERUNGGU
140	M. ARDY	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
141	M. BINTANG SURYA PRATAMA	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
142	M. FAHMI HIDAYAT	POPDA	TINJU	PERUNGGU
143	M. FERDYAN NOOR HADI	PORPROV	HAPKIDO	EMAS



144	M. GILANG RAMADHAN	PESONAS	BADMINTON	EMAS
145	M. HAFIZI	PORPROV	SILAT	EMAS
146	M. HELMY AZHARI	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS,PERUNGGU
147	M. HONGKI	PORPROV	KEMPO	EMAS
148	M. IHSAN	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS
149	M. IHZA AKBARIATNA	PORPROV	IODI	PERUNGGU
150	M. IRFAN	PORPROV	MUAYTHAI	PERUNGGU
		PORPROV	MUAYTHAI	PERUNGGU
151	M. KURNIAWAN	PESONAS	BASKET	PERUNGGU
152	M. NABIL BACHLEVI	PORPROV	ANGKAT BESI	PERUNGGU
153	M. PEBRIYANOR ALI	PORPROV	VOLI	PERAK
154	M. RAFII	PORPROV	ATLETIK	PERAK
155	M. RAMLY	PORPROV	MUAYTHAI	PERUNGGU
156	M. RASYIDI	PESONAS	FUTSAL	EMAS
157	M. REFENDI	PORPROV	KEMPO	PERUNGGU
		PORPROV	KEMPO	PERAK
158	M. REZA FAHLEVI	PORPROV	KEMPO	PERUNGGU
		PORPROV	KEMPO	PERAK
159	M. RIFQI ULIL IKHBAL	PORPROV	ATLETIK	PERAK
		PORPROV	ATLETIK	PERAK
		PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
160	M. RISKI SAFARI	PORPROV	TINJU	PERUNGGU
161	M. SAFUANI	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
162	M. SALIHIN	PORPROV	TENIS MEJA	PERUNGGU
163	M. SARI BUDI	PORPROV	BRIDGE	PERUNGGU
164	M. SURYADI SAPUTRA	PORPROV	HAPKIDO	EMAS
165	M. SYAFWAN	PORPROV	HAPKIDO	PERUNGGU
166	M. YAHYA	PORPROV	KEMPO	PERAK
167	M. ZAKI	PORPROV	KEMPO	PERAK
		PORPROV	KEMPO	PERAK
168	M.ALFRADU SUMIRAT	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERAK
169	M.FAZRIAN ARRAFIE	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
		PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERAK
170	M.GILANG RAMADHAN	PEPARPROV	BULU TANGKIS	EMAS,PERAK
171	M.RAFII	PORPROV	ATLETIK	PERAK



172	M.REHAN	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
173	M.RIFIQI	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
174	MAHENDRA	PESONAS	FUTSAL	EMAS
175	MAHRETA INDAYANI S	PORPROV	MUAYTHAI	PERAK
176	MALASARI	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
		PEPARPROV	ANGKAT BBERAT	EMAS
177	MALIK ABDUL AZIZ YULIANTO	POPDA	VOLI	EMAS
178	MARIAM	PORPROV	TENIS MEJA	PERUNGGU
179	MARSUDI SETIYAWAN	PORPROV	TINJU	EMAS
180	MAULANA MALIK IBRAHIM	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
181	MAULIA SABILA	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
182	MAULIDA RAHMAH	PORPROV	BRIDGE	EMAS
183	MAURA AMALINA NAYLA	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
		PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
184	MELITA YOGI PRATAMA	PORPROV	GULAT	PERAK
185	MIRWAN ALIYANI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
		POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
186	MN. YUSDI MUSALIN	PORPROV	CATUR	EMAS
		PORPROV	CATUR	PERUNGGU
187	MOHAMAT APRIYANTO	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
188	MOHAMMAD ZAKY HABIBI	POPDA	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
189	MP. HASMI NORBANA	PORPROV	CATUR	EMAS
		PORPROV	CATUR	PERUNGGU
190	MUDIANTO	PEPARPROV	ANGKAT BBERAT	EMAS,PERAK
191	MUHAMAD SIBAWAIHI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
192	MUHAMAD SYARWANI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
193	MUHAMMAD	PORPROV	HAPKIDO	PERAK
194	MUHAMMAD ADITYA RAHMAN	PORPROV	KARATE	PERUNGGU
195	MUHAMMAD AFIF LUBIS	PORPROV	KARATE	EMAS
		PORPROV	KARATE	PERAK
		PORPROV	KARATE	PERUNGGU
196	MUHAMMAD ALAMULHUDA	PORPROV	PANAHAHAN	PERUNGGU
197	MUHAMMAD ALFA RIZI	POPDA	PENCAK SILAT	PERAK

198	MUHAMMAD ALFARADU SUMIRAT	POPDA	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
199	MUHAMMAD ALWIN GHOFARI	POPDA	VOLI	EMAS
200	MUHAMMAD AMIRUDIN	PORPROV	PETANQUE	EMAS
201	MUHAMMAD HALILLURAHMAN	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
202	MUHAMMAD HONGKI ADI PUTRA	PORPROV	KEMPO	PERAK
203	MUHAMMAD IHSAN	PORPROV	ATLETIK	PERAK
		PESONAS	FUTSAL	EMAS
204	MUHAMMAD IRWANDANA	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
		PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
205	MUHAMMAD JAILANI	PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
206	MUHAMMAD NAVAN SETIAWAN	PORPROV	VOLI	PERAK
		POPDA	VOLI	EMAS
207	MUHAMMAD NOOR IQWAN	PORPROV	VOLI	PERAK
208	MUHAMMAD NUR YANDA RIFANI	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
209	MUHAMMAD RAHMATULLAH	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
210	MUHAMMAD RAMADHAN	PORPROV	TAKRAW	PERUNGGU
211	MUHAMMAD RAULNAL VANESTY	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
212	MUHAMMAD RIDUAN	PORPROV	BALAP MOTOR	PERAK
213	MUHAMMAD RIZKY RAMADANI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
214	MUHAMMAD YAHYA	PORPROV	KEMPO	EMAS
215	MUHAMMADSYAH AL HABSY	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
216	MUJI LESTARI	PEPARPROV	CATUR	PERAK
		PEPARPROV	ATLETIK	PERAK
		PEPARPROV	ANGKAT BBERAT	EMAS
217	NABILA AATIFA	PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	PERAK
218	NADIA LISMAYA PUTRI	PORPROV	SAMBO	EMAS
		PORPROV	SAMBO	PERAK
		PORPROV	SAMBO	PERAK
219	NAFSIAH	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
220	NAJLA SALSABILLA	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS



221	NANDA	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
222	NASARUDDIN	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
223	NAYLA NAKEISYA	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
		PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
224	NAZWA D	PORPROV	KEMPO	PERUNGGU
225	NITA APRILIYANTI	PESONAS	TENIS MEJA	PERUNGGU
226	NLISANUL HIDAYAH	PORPROV	SAMBO	PERAK
227	NOOR HAPIPAH	PORPROV	KARATE	PERAK
228	NOR AINAH	PESONAS	FUTSAL	PERAK
229	NOR AZIMA	PORPROV	KEMPO	EMAS
230	NOR CHASANAH	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
231	NOR RAINI SYARIFAH	PORPROV	HAPKIDO	PERAK
232	NORHAPIPAH	PORPROV	KARATE	PERAK
233	NORLAILI, S.Pd	PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	PERAK
		PORPROV	RENANG	PERAK
		PORPROV	RENANG	PERAK
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	PERAK
		PORPROV	RENANG	PERUNGGU
234	NORMIA	PORPROV	TINJU	PERAK
235	NORMINA	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
		PORPROV	SAMBO	PERAK
236	NUARY MAULANA	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
		POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
		PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
		POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
237	NUGROHO RAMADHANU	PORPROV	IODI	EMAS
238	NUR HAVIJA	PESONAS	FUTSAL	PERAK
239	NUR KHOLIK	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
240	NUR LUKMAN	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
241	NURDIN	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS
		PEPARPROV	BULU TANGKIS	PERAK
242	NURROHIM SIDIK	PORPROV	JUDO	PERAK
243	NURUL HIKMAH	PORPROV	FPTI	PERUNGGU



		PORPROV	FPTI	PERUNGGU
244	PANJI RIFKI	PORPROV	HAPKIDO	PERAK
245	PHARAS GUNTUR NASTIAR	PORPROV	VOLI	PERAK
246	PINNEHAS JULIANO	PORPROV	VOLI	PERAK
247	PRIYO SANTOSO	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS,PERUNGGU
248	PUTU ARI ARNIKA	PORPROV	KARATE	PERUNGGU
		PORPROV	KARATE	PERAK
249	RAHMAD HIDAYAT	POPDA	VOLI	EMAS
250	RAHMADANI	PORPROV	SAMBO	PERAK
251	RAHMANNUL HAKIM	PORPROV	BRIDGE	PERUNGGU
252	RAHMAT	PORPROV	TINJU	PERUNGGU
253	RAHMAYANTI	PORPROV	KEMPO	PERAK
		PORPROV	KEMPO	PERAK
		PORPROV	KEMPO	PERAK
254	RAHMI ASHFIA	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
		PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
255	RAHMIDI	PORPROV	ATLETIK	PERAK
256	RAMADANI	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
	RAMADANI	POPDA	VOLI	EMAS
257	RAMADHAN	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
		PORPROV	SILAT	PERAK
258	RAMANDA	PORPROV	JUDO	PERAK
259	RATIH INDAH PERTIWI	PORPROV	IODI	PERAK
		PORPROV	IODI	PERUNGGU
		PORPROV	IODI	PERUNGGU
		PORPROV	IODI	PERUNGGU
		PORPROV	IODI	PERUNGGU
260	RAYMOND HARIYONO	PORPROV	KARATE	PERUNGGU
261	RENDY FAHRIZAL	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
262	REVIANI	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
263	RIDHO APIBRI	PORPROV	ANGKAT BESI	EMAS
264	RIKO ARDIANTO	PORPROV	VOLI	PERAK
265	RISKA ANISA	PORPROV	ANGKAT BESI	PERAK
266	RISKY AL-FARISI	PESONAS	BOCCE PUTRA	PERUNGGU
267	RISKY HIDAYAT	PESONAS	FUTSAL	EMAS



268	RISWAN	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
269	RIZKY ALVINA	PORPROV	HAPKIDO	PERUNGGU
270	ROBBY SURRAHMAN	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
271	ROVAN RAKHA ADINATA	PORPROV	RENANG	PERUNGGU
		PORPROV	RENANG	PERUNGGU
		PORPROV	RENANG	PERUNGGU
272	SAFA NURHALISYA	PORPROV	FPTI	PERUNGGU
273	SAFFILA ADANTA PUTRA SANTOSO	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
274	SAIBUL BAHRI	PESONAS	VOLI	EMAS
275	SAID AKBAR	PORPROV	SAMBO	PERAK
		PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
276	SALAMIAH	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
277	SAM'ANI	PORPROV	BILLIARD	PERUNGGU
278	SANTUSU	PEPARPROV	JUDO	PERAK,PERUNGGU
279	SARAH NABILA SIMANJUNTAK	PORPROV	KARATE	EMAS
		PORPROV	KARATE	PERAK
280	SATRIA WIRA DEWANTO	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
281	SATRIO MULYADI	POPDA	VOLI	EMAS
282	SELAMET APRIYANTO	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
283	SHOLIKIN	PEPARPROV	ATLETIK	PERUNGGU
284	SITI AISYAH	PORPROV	HAPKIDO	PERUNGGU
285	SITI LESTARI	PORPROV	GULAT	EMAS
286	SITI MONALISA	POPDA	PENCAK SILAT	PERUNGGU
287	SITI RAHAYU	POPDA	PENCAK SILAT	PERUNGGU
288	SONI MARKUS	POPDA	VOLI	EMAS
289	STEVANI VANESIA DARMAWAN	POPDA	TINJU	PERUNGGU
		PORPROV	TINJU	PERUNGGU
290	SUPIANOR	PESONAS	VOLI	EMAS
291	SURYA HADI SAPUTRA	PORPROV	SILAT	PERUNGGU
		PESONAS	BADMINTON	EMAS
292	SUWANDI	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS,PERAK
293	SYAHRUL RAMADHAN	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
294	SYAIFUL BAHRI	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS
295	TAIBAH	PORPROV	KEMPO	PERAK

296	TAQDIR HERO WASKITO	PORPROV	HAPKIDO	PERAK
297	TAUFIK RAHMAN	PORPROV	HAPKIDO	PERAK
298	TAUPIKURAHMAN	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
299	TEDDY	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
300	TEJA HANDOKO	PORPROV	TAKRAW	PERUNGGU
301	THOYYIBAH	PORPROV	KEMPO	EMAS
		PORPROV	KEMPO	EMAS
302	TIGOR ROBERT	PORPROV	KARATE	PERUNGGU
303	TIYA JULIANA	PORPROV	JUDO	PERAK
304	TONY KUNCAHYOHADI	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
305	TRI UNTARI	PEPARPROV	BULU TANGKIS	PERUNGGU
306	TRIO TONDO PRASETYO	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
307	TUTUT HASTUTI	PORPROV	KARATE	EMAS
		PORPROV	KARATE	PERAK
308	VINA	PORPROV	IODI	PERUNGGU
		PORPROV	IODI	PERAK
309	WAHYUDI NUR	PORPROV	HAPKIDO	EMAS
310	WINDA SAPUTRI	PORPROV	KARATE	PERAK
311	WULAN DESTIYA FITRI	PORPROV	PETANQUE	EMAS
312	ZAINAL AKLI	PORPROV	VOLI	PERAK
313	FEBRIANDY RANGGA	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
314	SUPRIYANTO	PEPARPROV	ANGKAT BBERAT	EMAS
315	NAYLA SAFINA	PORPROV	BRIDGE	EMAS
		PORPROV	BRIDGE	PERUNGGU

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut

Sebagai bahan pembanding, berikut disajikan daftar jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi dan medali yang diperoleh Tahun 2021.

Tabel 3.1.20

Daftar Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Medali yang diperoleh Tahun 2021

NO	NAMA	KEJUARAAN DAERAH	CABOR	MENDALI
----	------	------------------	-------	---------



1	ADITYA PUTRA	POPDA	ATLETIK	PERAK
2	AGUNG DWI S	PORDA SOINA KALSEL	ATLETIK	PERUNGGU
3	AHMAD RAIHAN	PORDA SOINA KALSEL	VOLI PUTRA	EMAS
4	AHMAD ABDUL AZIZ	POPDA	VOLI PASIR	PERAK
5	AHMAD ALVIN NIZAR	PORDA SOINA KALSEL	FUTSAL PUTRA	EMAS
6	AHMAD FARDANI. L	POPDA	JUDO	EMAS
7	AHMAD NAJIB KHAIRI	POPDA	KEMPO	PERAK
8	AKBAR NANDANG MAULANA	POPDA	GULAT	PERAK
9	AKHMAD RAMADHAN	PORDA SOINA KALSEL	VOLI PUTRA	EMAS
10	AKHMAD SALMANI	POPDA	GULAT	PERAK
11	ALDI RANGGA SAPUTRA	POPDA	KEMPO	EMAS
12	ALFIANOOR	POPDA	ATLETIK	PERAK
13	ALYA RAFTIANA PUTRI	POPDA	PANAHAN	PERUNGGU
14	ANDIKA BAGUS P	POPDA	KEMPO	EMAS
15	ANISA MERCHAYA R J	POPDA	TAEKWONDO	PERAK
16	ANNISA RAMADHANI	POPDA	KARATE	PERUNGGU
17	APRILIANI	POPDA	ATLETIK	PERAK
18	ARDA CAHYONO	POPDA	KEMPO	EMAS
19	ARIFIN ILHAM	POPDA	GULAT	PERAK
20	ARISTA KURNIA DEWI	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRI	EMAS
21	ARUM MUSTIKA DEWI	POPDA	JUDO	EMAS
22	ATIM SIAMI	POPDA	GULAT	EMAS
23	AULIA	PORDA SOINA KALSEL	BASKET PUTRA	PERUNGGU
24	BARIYAH	PORDA SOINA KALSEL	BASKET PUTRA	PERUNGGU
		PORDA SOINA KALSEL	FUTSAL PUTRI	EMAS



25	BELLA PUSPITA	PORDA SOINA KALSEL	BASKET PUTRA	PERUNGGU
26	BRIAN DARMAWAN	POPDA	TAEKWONDO	PERUNGGU
27	CITRA CHELSY OLIVIA	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRI	EMAS
28	DARSIAH	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRI	EMAS
29	DELA LUTHFIAH	POPDA	KARATE	PERAK
30	DESI	PON	KEMPO	PERAK
31	DESI KARTIKA SARI	POPDA	GULAT	PERUNGGU
32	DHEA AMALIA DINI	POPDA	KEMPO	EMAS
33	DIANDRA PARAMITHA	POPDA	RENANG	EMAS
34	DWI ANGGRAINI	PORDA SOINA KALSEL	FUTSAL PUTRI	EMAS
35	DWI ANGGREANI SAPUTRI	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRI	EMAS
36	DWI APRILIYANTO	POPDA	TAEKWONDO	PERAK
37	DWI SUCI RAMADHANI	POPDA	RENANG	EMAS,PERAK
38	DWI YULIANI	POPDA	ATLETIK	PERUNGGU
39	ENDANG	PORDA SOINA KALSEL	FUTSAL PUTRI	EMAS
40	ERVINA	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRI	EMAS
41	FAATIH MUHAMMAD AKMAL	POPDA	RENANG	EMAS
42	FAHRIANSYAH	PORDA SOINA KALSEL	FUTSAL PUTRA	EMAS
43	FATHULLAH SYURURI	POPDA	KEMPO	PERAK
44	FAUZIAH	POPDA	KEMPO	PERAK
45	FERDIAN FATHUR ROHMAN	PORDA SOINA KALSEL	VOLI PUTRA	EMAS
46	FITRI RAHMAYANTI	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRI	EMAS
47	FITRIA RAMADHINI	POPDA	TINJU	PERUNGGU
48	HAIRIL FADILAH	POPDA	GULAT	PERAK
49	HANISA MAYRANI	PORDA SOINA KALSEL	BASKET PUTRA	PERUNGGU



50	HASAN	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRA	PERUNGGU
51	HASNA ANNISA	POPDA	TINJU	EMAS
52	IBERAHIM	PEPARNAS	CATUR	EMAS
		PEPARNAS	CATUR	PERUNGGU
53	IRENA IIS SHOFIA MAHARANI	POPDA	TAEKWONDO	PERAK
54	JELITA	POPDA	KEMPO	EMAS
55	JUANDA HUSAINI	POPDA	GULAT	EMAS
56	KHAIRUNNISA	POPDA	ATLETIK	EMAS
57	M. ADRIANSYAH	POPDA	ATLETIK	EMAS
58	M. AMIRUL RIDHANI ABDUL AZIZ	POPDA	TINJU	EMAS
59	M. ARDI	PORDA SOINA KALSEL	RENANG	PERUNGGU
60	M. GILANG RAMADHAN	PORDA SOINA KALSEL	VOLI PUTRA	EMAS
61	M. HARTONI	POPDA	GULAT	PERUNGGU
62	M. IHSAN	PORDA SOINA KALSEL	RENANG	PERUNGGU
63	M. JAELANI	PORDA SOINA KALSEL	ATLETIK	EMAS
64	M. RASYIDI	PORDA SOINA KALSEL	FUTSAL PUTRA	EMAS
65	M. RIDHONI	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRA	PERUNGGU
66	M. RIQI AL FARIZ	POPDA	GULAT	PERUNGGU
67	M. SURYADI SAPUTRA	POPDA	JUDO	EMAS
68	M.GILANG RAMADHAN	PORDA SOINA KALSEL	BULU TANGKIS	PERAK
69	MAHENDRA	PORDA SOINA KALSEL	FUTSAL PUTRA	EMAS
70	MALASARI	PORDA SOINA KALSEL	FUTSAL PUTRI	EMAS
71	MASJIDI	PORDA SOINA KALSEL	BULU TANGKIS	PERUNGGU
72	MELDA	POPDA	VOLI PASIR	PERAK



73	MELITA YOGI PRATAMA	POPDA	GULAT	EMAS
74	MOHAMAT APRIYANTO	PORDA SOINA KALSEL	ATLETIK	EMAS
75	MUDIANTO	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRA	PERUNGGU
76	MUHAMAD RAMADENDY	POPDA	TAEKWONDO	EMAS
77	MUHAMMAD ARDY	POPDA	GULAT	PERAK
78	MUHAMMAD BAITUL RIDHO	POPDA	KARATE	PERUNGGU
79	MUHAMMAD FAHRIZA	POPDA	GULAT	PERAK
80	MUHAMMAD HAFIZ SETIAWAN	POPDA	RENANG	EMAS
81	MUHAMMAD HAPIJI	PON	SILAT	PERAK
82	MUHAMMAD IHSAN	PORDA SOINA KALSEL	FUTSAL PUTRA	EMAS
		PEPARNAS	ATLETIK	PERUNGGU
83	MUHAMMAD IHSAN RIDWAN	POPDA	GULAT	PERUNGGU
84	MUHAMMAD JAILANI	PORDA SOINA KALSEL	TENIS MEJA	PERUNGGU
85	MUHAMMAD RAMADHAN	POPDA	ATLETIK	EMAS
86	MUHAMMAD RIYAN SAPUTRA	POPDA	KEMPO	PERUNGGU
87	MUHAMMAD SATRIO AIRLANGGA	POPDA	GULAT	PERUNGGU
88	NABILA A'ATIFA RAMADHANI	POPDA	RENANG	EMAS,PERUNGGU
89	NADIA LISMAYA PUTRI	POPDA	GULAT	PERUNGGU
90	NAJIB ALLAUDIN	POPDA	TINJU	PERAK
91	NAZWA DESTINA S	POPDA	KEMPO	EMAS
92	NIK'MAH SA'ADAH	POPDA	KEMPO	PERAK
93	NITA APRILIYANTI	PORDA SOINA KALSEL	TENIS MEJA	EMAS
94	NOR CHASANAH	PORDA SOINA KALSEL	FUTSAL PUTRI	EMAS

95	NUR KHOLIK	PORDA SOINA KALSEL	ATLETIK	EMAS
96	NURDIN	PORDA SOINA KALSEL	BULU TANGKIS	EMAS
		PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRA	PERUNGGU
97	OKTAVIA GIANDA	POPDA	VOLI PASIR	PERAK
98	PHARAS GUNTUR NASTIAR	POPDA	VOLI PASIR	PERAK
	RAHMATULLAH	POPDA	ATLETIK	EMAS
100	RAMANDA OKTAVIA	POPDA	JUDO	PERAK
101	RAYYA NOUVALIA	POPDA	KEMPO	PERAK
102	RESHA ARTA DWI GUNA	POPDA	KARATE	PERAK
103	REVOL MARDIAN	POPDA	TINJU	EMAS
104	RISKY AL-FARISI	PORDA SOINA KALSEL	BOCCE	PERAK
105	RISKY HIDAYAT	PORDA SOINA KALSEL	FUTSAL PUTRA	EMAS
106	RISWAN	POPDA	GULAT	PERUNGGU
107	ROVAN RAKHA ADINATA	POPDA	RENANG	EMAS
108	SAIBUL BAHRI	PORDA SOINA KALSEL	VOLI PUTRA	EMAS
109	SALAMIAH	PORDA SOINA KALSEL	ATLETIK	PERUNGGU
		PORDA SOINA KALSEL	FUTSAL PUTRI	EMAS
110	SANTI TRIYANI	POPDA	TINJU	EMAS
111	SANTUSU	PORDA SOINA KALSEL	BOCCE	EMAS
112	SARAH NABILLA R. SIMANJUNTAK	POPDA	KARATE	PERAK
113	SAYUTI AYUB	POPDA	KEMPO	PERAK
114	SHINDO PURNADI	POPDA	RENANG	EMAS,PERAK
115	SUPIANOR	PORDA SOINA KALSEL	VOLI PUTRA	EMAS

116	SUPRIYANTO	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRA	PERUNGGU
117	SURYA HADI SAPUTRA	POPDA	ATLETIK	PERAK
118	SURYA PANDYANATHA	PORDA SOINA KALSEL	BASKET PUTRA	PERUNGGU
119	SUSANTI	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRI	PERUNGGU
120	SUWAHYUDIN PRASETRO N.	POPDA	JUDO	EMAS
121	TASYA ARIANI	POPDA	TINJU	PERUNGGU
122	TIYA JULIANA	POPDA	JUDO	PERUNGGU
123	TRI KUNTARI	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRA	PERUNGGU
124	WENDI ALFIAN	POPDA	JUDO	EMAS
125	YANTO	PORDA SOINA KALSEL	BOLA TANGAN PUTRA	PERUNGGU
126	ZAHRA NUR AISYAH	POPDA	TAEKWONDO	PERUNGGU
127	ZAHRO NUR AISYAH	POPDA	TAEKWONDO	EMAS
128	ZAINAL AQLY	POPDA	RENANG	EMAS

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan atlet berprestasi selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan lapangan Sepak Bola di Desa Sei Rasau Kecamatan Bumi Makmur.
2. Mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Nasional.
3. Melaksanakan kejuaraan daerah/provinsi
4. Pelatihan pelatih/wasit dan juri olahraga
5. Pengawasan dan pendampingan pemusatan latihan
6. Kegiatan olah raga prestasi, tradisional dan rekreasi.
7. Pemberian penghargaan berupa bonus kepada atlet berprestasi dan pelatih untuk atlet berprestasi.

Gambar 3.1.2
Pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi



Rencana aksi ke depan untuk terus meningkatkan jumlah atlet yang berprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Lebih meningkatkan prestasi yang dicapai melalui semua cabang olahraga
- 2) Dilaksanakannya pemusatan latihan atlet yang lebih intensif
- 3) Terlaksananya Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Cabang Olahraga Unggulan
- 4) Melaksanakan kejuaraan daerah, provinsi dan nasional
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
- 6) mewujudkan masyarakat sehat melalui olahraga
- 7) Peningkatan Kapasitas pelatih/wasit/juri olahraga lisensi nasional
- 8) Pemanduan bakat olahraga/seleksi atlet usia dini
- 9) Pemusatan dan pengawasan pendampingan

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 49 ASN pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta 122 ASN pada Dinas



Pendidikan dan Kebudayaan dan di dukung oleh 7 Program dengan Pagu Rp. 16,349,180,758.00 dan terealisasi Rp. 16,248,831,507.00 atau sebesar 99.39%.

Tabel 3.1.21
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengembangan Kebudayaan	45,999,034,00	40.242.900,00
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1,335,927,973,00	1.243.816.255,00
3	Program Pembinaan Sejarah	341,750,110,00	301.913.158,00
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	248,544,967,00	217.435.800,00
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,559,026,019,00	1.414.903.353,00
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12,142,932,655,00	12,616,311,041
7	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	675,000,000,00	414,209,000
Jumlah		16,349,180,758.00	16,248,831,507.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 5

Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.22
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											100%

Tabel 3.1.23
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD	%	100	100	100%	100	100%

Realisasi indikator Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD di tahun 2022 adalah 100%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan tingkat capaian 100%. Capaian 100% diperoleh dari tahun 2019 sampai dengan 2022.

Tugas Pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui inovasi inovasi baru salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan. Banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa SKPD telah menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya Disdukpencaipil, DPMPTSP, BKPSDM, Dinas Kesehatan UPTD RSUD. Hadji Boejasin, Dinas Perhubungan, Kecamatan panyipatan, Kelurahan Angsau, Kelurahan Pabahanan dll. Berikut disajikan aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Tanah Laut.

Seluruh SKPD di atas telah melakukan pelayanan berbasis elektronik, sebagai contoh disajikan data jumlah pelayan berbasis teknologi informasi yang diberikan oleh DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.1.24
Jumlah Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Diberikan Oleh DPMPTSP

NO	URAIAN			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
				JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN
1.	TDP			615	582	589				
		*	PERORANGAN				449			
		*	CV				141			
		*	PT				60			
		*	KOPERASI				8			
		*	LAINNYA				2			
2.	SIUP			586	591	586	672	578	154	
3.	TANDA DAPTAH INDUSTRI/IUI			15	42	9	3	4		
4.	TDG (Tanda Daftar Gudang)						2	2	3	
4.	IJIN GANGGUAN HO (Izin Lingkungan Limbah B3 & Cair)			232	113	56			15	
		*	IZIN LINGKUNGAN				22			
		*	IZIN LIMBAH B3				22			
		*	IZIN LIMBAH CAIR				17			
5.	IMB/PBG			216	216	185	225	225	121	122
6.	SIUJK			86	88	108	74	39	20 (sampai april, selanjutn ya OSS)	
7.	IJIN USAHA PERKEBUNAN			6	3			1	1	
8.	IJIN USAHA HUBURAN UMUM			15	14		6		0	
9.	IJIN PEMBUKAAN KOPERASI						1			
10.	IJIN KOPERASI SIMPAN PINJAM						1	2		
11.	IJIN RENTAL PLAYSTATION/GAME									
12.	IJIN REKLAME			132	149	129	117	137	134	119



13	IJIN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET							
14	IJIN USAHA PERIKANAN (Pencatatan Kapal Perikanan)	14	44	36	47	45	91	39
15	IJIN PENANGKAPAN IKAN	24						
16	IJIN USAHA TOKO MODERN		12	7	10	8	14	14
17	IJIN KETERANGAN TEMPAT USAHA	1220	1,238	1247				
	* PERORANGAN				770			
	* CV				380			
	* PT				213			
18	IJIN USAHA PETERNAKAN		7		2	5	2	5
19	IJIN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT	2						
20	IJIN PENGGILINGAN PADI.	4	5	1	2	5	2	
21	IJIN PENUMPUKAN BAHAN BAKAR MINYAK / BBM	3	9	9	8		provinsi	
22	IJIN PRAKTEK DOKTER HEWAN		1		2	3	0	2
23	IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS		3		3			
24	IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T)					6		
25.	IJIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN							
26.	JASA KEPARIWISATAAN (TDUP)		23	6	6	7	2	
27.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	3	41	20	25	8	3	
28.	IZIN RUMAH SAKIT DAN RUMAH SAKIT BERSALIN SWASTA			2				
29.	IZIN KLINIK SWASTA	4		5				
30.	IZIN KLINIK PERUSAHAAN							
31.	IZIN APOTEK	6	3	8	5	5	11	4
32.	IZIN TOKO OBAT	1	2	2	2	1	2	
33	IZIN KURSUS	9		1	-	6	2	
34	IZIN KEPARIWISATAAN	5	4	7		7		
35	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP)			131	253	118	237	307
36	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEHNIS KEFARMASIAN			33	40	33	56	40
37	SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER			5	15	10	36	40
38	SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI DAN MULUT			3	8	11	16	29
39	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM				5	31		183
40	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS				4	36		
41	SURAT IZIN PRAKTEK KESEHATAN MASYARAKAT				2	3		
42	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN				2	70	224	233
43	IZIN OPERASIONAL KLINIK			5	4	4	4	1



44	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT			3	2		1	
45	IZIN PENYELENGGARA OPTIKAL			1				
46	SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA				29	52	22	61
47	IZIN LPK			1	1	3	1	
48	SURAT KETERANGAN TATA RUANG			12	95	89	79	105
49	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH / PKPPT				5	16	24	18
50	IZIN LOKASI				11	11	12	
51	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS						2	2
52	IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA						1	
53	IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK						43	63
54	IZIN PRAKTEK PSIKOLOGI KLINIS						2	1
55	IZIN PRAKTEK PENATA ANESTESI						3	2
56	IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI						12	16
57	IZIN PRAKTEK TENAGA SANITARIAN						1	
58	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI						15	10
59	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS						1	1
60	SURAT IZIN KERJA SANITARIAN						18	35
61	SURAT IZIN KERJA PROMOTOR KESEHATAN						11	13
62	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS						2	2
63	SURAT IZIN KERJA TENAGA REKAM MEDIS						10	14
64	SURAT IZIN KERJA RADIOLOGI						6	5
65	SURAT IZIN KERJA TENAGA OKUPASI TERAPI						1	1
66	IZIN PENELITIAN						71	141
67	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE DEPO AIR MINUM						4	1
68	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASA BOGA						1	1
69	SKB							
	• PERORANGAN						602	509
	• CV						289	183
	• PT						176	132
	• BADAN USAHA LAIN						0	
70	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL						1	1
71	IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG							3
72	IZIN HIBURAN							3
73	SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD							91



74	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA PROMOTOR KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU							13
75	SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA							2
76	SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS							1
Jumlah		3.198	3.148	3.207	3.773	3.409	2.882	2.568

Sumber : DPMPTSP Kab. Tanah Laut

Seluruh permohonan pelayanan yang masuk ke DPMPTSP baik itu secara langsung maupun elektronik harus melalui aplikasi Apperindu (Aplikasi Perizinan Terpadu) agar tidak terjadi pemalsuan perizinan (perizinan bodong).

Tabel 3.1.25

Jumlah Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Diberikan Oleh Disdukcapil Tahun 2022

No	JUMLAH PERMOHONAN				JUMLAH	
	APLIKASI SILAKAS		WHATSAPP			
	DITERIMA	DITOLAK	DITERIMA	DITOLAK	DITERIMA	DITOLAK
1	4.888	821	6.939	82	11.827	903

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

Tabel 3.1.26

Jumlah Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Diberikan Oleh Disdukcapil Tahun 2021

No	JUMLAH PERMOHONAN				JUMLAH	
	APLIKASI SILAKAS		WHATSAPP			
	DITERIMA	DITOLAK	DITERIMA	DITOLAK	DITERIMA	DITOLAK
1	12.833	6.943	13.774	912	26.607	7.855

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

Seluruh permohonan pelayanan yang masuk ke Disdukcapil diverifikasi oleh petugas. Apabila data dukung yang diberikan lengkap maka permohonan akan segera diproses dan diselesaikan. Untuk permohonan yang data dukungnya tidak lengkap maka permohonan akan ditolak dan disarankan untuk melakukan permohonan ulang dengan melengkapi seluruh data dukung yang dipersyaratkan.

Untuk pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh BKPSDM kepada seluruh PNS diantaranya yaitu Simpeg, E-SKP, SIDIKA, My SAPK, SIMPONI, aplikasi-

aplikasi tersebut telah dimanfaatkan oleh seluruh PNS yaitu berjumlah 4765 orang telah mengakses dan menggunakannya.

Selain itu pada DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengaplikasikan penggunaan Tanda Tangan Digital (*digital signature*) sehingga lebih mempercepat proses pelayanan di Kabupaten Tanah Laut.

Berikut disajikan data layanan yang berbasis elektronik pada SKPD lain, diantaranya yaitu :

Tabel 3.1.27
Data Layanan Berbasis Elektronik

NO	SKPD	Jenis Layanan Berbasis Elektronik	Permohonan Pelayanan			Penjelasan Singkat
			Jumlah Seluruh Permohonan	Diterima/ Aktif	Ditolak/ Tidak Aktif	
1	SETDA	PERMOHONAN AKUN SOSIALITA (Akun PPK, PEMBANTU PPK, PP, BENDAHARA INSTANSI)	142	134	8	Permohonan layanan melalui website Portal UKPBJ Tala (https://ukpbj.tanahlautkab.go.id/permohonan) untuk layanan permohonan akun pengguna sosialita untuk instansi lingkup tanah laut agar dapat Bertransaksi dengan Penyedia di SOSIALITA
		PERMOHONAN AKUN PENYEDIA SOSIALITA	437	235	202	Untuk menjadi penyedia di SOSIALITA Maka calon Penyedia mendaftar melalui website (https://sosialita.tanahlautkab.go.id/) kemudian akan diverifikasi oleh admin verifikasi penyedia sosialita apakah data dan dokumen sdh memenuhi persyaratan atau tidak, yang memenuhi persyaratan akan di aktifkan dan yang belum memenuhi akun tidak aktif.
		PERMOHONAN AKUN SPSE (Akun PA, PPK dan PP)	56	52	4	Permohonan layanan melalui website Portal UKPBJ Tala (https://ukpbj.tanahlautkab.go.id/permohonan) untuk layanan permohonan akun SPSE untuk instansi lingkup tanah laut agar dapat melaksanakan proses mulai dari perencanaan pengadaan barang/jasa sampai pada pelaksanaan pengadaan melalui Akun PA, PPK dan PP yang telah ditetapkan oleh Pemangku Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan, permohonan yang memenuhi syarat akan dibuatkan atau update data serta di aktifkan oleh admin agency pada web (https://lpse.tanahlautkab.go.id/eproc4/)



2	DISPUS IP	Inlistlite	2422	2422	0	<p>ENLIS LITE merupakan rangkaian modul sistem perpustakaan yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Modul untuk digunakan oleh USER dan modul untuk ADMINISTRASI. Pengertian user adalah orang atau petugas perpustakaan yang bertugas mengelola data perpustakaan sementara Administrasi adalah petugas yang membantu user memelihara sistem dari sisi administrasi seperti pendaftaran user ke dalam sistem, konfigurasi setting pada aplikasi dan lain-lain. Semua ini akan dibahas satu per satu pada sub-sub bahasan pada dokumen ini Dimana Semua Buku yang ada di perpustakaan abik itu dari belanja modal maupun hibah masuk kedalam apalikasi ini, dan juga mendaftar sebagai anggota perpustakaan di mana nanti user maupun pegguna cukup meperlihatakan ktp, kepada petugas langsung di buatkan kartu sebagai pendaftar segai anggota diman mudah unytuk meminjam buku,</p> <p>Cara buat meminjam buku iya lah akan di sediakan computer lalu di isi judul buku yang di inginkan lalu operator (petugas0 akan mengarahkan ke rak sesuai dengan kategorinya lalu petugas mengisi data kita dengan lengkap dengan menyerahkan kartu anggota pepustakaan yang kita buat tadi lalu setelah selesai nanti nanti petugas akan memperivikasinya berapa lama buku tersebut ingin kita pinjam maksimal biasanya kurang lebih 2 minggu</p>
		Sistem Informasi Pembinaan Perpustakaan	256	256	0	<p>Aplikasi Ini Bertujuan untuk pembinaan di desa di mana terdiri dari 2 Peguna yaitu user (petugas Sekolah) dan admin (operator Dinas Perpustakaan) apa bila ada perpustakaan desa atau pun sekolah yang ingin mendaftar maka bisa usul lewat aplikasi tersebut dimana operator nanti akan menyurpei kesekolah tersebut nanti setelah di setujuai maka proses pembuatan akun selesai terus operator sekolah mengisi data seperti, jumlah buku, spesifikasi buku, jumlah kursi, meja, jumlah pustakawanya maupun pendukung yang berkaitan dengan fasilitas perpustakaan sekolah atau perpustakaan desa, baik itu dari kelayakan nya layak atau tidak sedangkan tugas dari operator dinas perpustakaan memonitor tanpa perlu terju kelapangan bagaimana jumlah kelayakan perpustakaan yang ada di daerah tanah laut ini baik itu berupa jumlah buku di desa atau pun di sekolah-sekolah buat memudahkan operator perpustakaan untuk melaporkan akhir tahun.</p>



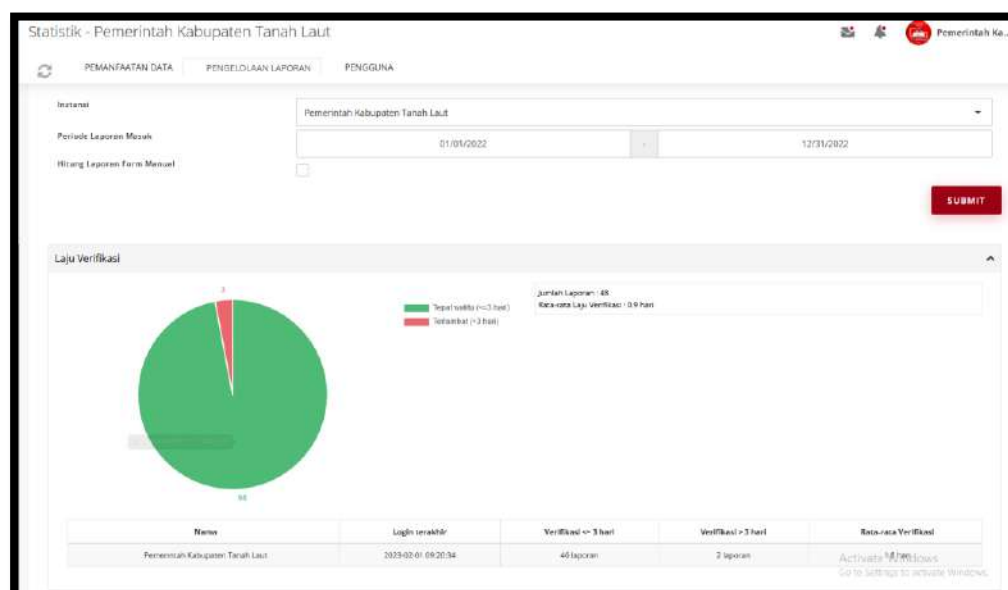
3	BPKAD	Penerbitan Pengantar Perpanjangan STNK/administrasi kendaraan dinas ke Samsat/Polda	1286	1286	-	Semua usulan peperangan STNK (pajak kendaraan bermotor) yang masuk melalui SIM-PKB diverifikasi admin bidang. Apabila data dukung yang diberikan lengkap maka permohonan akan segera diproses dan diselesaikan.
		Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) UP, GU, LS, TU	9354	9354	-	Semua usulan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui aplikasi SIPD diverifikasi kelengkapannya oleh admin bidang. Apabila data dukung yang diberikan lengkap maka permohonan akan segera diproses dan diselesaikan.
		Penerbitan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) Pensiun, Pindah, Diberhentikan, Mengundurkan Diri, Mati Bujang, Habis Kontrak	252	252	-	Semua usulan penerbitan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) melalui aplikasi SIM-GAJI diverifikasi kelengkapannya oleh admin bidang. Apabila data dukung yang diberikan lengkap maka permohonan akan segera diproses dan diselesaikan.

4	BKPSDM	SIMFONI	5.085	5.085	-	<p>Aplikasi simfoni dibuat pada tahun 2020 dan mulai digunakan mulai Tahun 2021. Aplikasi ini digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepegawalan hanya melayani usulan kenaikan Pangkat.</p> <p>Pada Pertengahan Tahun 2021 Aplikasi Simfoni dikembangkan untuk berbagai pelayanan di BKPSDM Kab. Tala (usulan jabatan fungsional, Izin Belajar, Tugas Belajar, Diklat/Bimtek, Cuti, Karis Karsu, Kartu Taspen, Satya Lencana, Perbaikan Data PNS dan Ujian Dinas, serta untuk mengunduh semua berkas kepegawaian yang telah dikeluarkan BKPSDM.</p> <p>Pada tahun 2022 berinovasi memudahkan pemakai untuk mendapatkan informasi peraturan-peraturan, surat menyurat dan monitoring pelaksanaan proses kenaikan pangkat</p> <p>Tahun 2023 fitur-fitur ditambahkan untuk data jaga elektronik dan memudahkan memverifikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahunan seluruh ASN.</p> <p>Aplikasi simfoni memberikan solusi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel untuk seluruh ASN.</p>
---	--------	---------	-------	-------	---	---

Pada Tahun 2022 jumlah pengaduan yang masuk pada aplikasi LAPOR berjumlah 48 pengaduan, dengan ketepatan waktu verifikasi kurang dari 3 hari berjumlah 46 laporan dan verifikasi lebih dari 3 hari berjumlah 2 laporan. Seluruh laporan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui akun masing-masing SKPD.

Gambar 3.1.3

Statistik Aplikasi LAPOR Kab.Tanah Laut Tahun 2022



Langkah-langkah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dan SKPD terkait dalam rangka peningkatan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi dalam mendukung SKPD agar dapat menindaklanjuti seluruh permohonan pelayanan publik diantaranya:

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan-layanan apa saja dan oleh SKPD mana saja yang memberikan pelayanan berbasis elektronik.
- 2) Pengembangan *E-Government* melalui Penempatan Aplikasi Pelayanan Perizinan di Server Kominfo dan Pusat Data Nasional;
- 3) Tersedianya website seluruh SKPD dan aplikasi aplikasi penunjang pelayanan
- 4) Pengintegrasian seluruh website dan aplikasi di dalam portal resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diakses <https://portal.tanahlautkab.go.id>.
- 5) Pembuatan hosting dan virtual server yang bertujuan untuk kelancaran akses website dan aplikasi SKPD.
- 6) Sinkronisasi Data Kependudukan dengan data ketenagakerjaan dan untuk Pelayanan Puskesmas
- 7) Sinkronisasi Pemanfaatan data kependudukan dengan Aplikasi Perizinan Terpadu Secara Online.
- 8) Melaksanakan analisa jaringan intra pemerintah;

Dengan adanya upaya-upaya di atas maka, seluruh permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang diajukan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh SKPD. Namun masih terdapat Kendala-kendala yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

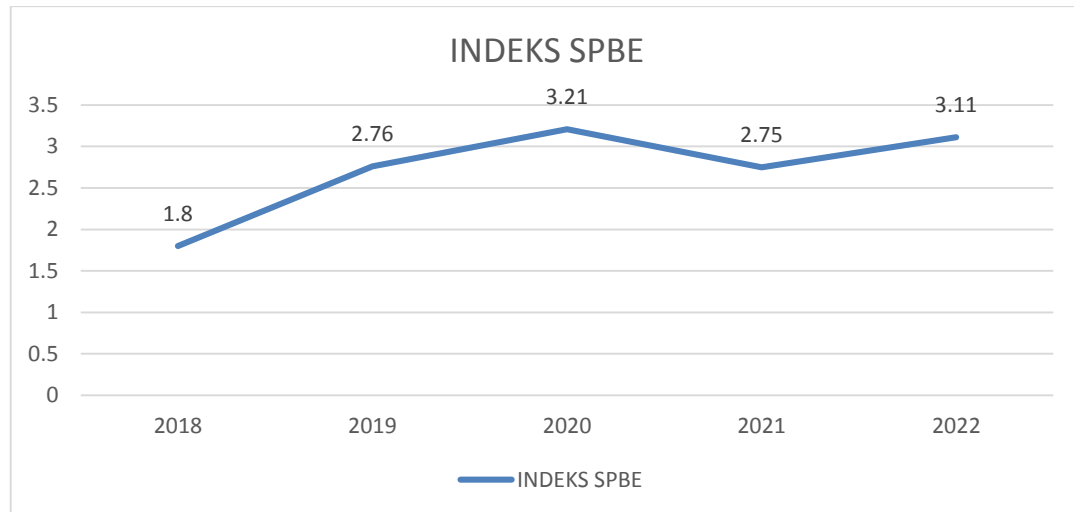
- 1) Masih belum terbiasanya masyarakat untuk menggunakan layanan secara elektronik terutama masyarakat yang masih minim terhadap teknologi informasi.
- 2) Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang inovasi-inovasi pelayanan yang tersedia.
- 3) Belum terintegrasi sepenuhnya seluruh Aplikasi layanan namun seluruh aplikasi secara terpusat sudah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 4) Masih susah nya jaringan internet di beberapa Kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Bajuin.

Rencana Aksi/Langkah-langkah ke depan dalam rangka peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi:

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, media cetak, radio dan lain-lain.
- 2) Penyempurnaan/penguatan system pengadaan secara elektronik;
- 3) Penguatan ruang Server Room dan Network Operation Center (NOC) Kabupaten dan menjalin Kerjasama dengan Pusat Data Nasional;
- 4) Pembangunan jaringan antar SKPD yang masih belum terhubung dengan jaringan intra pemerintah kabupaten;
- 5) Penyusunan revisi Peraturan Bupati tentang SPBE dan aplikasi daerah;
- 6) Pengembangan aplikasi daerah yang terintegrasi;
- 7) Pemanfaatan infrastruktur *E-Government* untuk penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektroink;
- 8) Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang teknologi informasi; dan
- 9) Penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi.
- 10) mengadakan pemeliharaan dan penambahan kecepatan kualitas jaringan internet

sebagai bentuk keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh Indeks SPBE pada Tahun 2022 yaitu 3,11 dengan predikat Baik. Nilai ini peningkatan dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2021 yaitu 2,75 dengan predikat Baik. Berikut disajikan Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022.

Grafik 3.1.8
 Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022



Dalam mencapai sasaran Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 60 ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Rp 5,473,511,131.00 dan terealisasi Rp. 5,225,329,995.00 atau sebesar 95.47%.

Tabel 3.1.28
 Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2,420,881,290,00	2.290.440.245,00
2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	49,971,151,00	37.293.750,00
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	49,805,090,00	47.370.000,00
4	Program Aplikasi Informatika	2,952,853,600,00	2.850.226.000,00
Jumlah		5,473,511,131.00	5,225,329,995.00

MISI II

Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 2 tujuan untuk misi II yaitu :

1. Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik.
2. Peningkatan inovasi di masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 2 indikator yaitu jumlah penghargaan inovasi publik dan jumlah industri kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian.

Tabel 3.2.1
Target indikator tujuan Tahun 2023

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	Penghargaan	1 Penghargaan
2	Peningkatan inovasi di masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Jumlah industri kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	Unit Usaha	25 Unit Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya inovasi pelayanan publik
2. Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 6**Meningkatnya inovasi pelayanan publik**

Meningkatnya inovasi pelayanan publik diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
 Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	inovasi	2	5	250%	2	6	300%	2	10	500%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											500 %

Tabel 3.2.3
 Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	inovasi	2	10	500%	2	500%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

Tujuan dari Inovasi Pelayanan Publik, yaitu:

- 1) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik;
- 2) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik;
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- 4) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Realisasi indikator jumlah inovasi yang didaftarkan di tahun 2022 pada KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada 2 (dua) Inovasi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2.4
Daftar Inovasi yang didaftarkan KIPP Tahun 2022

No	SKPD	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Silakas (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone)	2020	Layanan dokumen kependudukan melalui media digital berbasis android yang dapat didownload di playstore.
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Detak (Desa Tertib Administrasi Kependudukan)	2020	Layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke desa-desa untuk memberikan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga setiap warga desa tersebut memiliki dokumen kependudukan yang komplit untuk mewujudkan desa yang tertib administrasi kependudukan.

Pada tahun yang sama juga ada 10 (sepuluh) inovasi yang diikutsertakan pada *Innovative Government Award* (IGA) 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Inovasi yang didaftarkan itu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.5
Daftar Inovasi yang didaftarkan IGA Tahun 2022

No	SKPD		Nama Inovasi	Nilai Kematangan	Keterangan
1	Bagian PBJ Sekretariat Daerah		SOSIALITA (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut)	102.00	Sosialita adalah sistem order semua instansi lingkup Tanah laut untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan 50 juta. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD.
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	SIMFONI (Sistem Informasi Layanan Online)	93.00	Aplikasi yang dirancang sebagai solusi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
		2	SIDIKA (Sistem Informasi Dokumen Kepegawaian)	97.00	Aplikasi yang dibuat dalam rangka mewujudkan tertibnya penatalaksanaan arsip kepegawaian sehingga memberikan kemudahan dalam penyimpanan, pencarian arsip kepegawaian bagi ASN di Kab. Tala

3	Dinas Kesehatan		SIP OK (Survei Indikator PHBS Online oleh Kader)	97.00	Aplikasi berbasis <i>handphone</i> yang dapat digunakan baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses survei PHBS rumah tangga.
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1	Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup melalui nomor WA Pos Pengaduan DPRKPLH	66.00	Memberikan keleluasaan penyampaian pengaduan Lingkungan sebagai informasi awal melalui media Sosial Whatsap, IG, dan seluler Pengaduan DPRKPLH.
		2	LAMPU PJU (Layanan Masyarakat Pengaduan Lampu Penerangan Jalan Umum)	68.00	Sistem teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi whatsapp yg sdh terdapat di smartphone dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam pelaporan kerusakan dan gangguan pada lampu penerangan jalan umum.
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	SILAKAS (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone)	102.00	Layanan dokumen kependudukan melalui media digital berbasis android yang dapat didownload di playstore.
		2	DETAK (Desa Tertib Administrasi Kependudukan)	86.00	Layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke desa-desa untuk memberikan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga setiap warga desa tersebut memiliki dokumen kependudukan yang komplit untuk mewujudkan desa yang tertib administrasi kependudukan.
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		PUSPAGA (Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga)	57.00	Puspaga sebagai wadah untuk penyelesaian permasalahan keluarga termasuk tempat konsultasi terkait anak dengan lebih komprehensif dan dengan mengoptimalkan kehadiran Puspaga diharapkan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut bisa mempunyai ketahanan keluarga yang kuat dan utuh.
7	RSUD H. Boejasin		BISA (Boejasin Information System & Applications)	72.00	Aplikasi ini untuk mengakses informasi maupun layanan kesehatan di RSUD H. Boejasin Pelaihari. Aplikasi BISA dapat didownload di google playstore dengan menu pencarian "BISA BOEJASIN"

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen akan terus meningkatkan inovasi-inovasi di segala sendi kehidupan terutama inovasi dalam hal pelayanan publik. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Timbulnya kesadaran dari ASN untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.
- 2) Menciptakan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
- 3) Mempersingkat panjangnya birokrasi terutama dalam hal pelayanan publik

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan yaitu:

- 1) Setiap SKPD membuat inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut atau Keputusan Bupati Tanah Laut.

Dengan adanya inovasi SKPD, hal ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja perangkat daerah pada Tahun 2023, dimana ke depannya bagi SKPD yang telah memiliki inovasi maka akan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah itu sendiri dan akan mendapatkan *reward* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- 2) Melakukan pembinaan inovasi dalam kompetisi sehingga akan mendorong SKPD untuk memunculkan inovasinya lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan lebih baik dan berkualitas.
- 3) Menginventarisir inovasi-inovasi yang ada di SKPD, inovasi pada SKPD mana saja yang sudah memasuki 2 tahun pengimplementasiannya untuk diikutsertakan pada ajang KIPP tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berikut adalah perbandingan jumlah inovasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2020-2022.

Tabel 3.2.6

Perbandingan Jumlah Inovasi dari Tahun 2020-2022

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Inovasi SKPD	13	40	17

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dari Tahun 2020 s.d 2022, yaitu dengan total jumlah inovasi 70 inovasi. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Bupati Tanah Laut yang meminta kepada SKPD dan jajarannya agar terus dapat menciptakan inovasi-inovasi pada SKPD yang nantinya mempermudah dalam pelayanan publik.

Inovasi merupakan salah satu indikator sasaran dalam RPJMD dan penghargaan yang diterima adalah indikator tujuannya. Pada Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kabupaten Tanah Laut telah meraih predikat Pelayanan Prima (A) dengan nilai 4,53. Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2022 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, Kabupaten Tanah Laut memperoleh kategori B (kualitas tinggi) dengan nilai kepatuhan 86,61 zonasi Hijau.

Gambar 3.2.1

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Inovasi SKPD Tahun 2022



Dalam mencapai sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 3 ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan di dukung oleh 1 Program dengan Pagu Rp 987,671,625,670,00 dan terealisasi Rp. 858,101,394,365.92 atau sebesar 86.88%.

Tabel 3.2.7
 Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	987,671,625,670,00	858,101,394,365.92
Jumlah		987,671,625,670,00	858,101,394,365.92

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 7

Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian

Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2.8
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah industry kreatif yang tumbuh dan berkembang	unit	10	25	250%	15	103	686,67%	20	134	670%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022										670%	

Tabel 3.1.9
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Jumlah industry kreatif yang tumbuh dan berkembang	unit	20	134	670%	25	536%

Industri Kreatif adalah Kumpulan Aktivitas Ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri Kreatif juga dikenal dengan nama Ekonomi Kreatif. Menurut Kementerian Perdagangan, Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplotasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. ekonomi kreatif terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian dan pengembangan, perangkat lunak, mainan dan permainan, kuliner, televisi dan radio serta permainan video.

Sedangkan Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 64 tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan



bangunan tempat usaha. Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.

Realisasi indikator jumlah industri kreatif yang tumbuh dan berkembang di tahun 2022 adalah 134 unit, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 20 unit dengan tingkat capaian 670%. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 31 unit jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 103 unit.

Berikut disajikan jumlah industri kreatif yang tumbuh dan berkembang pada Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022.



Tabel 3.2.10
Jumlah IKM yang Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri
Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
1	IKM Langkar Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan	1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan	1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan
2	IKM Kunyit Sasirangan	Desa Kunyit, Kec. Bajuin	2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan	2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan	2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan
3	IKM Delima Sasirangan Kintap,	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
4	IKM Anyaman Pandan Swarangan	Desa Swarangan, Kec. Jorong	4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
5	IKM Anyaman Purun Telaga Langsat	Desa Telaga Langsat, Kec. Pelaihari	5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang	5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang	5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang
6	IKM Kerajinan Kayu Ulin Pelaihari	Pelaihari	6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari	6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari	6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari
7	IKM Kerajinan Kayu Ulin Panyipatan	Desa Kandungan Lama, Kec. Panyipatan	7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong	7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong	7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong
8	IKM Kerajinan Kayu Ulin Ds. Telaga	Desa Telaga, Kec. Pelaihari	8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
9	IKM Sasirangan Jorong	Desa Jorong, Kec. Jorong	9	IKM Karya Mulia <i>Creative</i> Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	9	IKM Karya Mulia <i>Creative</i> Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	9	IKM Karya Mulia <i>Creative</i> Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang



10	IKM Tenun Pelaihari	Desa Tebing Siring, Kec. Pelaihari	10	IKM Zidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	10	IKM Yazidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	10	IKM Yazidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
			11	IKM Amanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	11	IKM Almanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang			
			12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	11	IKM Almanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
			13	IKM El Banjarie Eksklusive	Pelaihari	13	IKM El Banjarie Eksklusive	Pelaihari	12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
			14	IKM Kerajinan Anyaman Purun "Bunga Purun"	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	14	IKM Kerajinan Anyaman Purun "Bunga Purun"	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	13	IKM El Banjarie Eksklusive	Pelaihari
			15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung	15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung	14	IKM Kerajinan Anyaman Purun "Bunga Purun"	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
			16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari	16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari	15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung
			17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin	17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin	16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari
			18	IKMRNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung	18	IKM Faeyza RNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung	17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin
			19	IKM Cisy Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	19	IKM Cisy Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	18	IKM Faeyza RNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung
			20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang	20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang	19	IKM Cisy Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
			21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang
			22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
			23	IKM Pondok Jahit	Pelaihari	23	IKM Pondok Jahit	Ds. Beramban, Kec. Pelaihari	22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari



			24	IKM Novie Konveksi	Pelaihari	24	IKM Novie Konveksi	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	23	IKM Pondok Jahit	Ds. Beramban, Kec. Pelaihari
			25	IKM <i>LuwesCollection</i>	Pelaihari	25	IKM <i>LuwesCollection</i>	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	24	IKM Novie Konveksi	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
						26	IKM Radita Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari	25	IKM <i>LuwesCollection</i>	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
						27	IKM Kambit Jaya Collection	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	26	IKM Radita Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari
						28	IKM KA'MCE Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari	27	IKM Kambit Jaya Collection	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
						29	IKM Bungas Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang	28	IKM KA'MCE Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari
						30	IKM HAYAART	Desa Tampang, Kec. Pelaihari	29	IKM Bungas Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang
						31	IKM Yeni Souvenir	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	30	IKM HAYAART	Desa Tampang, Kec. Pelaihari
						32	IKM Karya Mandiri Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	31	IKM Yeni Souvenir	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
						33	IKM Arthadeva Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	32	IKM Karya Mandiri Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
						34	IKM Ferariaputri Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang	33	IKM Arthadeva Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
						35	IKM Ari Collection	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	34	IKM Ferariaputri Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang
						36	IKM 3 Srikandi	Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap	35	IKM Ari Collection	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
						37	IKM Kunyit Sasirangan	Desa Kunyit, Kec. Bajuin	36	IKM 3 Srikandi	Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap



						38	IKM Blok D Sasirangan	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	37	IKM Kunyit Sasirangan	Desa Kunyit, Kec. Bajuin
						39	IKM Maswara Sasirangan	Desa Jorong, Kec. Jorong	38	IKM Blok D Sasirangan	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
						40	IKM MIMI Collection	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	39	IKM Maswara Sasirangan	Desa Jorong, Kec. Jorong
						41	IKM Penjahit Hafiz	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	40	IKM MIMI Collection	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
						42	IKM Berkah Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	41	IKM Penjahit Hafiz	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
						43	IKM Rumah Jahit Septia	Karang Jawa, Kec. Pelaihari	42	IKM Berkah Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin
						44	IKM Calap Baimbai	Desa Jorong, Kec. Jorong	43	IKM Rumah Jahit Septia	Karang Jawa, Kec. Pelaihari
						45	IKM Iyan Jahit	Pasar Tapandang Berseri, Kec. Pelaihari	44	IKM Calap Baimbai	Desa Jorong, Kec. Jorong
						46	IKM Sasirangan Markisa	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	45	IKM Iyan Jahit	Pasar Tapandang Berseri, Kec. Pelaihari
						47	IKM Comel Sasirangan	Desa Tebing Siring, Kec. Bajuin	46	IKM Sasirangan Markisa	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
						48	IKM Pondok Cobek	Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipatan	47	IKM Comel Sasirangan	Desa Tebing Siring, Kec. Bajuin
						49	IKM Pengolah Limbah Botol Plastik Jailani	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	48	IKM Pondok Cobek	Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipatan
						50	IKM Bunga Artifisial Sri Wulandari	Desa Ketapang, Kec. Bajuin	49	IKM Pengolah Limbah Botol Plastik Jailani	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
						51	IKM Miniatur Kapal by SKN	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	50	IKM Bunga Artifisial Sri Wulandari	Desa Ketapang, Kec. Bajuin



						52	IKM Kerajinan Paket Hantaran Shavana	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	51	IKM Miniatur Kapal by SKN	Desa Bajuin, Kec. Bajuin
						53	IKM Bunga Artifisial Esi Lukas	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	52	IKM Kerajinan Paket Hantaran Shavana	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
						54	IKM Gerah Polo Art Galery	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	53	IKM Bunga Artifisial Esi Lukas	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
						55	IKM Perbengkelan Makmur Berkarya	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	54	IKM Gerah Polo Art Galery	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
						56	IKM Kreanov POLITALA	Desa Panggung, Kec. Pelaihari	55	IKM Perbengkelan Makmur Berkarya	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
						57	IKM Hangit Craft	Desa Bingkulu, Kec. Tambang Ulang	56	IKM Kreanov POLITALA	Desa Panggung, Kec. Pelaihari
						58	IKM Perbengkelan Karya Bersama Teknologi	Desa Pandan Sari, Kec. Kintap	57	IKM Hangit Craft	Desa Bingkulu, Kec. Tambang Ulang
						59	IKM Perbengkelan Maju Jaya	Desa Asam Jaya, Kec. Jorong	58	IKM Perbengkelan Karya Bersama Teknologi	Desa Pandan Sari, Kec. Kintap
						60	IKM Perbengkelan Karya Gemilang	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung	59	IKM Perbengkelan Maju Jaya	Desa Asam Jaya, Kec. Jorong
						61	IKM NS Teknik	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	60	IKM Perbengkelan Karya Gemilang	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung
						62	IKM Perbengkelan SMR	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung	61	IKM NS Teknik	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
						63	IKM Perbengkelan Abdul Mu'thie	Desa Bentok Kampung, Kec. Bati-Bati	62	IKM Perbengkelan SMR	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung
						64	KUB Handil Maluka Jaya	Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur	63	IKM Perbengkelan Abdul Mu'thie	Desa Bentok Kampung, Kec. Bati-Bati



						65	IKM Al Makka Sasirangan	Desa Kayu Habang, Kec. Tambang Ulang	64	KUB Handil Maluka Jaya	Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur
						66	IKM Ainun Sasirangan	Desa Handil Babirik, Kec. Bumi Makmur	65	IKM Al Makka Sasirangan	Desa Kayu Habang, Kec. Tambang Ulang
						67	IKM Bintang Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati	66	IKM Ainun Sasirangan	Desa Handil Babirik, Kec. Bumi Makmur
						68	IKM Farid Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati	67	IKM Bintang Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati
						69	IKM Pondok Sasirangan	Ds. Gunung Raja, Kec. Bati - Bati	68	IKM Farid Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati
						70	IKM Keramat Handicraft	Ds. Takisung, Kec. Takisung	69	IKM Pondok Sasirangan	Ds. Gunung Raja, Kec. Bati - Bati
						71	IKM Zulfa & Yara Collection	Ds. Bentok Kampung, Kec. Takisung	70	IKM Keramat Handicraft	Ds. Takisung, Kec. Takisung
						72	IKM Salsabila Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung	71	IKM Zulfa & Yara Collection	Ds. Bentok Kampung, Kec. Takisung
						73	IKM Art Collection	Ds. Sumber Makmur, Kecamatan Takisung	72	IKM Salsabila Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung
						74	IKM Rossy Collection	Ds. Benua Lawas, Kecamatan Takisung	73	IKM Art Collection	Ds. Sumber Makmur, Kecamatan Takisung
						75	IKM Yeyen Shakila Collection	Kel. Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari	74	IKM Rossy Collection	Ds. Benua Lawas, Kecamatan Takisung
						76	IKM Windy Collection	Ds. Benua Tengah, Kecamatan Takisung	75	IKM Yeyen Shakila Collection	Kel. Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari
						77	IKM Neyney Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung	76	IKM Windy Collection	Ds. Benua Tengah, Kecamatan Takisung



						78	IKM N&K Collection	Ds. Takisung, Kec. Takisung	77	IKM Neyney Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung
						79	IKM Purajut	Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari	78	IKM N&K Collection	Ds. Takisung, Kec. Takisung
						80	IKM Makmur Jaya Lestari	Ds. Telaga Langsat, Kec. Takisung	79	IKM Purajut	Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari
						81	IKM Perbengkelan Jaya Lestari Teknik	Ds. Durian Bungkok, Kec. Batu Ampar	80	IKM Makmur Jaya Lestari	Ds. Telaga Langsat, Kec. Takisung
						82	IKM Sirajul Huda Konveksi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	81	IKM Perbengkelan Jaya Lestari Teknik	Ds. Durian Bungkok, Kec. Batu Ampar
						83	IKM BYHAF Minuman Herbal	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin	82	IKM Sirajul Huda Konveksi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
						84	IKM Susu Kurma DMM	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	83	IKM BYHAF Minuman Herbal	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin
						85	IKM BONZEE Food	Ds. Sungai Riam, Kec. Pelaihari	84	IKM Susu Kurma DMM	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
						86	IKM Keripik Naschips	Ds. Panggung, Kec. Pelaihari	85	IKM BONZEE Food	Ds. Sungai Riam, Kec. Pelaihari
						87	IKM Peyek PA HAJI	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	86	IKM Keripik Naschips	Ds. Panggung, Kec. Pelaihari
						88	IKM Kerupuk Karya Bersama	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	87	IKM Peyek PA HAJI	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
						89	IKM Kue Kering Sefhia	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	88	IKM Kerupuk Karya Bersama	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
						90	IKM Keripik AUDIT	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	89	IKM Kue Kering Sefhia	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
						91	IKM Sahabat Madu	Ds. Sumber Makmur, Kec. Takisung	90	IKM Keripik AUDIT	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari



						92	IKM Tahu Tempe RIDHO JAYA 88	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	91	IKM Madu Hasan Al Zahra	Ds. Ujung Batu, Kec. Pelaihari
						93	IKM Keripik Jamur SYYFA	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari	92	IKM Tahu Tempe RIDHO JAYA 88	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
						94	IKM Minuman Herbal YOGATAMA	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	93	IKM Keripik Jamur SYYFA	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari
						95	IKM Kerupuk Udang MAMA RIAN	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	94	IKM Minuman Herbal YOGATAMA	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
						96	IKM Keripik Jamur 3 Ardi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	95	IKM Kerupuk Udang MAMA RIAN	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
						97	IKM Kue Kering MB-LA	Ds. Liang Anggang, Kec. Bati - Bati	96	IKM Keripik Jamur 3 Ardi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
						98	IKM Kerupuk Amplang PINUS PERMAI	Ds. Batakan, Kec. Panyipatan	97	IKM Kue Kering MB- LA	Ds. Liang Anggang, Kec. Bati - Bati
						99	IKM RISMA Amplang	Ds. Takisung Kec. Takisung	98	IKM Kerupuk Amplang PINUS PERMAI	Ds. Batakan, Kec. Panyipatan
						100	IKM Kerupuk Duitri	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	99	IKM RISMA Amplang	Ds. Takisung Kec. Takisung
						101	IKM Susu Segar ROJO KOYO	Ds. Ambungan Kec. Pelaihari	100	IKM Kerupuk Duitri	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
						102	IKM Amplang OMEGA	Ds. Takisung, Kec. Takisung	101	IKM Susu Segar ROJO KOYO	Ds. Ambungan Kec. Pelaihari
						103	IKM Kerupuk Nyai Kasnah	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	102	IKM Amplang OMEGA	Ds. Takisung, Kec. Takisung
									103	IKM Kerupuk Nyai Kasnah	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
									104	Kelompok Sumber Rezeki Kerupuk Udang	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur



									105	Kelompok Kenanga Terasi	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
									106	Kelompok Berkah Mangrove Sirup dan Selai	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
									107	Kelompok Kayuh Baimbai Kerupuk Udang	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
									108	Kelompok Nelayan Membangun Ikan Asin	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
									109	IKM Mama Aisyah Pentol Ikan	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
									110	IKM Mama Zahro Pentol Ikan	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
									111	IKM Berkat Motekar	Ds. Pemuda, Kec. Pelaihari
									112	IKM Batu Balai	Ds. Batilai, Kec. Takisung
									113	IKM Kecap Kelulut	Ds. Gunung Melati, Kec. Batu Ampar
									114	IKM Minuman Herbal dan VCO Bu Kokom	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin
									115	IKM Kerupuk Haruan Acil Rapidah	Ds. Benua Raya Kec. Bati - Bati
									116	IKM Kerupuk Haruan Acil Rusmanina	Ds. Benua Raya Kec. Bati - Bati
									117	IKM Perbengkelan Maju Bersama	Ds. Tajau Pecah Kec. Batu Ampar
									118	IKM Kerupuk Udang Harapan Bersama	Jl. Pelabuhan Barat RT. 005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan



									119	IKM Kerupuk Parimata	Jl. Pelabuhan Barat RT. 005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
									120	IKM Kerupuk Seafood Lestari	Perumahan Putih RT.015/RW.001, Desa Batakan, Kec. Panyipatan
									121	IKM Alika Cake	Ds. Kintap Kecil, Kec. Kintap
									122	Bumdes Mandiri Sejahtera (Lahang)	Ds. Guntung Besar, Kec. Pelaihari
									123	IKM Kerupuk Pantai Indah	Jl. Pahlawan RT.007/RW.002, Desa Batakan, Kec. Panyipatan
									124	IKM Kerupuk Telur Asin	Jl. A. Yani KM. 28 RT.007 RW.002 Desa Pandahan, Kec. Bati-Bati
									125	IKM Kerupuk Budi Bersama	Jl. Pelabuhan RT.005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
									126	IKM Keripik Jaya Makmur	Gunung Melati RT.006/RW.002
									127	IKM Madu Kelulut Sakatalu	Jl. Goa Marmer RT.005/RW.002, Desa Sungai Bakar, Kec. Bajuin
									128	IKM Kerupuk Cinta Rasa	Jl. Datu Pamalutan RT.001/RW.001 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
									129	IKM Kerupuk Mercusuar	Jl. Datu Pamalutan RT.001/RW.001 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan



									130	IKM Kerupuk Pulau Datu	Jl. Pelabuhan Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
									131	IKM Kerupuk Karnita	Jl. Pariwisata RT.021/RW.011, Desa Batakan, Kec. Panyipatan
									132	IKM Kerupuk Mama Zidan	Jl. Muhara RT.002/RW.001, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
									133	IKM Radjamadu	Ds. Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang
									134	IKM Madu Gunung Katunun	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari

Pada tahun 2022 target pertumbuhan jumlah IKM yang mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri meningkat 31 IKM atau 30% dari total ungulan sebelumnya sebanyak 103 IKM, sebagaimana terinci pada tabel di atas.

Pertumbuhan IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri ini terjadi dikarenakan adanya pelatihan dan pembinaan intensif dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut baik yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab Tanah Laut maupun dari Pokir DPR RI. Di Tahun 2022, dana - dana kegiatan pembinaan IKM yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut belum sepenuhnya pulih. Oleh karenanya, sinergi kerjasama pembinaan IKM antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan demi eksistensi keberadaan dan keberlangsungan usaha IKM.

Selain dari data pelatihan, data pertumbuhan jumlah industri yang mengembangkan inovasi dan kreativitas juga didapatkan dari Kegiatan Pendataan IKM se Kabupaten tanah Laut yang dilakukan rutin setiap tahun. Adapun pada tahun 2022 terdata sebanyak 4719 IKM dengan sebaran data sebagai berikut :

Tabel 3.2.11
 Rekap data IKM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM 2022			
			Data Lama	Data Baru	Tutup/ Tidak Aktif	TOTAL
1	Bajuin	Bajuin	15	3	1	17
		Galam	21	8	1	28
		Ketapang	16	13	0	29
		Kunyt	27	7	0	34
		Pemalongan	14	0	0	14
		Sungai Bakar	9	41	1	49
		Tanjung	13	0	0	13
		Tebing Siring	17	0	0	17
		Tirta Jaya	20	8	0	28
2	Bati-Bati	Banyu Irang	43	13	3	53
		Bati-Bati	43	0	0	43
		Bentok Darat	27	33	3	57
		Bentok Kampung	25	0	0	25
		Benua Raya	15	0	0	15



		Kait-Kait	27	0	1	26
		Kait-Kait Baru	36	7	5	38
		Liang Anggang	59	16	3	72
		Nusa Indah	33	0	0	33
		Padang	31	12	4	39
		Pandahan	139	19	19	139
		Sambangan	17	0	0	17
		Ujung	53	12	22	43
		Ujung Baru	36	0	2	34
3	Batu Ampar	Ambawang	9	0	0	9
		Batu Ampar	24	22	9	37
		Bluru	20	0	0	20
		Damar Lima	15	0	2	13
		Damit	30	18	4	44
		Damit Hulu	17	19	6	30
		Durian Bungkok	49	3	0	52
		Gunung Mas	25	14	3	36
		Gunung Melati	19	0	1	18
		Jilatan	16	0	0	16
		Jilatan Alur	11	0	1	10
		Pantai Linuh	10	0	0	10
		Tajau Mulya	16	11	7	20
		Tajau Pecah	39	41	11	69
4	Bumi Makmur	Bumi Harapan	6	21	0	27
		Handil Babirik	17	45	3	59
		Handil Birayang Atas	13	0	0	13
		Handil Birayang Bawah	3	0	0	3
		Handil Gayam	10	63	0	73
		Handil Labuan Amas	10	0	0	10
		Handil Maluka	7	13	0	20
		Handil Suruk	11	20	0	31
		Kurau Utara	14	45	2	57
		Pantai Harapan	15	0	0	15
		Sungai Rasau	15	0	0	15
5	Jorong	Alur	20	0	0	20
		Asam Asam	21	0	3	18
		Asam Jaya	25	36	6	55
		Asri Mulya	11	9	4	16
		Batalang	4	0	0	4
		Jorong	36	5	14	27
		Karang Rejo	19	11	2	28

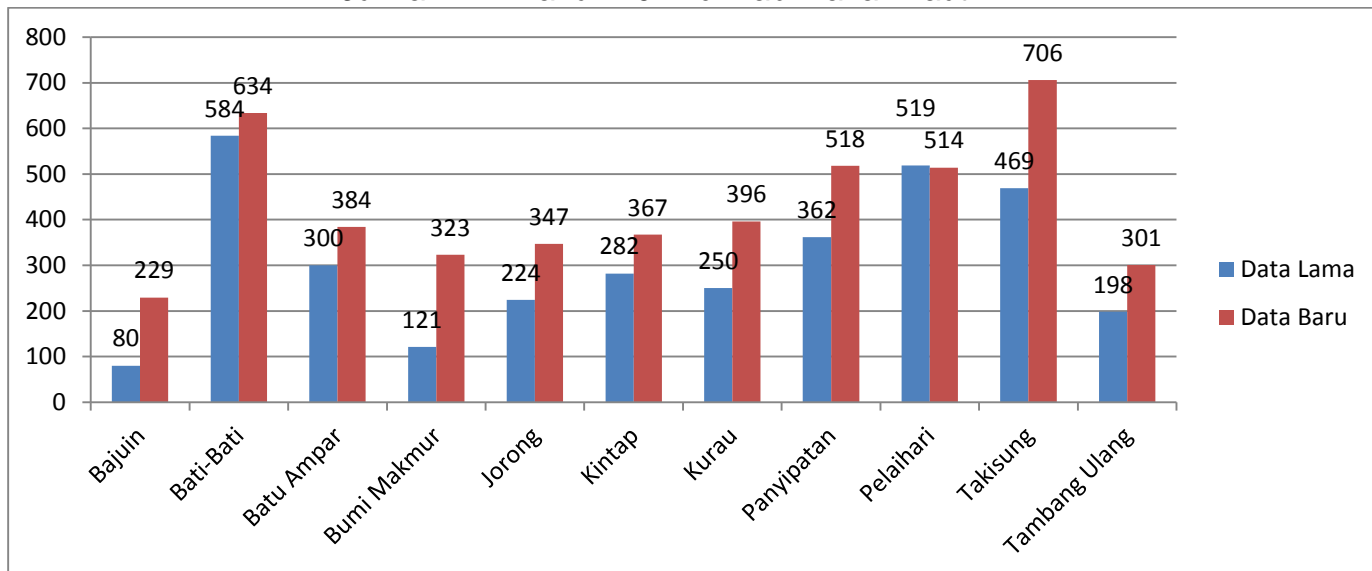


		Muara Asam Asam	18	0	1	17
		Sabuhur	17	63	2	78
		Simpang Empat Sungai Baru	33	35	4	64
		Swarangan	20	0	0	20
6	Kintap	Bukit Mulia	16	0	0	16
		Kebun Raya	38	0	2	36
		Kintap	28	0	0	28
		Kintap Kecil	42	0	2	40
		Kintapura	15	0	0	15
		Mekar Sari	21	0	0	21
		Muara Kintap	25	0	0	25
		Pandan Sari	22	21	0	43
		Pasir Putih	15	0	0	15
		Riam Adungan	4	0	0	4
		Salaman	5	0	0	5
		Sebamban Baru	21	0	0	21
		Sumber Jaya	12	35	1	46
		Sungai Cuka	18	35	1	52
7	Kurau	Bawah Layung	11	0	0	11
		Handil Negara	79	10	8	81
		Kali Besar	35	0	0	35
		Kurau	17	14	0	31
		Maluka Baulin	10	53	2	61
		Padang Luas	16	34	0	50
		Raden	11	0	0	11
		Sarikandi	20	15	2	33
		Sungai Bakau	12	0	0	12
		Tambak Karya	25	0	0	25
		Tambak Sarinah	14	33	1	46
8	Panyipatan	Batakan	61	117	5	173
		Batu Mulya	33	0	4	29
		Batu Tungku	30	11	6	35
		Bumi Asih	19	0	0	19
		Kandangan Baru	40	11	15	36
		Kandangan Lama	32	11	2	41
		Kuringkit	36	30	11	55
		Panyipatan	43	21	1	63
		Suka Ramah	37	5	6	36
		Tanjung Dewa	31	0	0	31
9	Pelaihari	Ambungan	29	0	0	29
		Atu-Atu	11	0	0	11



		Bumi Jaya	46	0	0	46
		Guntung Besar	13	0	0	13
		Kampung Baru	23	0	0	23
		Kelurahan Angsau	14	0	0	14
		Kelurahan Karang Taruna	48	0	0	48
		Kelurahan Pabahanan	39	0	1	38
		Kelurahan Pelaihari	45	0	0	45
		Kelurahan Sarang Halang	19	0	0	19
		Panggung	12	0	0	12
		Panggung Baru	23	0	3	20
		Panjaratan	17	0	0	17
		Pemuda	36	0	0	36
		Sumber Mulia	25	0	0	25
		Sungai Riam	38	0	0	38
		Tampang	18	0	1	17
		Telaga	27	0	0	27
		Tungkaran	7	0	0	7
		Ujung Batu	29	0	0	29
10	Takisung	Batilai	29	31	3	57
		Benua Lawas	28	31	0	59
		Benua Tengah	34	32	5	61
		Gunung Makmur	54	0	1	53
		Kuala Tambangan	38	0	0	38
		Pagatan Besar	69	0	0	69
		Ranggang	33	31	6	58
		Ranggang Dalam	18	0	0	18
		Sumber Makmur	39	49	4	84
		Tabanio	32	0	0	32
		Takisung	68	80	2	146
		Telaga Langsat	27	8	4	31
11	Tambang Ulang	Bingkulu	14	0	0	14
		Gunung Raja	35	31	5	61
		Kayu Abang	13	0	1	12
		Martadah	12	10	0	22
		Martadah Baru	24	0	0	24
		Pulau Sari	31	33	7	57
		Sungai Jelai	24	6	2	28
		Sungai Pinang	10	17	0	27
		Tambang Ulang	35	23	2	56
TOTAL			3461	1524	266	4719

Grafik 3.2.1
Jumlah IKM Tahun 2022 di Kab. Tanah Laut



Berdasarkan pendataan tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah IKM dari 3.461 industri menjadi 4.719 industri atau terjadi peningkatan 36,35 % .

Selain itu, pada tahun 2022 telah disusun Dokumen Deliniasi Kawasan Industri Jorong dimana dokumen ini bertujuan untuk :

1. Membantu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan dokumen penunjang pembangunan Kawasan Industri dalam bentuk Perencanaan Deliniasi Kawasan Industri Jorong yang merupakan bagian dari output Rencana Induk (Master Plan) Kawasan Industri sebagaimana yang diamanahkan dalam Permenperin No. 40 Tahun 2016;
2. Membantu mengakomodir rencana pengembangan sektor industri Kabupaten Tanah Laut, baik secara eksisting maupun pengembangan kedepannya;
3. Membantu melengkapi persyaratan pengajuan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) bagi Calon Pengelola Kawasan Industri
 - a. Dari Dana Dekonsentrasi Dinas Perindustrian Prov. Kalimantan Selatan dan dana mandiri, IKM yang difasilitasi Hal Merk antara lain :

Tabel 3.2.12
Rekap data IKM yang Di Fasilitas dari Dana Dekonsentrasi Dinas Perindustrian
Prov.Kalimantan Selatan Tahun 2022

NO	NAMA IKM	Merek	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KET
1	D'Ncef	D'Ncef	Hijria Septi Anggraeni	Jl. Pendidikan RT.02/RW.01, Desa Ambungan	Dana Dekon Prov. KalSel
2	Airas	Airas	Santoso	Kabuau Jl. Pelaihari Takisung RT.004/RW.002 Desa Telaga, kec. Pelaihari	MANDIRI
3	Rafidah	Rafidah	Rafidah	Jl. Suka Maju RT.014/RW.004 Desa Benua Raya, Kec. Bati-Bati	Dana Dekon Prov. KalSel
4	Atiah	Atiah	Atiah	Jl. Suka Maju RT.014/RW.005 Desa Benua Raya, Kec. Bati-Bati	Dana Dekon Prov. KalSel
5	Kerupuk Ikan Haruan Ibu Rusmaninah	Kerupuk Ikan Haruan Ibu Rusmaninah	Rusmaninah	Jl. Masjid Ihyaudin RT.009/RW.004, Desa Benua Raya, Kec. Bati-Bati	Dana Dekon Prov. KalSel
6	Calap Baimbai Sasirangan	Calap Baimbai Sasirangan	Hj. Siti Syarah	Jl. A. Yani RT.011/RW.002, Ds. Jorong Kec. Jorong	Dana Dekon Prov. KalSel
7	Arthadeva Gallery	Arthadeva Gallery	Sri Rahayu	Desa Martadah Baru RT.002/RW.001, Kec. Tambang Ulang	Dana Dekon Prov. KalSel

- b. Pada tahun 2022, total 61 IKM yang kita fasilitas, dengan rincian sebanyak 54 IKM Pangan yang difasilitas Sistem Jaminan Halal melalui Self Delcare dan sebanyak 7 IKM difasilitas melalui Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian RI sebagaimana yang terinci pada tabel berikut :

Tabel 3.2.13
Rekap data IKM yang Di Fasilitas Tahun 2022

NO	NAMA IKM	MERK	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN
1	Poklahsar Bina Bersama	Parimata	Helda	Jl. Pelabuhan Barat RT.005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang



2	Poklarsar Harapan Bersama	Harapan Bersama	Siti	Jl. Pelabuhan Barat RT.005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
3	IKM Mama Zidan	Mama Zidan	Rusniah	Jl. Muhara RT.002/RW.001, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
4	Kelompok Cinta Rasa	Cinta Rasa	Norhayani	Jl. Datu Pamulutan RT.001/RW.001, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
5	Kelompok Pulau Datu	Pulau Datu	Endang Rahmawati	Jl. Pelabuhan Rt.001/Rw.001, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan & Udang, Abon Ikan dan Amplang Ikan
6	Kelompok Karnita	Karnita	Maryam	Jl. Pariwisata RT.021/RW.011, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
7	Kelompok Mercusuar	Mercusuar	Khadijah	Jl. Datu Pamulutan RT.001/RW.001, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
8	Kelompok KTH. Sakatalu	Mama Nisa	Salabiah	Jl. Goa Marmer RT.005/RW.002, Desa Sungai Bakar, Kec. Bajuin	Keripik Pisang
9	LPHD Sungai Bakar	LPHD Sungai Bakar	Sukatman	Jl. Wisata Air Terjun RT.001/RW.001, Desa Sungai Bakar, Kec. Bajuin	Keripik Sukun dan Rempeyek
10	Kelompok Seafood Lestari	Mama Madan	Asmah	Perumahan Putih RT.015/RW.001, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
11	Kerupuk Ikan Haruan Rapidah	Rapidah	Rafidah	Jl. Suka Maju RT.014/RW.004, Desa Benua Raya, Kec. Bati-Bati	Kerupuk Ikan
12	UR. Krystal	Uap Dan Ukacan	Nor Latipah	Jl. KH. Achmad Nawawi, RT.001/RW.001, Desa Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Bumbu Rujak



13	Mama Naura	Mama Naura	Darti Sutini	Komplek Daffa Land. No. 18 Atu-Atu, Kec. Pelaihari	Jahe Serbuk
14	KUB. Jaya Makmur	Eco	Bambang Eko Nurdiansyah	Gunung Melati RT.006/RW.002	Aneka Keripik
17	Kelompok Budi Bersama	Pukaha	Kartini	Jl. Pelabuhan RT.005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec.Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
18	Sacha Inchi Borneo	Ais	Mas Arif Biantoro	Jl. Matah II, RT.007/RW.003, Desa Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Madu Kelulut
19	Sacha Inchi Borneo	Sacha Inchi Borneo	Mas Arif Biantoro	Jl. Matah II, RT.007/RW.003, Desa Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Minyak Sacha Inchi
20	Sacha Inchi Borneo	Sacha Inchi Borneo	Mas Arif Biantoro	Jl. Matah II, RT.007/RW.003, Desa Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Snack Sacha Inchi
21	KUB. Sari Laut 2	Mama Rofi'i	Nurul Yuhana	Jl. Niaga RT.008/RW.004, Tabanio, Kec. Takisung	Amplang
22	KUB. Sari Laut 2	Benteng Tabanio	Nurul Yuhana	Jl. Niaga RT.008/RW.004, Tabanio, Kec. Takisung	Kerupuk Ikan dan Udang
23	Iqlima Bakery	Iqlima Bakery	Wardatul Firdausi	Jl. Sejahtera RT.008 No.51 Atu-Atu, Kec. Pelaihari	Roti dan Kue
24	IKM Sakdijah	Sakdijah	Sulikah	Desa Bingkulu RT.001/RW.001, Kec. Tambang Ulang	Makanan Ringan (Aneka Stik)
25	Gapoktan Hidup Makmur	Kopi Katunun	Katiman	Katunun, RT.003/RW.003, Desa Telaga, Kec. Pelaihari	Kopi Bubuk
26	UMKM Arifin	Al Wafi	Muhammad Noor Arifin	Jl. A. Yani KM.28 RT.007/RW.002, Desa Pandahan, Kec. Bati-Bati	Kerupuk Telur Asin



27	UMKM Arifin	Al Wafi	Muhammad Noor Arifin	Jl. A. Yani KM.28 RT.007/RW.002, Desa Pandahan, Kec. Bati-Bati	Telur Asin
28	HB Borneo	Kelulut	Firdaus Hari Laksana	Desa Gunung Melati RT.011/RW.002, Kec. Batu Ampar	Kecap Manis
29	Bu KOKOM	Bu KOKOM	Siti Komsianah	Desa Tirta Jaya RT.001/RW.001, Kec. Bajuin	Jamu Instan
30	Bu KOKOM	Bu KOKOM	Siti Komsianah	Desa Tirta Jaya RT.001/RW.001, Kec. Bajuin	VCO
31	Bu KOKOM	Bu KOKOM	Siti Komsianah	Desa Tirta Jaya RT.001/RW.001, Kec. Bajuin	Madu Mongso
32	Hafizh Adzka	Hafizh Adzka	Yuyun Rahmadini	Perumahan Cipta Indah Permai (CIP) Blok D No 32 Atu-Atu	Risoles Frozen
33	Kelompok Pantai Indah	Pantai Indah	Hamsiah	Jl. Pahlawan RT.007/RW.002, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
34	BUMDES Mandiri Sejahtera	Gms	Noor Afidah	Jl. Wahyu Hartopo RT.001/RW.001, Desa Guntung Besar	Air Aren/Lahang
35	KUB. Pesona Tanjung	Duitri	Rina	Jl. Pelabuhan Barat, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
36	KTH. Kariya Jaya	M@Yun	Mawardi	Bendungan PTP RT.001/RW.003, Desa Ambungan	Jahe Instan
37	Alika Cake	Alika Cake	Fathol Jannah	Jl. A. Yani RT.005/RW.002, Desa Kintap Kecil, Kec. Kintap	Roti dan Kue
38	Kerupuk Ikan Ibu Badariyah	Kerupuk Ikan Ibu Badariyah	Ideres atau Badariyah	Jl. Pariwisata RT.021/RW.005, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
39	Kelompok Batu Balai	Algusren	M. Alfin	Desa Batilai RT.004/RW.002, Kec. Takisung	Gula Merah dan Gula Semut



40	D'tiya	D'tiya	Sumani	Jl. Ibunda RT.005/RW.001, Desa Tirta Jaya Kec. Bajuin	Getuk
41	Farhan Snack	Farhan Snack	Melda Rosalina	Desa Pulau Sari RT.004/RW.002, Kec. Tambang Ulang	Akar Pinang, Kacang Bawang, Makaroni, Keripik Ketumbar
42	Lina Bakery	Roti Lina	Saleha	Desa Handil Negara RT.003/RW.001, Kec. Kurau	Roti Manis
43	Qur'as Madu	Qur'as Madu	Suratmin	Desa Benua Tengah RT.018/RW.005, Kec. Takisung	Madu Kelulut
44	Karya Bersama	3 Ardi	Supardi	Jl. Taruna Jaya RT.012/RW.004, Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Keripik Jamur
45	Mbak Sri	Mbak Sri	Sri Sumaryati	Jl. Raya Takisung RT.003 Desa Banua Tengah Kec. Takisung	Jahe Instan
46	Kelompok Sejahtera	Riani	Muhammad Sabil Mubtadin	Desa Takisung RT.011/RW.004, Kec. Takisung	Kerupuk Ikan dan Udang
47	KTH. Subur Makmur	Mbak Siti	Abd. Basir	Katunun RT.003/RW.003 Desa Telaga Kec. Pelaihari	Keripik Singkong, Talas, Pisang, Pare
48	Kue Kering Nurkah	Batang Jabuk	Nurkah	Jl. Raya Takisung RT.004/RW.002, Gg. Jakasuma Desa Telaga Kec. Pelaihari	Popia Original & Premium
49	Gila Rasa	Gila Rasa	Imam Wahyudi	Jl. Panembahan Senopati RT.09a/RW.004 Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari	Nugget Jamur
50	Tanah Laut Manis	Kandangan Lama Manis	Sayid Hasan	Desa Kandangan Lama RT.004/RW.002, Kec. Panyipatan	Gula Merah dan Gula Semut
51	Dadaringan	Dadaringan	Mega Yusrina	Ranggang Desa Ranggang, Kec. Takisung	Gula Semut



52	Mama Arkha	Mama Arkha	Amelia Agustina	Jl. Datu Daim No.89, Pelaihari	Gula Merah
53	Bu Lasmi	Bu Lasmi	Lasmiatun	Ranggang RT.001, Kec. Takisung	Sambal Pecel
53	NJH	NJH	Nining Eko Puji Lestari	Jl. Untung Suropati RT.003/RW.001, Sebamban, Ds. Kebun Raya	Jamu Tradisional/ Minuman Herbal
54	Raja Gunung	Widarningsih	Cap Raja Gunung	G'g Harapan Maju RT.005/RW.002, Gunung Raja, Kec. Tambang Ulang	Jamu Tradisional/ Minuman Herbal
55	KTH. Batu Kura	Kemiri Kita	Ibnu Kasim	Desa Galam RT.004/RW.002, Kec. Bajuin	Kemiri Kupas
56	Yotro Teko Berkah (YTB)	Yotro Teko Berkah (YTB)	Eka Dewi Kharisman	Jln. Pangeran Antasari RT.004/RW.001, Desa Tirta Jaya, Kec. Bajuin	Aneka Makanan Ringan Siap Santap
57	Tazakacake	Tazakacake	Ariesta Shinta Wati	Jl. Swadaya No.70 Balirejo RT.18b/RW.006	Bakeri
58	Dapur Kamilah	Dapur Kamilah	Suci Setioningsih	Bingkulu RT.001/RW.003, Kec. Tambang Ulang	Aneka Makanan Ringan Siap Santap
59	Mimi Donkent	Mimi Donkent	Fenina Noos Islamiyah	Komp. Bajuin Raya Jl. Arwana No.52, Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari	Donat Kentang
60	Mama Zeva	Mama Zeva	Suhartati	Desa Maluka Baulin RT.005/RW.001, Kec. Kurau	Kerupuk Udang
61	Poklahsar Karya	Asoy	Norhana	Jl. Hangtuh RT.002/RW.001, Kec. Jorong	Kerupuk Udang dan Ikan

Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah

1. Tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dimana dana DAK hanya bagi Daerah Prioritas Pariwisata, sehingga Tanah Laut tidak dapat mengajukan permohonan dana tersebut untuk pengembangan rumah kemasan, baik untuk pembelian

mesin peralatan maupun pembangunan workshop.

2. Tidak adanya Dana Intensif Daerah (DID)

Untuk dana DID, dimana pada tahun 2021 Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut mendapatkan dana DID dan dialokasikan untuk fasilitasi Hak Merek, Halal maupun pembelian mesin peralatan bagi IKM dan juga pembelian mobil promosi. Karena tahun 2022 ini tidak dapat, maka target kami untuk fasilitasi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak bisa kami laksanakan. Begitupun dengan fasilitasi hak merek tahun 2022 ini berasal dari dana provinsi sehingga masih banyak IKM yang belum terfasilitasi Hak Merek.

3. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pameran, sehingga pada tahun ini, kita tidak dapat mengikuti pameran incraft yang merupakan pameran kerajinan terbesar di Indonesia dan berpotensi besar untuk promosi produk.
4. Kurangnya pelatihan softskill
5. Kurangnya jumlah kegiatan pelatihan peningkatan wirausaha baru

Solusi untuk memecahkan masalah tersebut antara lain :

1. Mendorong Pemkab dan Pemrov agar Tanah Laut masuk menjadi Daerah Prioritas Pariwisata, serta sounding ke kementerian agar kebijakan DAK dapat direvisi.
2. Mendorong Bappeda dan TAPD agar Disnakerind mendapatkan alokasi DID yang dapat kami manfaatkan untuk pemulihan ekonomi IKM dan untuk standarisasi produk IKM
3. Kerjasama dengan SKPD lain khususnya terkait promosi produk dan investasi.
4. Diperlukan pelatihan peningkatan kompetensi keterampilan berindustri yang diiringi dengan pelatihan soft skill dalam rangka membangun jiwa enterpreur dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan juga dengan Bidang P2TK Disnakerind. Selain hal tersebut, pemilihan peserta pelatihan oleh Kepala Desa diharapkan juga akan lebih selektif lagi agar benar-benar yang berminat yang akan diikutsertakan dalam pelatihan.
5. Dilakukan beberapa langkah kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan pelatihan industri



serta fasilitasi penerapan teknologi bagi IKM di Kabupaten Tanah Laut

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Menumbuhkan sentra-sentra Industri Kecil Menengah
2. Mempromosikan Gedung Dekranasda dan Gedung Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang sebagai tempat promosi produk IKM, baik pangan maupun kerajinan. Selama ini promosi dilakukan melalui Media Sosial *Facebook* dengan alamat Fb : ***Dekranasda Tanah Laut dan Puspro Tambang Ulang***), melalui *Instagram* dan melalui Aplikasi *Whats App*. Promosi yang akan dilakukan ditahun depan dengan cara membuat Aplikasi *E-commerce* yaitu berupa penjualan produk IKM secara online.
3. Mendorong IKM untuk dapat mengakses Program Gapura Karomah dikarenakan IKM - IKM yang baru bertumbuh juga memerlukan stimulus bantuan permodalan yang dalam hal ini dapat ditanggulangi melalui Program Gapura Karomah yaitu program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah yang berlangsung sejak tahun 2019 dan berlanjut hingga sekarang. Tahun 2022 ada 16 IKM yang mengajukan usulan pada Program Gapura Karomah.
4. Akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD terkait, juga akan membangun komunikasi dengan asosiasi maupun lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama mendorong masyarakat untuk menumbuhkan jiwa enterpreneur melalui sosialisasi maupun pelatihan teknis lainnya.
5. Mendorong sertifikasi TKDN, Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Hak Merek bagi Industri Kecil
6. Penggunaa Aplikasi Sosialita dan EKatalog local dalam belanja pengadaan.
7. Mengaktifkan pelayanan desain produk di Rumah Kemasan.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 86 ASN pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp 456,681,529,00 dan terealisasi Rp. 411,502,584.00 atau sebesar 90.11%.



Tabel 3.2.14
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	338,997,997,00	321.420.484,00
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	69,598,532,00	46.514.600,00
3	Program Hubungan Industrial	48,085,000,00	43.567.500,00
Jumlah		456,681,529,00	411,502,584.00

MISI III

Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 1 tujuan untuk misi III yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan suatu indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.3.1
Target indikator tujuan Tahun 2023

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	75 (Baik)

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
2. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 8**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan diukur mealui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3.2
 Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB (74,00)	B (66,88)	97,76%	BB (77,00)	B (66,11)	85,86%	A (81)	B (67,28)	83,06%
2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											91,53%

Tabel 3.3.3
 Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	A (81)	B (67,28)	83,06%	A (81)	83,06%
2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	100%

a. Nilai SAKIP

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun dilaksanakan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB. Komponen yang dinilai terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented program*).

Realisasi indikator Nilai SAKIP tahun 2022 adalah B (67,28) belum mencapai target yang ditetapkan yaitu A (81) dengan tingkat capaian 83,06%. Nilai ini mengalami peningkatan 1,17 *point* jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu B (66,11). Realisasi tersebut baru mencapai 83,06% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 81 (Baik).

Dilihat dari penilaian per komponen, dari ke 4 (empat) komponen penilaian SAKIP sesuai dengan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.4
 Nilai Komponen SAKIP tahun 2022

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2022	Capaian (%)
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,43	74,77
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,46	64,87
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,59	70,6
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,80	59,2
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,28	100
Tingkat akuntabilitas kinerja			B	

Sumber: diolah

Untuk Tahun 2019-2021 dasar yang digunakan dalam rangka evaluasi SAKIP adalah PermenpanRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan 5 (lima) komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.3.5
 Nilai Komponen SAKIP tahun 2019, 2020 dan 2021

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,99	22,14	22,25
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,05	16,18	16,22
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,35	10,45	10,49
d.	Evaluasi Internal	10	6,17	6,53	6,53
e.	Capaian Kinerja	20	10,32	10,58	10,62

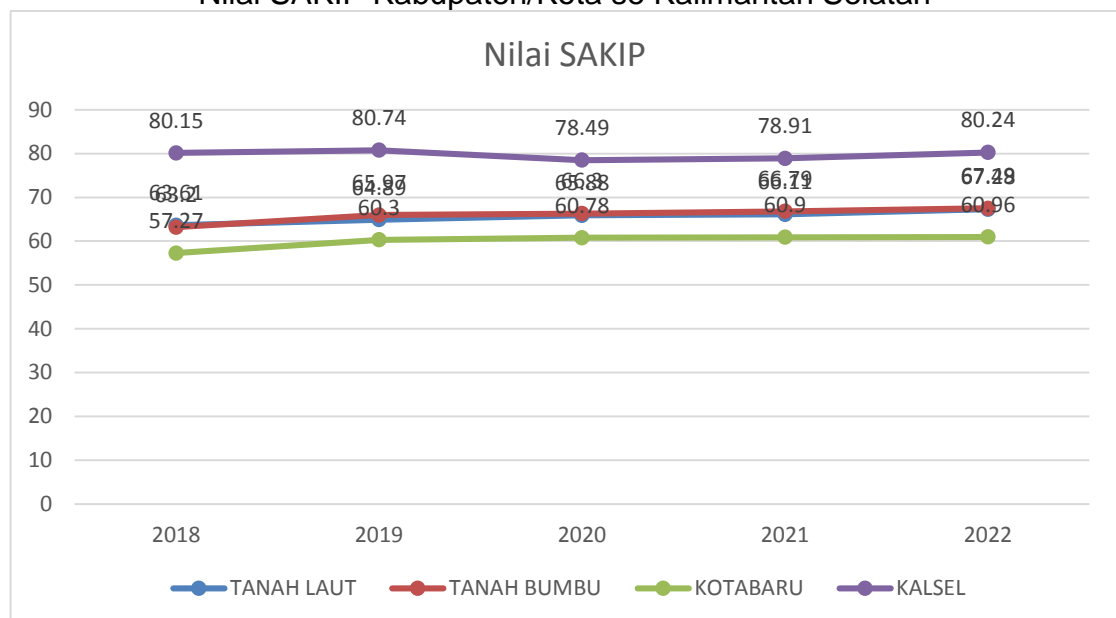


Nilai Hasil Evaluasi	100	64,89	65,88	66,11
Tingkat akuntabilitas kinerja		B	B	B

Sumber: diolah

Jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut masih jauh berada di bawah, dimana nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 adalah A (80,24).

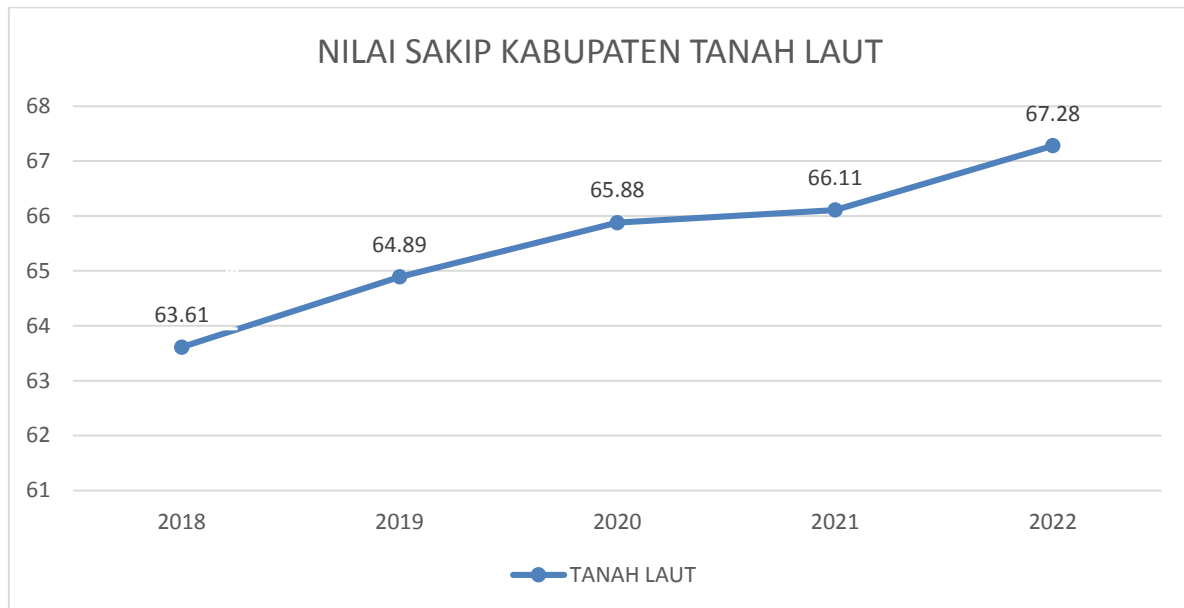
Grafik 3.3.1
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan



Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.3.2
Nilai SAKIP tahun 2018– 2022



Sumber: diolah

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP, karena dilihat dari nilai semua komponen masih banyak terdapat kekurangan, nilai komponen yang masih sangat rendah yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimana nilai maksimal adalah 25 dan terealisasi sebesar 14,80 atau 59,2%.

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP di tahun 2022 antara lain :

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD yang ditetapkan telah memuat penjabaran kinerja (*cascade down*) hingga level pelaksana.
2. Melakukan pelatihan atau bimtek kepada aparatur perencanaan baik internal Bappeda serta kepada aparatur perencanaan di SKPD dengan narasumber dari Bappenas.
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD yang ditetapkan telah memuat penjabaran kinerja (*cascade down*) hingga level pelaksana.
4. Efektifitas program dan kegiatan melalui refocusing program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah berorientasi pada *outcome* bukan sebatas

output. Terdapat efektifitas program sebesar 22,07%, kegiatan sebesar 45,88% dan Sub Kegiatan sebesar 47,3%. Perbandingan jumlah program dan kegiatan antara APBD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

APBD TAHUN 2022	RKPD TAHUN 2023
Program 154	Program 120
Kegiatan 436	Kegiatan 236
Sub Kegiatan 1.260	Sub Kegiatan 664

Sumber: Bappeda Kabupaten Tanah Laut

5. menindaklanjuti Permenpan 88 Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan evaluasi SAKIP SKPD, telah membuat aplikasi SAKUNTALA (Sistem Akuntabilitas Tanah Laut) sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, diharapkan dengan adanya system ini kinerja SKPD dapat lebih ditingkatkan. berikut tabel hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD tahun 2022:

JUMLAH SKPD	KATAGORI	PERSENTASE	INTERPRESTASI
6	A	15	Memuaskan
34	BB	85	Sangat Baik
0	B	0	Baik
0	CC	0	Cukup Baik
0	C	0	Kurang

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Tahun 2022 seluruh SKPD atau sebesar 100% telah mendapatkan nilai SAKIP minimal BB atau dengan nilai di atas 70. Terjadi peningkatan dibandingkan Tahun 2021 dimana pada Tahun 2021 terdapat 37 SKPD atau sebesar 92,5% dengan nilai SAKIP minimal BB, 3 SKPD dengan nilai SAKIP Baik dan tidak ada lagi SKPD yang memiliki nilai SAKIP dibawah Baik. Ringkasan evaluasi SAKIP Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3.6
Rekapitulasi Nilasi SAKIP SKPD per komponen Tahun 2022 hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten

NO	ENTITAS AKUNTABILITAS (SKPD)	NILAI KOMPONEN				Total Nilai	KATEGORI
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (10%)		
1	SEKRETARIAT DAERAH	24.99	24.99	12.495	21.675	84.2	A
2	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	24.00	24.99	12.495	21.675	83.2	A
3	DINAS KESEHATAN	24.99	24.00	11.505	20.825	81.3	A
4	INSPEKTORAT KABUPATEN	24.99	24.00	12.000	20.000	81	A
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.99	24.00	11.505	20.000	80.5	A
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	24.99	24.00	11.505	20.000	80.5	A
7	DINAS PARIWISATA	24.00	24.99	11.505	19.175	79.7	BB
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	24.99	23.01	11.505	20.000	79.5	BB
9	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	24.99	23.01	11.505	20.00	79.5	BB
10	SEKRETARIAT DPRD	24.00	24.00	11.505	20.000	79.5	BB
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24.00	23.01	12.000	20.000	79	BB
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	24.00	22.50	11.600	20.000	78.1	BB
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24.99	23.01	12.000	17.500	77.5	BB
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.10	23.70	11.600	18.800	77.2	BB
15	BADAN PENDAPATAN DAERAH	26.01	23.01	11.505	16.675	77.2	BB
16	KECAMATAN TAKISUNG	24.99	24.00	11.505	16.675	77.2	BB
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.00	23.01	11.505	18.325	76.8	BB
18	KECAMATAN BAJUIN	24.99	23.01	10.500	18.325	76.8	BB
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.01	21.99	11.505	20.000	76.5	BB
20	KECAMATAN PELAIHARI	24.00	23.01	10.995	18.325	76.3	BB



21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.00	21.99	10.995	17.500	74.5	BB
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23.01	23.01	10.500	17.500	74	BB
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	24.00	21.00	10.500	18.325	73.8	BB
24	KECAMATAN TAMBANG ULANG	24.00	21.00	10.995	17.500	73.5	BB
25	DINAS SOSIAL	23.01	23.01	10.500	16.675	73.2	BB
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.20	21.00	11.100	18.800	73.1	BB
27	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	21.60	21.90	10.800	18.800	73.1	BB
28	KECAMATAN PANYIPATAN	21.99	23.01	10.500	17.500	73	BB
29	KECAMATAN JORONG	20.40	22.50	11.100	18.800	72.8	BB
30	KECAMATAN BUMI MAKMUR	21.60	21.90	11.000	18.300	72.8	BB
31	DINAS PERHUBUNGAN	23.10	21.60	10.100	18.000	72.8	BB
32	KECAMATAN KURAU	23.01	21.00	10.995	17.500	72.5	BB
33	KECAMATAN BATU AMPAR	21.90	21.60	10.800	18.800	72.3	BB
34	KECAMATAN KINTAP	22.50	21.90	10.800	17.000	72,2	BB
35	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	19.50	23.40	11.700	17.500	72.1	BB
36	KECAMATAN BATI-BATI	22.50	20.01	11.600	17.500	71.7	BB
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	21.60	21.00	10.500	17.500	70.6	BB
38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23.10	21.00	10.400	16.000	70.5	BB
39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	20.01	21.99	10.005	18.325	70.3	BB
40	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	23.40	23.40	9.500	13.800	70.1	BB

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Beberapa hal yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP antara lain:

1. Kurangnya komitmen Pimpinan dan seluruh Aparatur dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja.

2. Sasaran kinerja SKPD belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pemilihan program dan kegiatan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Kualitas pengukuran kinerja SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil pencapaian kinerja program, masih pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
4. Masih kurangnya kualitas laporan kinerja, dimana masih banyak laporan kinerja yang mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja program serta belum mampu menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
5. Evaluasi atas program belum sepenuhnya mampu menampilkan efektivitas program yang diemban oleh setiap SKPD disebabkan belum berorientasi kepada kinerja program, dan hanya pelaksanaan program atau kegiatan serta penyerapan anggaran.
6. Masih kurangnya capaian target kinerja dan SKPD yang berakibat pada kurangnya pencapaian target Kabupaten,
7. Analisa terhadap setiap pencapaian target belum sepenuhnya dibuat.
8. Pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD belum dilakukan.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka peningkatan nilai SAKIP adalah:

1. Internalisasi BerAKhlak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara agar bekerja lebih berorientasi kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
2. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level Kepala SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai.
3. Mempertajam rumusan pengukuran Indikator Kinerja Utama SKPD.
4. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini untuk

- dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;
5. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerjanya;
 6. Memastikan kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama Kabupaten mendapatkan anggaran yang sesuai dengan porsinya, sehingga dapat mencapai target indikatornya.
 7. Membangun Komitmen antara KDH/WKDH dengan seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kabupaten Tanah Laut dengan Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Coaching Klinik tentang SAKIP yang digunakan untuk memperbaiki sistem yang telah dibangun.
 8. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap *outcome* dan *output* secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja (tujuan dan sasaran) organisasi;
 9. Meningkatkan kualitas indikator kinerja sasaran strategis pada SKPD sehingga lebih berorientasi hasil dan relevan dengan sasaran yang dicapai;
 10. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegritasi mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja hingga pelaporan agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan, serta meningkatkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerjanya;
 11. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
 12. Mendorong APIP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD, dan hasil evaluasi dapat dijadikan untuk pemberian reward dan punishment bagi SKPD.
 13. menciptakan pemahaman yang merata bagi APIP, serta mendorong secara khusus kepada SKPD pengampu bidang perencanaan dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran;

14. Perlunya pengumpulan data kinerja yang dilakukan secara berkala (triwulan) sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja;
15. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja setiap pencapaian target SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran
16. Perlunya dilakukan pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD, hal ini akan diketahui kendala solusi dan rencana aksi yang akan dan yang telah dilakukan.
17. Menerbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dengan aplikasi SAKUNTALA (Sistem Akuntabilitas Tanah Laut).

Rencana Aksi yang akan dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan Desk penajaman terhadap rumusan pengukuran Indikator Kinerja Utama SKPD.
2. Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan *reward* dan *punishment* kepada SKPD sesuai dengan nilai beberapa indikator yang salah satunya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh.
3. Pembangunan dan pengaplikasian E SAKIP Kabupaten Tanah Laut yang telah dianggarkan di Tahun 2022.
4. Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.
5. Melakukan pendampingan penyusunan dan perbaikan laporan AKIP ke seluruh SKPD.
6. Melakukan diklat rewiu dan evaluasi SAKIP dalam rangka peningkatan kompetensi *evaluator* SAKIP.

b. Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah Tahun 2022 adalah merupakan pencapaian kesembilan kalinya sejak Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan yang telah diterbitkan oleh BPK yaitu Nomor: 5.B/LHP/XIX.BJM/5/2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

Tabel 3.3.7

Perolehan Opini BPK Kabupaten Tanah Laut

NO	TAHUN PEROLEHAN	PREDIKAT (OPINI BPK)
1	2014	WTP
2	2015	WTP
3	2016	WTP
4	2017	WTP
5	2018	WTP
6	2019	WTP
7	2020	WTP
8	2021	WTP
9	2022	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel dan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan tercantum di dalam RPJMD 2018-2023 telah mencapai 100%. Untuk mencapai target tersebut tercapai dikarenakan adanya:

1. Komitmen Aparatur dan Pemangku Kepentingan
 - a. Penguatan Komitmen Bebas Temuan dan Rekomendasi Pemeriksa pada Tahun 2015 dengan penandatanganan pakta integritas
 - b. Peningkatan Intensitas Koordinasi Internal dan Eksternal
2. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

- a. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Pemda
- b. Sistem *Reward and Punishment*
- c. Penataan Organisasi dan Kelembagaan
3. Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - a. SIMDA-Kuangan dan pendapatan (Simda F-MIS dan Aplikasi SIPD)
 - b. SIMDA-BMD
4. Kelengkapan Regulasi Daerah
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Melalui upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut optimis bisa mempertahankan Opini WTP selama semua dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut akan menuangkan *action plan* mempertahankan Opini WTP dalam sebuah Peraturan Bupati Tanah Laut dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pimpinan Daerah telah mensosialisasikan tentang adanya regulasi terbaru berkaitan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada setiap pelaksanaan *coffee morning* untuk seluruh pimpinan SKPD.
2. Melakukan rapat koordinasi/penyamaan persepsi dengan Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan aset, Pemerintah Daerah (BPKAD) mengadakan pembinaan terhadap entitas akuntansi, sosialisasi regulasi, melaksanakan rekonsiliasi dan monitoring, melaksanakan FGD untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada Pemerintah Daerah.
4. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi serta BPK dan BPKP.
5. Menetapkan revisi Kebijakan Akuntansi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

6. Pengelolaan keuangan dan aset telah membuat jaringan online berbasis website dengan menggunakan SIMDA-Kuangan dan Pendapatan (Simdang F-MIS) dan Aplikasi SIPD.
7. Melakukan penyesuaian kode rekening secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
8. Memberikan penghargaan setiap tahunnya bagi SKPD terbaik, Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
2. Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
3. Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
4. Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrua dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
5. Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
6. Belum terintegrasi antara Aplikasi SIPD dengan Simda Keuangan FMIS dengan SIMDA BMD.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffe morning.
2. Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan,



- Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
3. Berkoordinasi dengan pihak dinas terkait dalam pemerataan tenaga IT.
 4. Melakukan Pembinaan entitas akuntansi, melaksanakan rekonsiliasi, monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
 5. Melakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
 6. Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset

Nilai SAKIP dan WTP merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten telah melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh SKPD dan UPTD RSUD H. Boejasin Pelaihari. Hasil evaluasi terhadap 40 SKPD dan 1 UPTD tersebut dengan hasil yang dapat dikategorikan Cukup Baik.



Tabel 3.3.8
Rekapitulasi Nilai Reformasi Birokrasi SKPD Tahun 2022

No	SKPD	IRBAN PENGAMPU	NILAI PEMENUHAN (14,6)	NILAI REFORM (21,7)	NILAI TOTAL (36,30)	RANKING	PERSENTASE %	KATEGORI
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	14.30	20.86	35.16	1	96.86	AA
2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1	14.57	19.60	34.17	2	94.13	AA
3	Dinas Pariwisata	2	12.69	21.28	33.97	3	93.58	AA
4	Sekretariat Daerah	4	13.59	20.02	33.61	4	92.59	AA
5	Inspektorat	3	13.04	20.56	33.60	5	92.56	AA
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	4	13.46	19.87	33.33	6	91.82	AA
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	1	13.73	19.54	33.27	7	91.65	AA
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	12.74	19.97	32.71	8	90.11	AA
9	Kecamatan Kintap	2	12.42	20.20	32.62	9	89.86	A
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	12.70	19.33	32.03	10	88.24	A
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	12.41	19.40	31.81	11	87.63	A
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1	12.49	19.04	31.53	12	86.86	A
13	Kecamatan Panyipatan	2	12.29	18.63	30.92	13	85.18	A
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	10.95	19.70	30.65	14	84.44	A



15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	3	11.87	18.69	30.56	15	84.19	A
16	Dinas Perhubungan	1	9.95	19.60	29.55	16	81.40	A
17	Kecamatan Tambang Ulang	4	12.46	16.86	29.32	17	80.77	A
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2	9.79	19.03	28.82	18	79.39	BB
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4	10.51	18.06	28.57	19	78.71	BB
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	10.70	17.30	28.00	20	77.13	BB
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4	9.48	18.43	27.91	21	76.89	BB
22	Dinas Kesehatan	2	10.17	17.44	27.61	22	76.06	BB
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	10.92	16.61	27.53	23	75.84	BB
24	Kecamatan Jorong	1	10.19	16.90	27.09	24	74.64	BB
25	Kecamatan Bajuin	1	9.52	17.56	27.08	25	74.60	BB
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	9.03	17.56	26.59	26	73.25	BB
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	9.43	16.66	26.09	27	71.87	BB
28	Kecamatan Takisung	4	10.22	15.83	26.05	28	71.76	BB
29	Sekretariat DPRD	2	9.89	15.93	25.82	29	71.13	BB
30	Kecamatan Bati-Bati	4	10.29	14.79	25.08	30	69.08	B
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	9.43	14.93	24.36	31	67.11	B
32	Kecamatan Kurau	1	9.26	14.80	24.06	32	66.28	B



33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	3	9.87	13.94	23.81	33	65.59	B
34	Dinas Sosial	4	8.72	14.70	23.42	34	64.51	B
35	Badan Pendapatan Daerah	4	7.44	15.85	23.29	35	64.15	B
36	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	8.99	14.24	23.23	36	63.99	B
37	RSUD H.Boejasin	2	8.98	14.11	23.09	37	63.61	B
38	Kecamatan Bumi Makmur	3	8.43	14.32	22.75	38	62.67	B
39	Kecamatan Pelaihari	3	7.17	15.58	22.75	39	62.67	B
40	Kecamatan Batu Ampar	3	12.49	10.05	22.54	40	62.09	B
41	Dinas Pendidikan	3	8.81	13.47	22.28	41	61.37	B

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 29 SKPD dengan nilai RB minimal BB atau sebesar 72,5% dari seluruh SKPD (40 SKPD). Hal ini menggambarkan bahwa sudah 70% SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan reformasi birokrasi dengan sangat baik.

Di dalam RPJMD 2018-2023 telah ditargetkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Laut yang merupakan indikator tujuan adalah 70 (Baik). Ini merupakan Tahun ke 4 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan evaluasi oleh KemenpanRB terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 adalah 60,19 dengan kategori Baik.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berupaya optimal dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan pembangunan Zona Integritas sebagai wujud keseriusan untuk menciptakan *Good Governance*.

Pembangunan Zona Integritas juga telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memiliki 2 (dua) SKPD yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KEMENPANRB yaitu **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**. Berikut disajikan hasil evaluasi mandiri pelaksanaan Zona integritas oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.3.9
Nilai hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2022

No	SKPD	Nilai
1	Disdukcapil	95,08
2	Inspektorat	89,20
3	DPMPTSP	93,83
4	Kecamatan Pelaihari	63,92
5	Sekretariat Daerah	87,74
6	BPKAD	79,79
7	Dinas Perhubungan	60,25



8	Disdikbud	69,26
9	Bapenda	85,77
10	BKPSDM	76,97
11	RSUD H.Boejasin	80,79

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 79 ASN pada BPKAD, 47 ASN pada Inspektorat, 3 ASN pada Bagian Organisasi, 82 ASN pada BAPPEDA dan di dukung oleh 8 Program dengan Pagu Rp. 296,971,334,171,00 dan terealisasi Rp. 265,842,581,314.00 atau sebesar 89,52%.

Tabel 3.1.10
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	33,894,807,823,00	32.289.572.000,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	248,473,769,391,00	221.256.118.768,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9,588,994,567,00	8.581.056.686,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,676,730,461,00	1.044.747.964,00
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	574,979,700,00	454.963.250,00
6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	467,737,810,00	417.981.832,00
7	Program Kepegawaian Daerah	1,314,990,175,00	951.548.074,00
8	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	979,324,244,00	846.592.740,00
Jumlah		296,971,334,171,00	265,842,581,314.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 9

Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik

Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3.11
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	23,81	54,375	228,37%	35,71	55,87	156,45%	47,62	58,98	123,86 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											123,86%

Tabel 3.1.12
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	47,62	58,98	123,86 %	59,52	99,09%

Realisasi indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 adalah sebesar 58,98 mengalami peningkatan sebesar 3,11 poin dibandingkan tahun 2021. Peningkatan tersebut adalah hasil dari langkah langkah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya sebagai berikut :

1. Sosialisasi PPID ke seluruh SKPD dan Kecamatan dengan membuat akun PPID Pembantu, sehingga masing masing SKPD dan Kecamatan melalui PPID Pembantu yang dijabat oleh Sekretaris SKPD dan Kecamatan dapat mempublikasikan dokumen dan Informasi langsung ke website PPID.
2. Sosialisasi PPID ke seluruh SKPD dan Kecamatan dengan membuat akun PPID Pembantu, sehingga masing masing SKPD dan Kecamatan melalui PPID Pembantu yang dijabat oleh Sekretaris SKPD dan Kecamatan dapat mempublikasikan dokumen dan Informasi langsung ke website PPID.
3. PPID Utama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progress PPID

Pembantu dalam mempublikasikan dokumen dan Informasi tersebut. Hingga Desember 2022 perkembangan publikasi Informasi dan Dokumentasi di *website* ppid.tanahlautkab.go.id telah mencapai 3408 buah, ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 yang berjumlah 2537 buah. Dari data statistik di *website* tersebut juga menunjukkan jumlah peminat informasi cukup tinggi dengan kunjungan mencapai jumlah 37.838, meningkat cukup signifikan dari tahun 2021 dimana kunjungan peminat informasi ke *website* ppid.tanahlautkab.go.id sebanyak 36.522.

4. Melaksanakan Rapat Koordinasi PPID tingkat Kabupaten Tanah Laut yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut diikuti oleh PPID Utama dan PPID Pembantu se-Kabupaten Tanah Laut dengan agenda evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.
5. Selain melakukan monitoring dan evaluasi melalui *website* PPID, PPID Utama juga membentuk grup whatsapp yang beranggotakan seluruh PPID Pembantu sebagai media komunikasi dan diskusi terkait kegiatan PPID di Kabupaten Tanah Laut.
6. Melakukan koordinasi secara dinamis kepada pejabat pengelola informasi dokumentasi pembantu pada seluruh SKPD terkait keterbukaan informasi publik. Dengan terpublikasikannya dokumen dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh badan publik melalui *website* ppid.tanahlautkab.go.id, maka setiap orang dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mengakses alamat *website* tersebut, sehingga keterbukaan informasi publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi.

Selain itu juga dilakukan forum konsultasi publik melalui siaran radio pada program dialog interaktif Tanah Laut Menyapa dengan menghadirkan narasumber dari SKPD dilingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menyampaikan program dan kegiatan pada masing masing SKPD sesuai jadwal yang telah ditentukan pukul 09.00 sampai 10.00 Wita setiap hari Rabu dan Kamis.

Selain itu juga dilakukan penyebaran informasi melalui media sosial Facebook LPPL Radio Tuntung Pandang, instagram @radiotuntungpandang dan



Youtube LPPL Radio Tuntung Pandang mengenai kegiatan Kepala Daerah dan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Untuk menunjang keterbukaan informasi publik di masyarakat, dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat di desa, yang bertugas sebagai corong informasi untuk mempromosikan dan mempublikasikan potensi dan prestasi desa termasuk kegiatan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan di desa tersebut. Sampai dengan tahun 2022, KIM yang terbentuk sebanyak 17 buah. Pembinaan terhadap KIM dilakukan secara berkala, baik melalui kunjungan langsung maupun melalui grup whatsapp. Pada tahun 2022, seluruh KIM telah membentuk kepengurusan Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang diketuai oleh Siti Komsianah dari KIM Desa Tirtajaya. Untuk Forum KIM di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, ketua terpilih adalah Junaidi dari KIM Desa Tirtajaya Kabupaten Tanah Laut, Slamet Prayitno dari KIM Desa Martadah Baru dan M. Salman dari KIM Desa Sungai Rasau sebagai anggota kepengurusan. Untuk menunjang capaian publikasi yang lebih luas, maka publikasi informasi dari seluruh KIM dilakukan pada website resmi KIM Tanah Laut dengan alamat *website* kim.diskominfo.tanahlautkab.go.id

Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial fanpage Media Center Kabupaten Tanah Laut, media sosial facebook LPPL radio Tuntung Pandang, Instagram @radiotuntungpandang, youtube LPPL Radio Tuntung Pandang, siaran radio Info Tanah Laut, portal berita daerah dan newsvideo di alamat website resmi pemerintah kabupaten tanah laut www.tanahlautkab.go.id.

Indeks keterbukaan informasi publik dihitung dengan menggunakan indikator jenis dokumen yang dipublikasikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ada sebanyak 12 jenis dokumen yang wajib dipublikasikan oleh setiap SKPD. Dari jumlah informasi dan dokumentasi seluruh SKPD yang wajib tersedia dibagi jumlah SKPD maka diperoleh capaian penilaian Keterbukaan Informasi publik Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 yaitu sebesar 58,98. Ini menunjukkan realisasi melebihi target yang ditetapkan sebesar 47,62. Namun jika dianalisis per SKPD, Sebagian besar SKPD telah mempublikasikan seluruh jenis dokumen yang wajib dipublikasikan, hanya ada beberapa SKPD yang belum mempublikasikan dokumennya.

Website PPID (<http://ppid.tanahlautkab.go.id/>) dimana data yang tersedia di dalam website adalah data langsung bersumber dari masing-masing PPID Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasi. Namun dalam pengelolaannya juga terdapat kendala yakni belum semua SKPD memahami akan pentingnya melakukan update data/informasi pada website PPID ini dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik. Untuk kedepannya akan diambil langkah monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Kepala Daerah. Pada tahun 2020 telah dilakukan pembaharuan tampilan dan menu pada website PPID Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.3.1
Tampilan awal website PPID Kabupaten Tanah Laut



Untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk menghimbau setiap SKPD agar aktif mempublikasikan dokumen dan Informasi pada website PPID diantaranya dengan :

Melakukan sosialisasi ke seluruh SKPD tentang teknis pelaksanaan publikasi pada website PPID dan Daftar Informasi Publik yang wajib di publikasikan.

1. Membuat surat edaran Bupati Tanah Laut kepada seluruh SKPD agar aktif mempublikasikan dokumen dan Informasi pada website PPID sebagai dukungan terhadap upaya Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tanah Laut.



2. Menyampaikan rekapitulasi publikasi pada website PPID setiap triwulan sebagai bahan evaluasi bagi SKPD.
3. Mengadakan rapat koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Mengadakan pelatihan pengisian informasi dan dokumentasi pada website PPID Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.3.13
Rekapitulasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO.	NAMA SKPD	% INDEKS KIP			
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	KABUPATEN TANAH LAUT	16	54,375	55,87	58,98
1	RSUD. KH. MANSYUR KINTAP	-	-	44,44	59,09
2	RSUD. H. BOEJASIN	-	-	50	50
3	SEKRETARIAT DAERAH	10	58,3	50	59,09
4	SEKRETARIAT DPRD	20	16,7	14,28	45,45
5	INSPEKTORAT	20	66,7	72,22	36,36
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10	91,7	66,66	68,18
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30	8,3	33,33	81,81
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	40	100	71,42	86,36
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10	58,3	94,44	77,27
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10	91,7	66,66	50
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20	66,7	88,88	72,72
12	SATPOL PP DAN DAMKAR	10	75	52,38	77,27
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	10	66,7	94,44	63,63
14	DINAS KESEHATAN	30	50	44,44	77,27
15	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	30	91,7	55,55	59,09
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40	100	77,77	50



17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	20	58,3	27,77	68,18
18	DINAS PARIWISATA	10	75	94,44	54,54
19	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	10	83,3	61,11	68,18
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	10	75	61,11	59,09
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10	66,7	55,55	59,09
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20	83,3	77,77	4,54
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50	8,3	0	63,63
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	30	41,7	72,22	59,09
25	DINAS PERHUBUNGAN	10	25,0	90,47	63,63
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10	75	44,44	72,72
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10	91,7	61,11	59,09
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	10	58,3	72,22	63,63
29	DINAS SOSIAL	20	50	88,88	63,63
30	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	10	75	100	81,81
31	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	10	100	72,22	86,36
32	KECAMATAN BAJUIN	10	33,3	61,9	81,81
33	KECAMATAN BATI BATI	10	0	0	45,45
34	KECAMATAN KINTAP	10	8,3	0	81,81
35	KECAMATAN KURAU	10	41,7	42,85	40,90
36	KECAMATAN PELAIHARI	10	25	38,09	45,45
37	KECAMATAN TAKISUNG	10	8,3	14,28	54,54
38	KECAMATAN BATU AMPAR	10	0	66,66	0
39	KECAMATAN BUMI MAKMUR	10	0	38,09	50
40	KECAMATAN JORONG	10	50	4,76	27,27
41	KECAMATAN PANYIPATAN	10	100	66,66	72,72
42	KECAMATAN TAMBANG ULANG	10	0	57,14	36,36

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut



Dalam mencapai sasaran Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 60 ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan di dukung oleh 10 Program dengan Pagu Rp. 65,910,511,428,00 dan terealisasi Rp. 53,854,114,514.00 atau sebesar 81.71%.

Tabel 3.1.14
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	33,894,807,823.00	32.289.572.000,00
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,636,958,144.00	1.455.753.288,00
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26,231,786,316.00	16.700.223.024,00
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	660,776,487.00	603.909.494,00
5	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	146,476,998.00	98.905.010,00
6	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	650,126,753.00	423.886.098,00
7	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	44,236,413.00	32.210.600,00
8	Program Penatagunaan Tanah	2,582,353,615.00	2.202.371.000,00
9	Program Pengelolaan Arsip	21,960,000.00	18.600.000,00
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	41,028,879.00	28.684.000,00
Jumlah		65,910,511,428,00	53,854,114,514.00

MISI IV

Mewujudkan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 1 tujuan untuk misi IV yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan suatu indikator yaitu Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama.

Tabel 3.4.1
Indikator Tujuan dan Target Tahun 2023

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	Persen	100%

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama.
2. Meningkatnya wawasan kebangsaan

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 10

Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama

Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama	Konflik	0	3	0%	0	0	100%	0	0	100%

Tabel 3.4.3
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama	Konflik	0	0	100%	0	100%

Kerukunan umat beragama menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten merupakan tugas dan kewajiban Bupati selaku kepala daerah dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.

Realisasi indikator jumlah konflik intern dan antarumat beragama tahun 2022 adalah 100%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 0 konflik dengan tingkat capaian 100%.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berhasil mempertahankan agar tidak terjadi konflik intern dan antarumat beragama selama tahun 2022. Banyak upaya yang dilakukan selama Tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut dan FKUB Kecamatan, FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
2. Penyuluhan pembinaan kepada desa-desa tentang desa peduli toleransi



3. Penyuluhan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
4. Penyuluhan peraturan tentang organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi kedepan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar tidak terjadi konflik intern dan antarumat beragama :

- 1) Melakukan tindakan preventif pencegahan konflik
- 2) Mendeteksi secara dini potensi-potensi terjadinya konflik
- 3) Melaksanakan Program Kegiatan Penyuluhan :
- 4) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- 6) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- 7) Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- 8) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragaman dan pemberdayaan masyarakat.
- 9) Menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
- 10) Melaporkan hasil kegiatan yang berkenaan dengan konflik antar umat beragama di wilayah Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut.
- 11) melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang telah ada secara maksimal dan menambah kuantitas dan kualitas pelaksanaan sosialisasi melalui kegiatan manunggal tuntung pandang (kegiatan bermalam di desa oleh Bupati, wakil bupati beserta ASN) yang dilaksanakan setiap bulan dengan materi terkait toleransi kehidupan umat beragama.

Dalam mencapai sasaran Meningkatkan toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 71 ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp. 1,979,256,893,00 dan terealisasi Rp. 1,917,757,192.00 atau sebesar 96.89%.



Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,587,111,014,00	1.575.021.900,00
2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	145,000,000,00	145,000,000,00
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	247,145,879,00	197.735.292,00
Jumlah		1,979,256,893,00	1,917,757,192.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 11

Meningkatnya wawasan kebangsaan

Meningkatnya wawasan kebangsaan diukur mealui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4.15
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah konflik sosial	Konflik	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											100%

Tabel 3.4.16
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Jumlah konflik sosial	Konflik	0	0	100%	0	100%

Konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan.

Realisasi indikator jumlah konflik sosial tahun 2022 adalah 0 konflik atau tidak ada konflik yang terjadi. Konflik sosial tidak pernah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir di Kabupaten Tanah Laut.

Di Kabupaten Tanah Laut selama beberapa tahun terakhir tidak pernah terjadi konflik sosial. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya konflik melalui sosialisasi kepada anggota masyarakat, organisasi masyarakat, sekolah-sekolah tentang pentingnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan beberapa pendekatan baik antar umat beragama, suku-suku yang ada di Kabupaten Tanah Laut, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh beragama dan membentuk forum-forum kegamaan yang beranggotakan bermacam tokoh agama yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang terbentuk dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) yang keanggotaanya terdiri dari berbagai etnis dan suku yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang juga melaksanakan sosialisasi ke kecamatan dan sekolah-sekolah di Kabupaten Tanah Laut
2. Membentuk Tim Pusat Pendidikan wawasan Kebangsaan dan juga selalu mengadakan pendekatan dengan masyarakat melalui Forum Kewasapadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang beranggotakan berbagai tokoh yang ada di Kecamatan dan Kabupaten. Selain itu juga dilaksanakan rapat FKDM yang juga melibatkan seluruh anggota FKDM seluruh Kecamatan dalam rangka pembinaan tentang pelaporan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.
3. Pembentukan Tim PORA (Pengawasan Orang Asing), anggotanya terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kejaksaan, Polres, Kodim, BIN, dan Badan intelegen Strategis yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
4. Optimalisasi pencegahan konflik sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dengan materi, wawasan kebangsaan, ideology, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta P4GN, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa, pemangku kepentingan, yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
5. Melaksanakan aksi P4GN melalui sidak/raja pada tempat hiburan malam bersama dengan BNN, Keploisian, Satpol PP, deteksi dini dengan cara pemeriksaan urin narkoba kepada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan masyarakat yang ada ditempat hiburan di Tanah Laut.
6. Membentuk Perda tentang Fasilitas Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya.

7. Pembentukan satgas internal anti narkoba di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah banyak melakukan upaya dalam mempertahankan agar tidak terjadi konflik sosial selama tahun 2022. Namun ada 2 permasalahan yang berpotensi menjadi konflik dan secepat mungkin telah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan laporan, terjadi ada 2 (Dua) permasalahan selama tahun 2022 yaitu; Konflik Lahan HGU antara PT. SMART dengan Andi Cs/PANI, tuntutan karyawan PT. Sukses Wijaya Adi Makmur perihal beberapa kewajiban perusahaan yang belum terselesaikan. Kedua permasalahan tersebut telah dimediasi di tingkat Kabupaten, dengan kronologi sebagai berikut :

1. Larangan Lewat badan jalan Desa yang merupakan akses vital warga

Manajemen PTPN 13 bersama Pemerintah Desa Tebingsiring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), melakukan pertemuan dengan kalangan penambang batu gunung, Rabu 2 November 2022, Penambang batu gunung tersebut yang beroperasi di sekitar kebun PTPN 13 yang juga berdekatan dengan Tebing Siring dan Tercatat delapan penambang batu gunung yang beroperasi di wilayah setempat.

Pertemuan bertempat di aula kantor Desa Tebingsiring dipimpin Asisten Humas PTPN 13 Arnold W didampingi Kades Tebingsiring Ketang Subagio beserta kepala Dusun. Dan hadir pula beberapa pihak terkait lainnya. Adapun Agenda pertemuan membahas perbaikan jalan sepanjang 4,7 kilometer di area HGU PTPN 13 yang menjadi akses vital warga Tebing Siring keluar kampung, Kondisi jalan tersebut becek dan licin yang sulit dilintasi pada musim penghujan.

Pada pertemuan tersebut terungkap kalangan penambang batu gunung tersebut selama ini juga melintasi jalan HGU PTPN 13 itu. hanya saja sejak beberapa pekan terakhir tak lagi melintasi menyusul adanya larangan lewat agar badan jalan tersebut tak kian rusak, meski begitu ketika diminta kontribusi menyiapkan material untuk perbaikan jalan tersebut, pihak penambang batu gunung tersebut tetap menyatakan kesiapannya.

Sebelumnya pihak Pemdes Tebingsiring dan PTPN 13 memaparkan keperluan batu gunung untuk memperbaiki badan jalan sepanjang 4,7 kilometer tersebut sekitar 80 ret, dan rencana penanganan jalan tersebut pada rentang waktu dua bulan yakni November dan Desember 2022.

Dua perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah setempat, PT KJW dan CPKA, juga menyatakan kesiapannya membantu material. begitu pula penambang batu gunung dari Puskopad. hahkan pihak penambang batu gunung mempersilakan PT.KJW dan CPKA mengambil material Gratis.

2. Sengketa lahan antara kelompok masyarakat Desa Jorong dengan PT. Sarana Subur Agrindotama (SSA).

Sengketa tersebut sudah memasuki ranah hukum. kasus ini sudah berproses hingga sampai dua lembaga hukum sekaligus, DPRD Tanah Laut (Tala) melalui Komisi I telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk melakukan audiensi terhadap kedua belah pihak pada Senin, 5 September 2022.

Ketua Komisi I DPRD Tala, Yoga Pinis Suhendra mengatakan, pihaknya tetap menjalankan fungsi untuk menampung aspirasi masyarakat meski proses hukum telah berjalan, sebelum audiensi oleh DPRD, kasus ini juga sudah masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Pelaihari, bahkan ada yang membawa hingga ke Polda Kalimantan Selatan, berdasarkan aturan yang ada jika kasus telah berproses pada lembaga hukum, maka pihak legislatif bahkan eksekutif tidak ada wewenang campur tangan.

Pada saat RDPU kemarin dihadiri juga oleh pihak eksekutif melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, ada juga Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tala hingga pihak Kecamatan Jorong melalui Sekretaris Camat. Semua hadir mendengarkan duduk perkara atas kasus ini, namun, karena sudah berproses hukum, maka hanya bisa mengawal sampai ada putusan.

Seperti diketahui, kasus ini mencuat lantaran menurut masyarakat ada beberapa bidang tanah yang dimanfaatkan oleh PT. SSA. Lahan pinjam pakai milik masyarakat sekitar 200 hektare sejak tahun 1980. Di mana, 170 hektare di

antaranya untuk peternakan dan 30 hektare lainnya untuk perkebunan sawit, dan masyarakat berharap ada kompensasi ganti rugi maupun bagi hasil dari pemanfaatan lahan tersebut. Namun, pihak PT. SSA juga punya argumentasi dan bukti tersendiri bahwa tanah tersebut telah menjadi milik mereka karena telah melakukan pembebasan lahan sebelumnya.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya wawasan kebangsaan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 71 ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp. 11,584,574,824,00 dan terealisasi Rp. 9,509,482,299.00 atau sebesar 82.09%.

Tabel 3.1.17
 Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	219,458,136,00	160.279.695,00
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3,449,997,296,00	3.281.106.610,00
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7,915,119,392,00	6.068.095.994,00
Jumlah		11,584,574,824,00	9,509,482,299.00

MISI V

Membangun sinegritas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 5 tujuan untuk misi V yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial
2. Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas
3. Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5. Peningkatan upaya membina desa dan menata kota

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 5 indikator yaitu angka kemiskinan, indeks Pembangunan Infrastruktur, persentase pertumbuhan sektor unggulan daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks desa membangun.

Tabel 3.5.1
Tujuan dan indikator tujuan misi V

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan (%)	Persen	4.35
2	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	73,00
3	Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persen	5.06
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Nilai	61,712
5	Peningkatan upaya membina desa dan menata kota	Indeks Desa Membangun (skor rata-rata)	Nilai	0,720 (Maju)

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 10 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah

3. Menurunnya tingkat pengangguran
4. Meningkatnya perlindungan masyarakat
5. Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas
6. Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah
7. Meningkatnya ketahanan pangan
8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
9. Meningkatnya pembinaan desa
10. Meningkatnya cakupan penataan perkotaan

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 12

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diukur melalui 3 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2022		
			2020	2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,95	3,47	4	5,12	128%
2	Indeks Gini	Skor	0,250	0,232	0,254	0,263	96,58%
3	PDRB Per kapita atas dasar harga konstan	Rp Juta	29,24	29,68	36,81	30,62	83,18%
							102,58%

Tabel 3.5.3
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4	5,12	128%	5,05	101,38%

2	Indeks Gini	Skor	0,254	0,263	96,58%	0,253	96,19%
3	PDRB Per kapita atas dasar harga konstan	Rp Juta	36,81	30,62	83,18%	39,02	78,47%

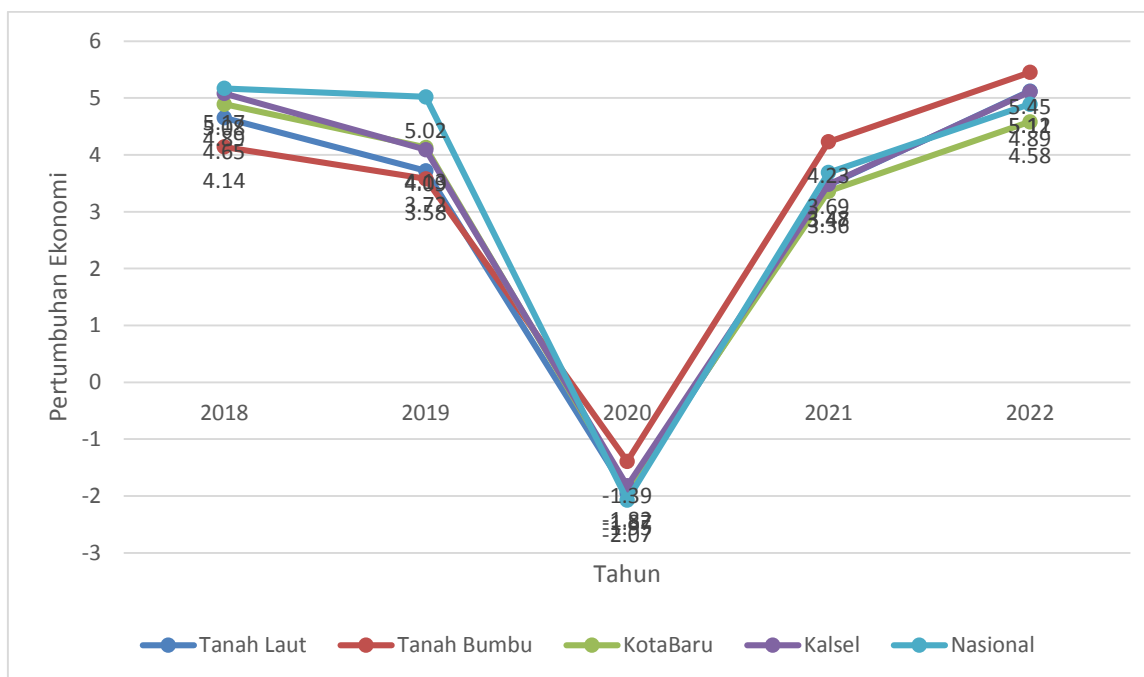
a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut sebesar 5,12 dengan tingkat capaian sebesar 128% dari target sebesar 5,12. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,65 point dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar 3,47.

Berikut perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan kabupaten/kota lain, provinsi dan nasional tahun 2022.

Grafik 3.5.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022

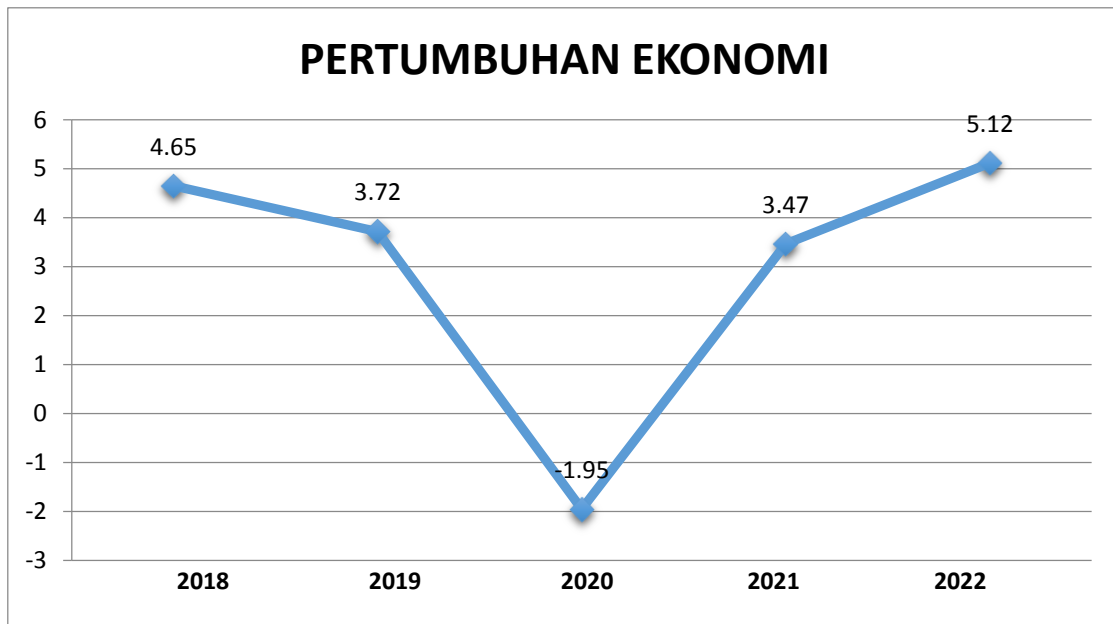


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Di atas disajikan laju pertumbuhan ekonomi beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

berada dibawah Kabupaten Tanah Bumbu tetapi lebih tinggi dari Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

Grafik 3.5.2
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berhasil membangkitkan perekonomian daerah. Hal ini terbukti dengan angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 pada angka 5,12, tahun 2021 berada di angka 3,47 dan pada tahun 2020 di angka -1,95.

Banyak Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0 % untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM dan lain-lain Sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah).

Program ini dijalankan melalui penunjukan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai pengelola investasi (Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha,

dengan Penunjukan Pelaksanaan Pengelolaannya Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanah Laut). Pencapaian program tersebut yaitu :

- a. Diluncurkan “GAPURA KAROMAH” (Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah) pada tahun 2019 dan disalurkan ke kredit 6 Milyar dan yang dikelola oleh BPR 4 Milyar dengan jumlah investasi 10 Milyar.
- b. Tahun 2020 yang disalurkan ke kredit 4 Milyar dan yang dikelola oleh BPR 6 Milyar dengan jumlah investasi 10 Milyar
- c. Tahun 2021 yang disalurkan ke kredit 2 Milyar dan yang dikelola oleh BPR 3 Milyar dengan jumlah investasi 5 Milyar.
- d. Tahun 2022 yang disalurkan ke kredit 6 Milyar dan yang dikelola oleh BPR 4 Milyar dengan jumlah investasi 10 Milyar

Sehingga total yang disalurkan ke kredit berjumlah 18 Milyar dan total yang dikelola oleh BPR berjumlah 17 Milyar dari total seluruh investasi berjumlah 35 Milyar.

Penyaluran Gapura Karomah :

- a. Sektor Pertanian total realisasi 1.384 orang dengan nominal Rp.10.505.550.000 (58,50%)
- b. Sektor Perdagangan total realisasi 400 orang dengan nominal Rp.2.481.000.000 (13,82%)
- c. Sektor Peternakan total realisasi 421 orang dengan nominal Rp. 4.645.000.000 (25,87%)
- d. Sektor Perikanan total realisasi 34 orang dengan nominal Rp.209.000.000 (1,16%)
- e. Sektor Industri total realisasi 20 orang dengan nominal Rp.118.000.000 (0,66%)

Posisi Akhir Desember 2022 Dana yang dikelola Gapura Karomah dengan total penyaluran kredit kepada 2.259 pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Investasi Tahap 1 Dana Masuk 10 Milyar dikembalikan 5.851.416.100 dan sisa dana Rp.4.148.583.900 dengan alokasi dana kredit gapura karomah berjumlah Rp. 148.583.900 dan yang dikelola BPR Rp.4.000.000.000

- b. Investasi Tahap 2 Dana Masuk 10 Milyar dikembalikan Rp. 3.935.223.400 dan sisa dana Rp 6.064.776.600 dengan alokasi dana kredit gapura karomah berjumlah Rp. 64.776.600 dan yang dikelola BPR Rp.6.000.000.000
 - c. Investasi Tahap 3 Dana Masuk 5 Milyar dikembalikan Rp. 1.965.000.000 dan sisa dana Rp 3.035.000.000 dengan alokasi dana kredit gapura karomah berjumlah Rp.35.000.000 dan yang dikelola BPR Rp.3.000.000.000
 - d. Investasi Tahap 4 Dana Masuk 10 Milyar dengan alokasi dana yang disalurkan untuk kredit gapura karomah berjumlah Rp.6.000.000.000 dan yang dikelola BPR Rp.4.000.000.000.
2. Memperkuat permodalan kepada pelaku UMKM dengan memaksimalkan program Nasional yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Capaian serapan KUR ditahun 2022 adalah sebesar Rp. 530.505.850.000,- (lima ratus tiga puluh milyar lima ratus lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah ini meningkat sebesar Rp. 124.366.747.671 dari tahun 2021 yaitu Rp 406.139.102.329,- (empat ratus enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), atau meningkat sebesar 30,62%. Capaian penyaluran pembiayaan UMi (Ultra Mikro) di Tahun 2022 sebesar Rp 3.542.700.000 (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau meningkat 35,03% di bandingkan penyaluran tahun 2021.
- Tahapan-tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan upload data calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) potensial untuk dapat dibiayai KUR kedalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan penanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
 - b. Mengidentifikasi data calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di upload oleh penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai wilayah masing-masing kedalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
 - c. Melakukan pendampingan/monitoring dan evaluasi atas kredit yang diterima atau calon yang belum berhasil mengakses kredit.
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) minimal 1 kali dalam

sebulan melalui yang terkoordinasi maupun yang dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- e. Membuat Iklan KUR
 - f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Laut melalui Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 - g. Mendorong koperasi – koperasi yang ada di Tanah Laut untuk menjadi penyalur pembiayaan Umi.
3. Kebijakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha BUMD;
Dalam rangka peningkatan dan pengembangan BUMD telah dilaksanakan beberapa kebijakan antara lain:
- a) Mengajukan draft rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal kepada PT. BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp 53.000.000.000 (lima puluh tiga milyar rupiah) dan telah di setuju oleh DPRD Kabupaten Tanah Laut
 - b) Mengajukan draft rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal kepada PT. BPR Tanah Laut sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan telah beproses di DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk dibahas dan disahkan
 - c) Melakukan evaluasi kinerja PDAM Tanah Laut bekerja sama dengan BPKP Kalimantan Selatan, Kinerja PDAM Tanah Laut sekarang sudah semakin membaik
 - d) Melakukan evaluasi kinerja PD. Baratala dan melakukan penyusunan kajian analisis untuk penambahan modal Pemerintah Kepada PD. Baratala
 - e) Melaksanakan asistensi dan penilaian terhadap RKAP masing – masing BUMD.
4. Kebijakan dalam rangka antisipasi kenaikan harga Gas LPG 3 Kg bersubsidi selama pandemi covid 19;
Kebijakan dalam rangka mengawasi distribusi gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Tanaha Laut antara lain:
- a) Meminta kepada agen penyalur Gas LPG 3 Kg Bersubsidi agar mengirimkan data rencana pengiriman mingguan dan bulanan Gas LPG



- 3 Kg Bersubsidi kepada pangkalan sebagai bahan pengawasan Tim Penertiban dan Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi
- b) Meminta kepada PT. Pertamina MO Kalselteng untuk membuka pangkalan – pangkalan baru di desa – desa yang masih kekurangan berdasarkan data kebutuhan dari timwastibGas Kabupaten Tanah Laut.
 - c) Secara berkala melakukan sidak kepada toko dan warung non pangkalan yang masih menjual Gas LPG 3 Kg Bersubsidi
 - d) Menerbitkan kartu kendali khusus untuk masyarakat miskin.
5. Penggunaan Market Place Tanah Laut “SOSIALITA” (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut untuk memberdayakan UKM dan UMKM yang ada di Tanah Laut.
6. Program Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Sebesar 50%.
- Peningkatan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk perwujudan visi misi Kabupaten Tanah Laut pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 yaitu “Desa Dibina Kota Ditata” dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tanah Laut untuk pagu tahun anggaran 2018-2021 adalah sebesar :
- a. Tahun 2018, ADD yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 76.717.987.513,00 atau 10% dari jumlah DAU dan DBH yang diterima, untuk 130 Desa di Kabupaten Tanah Laut
 - b. Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 132.096.433.930,00 atau mengalami kenaikan 72% dari tahun 2018
 - c. Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 138,765,257,820,00 atau mengalami kenaikan 81% dari tahun 2018 dan 5% dari tahun 2019.
 - d. Realisasi bantuan keuangan ADD tahun 2021 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%.
 - e. Realisasi bantuan keuangan ADD tahun 2022 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%.

Dengan memperhatikan potensi ekonomi serta berbagai hal terkait pencapaian target pembangunan di masa yang akan datang, maka beberapa kebijakan perlu disiapkan, diantaranya:

Perubahan basis ekonomi

Ketergantungan yang besar pada hasil eksploitasi alam akan menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam memperhatikan kualitas lingkungan serta keterbatasan dalam potensi yang dimilikinya, sehingga perlu diupayakan kedepan Kabupaten Tanah Laut memiliki basis ekonomi yang berdasarkan pada potensi alam yang dimiliki dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Perlu disiapkan kesepakatan dan perangkat kebijakan yang mendukung perubahan dari basis ekonomi primer menjadi basis ekonomi sekunder dan tersier untuk pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.

Pertanian dan Industri

Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian adalah dengan cara peningkatan nilai tambah. Salah satu caranya adalah menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku industri yang terdapat pada daerah tersebut. Industri pengolahan makanan yang bahan bakunya berasal dari wilayah setempat, selain mampu menggerakkan ekonomi juga mampu melibatkan banyak aktor ekonomi lokal sehingga memungkinkan penciptaan angka pengganda yang tinggi. Perangkat kebijakan yang diperlukan adalah mendorong suasana kondusif bagi kegiatan investasi dalam pengembangan industri pengolahan hasil pertanian agar lebih mendorong para investor baik lokal maupun nasional untuk masuk ke Kabupaten Tanah Laut. Disamping itu diperlukan seperangkat kebijakan untuk mendukung kegiatan investasi di bidang industri melalui penyiapan infrastruktur pendukung untuk membantu kegiatan industri dalam mencapai tingkat efisiensi dalam berusaha.

Upaya peningkatan perhatian pada kualitas lingkungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas ekonomi selalu bersinggungan dengan menurunnya kualitas lingkungan sekitar jika tidak ditangani dengan benar. Upaya meningkatkan aktivitas industri dalam upaya peningkatan nilai tambah perlu disertai dengan kebijakan lingkungan. Mitigasi resiko atas kegiatan-kegiatan

industri yang akan memberikan kontribusi bagi peningkatan polusi dan kerusakan lingkungan harus diidentifikasi sejak dini.

Seperangkat aturan, baik yang berisi tentang kewajiban dan dukungan pemerintah daerah terkait masalah lingkungan harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak.

Pemanfaatan dan optimalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pelabuhan laut berstandar internasional

Jika PSN dan pelabuhan laut di Kabupaten Tanah Laut benar-benar terealisasi sebagaimana rencana yang telah disusun, maka pemanfaatannya harus benar-benar direncanakan dengan baik. PSN ini diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu, pelabuhan laut berstandar internasional ini akan berfungsi sebagai pintu masuk maupun keluar bagi semua barang/produk baik faktor produksi maupun hasil industri bagi Kabupaten Tanah Laut maupun juga bagi daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keduanya, diperlukan dukungan kelengkapan infrastruktur ekonomi yang berkualitas sebagai penghubung/penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan, karena hierarki suatu kota yang besar akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang.

Menjaga daya beli masyarakat

Komponen terpenting dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut adalah tingginya konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan konsumsi masyarakat masih mendominasi aktivitas ekonomi, sehingga kemampuan daya beli masyarakat harus dipertahankan agar komponen konsumsi ini tetap mampu memberikan dukungan pada ekonomi daerah. Oleh karena itu kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli

masyarakat sangat diperlukan. Kebijakan ini dapat melalui pencapaian pendapatan per kapita yang meningkat, kebijakan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), kebijakan pengamanan ketersediaan bahan yang dibutuhkan masyarakat melalui penataan logistik yang sesuai, dan lain sebagainya.

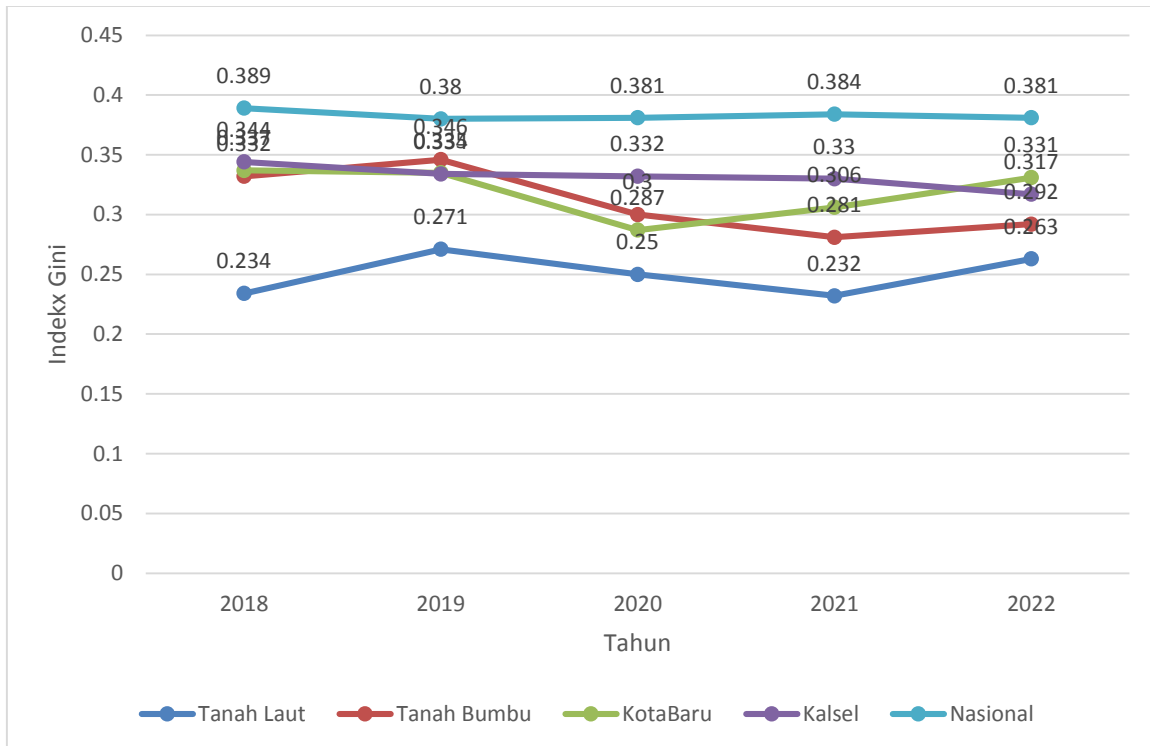
Peningkatan peran perbankan

Perbankan yang memainkan peran penting dalam perekonomian perlu diberikan porsi yang lebih besar agar lebih berperan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi sektoral. Melalui aktivitas perbankan, baik peningkatan sisi simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) maupun penyaluran melalui kredit akan sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Maka dibutuhkan pendekatan yang sesuai agar perbankan memberikan perhatian dan dukungan bagi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut melalui penyaluran kredit pada sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian, misalnya industri dan pertanian.

b. Indeks Gini

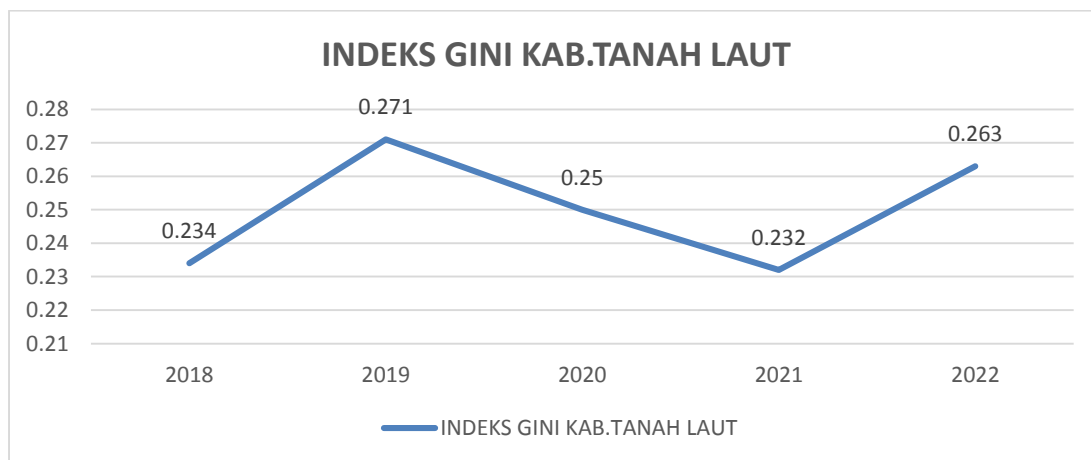
Indeks Gini Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 sebesar 0,263, naik sebesar 0,031 poin dari nilai pada tahun 2021 sebesar 0,232. Indeks Gini tahun 2022 belum mencapai target sebesar 0,254 atau tingkat capaiannya sebesar 96,57%.

Grafik 3.5.3
Indeks Gini Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Grafik 3.5.4
Indeks Gini Kab. Tanah Laut 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Selama periode 2018-2022 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2020 gini ratio tercatat sebesar 0,250 atau mengalami penurunan sebesar 0,020 dibanding tahun 2019. Sementara pada tahun 2022 gini ratio tercatat sebesar 0,263 atau mengalami peningkatan sebesar 0,031 dibanding tahun 2021. Artinya distribusi pengeluaran penduduk Kabupaten Tanah Laut cenderung

semakin menimpang. Namun demikian, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Tanah Laut masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah karena nilainya masih dibawah nilai 0,3.

Upaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengurangi ketimpangan di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan angka stunting berdasarkan eppgbm tahun 2022 dengan Prevalansi stunting 5,35, mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 15,5%.
2. Pelaksanaan program UHC (*Universal Healt Coverage*) bagi seluruh masyarakat Tanah Laut dengan program JKN KIS melalui APBD bagi masyarakat yang belum tercover oleh APBN, maupun JKN KIS mandiri. Dengan total jumlah penduduk yang belum terdaftar adalah 11.618 jiwa atau sebesar 3,29,% dari seluruh jumlah penduduk yaitu 348.226 jiwa (data penduduk hasil registrasi Disdukcapil Tahun 2022).
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yaitu dengan pembangunan jalan dan jembatan, box culvert dengan data lengkap sebagaimana tersaji pada indikator indeks pembangunan infrastruktur.
 - a) Berusaha menurunkan angka kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada warga masyarakat termasuk PMKS. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 3.5.4

Uraian Program Berdasarkan Sumber Dana

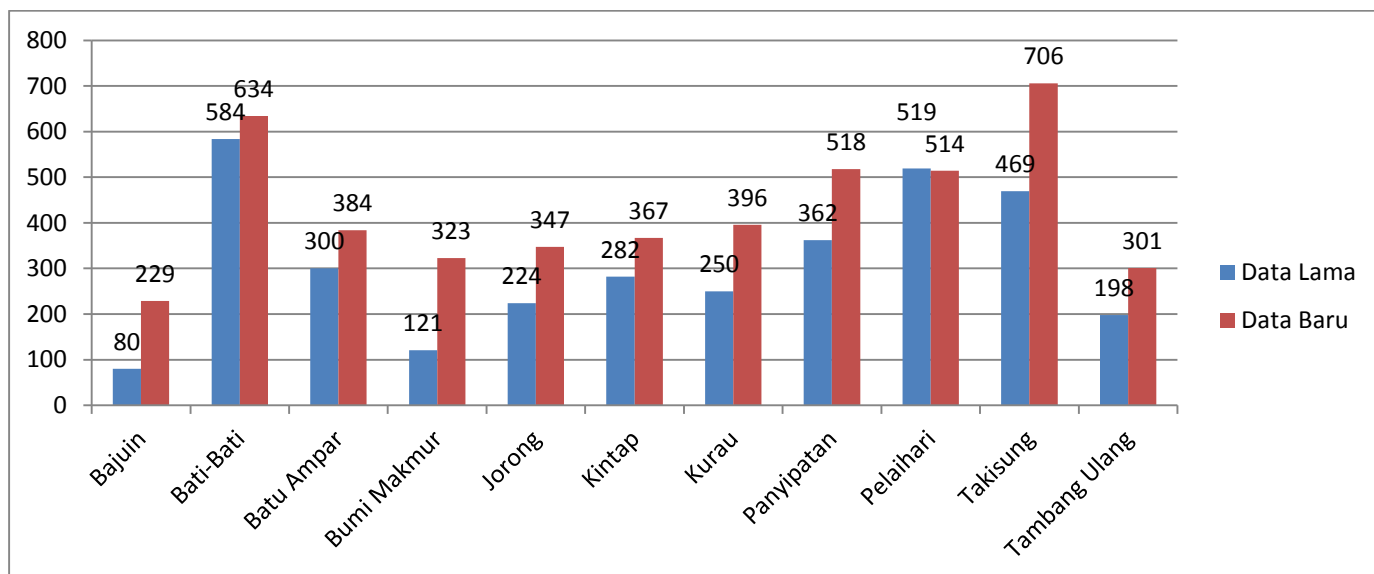
No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Jumlah	Sumber Dana	
				APBN	APBD
1	KUBE	Keluarga Fakir Miskin	1		APBD I
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga Fakir Miskin	5.896 KPM	APBN	
3.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Keluarga Fakir Miskin	23.626 KPM	APBN	

4.	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	4.807 Jiwa		APBD
5	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	70.496 Jiwa	APBN	
6.	Bantuan Sosial Dampak Inflasi	Lansia, Disabilitas, dan Fakir Miskin	6.753 KPM		APBD
7	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas	40 Orang		APBD

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan mengusung Program Unggulan Bupati Tanah Laut yaitu 500 orang siap kerja per tahun berhasil meningkatkan kompetensi sebanyak 924 orang selama tahun 2022.
- Pembinaan IKM oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menjadi IKM yang tumbuh dan berkembang di tahun 2022 dengan total IKM adalah sebanyak 4.719 IKM.

Grafik 3.5.5
Jumlah IKM Tahun 2022 di Kab. Tanah Laut



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

6. Tumbuhnya pasar-pasar dan toko online yang menjangkau sampai dengan pelosok daerah seperti Pasar Pelaihari Online, Ojek Online, Pasar Takisung Online.
7. Pengalokasian ADD sebesar Rp. 115.040.966.190 terealisasi sebesar Rp. 115.040.966.190 atau sebesar 100%.

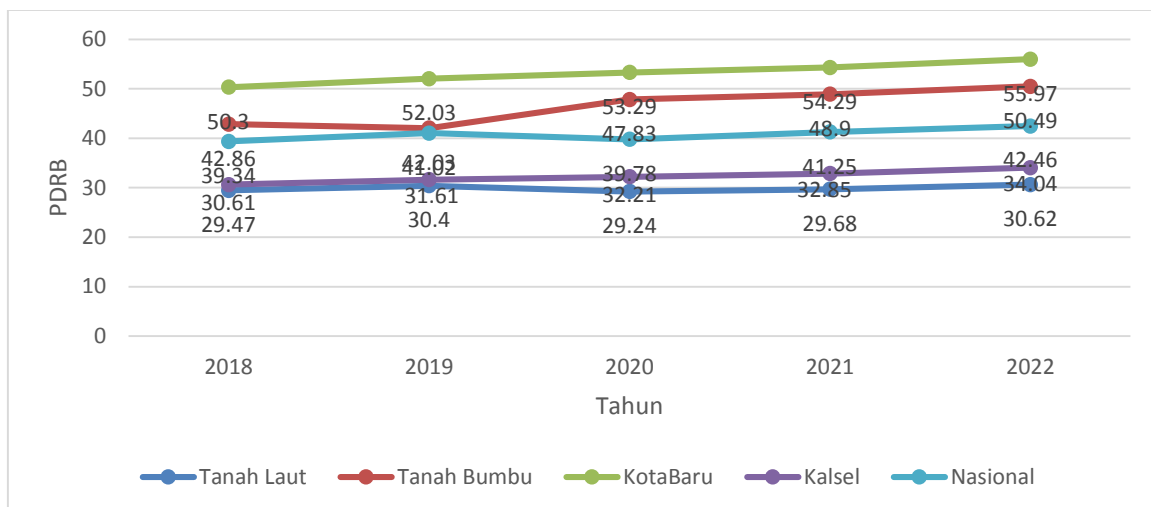
Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan dalam rangka penurunan Gini Ratio adalah:

- a. Terus mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penurunan stunting yg merupakan rencana aksi daerah dalam pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting.
- b. Pelaksanaan penanggulangan stunting dengan memfokuskan pada 20 Lokus Desa Stunting pada 4 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2023.
- c. Pembinaan terhadap industri industri kecil dan mikro;
- d. Terus melakukan pelatihan tenaga kerja siap pakai 500 orang setiap tahun yang merupakan program unggulan Bupati.
- e. Pemagangan tenaga kerja dengan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan.
- f. Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam hal pemagangan tenaga kerja.

c. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan

Realisasi indikator PDRB Perkapita atas dasar harga konstan tahun 2022 adalah sebesar 30.62 juta rupiah mengalami peningkatan sebesar 0,94 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 29,68 juta rupiah. Realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 36,81 juta rupiah dengan tingkat capaian 83,18%. Berikut perbandingan PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Tanah Laut dengan kabupaten/kota lain, provinsi dan nasional tahun 2022.

Grafik 3.5.6
Perbandingan PDRB per kapita atas dasar harga konstan Regional
(juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan dengan angka 30.62 (juta rupiah) lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka masing-masing 55,97 dan 50,49 (juta rupiah). Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 34,04 (juta rupiah), terpaut berbeda 3,42 (juta rupiah) dan lebih rendah sebesar 11,84 (juta rupiah) jika dibandingkan dengan nasional sebesar 42,46 juta rupiah. Berikut disajikan PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut tahun 2016-2022.

Tabel 3.5.5
PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB/GRPD(Milyar Rupiah/Billion rupiahs)							
ADHB/ at current price	11.392,82	12.329,41	13.241,24	13.902,30	13.786,69	15.326,24	19.019,17
ADHK/ at 2010 Constant Price	9.127,65	9.550,76	9.995,21	10.366,65	10.164,06	10.515,15	11.053,37
PDRB per Kapita/Per Capita GRPD (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)							
ADHB/ at current price	34.598,55	36.878,19	39.037,24	40.773,03	39.659,54	43.252,93	52.678,29
ADHK/ at 2010 Constant Price	27.719,51	28.567,05	29.467,46	30.403,58	29.238,50	29.675,33	30.615,03
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of per Capita GDRP at 2010Constant Price	1,67	3,06	3,15	3,18	-3,83	1,51	3.17



Jumlah Penduduk (orang)/ Population (people)	329.286	334.328	339.195	340.968	347.626	354.340	361.044
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)/ Population Growth (percent)	1,54	1,53	1,46	0,52	1,95	1,93	1,89

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel diatas. Selama tahun 2016-2022, PDRB per kapita atas dasar harga konstan Tanah Laut semakin meningkat setiap tahunnya dari 27,719 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 30.615,03 juta rupiah pada tahun 2022. Tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB perkapita dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu dari 30.403 juta rupiah menjadi 29,238 juta rupiah.

PDRB per kapita Tanah Laut selama tahun 2016-2021 sebagian besar mengalami pertumbuhan yang meningkat semenjak tahun 2016. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Tanah Laut dalam kurun waktu yang sama

Grafik 3.5.7
ADHK/ AT 2010 CONSTANT PRICE



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Peningkatan PDRB perkapita ADHK di tahun 2020 mengalami penurunan dibanding Tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19 yang melanda hampir diseluruh dunia dimana diberlakukannya pembatasan ekonomi berskala besar yang membatasi pergerakan masyarakat terhadap kegiatan perekonomian. Covid 19 menyebabkan banyaknya Pekerja yang di PHK mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, selain itu juga bertambahnya penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut, dimana data dari Dinas Sosial jumlah PMKS pada Tahun 2019 sebanyak 31.847 jiwa dan di Tahun 2020 menjadi 45.090 jiwa, dan meningkat lagi di Tahun 2021 menjadi 109.173 dikarenakan terjadinya bencana banjir dan masih adanya pandemic Covid 19 di Kabupaten Tanah Laut.

Pada tahun 2022 PDRB perkapita ADHK di tahun 2022 kembali meningkat pada angka 30.61,03 juta rupiah. Hal ini disebabkan menurunnya jumlah PMKS di Kabupaten Tanah Laut pada angka 75.696 jiwa.

Dalam mencapai sasaran Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 115 ASN pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 110 ASN pada Distanshorbun, 72 ASN pada Diskopdag, 61 ASN pada DPMPTSP dan di dukung oleh 19 Program dengan Pagu Rp. 28,510,754,246,00 dan terealisasi Rp. 26,547,739,166.00 atau sebesar 82.09%.

Tabel 3.1.17
Realisasi Program Penunjang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	619,160,328,00	483.425.992,00
2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	154,509,542,00	133.855.500,00
3	Program Penyuluhan Pertanian	1,634,699,687,00	1.462.796.852,00
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	16,721,679,00	16.594.000,00
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,505,537,697,00	1.469.524.052,00
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14,598,659,882,00	13.599.572.850,00
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	7,262,351,324,00	7.071.965.400,00
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	739,301,821,00	622.938.000,00



9	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	20,000,000,00	10.781.250,00
10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	329,600,268,00	323.832.250,00
11	Program Pengembangan Ekspor	-	-
12	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	43,822,408,00	35.957.000,00
13	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-
14	Program Pelayanan Penanaman Modal	115,856,646,00	87.437.750,00
15	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	419,903,600,00	297.118.873,00
16	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70,543,892,00	68.096.800,00
17	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	468,999,456,00	431.631.847,00
18	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	424,167,701,00	348.570.500,00
19	Program Promosi Penanaman Modal	86,918,315,00	83.640.250,00
		28,510,754,246,00	26,547,739,166.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 13

Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan

Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.18
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88.5	87.19	98.52	88.75	86.86	97.87	89	87,28	98,07%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											98,07%

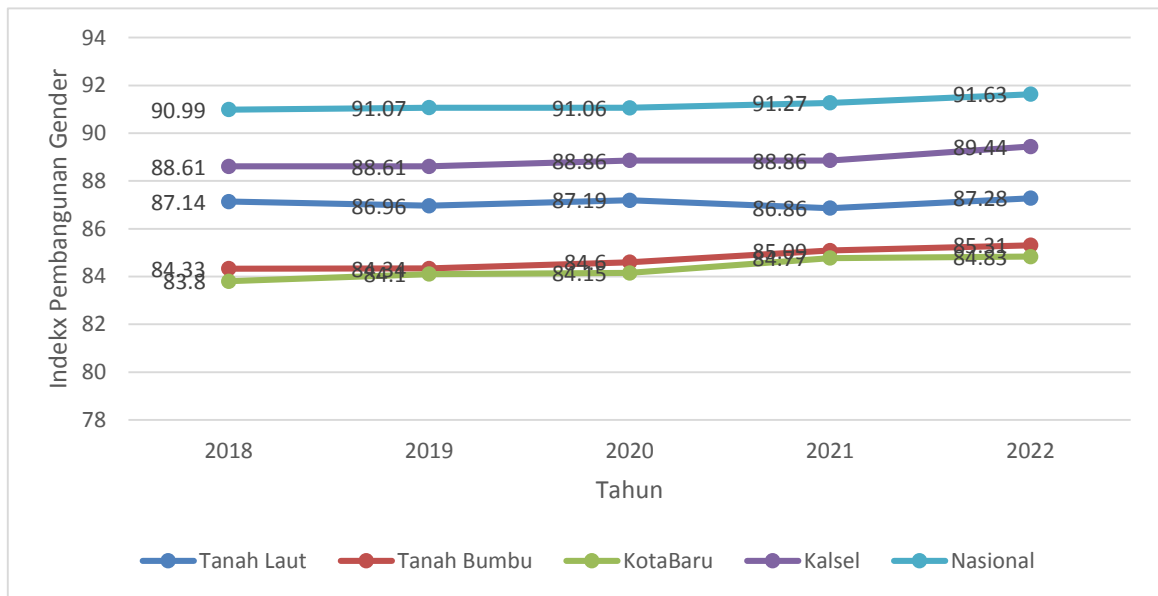
Tabel 3.5.19
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89	87,28	98,07%	89,50	98,06%

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sendiri digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender).

Realisasi indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 adalah 87,28. Belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 89 dengan tingkat capaian 98,07%. mengalami peningkatan 0,09 point jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 87,28. Realisasi tersebut sudah mencapai 98,06% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 89,50. Berikut perbandingan indeks pembangunan gender Kabupaten Tanah Laut dengan kabupaten/kota lain, provinsi dan nasional tahun 2022.

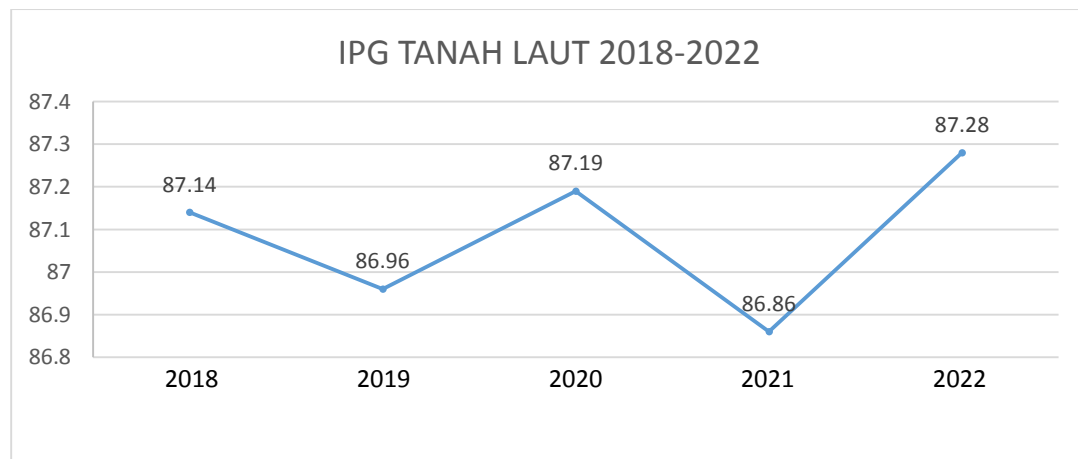
Grafik 3.5.8
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022



Sumber : BPS Kalimantan Selatan

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, Indeks pembangunan gender Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 pada skor 87,28, lebih rendah 2,16 point jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 89,44 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional dengan angka 91,63. Berikut grafik perkembangan indek pembangunan gender Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2018-2022.

Grafik 3.5.9
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanah Laut 2018-2022





Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Indikator komposit yang ada adalah Harapan Lama Sekolah, Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per kapita. Dari sisi pendidikan perempuan Kab.Tala telah mendapat kesempatan yg sama dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang, yang tercermin dari persentase yg menerima ijazah akhir, rasio APM, serta angka HLS, namun jika dilihat dari rata-rata Angka Lama Sekolah, laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan. Partisipasi perempuan meningkat dalam pemerintahan yang tercermin dari angka persentase jumlah ASN perempuan yang meningkat, namun dalam lembaga legislatif, keterwakilan perempuan masih rendah pada periode 2019-2023 yaitu 20% (7 perempuan dari 35 anggota dewan).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui DP2KBP3A dalam penyataan gender diantaranya sebagai berikut:

1. Penyempurnaan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan agar selalu mendapat masukan dari perspektif gender.
2. Pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan daerah agar berspektif gender.
3. Peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam menerapkan PUG.
4. Perlunya penguatan mekanisme koordinasi, dan sinergi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG.
5. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat.
6. Penguatan system penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah.
7. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.
8. Pendekatan pembangunan yang mengkoordinir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
9. Mengupayakan perbaikan terhadap posisi perempuan dalam kependudukan di masyarakat melalui peningkatan pemahaman pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan.
10. Melakukan analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk

memastikan ada keadilan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.



Keterangan : Foto kegiatan Launching Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) di Desa Ramah Perempuan dan Anak tanggal 02 Maret 2022.



Keterangan : Foto kegiatan Pembinaan ke Kelompok Home Industri Perempuan tanggal 14 Maret 2022.

Beberapa faktor penghambat yaitu :

1. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender (PUG).
2. Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Masih belum meratanya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tatanan pembangunan.
4. Rendahnya presentasi perempuan yang menduduki jabatan di eselon I dan II.

Faktor Pendukung dalam mencapai SDGs 8 yaitu :

1. Adanya kerjasama yang baik dengan lintas sektor yang tertuang dalam SK Bupati tentang Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga.
2. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung TPK2D terlihat dalam aktifnya masyarakat dalam mengikuti pembinaan-pembinaan.
3. Mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga.
4. Pembentukan kelompok-kelompok baru industri rumahan di masyarakat.



Keterangan : Foto kegiatan Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tanah Laut Di Desa Sumber Mulia tahun 2022



Keterangan : Foto kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita dalam rangka Pelatihan Eco Enzim di Kecamatan Tambang Ulang tahun 2022.



Keterangan : Foto kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita dalam rangka Pelatihan Keterampilan Perempuan Pembuatan Pengolahan Tudung Saji tahun 2022.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

1. Perlunya penyelarasan waktu dan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi wanita.
2. Pengusulan penambahan tenaga administratif sehingga kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tercapainya realisasi sesuai dengan target.
3. Penambahan dana untuk lebih meningkatkan kegiatan

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 68 ASN pada DP2KBP3A dan di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp. 11,584,574,824,00 dan terealisasi Rp. 9,509,482,299.00 atau sebesar 82.09%.

Tabel 3.5.17
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	157,501,937,00	134.845.030,00
2	Program Perlindungan Perempuan	291,711,210,00	97.903.525,00
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	171,170,679,00	108.100.816,00
	Program Perlindungan Khusus Anak	497,807,295,00	230.717.619,00
Jumlah		11,584,574,824,00	9,509,482,299.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 14

Menurunnya tingkat pengangguran

Menurunnya tingkat pengangguran diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.18
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,00	3,57	84%	4,00	3,52	112%	3,4	4,17	81,53%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											81,53%

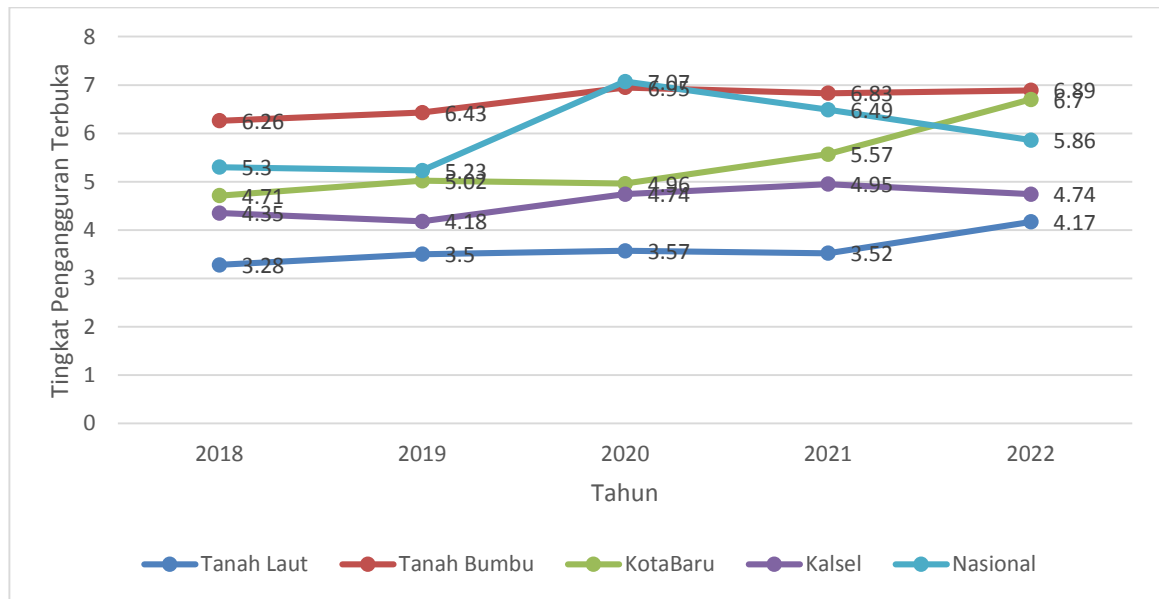
Tabel 3.5.19
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,4	4,17	81,53%	2,5	60,38%

TPTP kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah sebesar 4,17 mengalami peningkatan sebesar 0,65 poin dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 3,52. Tren perkembangan TPT selama kurun waktu 2013-2022 mengalami naik turun dimana angka tahun 2013 adalah 2,99 meningkat menjadi 4,53 di tahun 2015 dan sebesar 4,17 pada tahun 2022.

Grafik 3.5.10

Tingkat pengangguran terbuka Kab/Kota di Kalimantan Selatan dan Nasional



Sumber data BPS Kalimantan Selatan

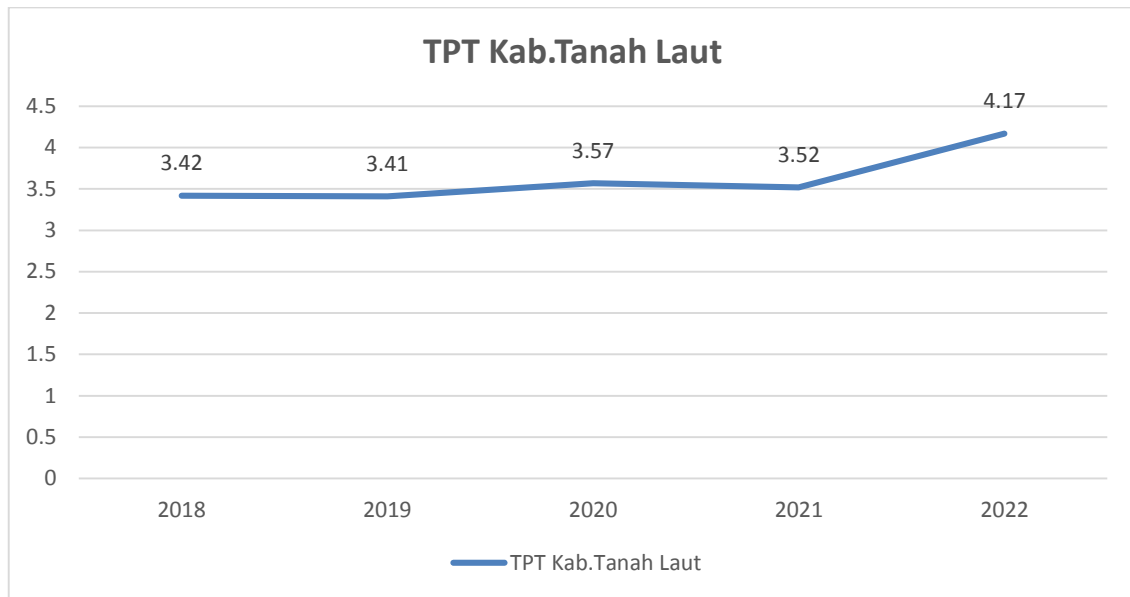
Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 untuk regional Kalimantan selatan, tingkat pengangguran terbuka **Kabupaten Tanah Laut lebih rendah** dibanding Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka 6.89% dan Kabupaten Kotabaru dengan angka 6.70%.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Laut yaitu 4,17%, **lebih rendah 0,57%** jika dibandingkan **dengan Provinsi Kalimantan Selatan** dengan angka 4,74% dan **lebih rendah 1,69%** jika di bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka **Indonesia** dengan angka 5,86%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka (PT) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mereka yang mencari pekerjaan
2. Mereka yang mempersiapkan usaha
3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan
4. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Grafik 3.5.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut per Agustus 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan :

TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP : Jumlah pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

(Sumber data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan

menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT pada tahun 2022 sebesar 4,17 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur.

TPT yang mengalami peningkatan pada tahun 2022 menggambarkan masih diperlukannya peran Pemerintah Daerah untuk mengayomi masyarakat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu disaat perekonomian masih dalam tahapan pemulihan akibat adanya Pandemi Covid-19, ternyata faktor cuaca yang tidak menentu pada tahun 2022 diawali dengan Fenomena La Nina lemah, IOD Negatif, menghangatnya suhu permukaan laut yang menggambarkan anomaly cuaca ekstrim, sehingga terjadi gagal panen di padi palawiaja, dan kesulitan menangkap ikan baik di perairan laut dan perairan darat dimana keseluruhan ini merupakan sektor lapangan kerja utama penduduk bekerja di Kabupaten Tanah Laut. Sementara mayoritas penduduk bekerja di sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan yaitu sebesar 49,52% pada Tahun 2022.

Memperhatikan amanat UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 pasal 4, Visi, Misi, dan 7 (tujuh) program unggulan Bupati dan Wakil Bupati serta tantangan dan permasalahan sektor ketenagakerjaan pada saat ini dan di masa depan maka **tujuan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** secara lebih spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan pertumbuhan, persebaran, dan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor lapangan usaha** yang diampu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis lainnya, yang terdiri atas 17 sektor yaitu :
 - a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - b. Pertambangan dan Penggalian;
 - c. Industri Pengolahan;
 - d. Pengadaan Listrik dan Gas;
 - e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
 - f. Konstruksi;
 - g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
 - h. Transportasi dan Pergudangan;

- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
 - j. Informasi dan Komunikasi;
 - k. Jasa Keuangan dan Asuransi;
 - l. Real Estate;
 - m. Jasa Perusahaan;
 - n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
 - o. Jasa Pendidikan;
 - p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
 - q. Jasa Lainnya.
- 2) sehingga terjadi peningkatan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran terjadi akibat dari ketidakseimbangan antara tersedianya lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan
- 3) Meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja sehingga mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi serta menyandang status dan jenis ketenagakerjaan lebih baik. Rendahnya kualitas angkatan kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan (kompetensi) menjadi permasalahan bagi tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan fleksibilitas pasar kerja dengan cara memberi kesempatan lebih luas bagi dunia usaha maupun masyarakat untuk berperan dalam pembangunan tenaga kerja. Pemecahan permasalahan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- 5) Meningkatkan perlindungan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Perlindungan tenaga kerja mencakup jaminan pemenuhan hak dasar pekerja, penyediaan jaminan sosial (BPJS) bagi pekerja formal dan informal, pencegahan pekerja anak, dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan diperlukan kebijakan umum yang menitikberatkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yaitu :

1. *Kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan* terutama dari sisi penguatan kebutuhan (*demand*) mencakup:

- 1) Mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar tenaga kerja;
 - 2) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
 - 3) Meningkatkan kerja kepada sumber daya produktif;
 - 4) Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan;
 - 5) Memfungsikan pasar tenaga kerja:
2. *Kebijakan umum pengendalian penduduk*, mencakup pembangunan di bidang kesehatan penduduk/masyarakat untuk mendorong terciptanya tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing, dan kebijakan pengendalian tambahan angkatan kerja, termasuk upaya menahan anak untuk tetap bersekolah ketika mereka merupakan Angkatan kerja di usia sekolah. Dengan pendekatan menanamkan pentingnya nilai pendidikan bagi masa depan anak-anak dalam keluarga.
 3. *Kebijakan umum Investasi*. Kebijakan penanaman modal akan dapat memberi arah bagi upaya pengembangan dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya akan membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja baru.

Pelaksanaan Kebijakan Umum di atas harus di dukung dengan **Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Tersedianya penduduk usia kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar perencanaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar perencanaan tenaga kerja, karena dengan demikian pada umumnya akan terbuka ketersediaan perluasan dan peluang pasar kerja yang lebih besar dan berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas otomatis akan dicari oleh berbagai pelaku usaha didalam maupun luar negeri. Pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal namun juga kegiatan-kegiatan pendidikan informal termasuk pendidikan keluarga, pendidikan agama serta kegiatan yang terkait yang dapat menumbuhkan minat belajar.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.5.20

 Rekapitulasi Data Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja
 Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kab. Tanah Laut

No	Lembaga Penyelenggara	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Org)			Jumlah Kelulusan (Org)		Sumber Dana	Keterangan
			L	P	Jumlah	Pelatihan / Pemagangan	Uji Kompetensi		
1	BBPLK Semarang	PBK Institutional Boarding	1	5	6	6	6	APBN	
2	BLK Pelaihari	PBK Institutional non Boarding	107	133	240	240	176	APBN	15 Paket
		Pelatihan yang dilaksanakan di Desa	32	80	112	112	0	APBD	7 Paket
JUMLAH Pelatihan oleh BLK Pelaihari			139	213	352	352	176		
3	BLK Komunitas	PBK Institutional non Boarding	25	39	64	64	30	Mandiri dan APBN	2 Paket Mandiri, 2 Paket APBN
4	LPK Swasta	PBK Institutional Boarding	153	370	523	472	62	Mandiri	
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Kal-Sel	Pemagangan Dalam Negeri	26	4	30	30	30	APBN	3 Paket
JUMLAH PBK			312	551	863	812	304		
JUMLAH PBK & PELATIHAN DI DESA OLEH BLK PELAIHARI			344	631	975	924	304		

Adapun kebijakan terkait dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan di bidang pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Tetap melaksanakan Program Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang Pertahun yang merupakan salah satu dari tujuh program unggulan Bupati Tanah Laut.
2. Mendorong tersedianya lembaga-lembaga pelatihan yang pelatihannya berorientasi pada duna kerja. Dengan demikian, amgkatan kerja tidak langsung masuk pasar kerja, akan tetapi terserap lebih dahulu ke Lembaga pelatihan, sehingga menciptakan keluaran berupa tenaga kerja yang lebih siap pakai.

3. Revitalisasi Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) melalui perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pelatihan yang ada, serta mendorong UPTD Balai Latihan Kerja untuk semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk pula melaksanakan pelatihan ke desa dengan akses dana desa, berdasarkan hasil musrembang.
4. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa yang diselenggarakan baik dinas pendidikan maupun SKPD teknis lainnya;
5. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha produktif melalui BLK Komunitas;
6. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para pencari kerja, melalui bantuan sarana prasarana LPK Swasta.
7. Penciptaan kemudahan akses informasi pelatihan melalui IT, sertifikasi dan penempatan (kios 3 in 1) bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja;
8. Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur secara bertahap melalui up grading, uji on the job training instruktur;
9. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi secara konsisten, didukung pengembangan TUK (Tempat Uji Kompetensi);
10. Mengarahkan Pelatihan Berbasis Masyarakat untuk mendorong terciptanya lapangan kerja usaha baru dan mendorong keberanian untuk memulai usaha baru (penumbuhan wirausaha baru) bagi pencari kerja muda, baik sarjana baru maupun non sarjana. Termasuk pengembangan pelatihan alih kerja (PAKER) atau alih profesi pekerja ter-PHK;
11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan kerja di berbagai bidang keahlian, melalui Lembaga pelatihan kerja dengan memperhatikan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
12. Sertifikasi kompetensi di akhir pelatihan dan pelaksanaan Uji Kompetensi bagi lulusan BLK Pemerintah, BLK Komunitas, LPK Swasta oleh lembaga Sertifikasi Profesi;
13. Membangun jejaring diantara pemangku kepentingan (stakeholders) bidang pelatihan kerja yang meliputi antara lain: dunia pendidikan (pendidikan umum

kejuruan, maupun perguruan tinggi), dunia usaha dan dunia industri melalui Bursa Kerja Khusus (BKK);

14. Pengembangan program dan peningkatan kualitas kelembagaan yang setara dengan standar kebutuhan pasar kerja yang bertaraf nasional maupun internasional.
15. Mengoptimalkan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan;

Semakin meningkatnya indikator-indikator di atas diharapkan akan memperbesar kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut. Pada bidang ketenagakerjaan perlu suatu kebijakan yang tidak hanya memperbesar akses dalam informasi pasar kerja melainkan juga terhadap kesiapan tenaga kerja dalam daerah. Salah satu bentuk kesiapan adalah perlunya pemetaan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Dengan melakukan pemetaan kompetensi dan sertifikasi keahlian diharapkan dapat memperbesar daya saing tenaga kerja dalam daerah terhadap tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten/kota atau luar provinsi bahkan tenaga kerja asing.

Dalam mencapai sasaran Menurunnya tingkat pengangguran di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 86 ASN pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan di dukung oleh 5 Program dengan Pagu Rp. 12,109,104,165,00 dan terealisasi Rp. 8,077,158,981.00 atau sebesar 66.70%.

Tabel 3.5.21
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	120,333,024,00	115.749.343,00
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	359,546,040,00	257,126,720.00
3	Program Rehabilitasi Sosial	4,712,818,176,00	972.879.755,00
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6,898,821,492,00	6.713.860.206,00
5	Program Perencanaan Tenaga Kerja	17,585,433,00	17.542.957,00
Jumlah		12,109,104,165,00	8,077,158,981.00



Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 15

Meningkatnya perlindungan masyarakat

Meningkatnya perlindungan masyarakat diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.22
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Resiko Bencana Daerah	skor	135 (Sedang)	178 (Tinggi)	75.84	130 (Sedang)	178 (Tinggi)	73.03	125 (sedang)	156,33 (tinggi)	79,95 %
2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri	%	15	2.54	16.93	20	49.01	245.05	25	13,32	53,28 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											66,61%

Tabel 3.5.23
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Indeks Resiko Bencana Daerah	skor	125 (sedang)	156,33 (tinggi)	79,95 %	120	76,76%
2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri	%	25	13,32	53,28 %	30	44,4%

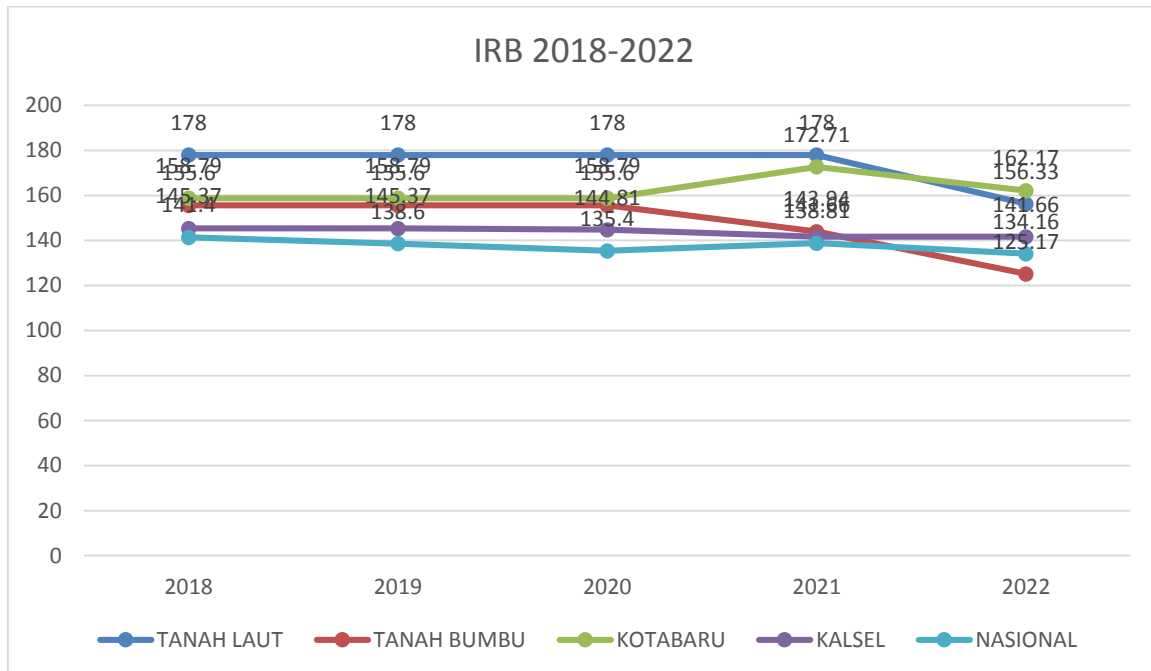
a. Indeks Resiko Bencana (IRB)

Indeks Resiko Bencana (IRB) tahun 2022 adalah sebesar 156,33 (tinggi) mengalami penurunan sebesar 21,67 point dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 178 (tinggi).

IRB tahun 2022, Kabupaten Tanah Laut merupakan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dengan IRB paling tinggi kedua dengan angka 156,33 (tinggi) setelah Kabupaten Kota Baru sebesar 162,17 (tinggi). Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional IRB Kabupaten Tanah Laut lebih tinggi masing-masing dengan indeks 141,66 dan 134,16.

Grafik 3.5.12

Indeks Resiko Bencana Daerah Kab/Kota se Kalimantan Selatan



Sumber: IRBI Badan Nasional Penanggulangan Bencana

IRB dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Risk} = \frac{\text{Hazard (bahaya)} \times \text{Vulnerability (kerentanan)}}{\text{Capacity (kapasitas)}}$$

IRB Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 mengalami penurunan 21,67 point dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang tetap pada angka 178. Komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat dan kapasitas pemulihan.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022 Dari 514 Kabupaten kabupaten/ kota di Indonesia terdapat 221 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 293 yang berada pada kelas indeks risiko sedang, Salah satunya adalah Kabupaten Tanah Laut dengan Skor 156,33 kelas resiko Tinggi.

Tabel 5.3.24

Nilai IRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan

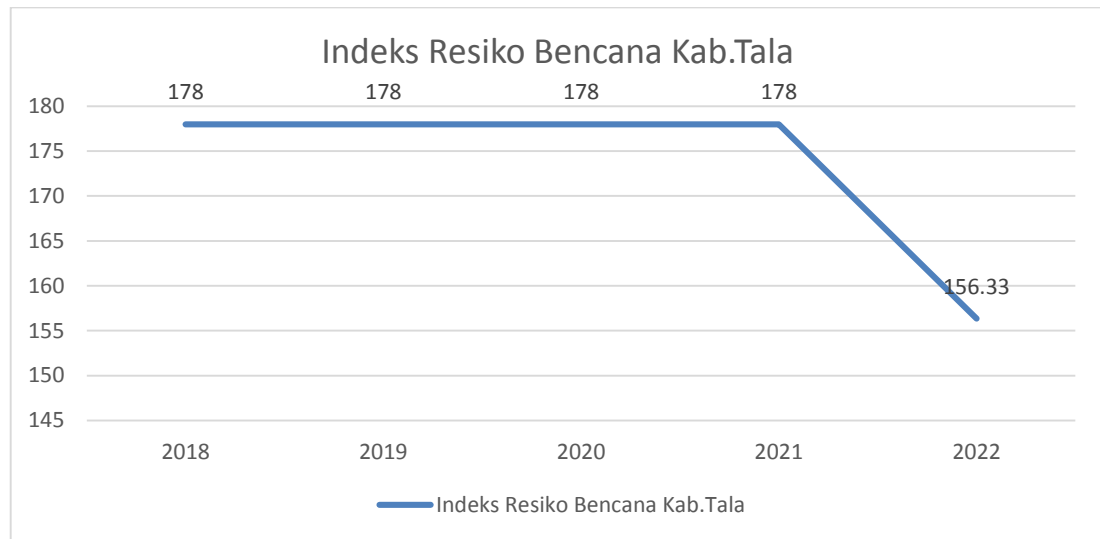
NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	KOTABARU	205,20	159,70	159,70	158,79	158,79	158,79	172,71	162,17	TINGGI
2	TANAH LAUT	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	156,33	TINGGI
3	BANJAR	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	165,12	150,41	TINGGI
4	HULU SUNGAI SELATAN	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	150,00	141,29	SEDANG
5	BARITO KUALA	190,00	179,68	179,68	155,45	155,45	155,45	155,96	140,65	SEDANG
6	TABALONG	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	149,03	130,06	SEDANG
7	BALANGAN	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	139,89	133,77	126,16	SEDANG
8	HULU SUNGAI UTARA	128,40	128,40	128,40	128,40	128,40	128,40	126,00	126,00	SEDANG
9	HULU SUNGAI TENGAH	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	133,87	125,74	SEDANG
10	TANAH BUMBU	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	143,94	125,17	SEDANG
11	TAPIN	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	128,79	110,71	SEDANG
12	KOTA BANJARBARU	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	95,78	SEDANG
13	KOTA BANJARMASIN	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	84,09	SEDANG

Perbandingan kinerja yang dicapai Kabupaten Tanah Laut dalam menurunkan Indeks risiko bencana tersebut melalui 7 Prioritas yaitu :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan rawan bencana
5. Peningkatan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan Sistem pemulihan bencana

Dari 7 Prioritas tersebut terdapat 71 indikator yang harus dilengkapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melibatkan beberapa SKPD terkait dalam penanganan bencana untuk menurunkan trend Indeks risiko bencana di Kabupaten Tanah Laut. Berikut *trend* Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2018-2022.

Grafik 3.5.13
 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2018-2022



Sumber: IRBI Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1) Penilaian Ancaman

Penilaian ancaman bencana (bahaya) merupakan dasar penentuan peta dan tingkat bahaya di Kabupaten Tanah Laut. Penilaian tersebut diperoleh dari besaran luas wilayah terpapar dari setiap jenis potensi bahaya. Potensi luas bahaya tersebut dihitung berdasarkan pada parameter-parameter yang berbeda untuk setiap bahaya. Parameter tersebut mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya dari kementerian/lembaga di tingkat nasional. Berdasarkan parameter tersebut, maka diketahui kelas bahaya dan luasan bahaya untuk masing-masing potensi bahaya. Rekapitulasi analisa kajian bahaya untuk seluruh bahaya yang berpotensi di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.5.25
 Potensi Bahaya di Kabupaten Tanah Laut

No	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	BANJIR	182.755	TINGGI
2.	BANJIR BANDANG	6.949	TINGGI

3.	CUACA EKSTRIM	212.073	TINGGI
4.	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	3.326	TINGGI
5.	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	175.785	TINGGI
6.	KEKERINGAN	363.135	SEDANG
7.	TANAH LONGSOR	26.298	SEDANG
TOTAL LUAS BENCANA		970.321	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

Tabel di atas menunjukkan luas bahaya dan tingkat bahaya seluruh potensi bahaya di Kabupaten Tanah Laut. Secara keseluruhan potensi bahaya di Kabupaten Tanah Laut hanya memiliki kelas sedang dan tinggi.

2) Penilaian Kerentanan

Kajian kerentanan merupakan penggabungan dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar mengkaji potensi penduduk terpapar dan indeks kerugian mengkaji potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar lingkungan yang rusak). Pengkajian masing-masing indeks tersebut berbeda untuk setiap bencana. Hasil potensi penduduk terpapar setiap bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.5.26
Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No	Jenis Bencana	Penduduk	Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
		Uk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Pendud Uk Cacat	
1.	Banjir	242.312	17.739	44.761	569	Tinggi
2.	Banjir Bandang	4.355	176	559	7	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	336.286	23.652	59.333	798	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	8.148	764	1.952	26	Tinggi
5.	Kekeringan	338.291	23.809	59.698	802	Sedang
6.	Tanah Longsor	1.713	128	285	15	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

Indeks penduduk terpapar dilihat dari komponen sosial budaya yang menentukan potensi penduduk terpapar. Potensi penduduk terpapar tersebut dilihat berdasarkan parameter kepadatan penduduk dan kelompok masyarakat rentan. Kelompok masyarakat rentan meliputi rasio jenis kelamin, kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk cacat. Penggabungan antara penduduk terpapar dengan kelompok masyarakat rentan menggunakan metode GIS dengan bobot 60% untuk kepadatan penduduk terpapar serta 40% untuk kelompok masyarakat rentan.

Parameter kerentanan sosial berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan tidak dikaji pada komponen sosial budaya. Hal ini disebabkan kebakaran hutan dan lahan berada diluar wilayah pemukiman penduduk. Sementara itu potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar lingkungan yang rusak) dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.5.27
Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No	BENCANA	POTENSI KERUGIAN (Juta Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
		KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1.	BANJIR	842.701	82.135	924.837	TINGGI	42.463	TINGGI
2.	BANJIR BANDANG	16.058	106.716	122.774	TINGGI	3.623	TINGGI
3.	CUACA EKSTRIM	1.878.917	553.348	2.432.266	TINGGI	-	-
4.	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	30.529	10.003	40.532	TINGGI	2.271	TINGGI
5.	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	38.367	38.367	TINGGI	50.189	TINGGI
6.	KEKERINGAN	-	2.120	2.120	SEDANG	66.583	TINGGI
7.	TANAH LONGSOR	6.563	53.149	59.711	TINGGI	12.771	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

Tabel diatas memperlihatkan total kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah) serta kerusakan lingkungan (dalam hektar). Pengkajian potensi kerugian tersebut dilihat dari komponen fisik, ekonomi, dan lingkungan.

3) Penilaian Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat.

Penilaian kapasitas daerah ditentukan berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu ketahanan daerah dan kesiapsiagaan Desa/Kelurahan:

a. Komponen Ketahanan Daerah

Komponen ini ditujukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penilaian komponen ini berpedoman pada Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Hasil kajian IKD diperoleh dari hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kebijakan di setiap institusi/instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana.

b. Komponen Kesiapsiagaan Desa/Kelurahan

Komponen ini ditujukan untuk mengukur kemampuan masyarakat Desa/Kelurahan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana. Komponen kesiapsiagaan Desa/Kelurahan diperoleh dari survey lapangan dan interview langsung (Deep Interview) dengan pihak masyarakat Desa/Kelurahan.

Rekapitulasi hasil kajian kapasitas Kabupaten Tanah Laut untuk seluruh potensi bencana dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.5.28
Hasil Kajian Kapasitas Daerah Kabupaten Tanah Laut

No	JENIS BENCANA	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS KAPASITAS
1	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG	RENDAH	RENDAH
2	LONGSOR	SEDANG	RENDAH	RENDAH
3	BANJIR BANDANG	SEDANG	RENDAH	RENDAH
4	CUACA EKSTRIM	SEDANG	RENDAH	RENDAH

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH
6	KEKERINGAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH
7	BANJIR	SEDANG	RENDAH	RENDAH

Tabel di atas menunjukkan bahwa kapasitas Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi seluruh bencana yang berpotensi berada pada tingkat rendah. Dengan kapasitas rendah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu meningkatkan kapasitasnya guna mengurangi dampak risiko yang akan timbul apabila terjadi bencana yang sudah berpotensi terjadi di Kabupaten Tanah Laut.

1) Tingkat Risiko Bencana

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel :

Tabel 3.5.29
Tingkat Risiko Di Kabupaten Tanah Laut

No	Jenis bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
4.	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6.	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
7.	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2018-2022=

Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Laut. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) jenis bencana di Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dengan tingkat risiko **tinggi**. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

2) Peta Risiko Bencana

Peta risiko bencana disusun dengan melakukan *overlay* peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Pemetaan risiko untuk setiap jenis potensi yang ada diselaraskan dengan hasil dan pengelompokkan nilai indeks yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk lebih mendetailkan hasil perhitungan yang dapat dilihat secara visual melalui sebuah peta.

Analisis peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana merupakan kunci untuk menurunkan resiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Untuk itu BPBD Kabupaten Tanah Laut menjadikan kapasitas sebagai sasaran strategis utama. Untuk meminimalkan jumlah kerugian yang disebabkan kejadian bencana baik berupa tingkat kerugian, kerusakan maupun korban jiwa. Upaya peningkatan kapasitas dilakukan mulai dari tahap bencana, saat darurat bencana dan pasca bencana yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ssebagai berikut:

1. Tahap pra bencana yaitu melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana memberikan pelayanan informasi rawan bencana melalui:
 - a) Sosialisasi peringatan dini bencana dalam rangka menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan atau membakar lahan dengan sengaja.
 - b) Memberikan pelatihan kepada tenaga Pusdalop PB (Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana) untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya anggota Pusdalo BPBD Tanah Laut dalam rangka dukungan kesiapsiagaan mengenai informasi dan data kebencanaan dan pelatihan Vertical Rescue kepada tenaga TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk peningkatan sumber daya dalam rangka penanganan lokasi bencana, evakuasi dan penyelamatan korban bencana serta kemampuan teknis lainnya yang ada di lapangan.
 - c) Hari Kesiapsiagaan Bencana yang diperingati setiap tahun tanggal 26 April yaitu untuk memberikan informasi kepada Peserta apel (Polri, TNI, SKPD, Relawan kebencanaan dan masyarakat) untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi musim hujan yang akan terjadi bencana banjir, tanah longsor dan angin putting beliung dan musim kemarau yang akan terjadi kebakaran

pemukiman dan hutan dan lahan

- d) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Pemantauan dilakukan dengan melaksanakan posko siaga darurat dalam rangka antisipasi bencana yaitu terbentuknya kelompok/regu piket yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalop (Pusat Pengendali dan Operasional) Penanggulangan Bencana, dengan adanya kegiatan rutin piket penjagaan posko selama 24 jam penuh sejak bulan Januari hingga Desember, serta khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat puncak musim hujan, pada saat libur hari raya, tahun baru, dan even tertentu. Pelaksanaan kegiatan mulai dari piket jaga, menerima laporan kejadian bencana, pelaksanaan penanganan bencana dan pelaporan kejadian bencana
2. Tahap pada saat tanggap darurat yaitu pada saat terjadi bencana melalui Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana melalui:
 - a) Menyiapkan Peralatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Peralatan penanggulangan bencana yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya penanganan bencana. Pengadaan peralatan penanggulangan bencana meliputi peralatan untuk penanganan bencana maupun peralatan komunikasi untuk memudahkan koordinasi. Peralatan penanganan bencana terdiri atas perahu apung (perahu karet dan perahu polytheiylen), Mobil tangki air, mesin apung, jetshooter, mesin potable, pakain tahan api, selang dan komper serta alat pendukung lainnya seperti tenda pengungsi, tenda keluarga, Velbeit, tandu, tali karmantel dan rompi pelampung serta alat komunikasi untuk mendukung proses koordinasi dalam penanganan bencana meliputi handy talky (HT)
 - b) Penanganan Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut berupaya melakukan penanganan kejadian secara cepat dan tepat, bersama relawan yaitu Tim Reaksi Cepat dan Pusdalop PB (Pusat Pengendali Operasil Penanggulangan Bencana). Laporan kejadian yang masuk segera ditindak lanjuti dengan

pengecekan lokasi dan melakukan assesment atau kaji cepat kondisi tanggap darurat, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti perangkat setempat, dinas terkait, polsek, TNI, maupun tim relawan untuk bersama-sama menangani bencana. Setiap kejadian bencana wajib dilaporkan kepada kepala daerah yaitu Bupati Tanah Laut dan BPBD Provinsi maupun BNPB, sebagai bentuk tindaklanjut dan dasar untuk pengajuan bantuan bagi korban bencana.

Tabel 3.5.30

Tabel Sebaran Jenis Bencana per Kecamatan

Jenis Kejadian	Kecamatan											Grand Total
	Baj uin	Bati-Bati	Batu Amp ar	Bumi Makmu r	Jorong	Kintap	Kurau	Panyipa tan	Pelaiha ri	Takis ung	Tam bang Ulan g	
Banjir	1	1	2	-	3	4	-	4	7	6	-	28
Cuaca Ekstrem (Angin Putting Beliung, Pohon Tumbang)	-	1	-	2	-	1	4	1	8	5	3	25
Gelombang Pasang/Abrasi (Banjir ROB)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	3	-	-	-	2	1	1	2	-	-	9
Kebakaran Permukiman, Fasilitas Umum dan Lain-Lain	1	10	1	-	-	6	-	-	9	2	1	30
Pencarian Dan Pertolongan	1	-	1	-	-	-	-	4	1		1	8
Grand Total	3	15	4	2	3	15	5	10	27	13	5	102

- c) **Pengadaan Logistik Kebencanaan** Pengadaan logistik kebencanaan diperuntukkan bagi korban terdampak bencana maupun pengungsi dalam kondisi darurat bencana. Bantuan logistik dimaksudkan sebagai stimulan untuk membantu memenuhi kebutuhan saat masa darurat bencana, yang meliputi bahan pokok makanan (sembako). Pada tahun 2020 BPBD Kabupaten Tanah Laut mengajukan permohonan bantuan pengadaan logistik kebencanaan ke BPBD Provinsi.

3. Tahap pasca bencana yaitu saat setelah terjadi bencana melalui program penanganan Pascabencana melalui :
 - a) Pemulihan Kerusakan Dampak Bencana Alam Penanggulangan bencana merupakan suatu kesatuan upaya pengurangan risiko bencana (pencegahan), penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana. Pemulihan kerusakan dampak bencana merupakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dengan melakukan perhitungan kebutuhan dari obyek yang mengalami kerusakan akibat dampak bencana baik berupa fasilitas umum/publik maupun rumah masyarakat.
 - b) Pelatihan dasar dalam kegiatan pasca bencana bagi aparat desa untuk mendata kerusakan rumah, infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut oleh BPBD dan Bappeda diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan Kajian Kawasan Berpotensi bencana dan Mitigasinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah.
2. Penyusunan dokumen mitigasi ini merupakan sebuah upaya untuk mengidentifikasi wilayah yang dianggap memiliki kiresiko tinggi terjadinya bencana alam yang dilakukan baik melalui pendekatan keilmuan maupun histori kejadian serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi wilayah untuk selanjutnya melakukan persiapan rencana pengelolaan bencana wilayah dalam rencana kontijensi. Berdasarkan hasil kajian secara menyeluruh, didapatkan alternatif solusi terbaik yang dapat diterapkan pada upaya pengurangan risiko dan pencegahan bencana di Kabupaten Tanah Laut melalui meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat melalui program sebagai berikut:
 - a. Menyusun strategi pengurangan risiko dan pencegahan bencana melalui pendekatan structural baik alami (upaya vegetative) dan buatan (upaya sipil teknis).
 - b. Penyesuaian pengaturan dalam rencana tata ruang dan kebijakan pembangunan.

- c. Penyusunan rencana dan jalur evakuasi.
- d. Penentuan wilayah aman bencana sebagai arahan lokasi permukiman.
- e. Pendidikan, penyuluhan dan pembentukan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat.
- f. Pematapan Tim Aksi Cepat Tanggap Bencana.
- g. Pemantapan system monitoring dan peringatan dini bencana.
3. Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui sosialisasi Peringatan Dini Bencana di Beberapa Kecamatan setiap tahunnya.
4. Melaksanakan pelatihan Tenaga TRC/ Pusdalops sebanyak 26 orang.
5. Pelaksanaan penanggulangan daerah rawan bencana di Kabupaten Tanah Laut.
6. Pembentukan Desa Tangguh bencana pada tahun 2018 ada 3 desa yaitu di Desa Penjaratan kecamatan Pelaihari, Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin dan Desa Kali Besar Kecamatan Kurau dan Tahun 2019 ada 1 Desa yaitu Desa Gunung Raja di Kecamatan Tambang Ulang, Tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada Pembentukan.
7. Pelayanan bencana dan pendistribusian logistik kepada korban bencana.
8. Pelaksanaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada tahun 2022.
9. Penyusunan dokumen bencana yang tersedia sampai tahun 2022 sebanyak 3 Dokumen Yaitu Dokumen Rencana Penanggulangan bencana (RPB) Tahun 2019-2023, Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon).

Rencana kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kedepan yaitu melaksanakan hasil kajian analisa mitigasi bencana dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Memasukkan rencana kerja mitigasi bencana yang dilakukan SKPD ke dalam rencana kerja Tahun 2023 diantaranya BPBD, Dinas Sosial, DPUPRP, DPRKPLH.
2. Penyesuaian hasil analisa mitigasi bencana ke dalam rencana perubahan Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut.
3. Untuk rekomendasi upaya-upaya yang tidak dapat dilakukan/dijangkau oleh Pemerintah Kabupaten Tanah laut akan digunakan sebagai bahan koordinasi dan

konsolidasi kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat serta agar mendapatkan bagaimana solusi pemecahan masalah tersebut.

b. Persentase PMKS yang mandiri

Capaian indikator Persentase PMKS yang mandiri tahun 2022 adalah 13,32% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 25% dengan tingkat capaian 53,28%. Capaian tersebut baru mencapai 44,4% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 30%.

Pembangunan Kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi salah satu sasaran strategis dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial tersebut. Menurut Permensos nomor : 8 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 jenis PMKS yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, berikut adalah tabel rekapitulasi data PMKS di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022.

Tabel 3.5.31
Rekapitulasi Data PMKS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO.	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah
		2022
1	Anak Balita Terlantar	0
2	Anak Terlantar	47
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	15
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	-
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	13.880
9	Penyandang Disabilitas	3044
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	60
12	Pengemis	-
13	Pemulung	-

14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	37
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-
18	Korban Traffiking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	8.081
22	Korban Bencana Sosial	121
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin (FM)	50.410
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
	TOTAL	75.696

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ada penurunan angka PMKS dari 109.173 jiwa pada tahun 2021 menjadi 75.696 jiwa pada tahun 2022 atau menurun sebesar 30,67% hal ini dikarenakan tidak adanya bencana alam besar yang terjadi sehingga angka PMKS di Kabupaten Tanah Laut menurun dari Tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2022 terjadi kenaikan harga BBM sehingga berdampak pada naiknya harga bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Hal ini mengakibatkan angka PMKS Fakir Miskin meningkat menjadi 50.410 jiwa.

Pada Tahun 2022, penanganan terhadap PMKS belum dilaksanakan secara optimal, dari 75.696 PMKS telah ditangani sekitar 31.356 jiwa atau sekitar 41,42%, artinya terdapat sekitar 44.340 PMKS atau lebih dari 50% PMKS yang belum tertangani secara optimal. hal ini dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi sehingga Dinas Sosial tidak dapat melaksanakan program-program secara optimal.

Penanganan PMKS rendah di tahun 2022 di bandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan beberapa faktor :

1. Tidak mencukupinya anggaran untuk pelaksanaan program-program yang ada di Dinas Sosial.
2. Kurangnya SDM yang berkompetensi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

3. Belum adanya program penanganan PMKS secara terpadu dan berkelanjutan.

Dari 26 jenis PMKS tersebut di atas hanya sekitar 8 (delapan) jenis PMKS yang terdata dan menjadi sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu :

Tabel 3.5.32
Jumlah PPKS yang dapat ditangani Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No.	Jenis PPKS	Jumlah
1	Anak Terlantar	18
2	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	15
3	Lanjut Usia Terlantar	2.833
4	Penyandang Disabilitas	287
5	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	37
6	Korban Bencana Alam	8.081
7	Korban Bencana Sosial	121
8	Fakir Miskin	19.964
TOTAL		31.356

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 31.356 PPKS yang telah ditangani yang terdiri dari 8 (delapan) jenis PPKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 8 jenis PPKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Fakir Miskin yaitu sebesar 19.964 jiwa atau sekitar 63,67 % dan penanganan korban bencana alam yaitu sebanyak 8.081 jiwa atau sekitar 25,78 %. Program penanganan fakir miskin ini lebih banyak diarahkan pada program-program baik dari pusat seperti PKH, BPNT, dan PBI-JK. Sedangkan dari APBD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program Bantuan Sosial dampak Inflasi dan Program Pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial terencana.

Untuk mengukur PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan indikator PPKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mengakses rumah sehat artinya setiap PPKS memiliki dan/atau menempati rumah sehat atau rumah yang layak huni

2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari, artinya setiap PPKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar pangannya untuk memenuhi makan sebanyak 3 x sehari.
3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, artinya PPKS memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi permakanaan, pakaian, pendidikan dan kesehatannya.
4. Memiliki akses bagi anak usia sekolah artinya PPKS dapat menyekolahkan anak-anaknya
5. Memiliki akses kesehatan dasar, artinya PPKS memiliki jaminan kesehatan dan dapat mengakses lembaga penyelenggara layanan kesehatan.

Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan berjumlah 10.086 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Korban bencana alam sebanyak 8081 orang
2. Bencana Sosial sebanyak 121 orang
3. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 37 orang
4. Keluarga Penerima Program PKH sebanyak 1847 orang

$$\begin{aligned}\text{Persentase PPKS yang menjadi mandiri} &= \frac{\text{PPKS Mandiri}}{\text{PPKS Keseluruhan}} \times 100\% \\ &= \frac{10.086}{75.695} \times 100\%\end{aligned}$$

$$\text{PPKS Mandiri} = 13,32 \%$$

Berdasarkan uraian di atas bahwa capaian PPKS yang menjadi mandiri masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 25 % namun telah tercapai sebesar 13,32 % saja hal ini dikarenakan penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut belum terlaksanakan secara optimal. Ada beberapa masalah yang masih dihadapi dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Data PPKS yang masih belum valid sehingga data yang disampaikan masih sering berubah-ubah.

2. Belum adanya system aplikasi data PPKS yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapat pelayanan dengan cepat dan tepat.
3. Masih tingginya program-program yang bersifat bantuan sosial dan masih rendah program-program yang memberdayakan masyarakat.
4. Belum adanya program penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mempertahankan capaian target perlindungan masyarakat pada tahun 2023, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan pelayanan
2. Membangun sistem aplikasi data PPKS hal ini untuk mempermudah akses pelayanan dan penanganan PPKS sehingga program-program penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat lebih tepat sasaran.
3. Menyusun SOP dan Kriteria penerima program-program penanganan dan pelayanan sosial sehingga penerima layanan akan sesuai dengan jenis program yang dibutuhkan.
4. Melaksanakan sinkronisasi data dan program agar penanganan masalah kemiskinan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Tabel 3.5.33

Uraian Program Berdasarkan Sumber Dana

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Jumlah	Sumber Dana	
				APBN	APBD
1	KUBE	Keluarga Fakir Miskin	1		APBD I
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga Fakir Miskin	5.896 KPM	APBN	
3.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Keluarga Fakir Miskin	23.626 KPM	APBN	
4.	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	4.807 Jiwa		APBD

5	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	70.496 Jiwa	APBN	
6.	Bantuan Sosial Dampak Inflasi	Lansia, Disabilitas, dan Fakir Miskin	6.753 KPM		APBD
7	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas	40 Orang		APBD

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya perlindungan masyarakat di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 45 ASN pada Dinas Sosial, 37 ASN pada BPBD dan di dukung oleh 8 Program dengan Pagu Rp. 14,321,456,775,00 dan terealisasi Rp. 9,939,330,679.00 atau sebesar 66.70%.

Tabel 3.5.34
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penanggulangan Bencana	682,785,776,00	373.032.325,00
2	Program Penanganan Bencana	195,076,408,00	170.846.500,00
3	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	951,784,433,00	897.482.948,00
4	Program Rehabilitasi Sosial	4,712,818,176,00	972.879.755,00
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6,898,821,492,00	6.713.860.206,00
6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	322,592,700,00	317.544.654,00
7	Program Pemberdayaan Sosial	530,011,340,00	471.266.097,00
8	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	27,566,450,00	22.418.194,00
		14,321,456,775,00	9,939,330,679.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 16

Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas

Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.35
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	nilai	70.75	53	74.91	71	43.13	60.75	89	58,12	65,30%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											65,30%

Tabel 3.5.36
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	nilai	89	58,12	65,30%	25	536%

Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2022 adalah 58,12 dengan tingkat capaian 65,30%. Mengalami kenaikan 14,99 point jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan angka 43,13.

Untuk mendapatkan indeks pembangunan infrastruktur digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

((jumlah panjang jalan nasional + jalan propinsi + jalan lokal primer dalam kondisi baik/jumlah panjang jalan keseluruhan x 100%)+((Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik/jumlah panjang irigasi x 35) + (jumlah luas areal yang dilayani irigasi/jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi x 20) +(Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik/jumlah panjang drainase x15)+(Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani/jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun) x 30))+(((Jumlah gedung kantor dalam

$$\text{kondisi baik/jumlah gedung kantor} \times 100\% + \left(\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\% + \frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses air limbah}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\% \right) / 2 + \left(\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang ditangani}}{\text{Luas permukiman kumuh yang seharusnya ditangani}} \times 100\% \right) / 2 + \left(\frac{\text{Panjang jalan bertrottoar di perkotaan}}{\text{Panjang jalan di perkotaan}} \times 100\% + \frac{\text{Panjang jalan berdrainase di perkotaan}}{\text{Panjang jalan di perkotaan}} \times 100\% \right) / 2 + \left(\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah produksi sampah}} \times 100\% + \frac{\text{Jumlah taman dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah keseluruhan Taman}} \times 100\% \right) / 2 + \left(\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya ada}} \times 100\% + \frac{\text{Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik}}{\text{Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada}} \times 100\% \right) / 2 \Bigg) / 5.$$

Dari rumus tersebut diperoleh hasil bahwa indeks pembangunan infrastruktur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebesar 58,12.

Data indikator perhitungan indeks pembangunan infrastruktur Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Tabel 3.5.37
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator	Satuan	2021	2022
1	Jumlah panjang jalan nasional kondisi baik	km	71.84	136,08
2	Jalan propinsi kondisi baik	km	51.72	135,82
3	Jalan lokal primer dalam kondisi baik	km	431.70	975,97
4	Jumlah panjang jalan keseluruhan	km	1,826.63	1.342,150
5	Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik	m	538,667.60	513.259,92
6	Jumlah panjang irigasi	m	819,489	753.940,13
7	Jumlah luas areal yang dilayani irigasi	ha	17,111.00	17.503,00
8	Jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi	ha	25,685.98	25.685,98
9	Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik	m	67,121	95.569,20
10	Jumlah panjang drainase	m	67,128.20	95.569,22
11	Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani	l	4,303,262,400	5.453.538.000,00

12	Jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)	l	10,041,588,000	11.378.320.200,00
13	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	buah	462.00	5.005,00
14	Jumlah gedung kantor	buah	462.00	5.005,00
15	Panjang jalan bertrottoar di perkotaan	km	6.783	6,78
16	panjang jalan di perkotaan	km	345.18	314,02
17	Panjang jalan berdrainase di perkotaan	km	345.18	345,18
18	panjang jalan di perkotaan	km	345.18	314,02
19	Jumlah sampah yang tertangani	ton	15,111	15.111
20	Jumlah produksi sampah	ton	51,807	51.807
21	Jumlah taman dalam kondisi baik	buah	32.00	32
22	Jumlah keseluruhan Taman	buah	32.00	32
23	Jumlah rumah tangga berakses air bersih	KK	36,843.00	36.843,00
24	Jumlah rumah tangga	KK	118,015.00	118.015,00
25	Jumlah rumah tangga berakses air limbah	KK	46,533.00	46.533,00
26	Jumlah rumah	buah	109,254.00	104.234,00
27	Jumlah rumah layak huni	buah	104,962.00	100.659,00
28	jumlah seluruh rumah	buah	109,254.00	104.234,00
29	Luas permukiman kumuh yang ditangani	ha	7.11	44,75
30	luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani	ha	86.61	123,49
31	Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik	buah	1,688	1.678
32	Jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya ada	buah	20,000	20.000
33	Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik	buah	17	17
34	Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada	buah	138	138

1) Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik

Jalan lokal primer dalam kondisi baik mengalami kenaikan pada 2022 dibandingkan tahun 2021 dari angka 431.70 km menjadi 975,97 km, bila dibandingkan dengan jumlah panjang jalan keseluruhan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

2) Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 sudah mencapai 513.259,92 dari jumlah seluruh irigasi. Jika dibandingkan tahun 2021 Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik mengalami penurunan pada tahun 2021 sekitar 2,88%.

3) Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi

Jumlah luas areal yang telah dilayani irigasi pada tahun 2022 sekitar 66% dari seluruh area yang harus dilayani yaitu sekitar 25.685 Ha.

4) Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik

Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2022 telah mencapai 95.56 % jika dibandingkan dengan panjang seluruh drainase. Kondisi ini mengalami peningkatan sebanyak 9,85% dibandingkan pada tahun 2021 dengan capaian 67,12 % jika dibandingkan dengan panjang seluruh panjang seluruh drainase.

5) Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani

Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani pada tahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2021 dari 4,303,262,400 menjadi 5.453.538.000 atau 16,7%.

6) Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki aset berupa gedung kantor sebanyak 462 buah di tahun 2021, meningkat menjadi 505 buah di tahun 2022 dan semua dalam kondisi yang masih baik atau terjadi peningkatan sebesar 16,6%.

7) Panjang Jalan Bertrotoar Di Perkotaan

Panjang jalan bertrotoar di Perkotaan Kabupaten Tanah Laut sepanjang 6,783 Km.

8) Panjang Jalan Berdrainase Di Perkotaan

Panjang jalan berdrainase di Perkotaan Kabupaten Tanah Laut sepanjang 345.18 Km.

9) Jumlah Sampah Yang Tertangani

Jumlah sampah yang di produksi di Kabupaten Tanah Laut keseluruhan mencapai 51.041,45 ton pada tahun 2022.

10) Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Jumlah rumah tangga yang berakses air bersih sekitar 36.843 rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022

11) Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah

Jumlah rumah tangga yang berakses air Limbah sekitar 46.533 rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022

12) Jumlah Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni pada tahun 2022 sebanyak 104.962 buah dari seluruh jumlah rumah yang ada di kabupaten tanah laut yaitu sebanyak 100.659 buah. Mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan angka 94,23%.

13) Luas Permukiman Kumuh Yang Ditangani

Luar pemukiman kumuh pada tahun 2021 seluas 86,61 Ha dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 44,75 Ha atau mengalami penurunan sebanyak 97,37%. Luas pemukiman yang bisa ditangani pada 2022 seluas 7,11 Ha atau hanya 8,20% dari seluruh pemukiman kumuh.

14) Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada adalah 20.000, sedangkan jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik tahun 2022 hanya 1.678 buah atau sebesar 8,39%. Pada Tahun 2021 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik adalah 1688 Unit.

Perlengkapan jalan yang seharusnya ada terdiri dari rambu Standart sebanyak 17570 Unit, RPPJ sebanyak 1000 Unit, Marka Jalan sepanjang 300.000 m¹, Cermin Cembung (Convex Mirror) sebanyak 200 Unit , Warning Light sebanyak 200 Unit APILL sebanyak 30 Unit, Deliniator sebanyak 1000.

15) Jumlah Prasarana Perhubungan Dlm Kondisi Baik

Jumlah Prasarana Perhubungan yang seharusnya ada tahun 2022 adalah 138 buah, akan tetapi pada tahun 2022 hanya 17 buah yang dalam kondisi baik 12,32%.

Prasarana Perhubungan yaitu, Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Unit, Terminal Type c Lokasi Kantor Dinas 1 Unit, Halte 11 Unit, Mobil Uji Kendaraan Keliling 1 Unit, Pos Pelabuhan 1 Unit.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas daerah di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 91 ASN pada DPUPRP, 80 ASN pada DISHUB, 107 ASN pada DPRKPLH di dukung oleh 11 Program dengan pagu Rp 324,292,968,518,00 dan realisasi sebesar Rp 304,334,873,777.00 atau sebesar 93.85%

Tabel 3.5.38
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Jalan	156,636,096,471,00	150.051.466.661,00
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	38,221,067,443,00	34.543.639.080,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,727,000,000,00	2.658.620.000,00
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	13,564,829,000,00	12.363.991.100,00
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	34,375,119,354,00	31.606.413.916,00
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14,598,659,882,00	13.599.572.850,00
7	Program Penataan Bangunan Gedung	31,548,655,137,00	30.020.728.114,00
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	59,999,400,00	36.397.878,00
9	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	562,651,387,00	372.070.300,00
10	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	30.539.418.575,00	29.037.252.094,00
11	Program Pengelolaan Pelayaran	59,484,433,00	44.721.784,00
Jumlah		324,292,968,518,00	304,334,873,777.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 17

Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah

Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.39
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pertumbuhan sektor Pertanian	%	3,51	-0.30	0.00	3.52	1.81	51.42	3,53	2,7	76,49 %
2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	%	7,57	-4.27	0.00	7.58	5.01	66.09	7,69	3,86	50,20 %
3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah	orang	285,000	330,241	115.87	285,000	193,671	67.95	300.000	579.878	193,29%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											106,66%

Tabel 3.5.40
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

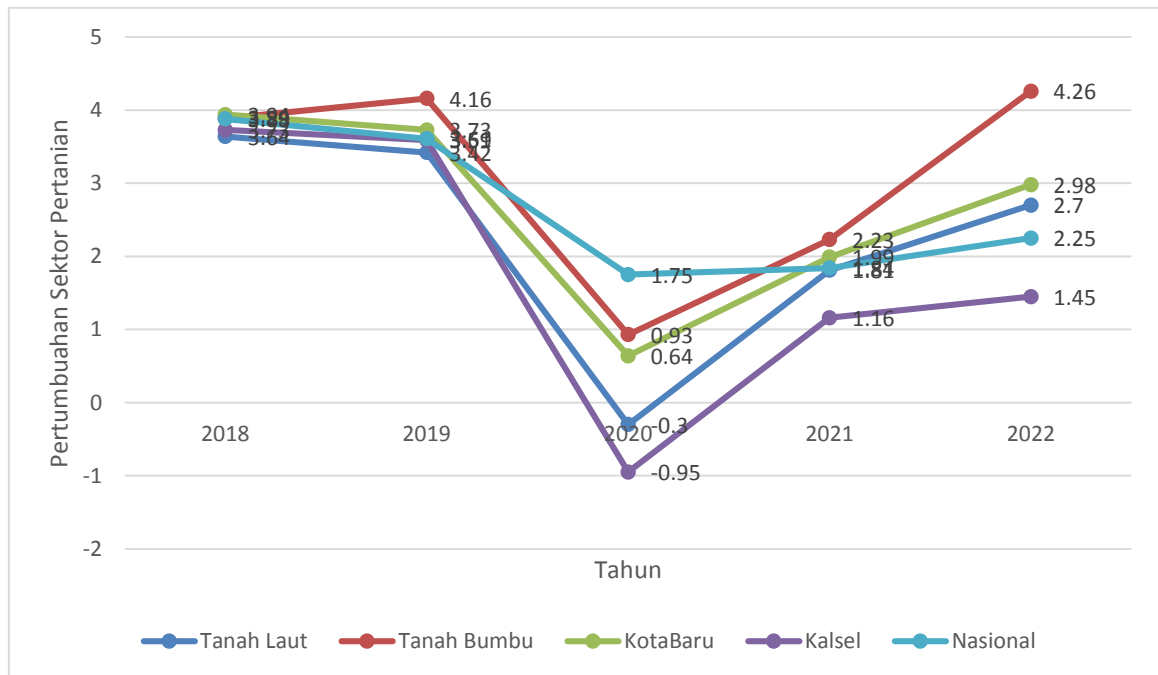
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Pertumbuhan sektor Pertanian	%	3,53	2,7	76,49 %	3,57	75,63%
2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	%	7,69	3,86	50,20 %	7,60	50,78%
3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah	orang	300.000	579.878	193,29%	350.000	165,57%

a. Pertumbuhan Sektor Pertanian

Pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah 2,7%, mengalami kenaikan 0,89% dari tahun 2021 yaitu sebesar 1,81%. Berikut

perbandingan Pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota lain dan provinsi dan nasional tahun 2022.

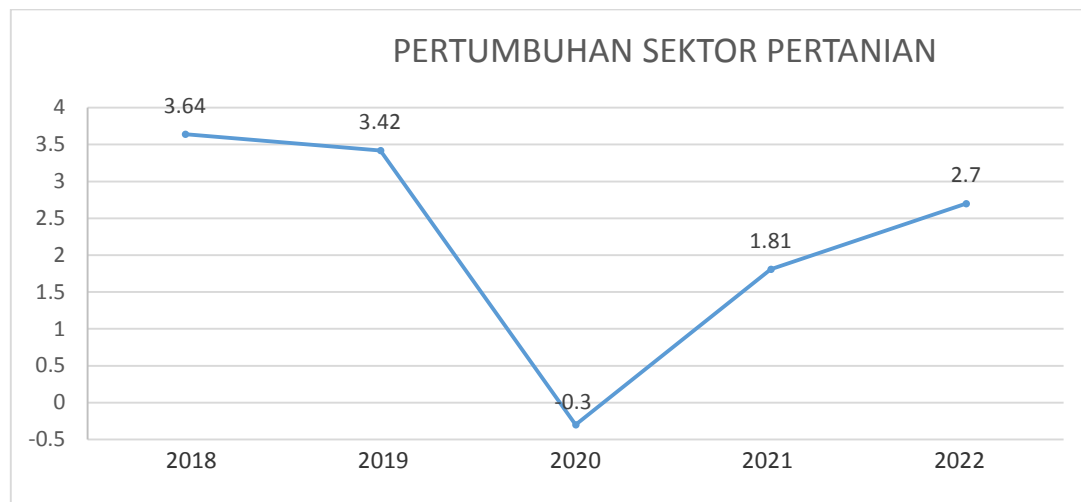
Grafik 3.5.14
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian, Kehutanan, Perikanan 2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Dari grafik di atas, Pertumbuhan sector pertanian Kabupaten Tanah Laut berada di atas provinsi Kalimantan selatan dan nasional yaitu masing-masing pada angka 1,45 dan 2,25 persen.

Grafik 3.5.15
 Pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Tanah Laut 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Lapangan usaha ini mencakup tiga subkategori. Pertama, subkategori Pertanian, Perternakan, Perburuan dan jasa Pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman Holtikutura, tanaman perkebunan, perternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Subkategori kedua adalah kehutanan dan penebangan kayu, dan yang terakhir adalah subkategori perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Peranan Lapangan Usaha PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2016-2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.41
 Peranan Lapangan Usaha PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 (Persen), 2016-2022

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pertanian, perternakan, Perburuan, Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>							

	a. Distribusi/ <i>Distribution</i>	19,65	19,23	18,92	19,02	19,28	18,03	15,58
	b. Laju Pertumbuhan/ <i>Growth</i>	3,84	3,50	3,64	3,42	(0,30)	1,73	2,70
	c. Laju Implisit/ <i>Growth Rate of Implicit Price Index</i>	3,05	2,30	1,98	2,03	0,84	2,19	4,38

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diantaranya melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sector pertanian baik melalui dana Pusat, Provinsi maupun APBD Kabupaten diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan JUT sebanyak 25 unit
2. Pembangunan JP sebanyak 46 unit
3. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
4. Pembangunan Embung sebanyak 3 unit
5. Pembangunan RJIT sebanyak 5 unit
6. Rehap dan sarana pendukung Balai Penyuluhan Pertanian sebanyak 3 Paket
7. Pelatihan teknis budidaya aneka cabai dan bawang merah
8. Pelatihan pengolahan hasil hortikultura dan National Borneo Orchid Show 2022
9. Pengembangan laboratorium kultur jaringan, temu lapang hortikultura dan pelatihan perbanyakan hortikultura
10. Bantuan Sumur Bor Rp. 85.000.000,-

Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

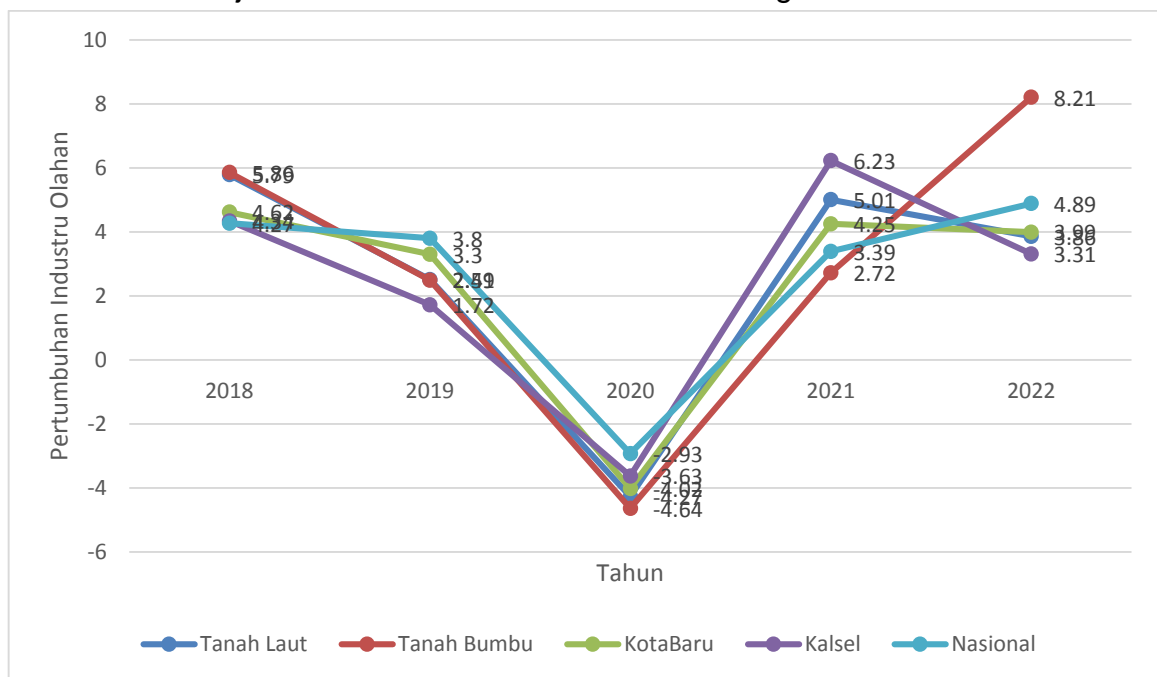
1. Adanya alih fungsi lahan, dari komoditas tanaman pangan ke komoditas perkebunan dan hortikultura
2. Adanya serangan hama penyakit tanaman (tungro) pada komoditas padi
3. Adanya penurunan bantuan benih dan fasilitas lainnya kepada para petani untuk padi, jagung dan kedelai
4. Adanya penurunan luas baku sawah (LBS)
5. Curah hujan tinggi menyebabkan terkena layu pusarium
6. Serangan layu pusarium, melakukan semai ulang untuk penyulaman
7. Bencana banjir menyebabkan tanaman rusak

8. Perubahan iklim sulit diprediksi
9. Tingginya harga pupuk
Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan adalah:
 1. Menggerakkan dan mensosialisasikan serta meningkatkan indeks pertanaman (IP)
 2. Menggerakkan dan mensosialisasikan petani menggunakan pupuk organik dalam jangka panjang
 3. Meningkatkan pengetahuan petani tentang informasi iklim dan cuaca (BMKG)
 4. Meningkatkan pengetahuan petani mengenai pengendalian opt baik secara hayati maupun kimia
 5. Meningkatkan kualitas penggunaan benih dengan membentuk kawasan/ petani mandiri benih
 6. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian
 7. Peningkatan luas panen tanaman hortikultura melalui perluasan areal tanam
 8. Peningkatan ketersediaan benih bersertifikat
 9. Pengendalian serangan opt hortikultura
 10. Penanggulangan bencana pertanian
 11. Pengembangan penerapan teknologi pertanian
 12. Penanggulangan/ pencegahan dampak pengendalian iklim
 13. Pengerjaan fisik bangunan dimulai di awal tahun
 14. Membuat gerakan pemakaian pupuk organik
 15. Menggerakkan lembaga masyarakat lainnya/BUMDES untuk melakukan pelayanan Alsintan melalui program Taxi Alsintan.
 16. Pengrekrutan Penyuluh Swadaya
 17. Mengerak/mengoptimalkan penggunaan pupuk organik, melalui gerakan pupuk organik mandiri petani sejahtera (pampera) dengan cara melakukan pelatihan kepada petani mengenai pembuatan pupuk organik
 18. Pelayanan pinjam pakai alsintan melalui Brigade alsintan dengan cara pengawasan penggunaan alsintan melalui pinjam pakai di Brigade Alsintan.

b. Pertumbuhan Sektor Industri Olahan

Pertumbuhan sektor industri olahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah 3,86% mengalami penurunan sebesar 1,15 poin dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 5,01%. Berikut perbandingan Pertumbuhan sektor petanian Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota lain dan provinsi dan nasional tahun 2022.

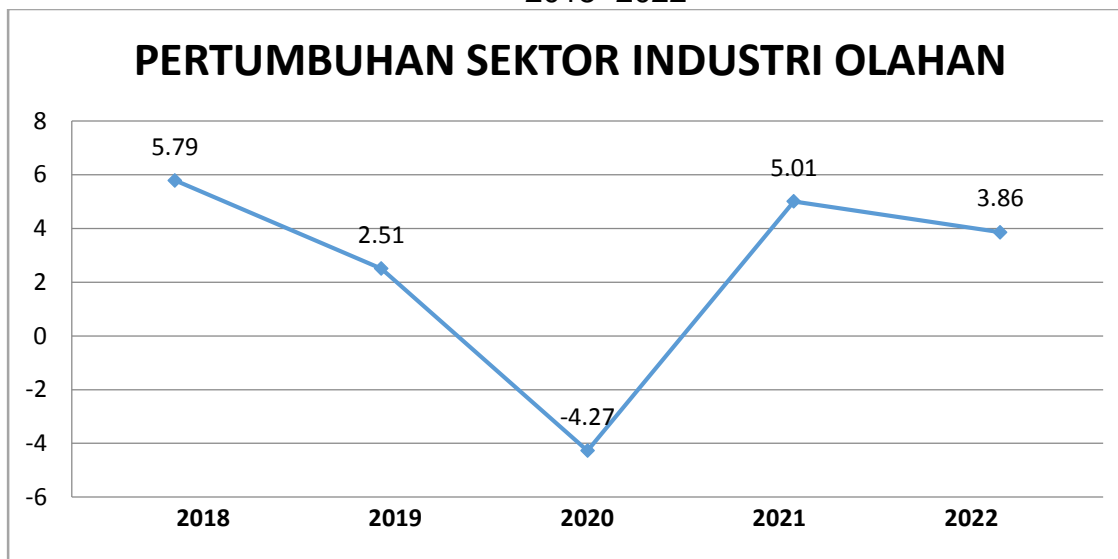
Grafik 3.5.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Industri Pengolahan 2022



Sumber: BPS Kalimantan Selatan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan yang tertinggi dengan angka 8,21%. Sedangkan Kabupaten Tanah Laut berada lebih tinggi jika dibandingkan provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 3,31%.

Grafik 3.5.17
Pertumbuhan Sektor Industri Olahan Kabupaten Tanah Laut
2018- 2022



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Kategori manufaktur dalam PDRB atas dasar tahun 2010, dibagi dalam 16 subkategori. Subkategori yang mendominasi kerja industri manufaktur di tanah laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai lebih dari 60 persen dari total produksi industri pengolahan keseluruhan di tanah laut. Komoditas utama dari industri makanan dan minuman tanah laut adalah crude palm oil (CPO). Komoditas tersebut menjadi kontributor terbesar kedua ekspor Tanah Laut setelah batubara. Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman tanah laut tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global.

Pada tahun 2019, kinerja subkategori industri makanan dan minuman masih menunjukkan arah yang positif dimana berarti produk yang dihasilkan oleh industri ini masih mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun begitu pada tahun 2019 industri makanan dan minuman mengalami perlambatan yang tajam, hal ini disebabkan karena menurunnya harga komoditas CPO di dunia. Di Tanah Laut Kinerja industri CPO ini didukung oleh kinerja subkategori perkebunan komoditas kelapa sawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Kecamatan Pelaihari, Jorong, dan Kintap).

Berikut data peranan lapangan usaha terhadap pdrb kategori industri pengolahan tahun 2016-2022.

Tabel 3.5.42

Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (persen), 2016-2022

Lapangan Industri	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Industri Pengolahan							
a. Peranan	12,24	12,89	12,78	12,51	12,30	12,10	10,50
b. Laju Pertumbuhan	7,57	7,56	5,79	2,51	(4,27)	5,01	3,86
c. Laju Implisit	5,48	5,90	0,72	0,20	1,85	4,13	3,76

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan pertumbuhan sector industry olahan diantaranya sebagai berikut:

1. Mendorong investasi dari pihak ketiga, dengan cara mempermudah persyaratan investasi, melakukan promosi kepada pihak ketiga.
2. Penguatan daya beli masyarakat, dengan cara melakukan promosi kepada masyarakat untuk menggunakan hasil industri dalam daerah melalui berbagai media, baik media sosial, radio, atau melalui dekranasda Tanah Laut.
3. Pengembangan kawasan industry jorong yang juga merupakan isu strategis Kabupaten Tanah Laut, dengan cara mempermudah perizinan pembangunan kawasan industri.
4. Pelatihan dan pendampingan, melaksanakan pelatihan bagi pelaku industri olahan agar dapat menggunakan teknologi dalam proses pengolahan hasil industri, meningkatkan kreativitas hasil industri olahan untuk menarik minat konsumen.



5. Fasilitasi pasar industri olahan, memberikan ruang bagi pelaku industri olahan agar dapat memasarkan hasil industri olahan, baik melalui pasar tradisional, dekranasda, maupun e-market (sosialita).

c. Jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah 2022 terealisasi sebesar 579.878 orang dengan tingkat capaian sebesar 193,29%. Mengalami peningkatan sebanyak 386.207 orang pengunjung jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 193.671 orang.

Tabel 3.5.43
Kunjungan Wisata menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
1	Kota Banjarmasin	1,178,056	2,487
2	Kota Banjarbaru	2,217,478	1,666
3	Kabupaten Banjar	2,104,383	1,063
4	Kabupaten Tapin	1,727,420	19
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	293,234	613
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	219,597	33
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	103,400	0
8	Kabupaten Balangan	40,127	20
9	Kabupaten Tabalong	3,092,902	44,754
10	Kabupaten Tanah Laut	567,506	8
11	Kabupaten Tanah Bumbu	857,429	389
12	Kabupaten Kotabaru	763,385	67
13	Kabupaten Barito Kuala	178,044	78
	Total	13,342,961	51,197

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Selatan, jumlah kunjungan wisata Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2022 pada urutan ke-8 setelah Kabupaten Kota Baru. Jumlah kunjungan wisata terbanyak yaitu Kabupaten Tabalong dengan jumlah pengunjung sebanyak 13.394.158 dan untuk jumlah kunjungan wisata terendah adalah Kabupaten Balangan dengan jumlah kunjungan 40.147 orang.

Objek wisata yang paling dominan dikunjungi wisatawan adalah Pantai Batakan Baru dan Pantai Takisung, karena selain jarak dekat dengan Kota Pelaihari sejumlah

fasilitas sarana prasarana sudah banyak perbaikan dan lengkap. Dinas Pariwisata terus melakukan pembenahan infrastruktur di Obyek Wisata yang sudah ada dan melakukan pengembangan Obyek Wisata baru yang ada di Kabupaten Tanah Laut, agar masyarakat mempunyai pilihan saat mengunjungi berbagai Destinasi Wisata. Pada tahun 2020 jumlah objek wisata yang ada adalah berjumlah 23 objek wisata, tahun 2021 sebanyak 24 objek wisata dan meningkat menjadi 26 objek wisata pada tahun 2022.

Tabel 3.5.44
 Jumlah Pengunjung Wisata di Objek Wisata di Wilayah Kabupaten Tanah Laut
 Tahun 2022

NO	NAMA OBJEK WISATA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH
Dikelola Pemda (Dinas Pariwisata)				
1	Gunung Kayangan	Desa Ambungan	Pelaihari	0
2	Air Terjun Bajuin	Desa Sungai Bakar	Bajuin	36.152
3	Taman Mina Tirta	Kelurahan Angsau	Pelaihari	2.940
	- Sepeda Air	Kelurahan Angsau	Pelaihari	0
	- Kereta Wisata	Kelurahan Angsau	Pelaihari	0
	- Orchid	Kelurahan Angsau	Pelaihari	175
	- Hutan Kota	Kelurahan Angsau	Pelaihari	2.511
4	Pantai Takisung	Desa Takisung	Takisung	48.800
5	Pantai Batakan Baru	Desa Batakan	Panyipatan	117.700
6	Pantai Swarangan	Desa Swarangan	Jorong	10.980
7	Pantai Batu Lima	Desa Kuala Tambangan	Takisung	0
Dikelola Oleh Masyarakat / Desa				
8	Pantai Kintap	Desa Muara Kintap	Kintap	911
9	Pantai Cemara Satu	Desa Muara Kintap	Kintap	9.347
10	Pantai Cemara Dua	Desa Muara Kintap	Kintap	8.092
11	Pantai Tanjung Dewa	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan	27.678
12	Pantai R.Piungan	Desa Asam Jaya	Jorong	0
13	Pulau Datu	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan	30.160
14	Kerbau Rawa	Desa Benua Raya	Bati-Bati	6.089
15	Mangrove Pagatan Besar	Desa Takisung	Takisung	11.795
16	Gunung Birah	Desa Kandangan Lama	Panyipatan	21.852
17	Dewa Katar	Desa Telaga	Pelaihari	4.320
18	Surai Bekantan Panjaratan	Desa Panjaratan	Pelaihari	3.379
19	Wisata Mahuni	Desa Padang	Bati-Bati	8.336
Dikelola oleh Pribadi				
20	Pantai Karindangan	Desa Pagatan Besar	Takisung	16.292

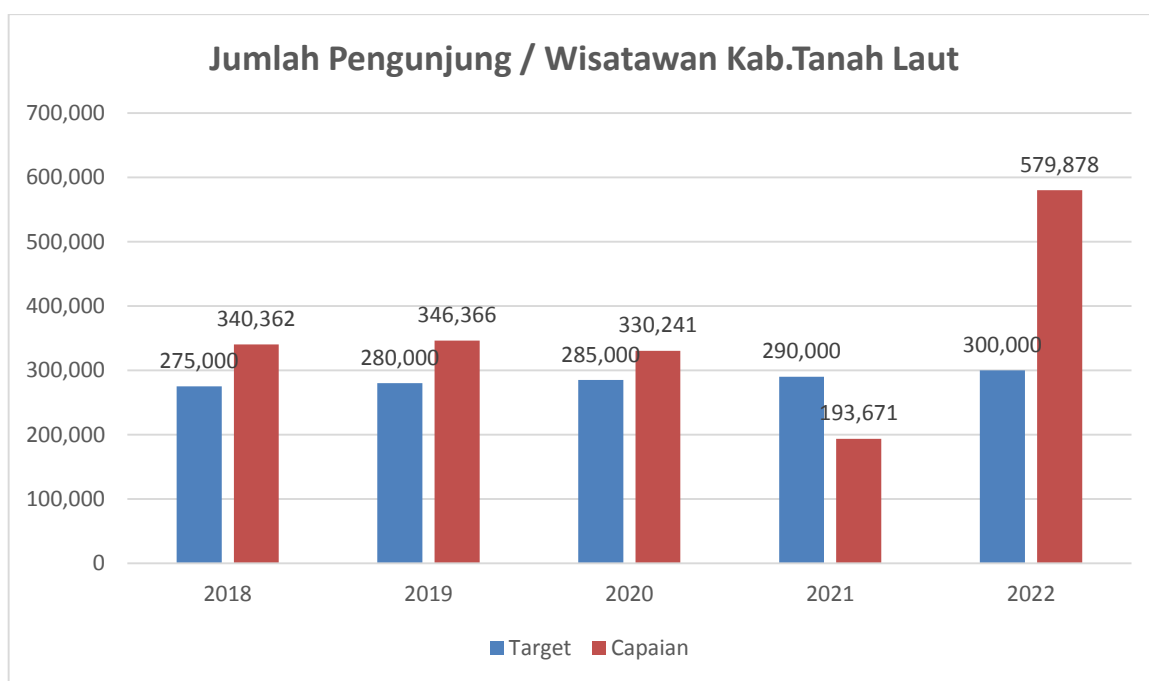
21	Pantai THR	Desa Pagatan Besar	Takisung	20.282
22	Pantai Turki	Desa Swarangan	Jorong	40.136
23	Pantai Asmara	Desa Muara Asam-Asam	Jorong	22.546
24	Pantai Tabanio	Desa Tabanio	Takisung	17.356
25	Bukit Timah	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan	31.699
26	Taman Permana	Desa Telaga	Pelaihari	80.350
	TOTAL JUMLAH			579.878

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Pada dasarnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 terus mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak Bulan Maret Tahun 2020. Namun pada Tahun 2022 jumlah kunjungan wisata meningkat tajam dibandingkan Tahun 2021.

Grafik 3.5.18

Jumlah kunjungan wisata Tanah Laut tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Tanah Laut :

1. Dinas Pariwisata terus melakukan pembenahan infrastuktur di obyek wisata yang sudah ada, pada tahun melakukan pembenahan perbaikan fasilitas sarana dan

prasarana pada 2 objek wisata meliputi pembangunan pos jaga destinasi air terjun Bajuin (usulan Musrenbang) dan pembuatan gazebo di objek wisata pantai batakan baru.



2. Melakukan pengembangan obyek wisata baru yang ada di Kabupaten Tanah Laut, agar masyarakat mempunyai pilihan saat mengunjungi berbagai destinasi wisata di wilayah Kabupaten Tanah Laut, sehingga capaian pengunjung wisata terus meningkat setiap tahunnya. Ada penambahan sebanyak 2 objek wisata baru yaitu Pantai Tabanio dan Pantai Timah.
3. Melakukan pemasaran pariwisata melalui kegiatan promosi pariwisata, melaksanakan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dan melakukan penyediaan dan penyampaian data dan informasi pariwisata.
4. Dinas Pariwisata melakukan koodinasi dengan BKSDA dan pihak terkait sehingga ada kesepakatan dalam pendistribusian karcis obyek wisata Pantai Batakan,
5. Melakukan kerja sama dengan pihak keamanan seperti Satpol PP, kepolisian setempat, TNI dalam rangka pengamanan obyek wisata seperti premanisme dan pungli.
6. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, pembinaan masyarakat dan pelaku usaha jasa kepariwisataan, dan
7. Melaksanakan promosikan/pemasaran pariwisata d kabupaten tanah Laut melalui media social, media cetak, pameran wisata di dalam provinsi maupun diluar provinsi Kalimantan selatan serta pelaksanaan lomba foto wisata, vlog wisata, podcast dan video wisata.

8. Melaksanakan pengembangan SDM kepariwisataan diantaranya pelatihan fotografi, pelatihan resque, pelatihan tour guide, dll.
9. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif melalui pelatihan fotografi kepada pelaku ekonomi kreatif, pendataan seluruh ekonomi kreatif.
10. Menghimbau kepada seluruh SKPD agar setiap event yang ada di Kabupaten Tanah Laut disertai dengan melibatkan sarana akomodasi/pihak hotel/penginapan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
11. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus melakukan perbaikan jalan menuju objek wisata sesuai dengan program unggulan Bupati Wakil Bupati Tanah Laut yaitu peningkatan/pengaspalan minimal 85% pada akhir tahun RPJMD (2018-2023).

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja peningkatan jumlah kunjungan wisatawan diantaranya :

1. Masih banyaknya infrastruktur yang rusak di objek-objek wisata.
2. Minimnya dana operasional pemeliharaan sarana prasarana yang ada di objek-objek wisata.
3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pengunjung wisata untuk memelihara sarana dan prasarana yang ada di objek wisata.
4. Belum adanya investor yang berpartisipasi mengembangkan objek wisata.
5. Keterbatasan dana dalam mengembangkan objek wisata menjadi objek wisata berkualitas atau sebuah kawasan wisata yang terkelola dengan baik.

Upaya yang ditempuh untuk penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan pariwisata yaitu:
 - 1) Pengembangan potensi pariwisata yang telah mempunyai dokumen kajian dan perencanaan agar dituntaskan (rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Masterplan terumbu karang dan penataan sungai)
 - 2) Optimalisasi Kerjasama dengan pihak ke tiga (swasta) untuk potensi pariwisata yang belum dikelola maupun yang sudah dikelola pemerintah daerah.
 - 3) Optimalisasi promosi potensi pariwisata melalui event-event tahunan, pameran-pameran, promosi melalui media cetak, media elektronik dan media

sosial serta memberdayakan penggiat seni dan budaya (influencer) yang ada untuk menarik minat wisatawan.

- 4) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sdm dan komunitas-komunitas penggiat seni, budaya dan pariwisata.
- 5) Pemerintah daerah berperan sebagai regulator dalam rencana pengembangan pariwisata, sedangkan pelaksana pengembangan didorong pihak ke tiga (investor) sebagai operator.
2. Meningkatkan sosialisasi pembinaan kepada masyarakat sekitar obyek wisata dan para pelaku usaha jasa kepariwisataan
3. Memperbaiki jalan-jalan yang rusak dengan berkoordinasi kepada instansi terkait.
4. Melaksanakan monitoring ke objek-objek wisata dan melakukan kerja sama dengan pihak keamanan seperti Satpol PP, kepolisian setempat, TNI dalam rangka pengamanan obyek wisata seperti premanisme dan pungli dan membentuk POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).
5. Meningkatkan promosi bidang kepariwisataan agar dapat menarik investor yang masuk ke Tanah Laut.
6. Melaksanakan koordinasi dengan Tim TAPD mengenai permasalahan anggaran melalui Rapat Koordinasi Teknis pada saat pembahasan anggaran mengenai program/kegiatan untuk tahun yang akan datang dapat lebih intensif.
7. Dalam usaha pengembangan kepariwisataan ini, Dinas Pariwisata memerlukan dukungan dari instansi terkait dengan peran serta semua pihak (*stakeholder*).
8. Mengembangkan dan terus membina UMKM dan industri kreatif yang ada di Tanah Laut.
9. Meningkatkan pengembangan pembangunan sarana prasarana pariwisata yang standarisasi dan refresentatif di objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah.
10. Meningkatkan pengembangan/penggalan potensi wisata baru. Melakukan kerja sama dengan pihak keamanan seperti Satpol PP, kepolisian setempat, TNI dalam rangka pengamanan obyek wisata seperti premanisme dan pungli, koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
11. Melakukan pembinaan masyarakat dan pelaku usaha jasa kepariwisataan.
12. Terus melakukan promosi/pemasaran pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah



Laut, baik melalui media cetak (brosur, pamflet, buku profil, media sosial (Webside, FB, Instagram, Twitter, Youtube), media elektronik (Radio Fantastic Tanah Laut).

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 65 ASN pada DKPP, 110 ASN pada DISTANHORBUN, 115 ASN pada DISNAKESWAN, 86 ASN pada DISNAKERIND, 55 ASN pada DISPAR dan di dukung oleh 8 Program dengan Pagu Rp. 10,702,017,128,00 dan terealisasi Rp. 9,946,388,564.00 atau sebesar 92,94%.

Tabel 3.5.45
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	739,301,821,00	622.938.000,00
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	89,892,611,00	89.323.670,00
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	339,878,035,00	324.870.750,00
4	Program Pemasaran Pariwisata	488,761,957,00	250.418.488,00
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	132,983,236,00	125.131.468,00
6	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,636,958,144,00	1.455.753.288,00
7	Program Pengendalian Izin Usaha Insutri Kabupaten/Kota	11,890,000,00	5.987.500,00
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	7,262,351,324,00	7.071.965.400,00
		10,702,017,128,00	9,946,388,564.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 18

Meningkatnya Ketahanan Pangan

Meningkatnya Ketahanan Pangan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.46
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Skor PPH Ketersediaan	Nilai	95	82.8	87.16	95	84.1	88.53	95	90,7	95,47 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											95,47 %

Tabel 3.5.47
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Skor PPH Ketersediaan	Nilai	95	90,7	95,47 %	95	95,47 %

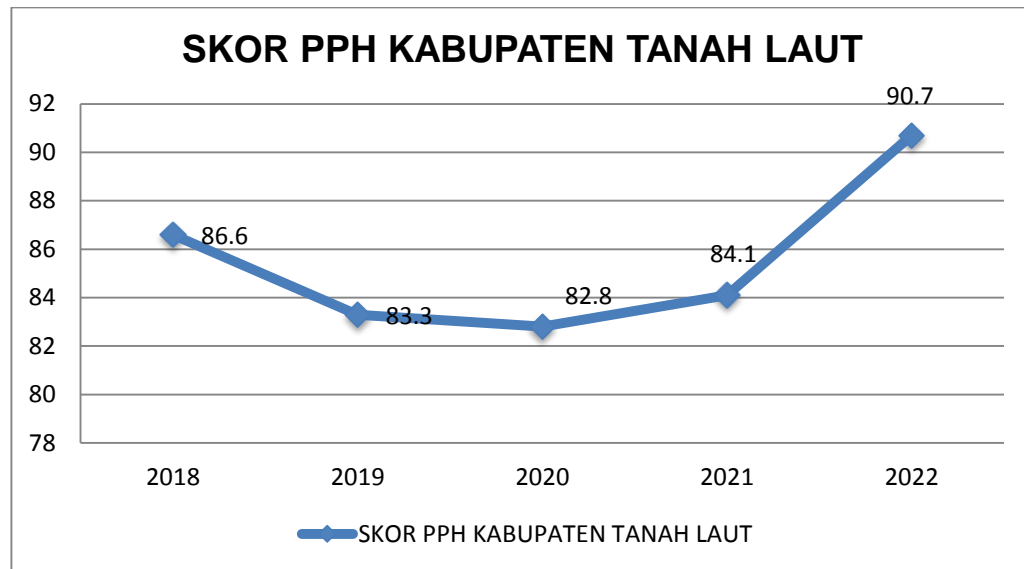
Skor PPH Ketersediaan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui Konsumsi pangan setiap rumah tangga yang berbeda baik jumlah, mutu gizi dan keberagaman pangan adalah dengan menggunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

Melalui pendekatan PPH kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH. Skor PPH merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ketahanan pangan di Indonesia Skor maksimal yang dicapai 100 (skor ideal). Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang.

Skor PPH Ketersediaan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,6 point dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 90,7 dengan tingkat capaian sebesar 95,47%.

Tabel 3.5.19
Skor PPH Kabupaten Tanah Laut 2018-2022



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Secara umum ada 9 kelompok pangan dalam PPH, yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta selain 8 kelompok tersebut, dimasukkan ke lain-lain. Jumlah kalori harian ideal yang dikonsumsi orang Indonesia dalam hal ini Kabupaten Tanah Laut Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah 2100 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram/kap/hari. Meskipun standar kecukupan lebih besar namun hasil data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Skor PPH kabupaten Tanah Laut yakni 90,7 lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 84,1.

Hasil dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tanah Laut ini meliputi Data-data Baseline, Konsumsi Hasil Pangan Hasil Susenas, hasil Analisis Pola Konsumsi, Kecukupan Gizi, skor PPH, Sasaran PPH, Proyeksi Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan wilayah berdasarkan pendekatan PPH sebagaimana terlampir

Berdasarkan Hasil Analisis Justifikasi Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan (Konsumsi Energi Dan Protein) dan skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat dari hasil perhitungan skor PPH pada Tabel dibawah ini.



Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Susenas
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Gram/ Kapita	%	% AKP**)
1	Padi-padian	1,295	58,5	64.8	30.8	58.5	53.9
2	Umbi-umbian	40	1.8	2.0	0.3	1.8	0.6
3	Pangan Hewani	296	13.4	14.8	24.8	13.4	43.4
4	Minyak dan Lemak	280	12.6	14.0	0.0	12.6	0.0
5	Buah/Biji Berminyak	16	0.7	0.8	0.2	0.7	0.4
6	Kacang-kacangan	45	2.0	2.2	4.7	2.0	8.3
7	Gula	108	4.9	5.4	0.0	4.9	0.1
8	Sayur dan Buah	87	3.9	4.3	3.2	3.9	5.6
9	Lain-lain	49	2.2	2.4	1.7	2.2	3.0
	Total	2,215	100.0	110.7	65.8	100.0	115.4

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi : 2000 Kkal/Kapita/Hari
**) Angka Kecukupan Protein : 52 Gram/ Kapita/ Hari

Tabel 3.5.48
 Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Susenas
 Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Gram/ Kapita	%	% AKP**)
1	Padi-padian	1,224.9	54.6	58.3	27.7	39.1	48.6
2	Umbi-umbian	43.1	1.9	2.1	0.4	0.6	0.7
3	Pangan Hewani	366.2	16.3	17.4	31.9	45	55.9
4	Minyak dan Lemak	273.0	12.2	13.0	0.0	0	0.0
5	Buah/Biji Berminyak	10.9	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3
6	Kacang-kacangan	53.8	2.4	2.6	4.7	4.7	8.3
7	Gula	107.5	4.8	5.1	0.1	0.1	0.1
8	Sayur dan Buah	116.6	5.2	5.6	4.3	4.3	7.5
9	Lain-lain	48,0	2,1	2,3	1,6	1,6	2,8
	Total	2.244	100.0	106.9	70.8	100.0	124.2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Keterangan = *) *Angka Kecukupan Energi : 2100 Kkal/Kapita/Hari*
 **) *Angka Kecukupan Protein : 57 Gram/ Kapita/ Hari*

Hasil Justifikasi Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dihasilkan adalah sebesar 2.215 Kkal per kapita per hari, hal ini menunjukkan bahwa AKE telah melampaui angka standar AKE yang telah ditetapkan dalam analisis yaitu sebesar 2000 Kkal per kapita per hari, sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) juga menunjukkan hasil sebesar 65,8 Gram perkapita per hari, dimana AKP juga telah melampaui standar yang telah ditetapkan sebesar 52 Gram per kapita per hari. Hal ini berarti konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Tanah Laut meskipun telah melampaui standar normative dan sudah memenuhi standar.

Walaupun AKG Energi dan Protein lebih tinggi standar nilai Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021, berdasarkan hasil data diperoleh bahwa hasil

Justifikasi Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat dilihat bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dihasilkan adalah sebesar 2.244 Kkal per kapita per hari, hal ini menunjukkan bahwa AKE telah melampaui angka standar AKE yang telah ditetapkan dalam analisis yaitu sebesar 2100 Kkal per kapita per hari, sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) juga menunjukkan hasil sebesar 70,8 Gram perkapita per hari, dimana AKP juga telah melampaui standar yang telah ditetapkan sebesar 57 Gram per kapita per hari. Hal ini berarti konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Tanah Laut meskipun telah melampaui standar normative dan sudah memenuhi standar.

Dilihat dari Komposisi Angka Kecukupan Gizi, konsumsi padi-padian idealnya 50%, namun konsumsi di Tanah Laut tahun 2021 adalah 64,8%, angka ini masih terlalu tinggi dan harus diturunkan sebesar 14,8%. Sedangkan pada Tahun 2022 prosentase untuk konsumsi padi-padian adalah 54,6 dengan nilai AKE bahan pangan bersumber padi-padian adalah 58,3%. Kampanye untuk mengurangi konsumsi beras harus terus digalakkan dan ditingkatkan oleh pemerintah baik pusat maupun di daerah dengan menggandeng seluruh Stakeholder agar terjadi perubahan mindset konsumsi beras.

Adapun data hasil konsumsi aktual pada Tahun 2021 berdasarkan hasil Susenas jika dibandingkan dengan standar kecukupan gizi yang dianjurkan maka tingkat konsumsi energi dan skor PPH aktual penduduk Kabupaten Tanah Laut masih sebesar 84,1 %, belum mencapai nilai standar Minimal yaitu 95 %. Pada Tahun 2022 capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menunjukkan peningkatan yakni Skor PPH 90,7, artinya ada peningkatan 6,6 point, tetapi capaian tersebut masih belum berhasil mencapai target yang ingin dicapai. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan karena terdapat selisih yang cukup tinggi pada kelompok konsumsi pangan tertentu dibandingkan dengan standar kecukupan konsumsi, antara lain :

- Masih tingginya konsumsi beras
- Masih rendahnya konsumsi umbi umbian, sayur dan buah
- Pola konsumsi masyarakat yang sukar dirubah terutama dalam konsumsi sayur dan buah

- Ketersediaan pangan untuk kelompok pangan tertentu masih kurang, misalnya di wilayah perikanan sayur dan buah kurang tersedia.
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai target karena belum meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbangan dan aman (B2SA). Dengan demikian masih diperlukan sosialisasi dan pembinaan yang intensif agar tingkat konsumsi pangan masyarakat mencapai skor pola pangan harapan yang diharapkan.

Angka Kecukupan Energi dan Angka Kecukupan Protein. Namun kontribusi energi-energi dari 9 kelompok pangan belum menunjukkan keseimbangan, artinya konsumsi masyarakat Kabupaten Tanah Laut belum memenuhi kaidah konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.49
Tingkat Pencapaian Energi Menurut Kelompok Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Ideal Kkal/Kapita/Hari	SPM 90%
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)		
1	Padi-padian	1.295	58.5	64.8	1000	900.0
2	Umbi-umbian	40	1.8	2.0	120	108.0
3	Pangan Hewani	296	13.4	14.8	240	216.0
4	Minyak dan Lemak	280	12.6	14.0	200	180.0
5	Buah/Biji Berminyak	16	0.7	0.8	60	54.0
6	Kacang-kacangan	45	2.0	2.2	100	90.0
7	Gula	108	4.9	5.4	100	90.0
8	Sayur dan Buah	87	3.9	4.3	120	108.0
9	Lain-lain	49	2.2	2.4	60	54.0
Total		2.215	100.0	110.7	2000	1,800.0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

*Keterangan = Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2000 Kkal/Kapita/Hari
SPM : Standar Pelayanan Minimum*

Tabel 3.5.50
 Tingkat Pencapaian Energi Menurut Kelompok Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Ideal Kkal/Kapita/Hari	SPM 90%
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)		
1	Padi-padian	1,224.9	54.6	58.3	1050	945.0
2	Umbi-umbian	43.1	1.9	2.1	126	113.4
3	Pangan Hewani	366.2	16.3	17.4	252	226.8
4	Minyak dan Lemak	273.0	12.2	13.0	210	189.0
5	Buah/Biji Berminyak	10.9	0.5	0.5	63	56.7
6	Kacang-kacangan	53.8	2.4	2.6	105	94.5
7	Gula	107.5	4.8	5.1	105	94.5
8	Sayur dan Buah	116.6	5.2	5.6	126	113.4
9	Lain-lain	48.0	2.1	2.3	63	56.7
Total		2.244	100.0	106.9	2100	1,890.0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

*Keterangan = Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2100 Kkal/Kapita/Hari
 SPM : Standar Pelayanan Minimum*

Berdasarkan data Tahun 2022 diketahui ada peningkatan Tingkat Konsumsi Energi yakni 2.244 Kkal/kapita jika dibandingkan tahun 2021 yakni 2.215 Kkal/kapita. Hasil Data Tahun 2022 diketahui bahwa dari 9 (sembilan) kelompok pangan asupan energi yang paling tinggi disumbangkan oleh kelompok padi-padian yaitu sebesar 1.224,9 Kkal per kapita per hari kemudian disusul dari pangan hewani sebesar 366,2 Kkal perkapita per hari kemudian minyak dan lemak sebesar 273 kkal perkapita per hari, gula sebesar 107,5 kkal/kap/hari, 4 jenis ini semuanya sudah melebihi standar/ nilai idealnya utk asupan perharinya. Sayur dan buah, kacang-kacangan sedangkan umbi-umbian masih sedikit sekali dan yang paling kecil adalah buah / biji berminyak hanya sekitar 10,9 Kkal perkapita per hari sedangkan idelanya konsumsi adalah buah / biji berminyak hanya sekitar 63 Kkal perkapita per hari

Bila dilihat dari pencapaian energi menurut kelompok pangan. Maka tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Tanah Laut telah mencapai tingkat konsumsi energy yang lebih dari ideal beberapa kelompok pangan. Namun masih terdapat ada beberapa kelompok pangan yang lebih kecil nilainya dari batas ideal. Standar normative konsumsi padi-padian perkapita per hari adalah 1.050 Kkal sementara

masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi jenis padi-padian hingga 1.224,9 Kkal. Konsumsi padi-padian idealnya adalah 54,5% sedangkan di Tanah Laut sebesar 58,3 %. Sedangkan standar normative konsumsi pangan sejenis umbi-umbian per kapita per hari adalah 126 Kkal, sementara masyarakat Kabupaten Tanah Laut mengkonsumsi pangan jenis ini baru mencapai 40,1 kkal per kapita per hari.

Pangan hewani mestinya dikonsumsi 252 Kkal per kapita per hari, sementara masyarakat Tanah Laut telah dapat mengkonsumsi pangan hewani sebanyak 366,2 Kkal. Minyak dan Lemak mestinya dikonsumsi 210 kkal per kapita perhari, masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi lemak hingga 273 Kkal. Buah/biji berminyak mesti dikonsumsi 63 Kkal perkapita per hari, namun masyarakat Tanah Laut hanya 10,9 Kkal per kapita per hari.

Kacang-kacangan mesti dikonsumsi 105 Kkal per kapita per hari, namun warga Tanah Laut hanya mengkonsumsi 53,8 Kkal. Demikian pun halnya Gula mesti dikonsumsi hingga 105 Kkal per kapita per hari. Namun dikonsumsi sebanyak 107,5 Kkal.

Sayur dan Buah-buahan mesti dikonsumsi 126 Kkal per kapita per hari faktanya yang dikonsumsi 116,6 Kkal perkapita per hari. Sedangkan bumbu-bumbuan dan minuman mesti dikonsumsi 63 Kkal perkapita per hari, sayangnya masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi bumbu-bumbuan dan minuman sebesar 48 Kkal Per kapita per hari.

Secara Keseluruhan Pola konsumsi pangan Kabupaten Tanah Laut masih belum optimal dikarenakan :

1. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras
2. Masih rendahnya konsumsi pangan buah/biji berminyak, umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayur dan buah
3. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal
4. Diperlukan upaya untuk menganekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.
5. Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (nutrition sensitive production system).

Apabila konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah tinggi skor PPH Konsumsi akan meningkat karena bobot dari kelompok pangan sayur dan buah dalam skor PPH konsumsi tinggi. Dari permasalahan tersebut, maka solusi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye gerakan mengurangi konsumsi beras yang dilaksanakan secara terus menerus dan masif di seluruh Kabupaten Tanah Laut serta dukungan dari seluruh stakeholder yang ada agar terjadi perubahan mindset konsumsi beras, dengan bahan pengganti beras bersumber bahan pangan local, seperti jagung, umbi-umbian, atau sagu.
2. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH konsumsi yang ideal agar hidup menjadi sehat, aktif dan produktif.
3. Meningkatkan pembinaan pada masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui sosialisasi di kelompok wanita tani (KWT) dengan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), PKK dan posyandu.
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan dengan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sehingga masyarakat dapat menyediakan pangan dan gizi secara mandiri tidak harus pergi ke pasar atau warung yang jaraknya cukup jauh untuk dijangkau masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir dan di pegunungan jauh dari penduduk, serta akses transportasi yang sulit.

Setelah dilakukan penilaian terhadap kualitas konsumsi masyarakat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan skor pola pangan harapan (PPH) dengan rentang skor 0 hingga 100, dengan asumsi semakin tinggi skor PPH menunjukkan bahwa mutu atau kualitas pangan yang dikonsumsi semakin beragam, bergizi dan seimbang. Dari hasil perhitungan skor pola pangan harapan (PPH) mutu konsumsi masyarakat Tanah Laut mendapat skor PPH pada Tahun 2021 sebesar 84,1. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Skor PPH mencapai 90,7 lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 3.5.51.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kualitas konsumsi pangan masyarakat Tanah Laut selama 4 tahun terakhir berdasarkan skor pola pangan harapan (PPH) maka pada tahun 2021 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor PPH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018– 2022.

Tabel 3.5.51
Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2022

Tahun	Energi Justifikasi	Skor PPH Justifikasi
2018	2.058	86.6
2019	2.211	83.3
2020	2.130	82.8
2021	2.215	84,1
2022	2.244	90,7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas dapat dilihat skor PPH tahun 2018 senilai 86.6 dan tahun 2019 skor PPH turun menjadi 83,3. Pada tahun 2020 skor PPH kembali mengalami penurunan menjadi 82,8. sedangkan tahun 2021 skor PPH naik lagi menjadi 84,1. Dan Tahun 2022 meningkat menjadi 90,7. Dilihat dari komposisi Angka Kecukupan Gizi, Konsumsi Dalam RPJMN 2020 -2024, indikator skor PPH dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam program prioritas peningkatan ketersediaan. Ada beberapa alternatif yang mungkin menyebabkan skor PPH Konsumsi Pangan Penduduk Tanah Laut mengalami peningkatan, walaupun tahun dari tahun 2020, sampai dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2020, namun masih belum sesuai dengan skor ideal yang diharapkan, hal tersebut disebabkan kemungkinann antara lain semakin baiknya pola konsumsi pangan keluarga, tingkat pendapatan rumah tangga yang semakin baik, demikian juga status kesehatan masyarakat semakin baik seperti kita ketahui bahwa dalam tahun 2022 terakhir ini kasus covid-19 semakin kecil/ berkurang di Kabupaten Tanah Laut dan hal ini sangat berimbas kepada pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap, faktor lainnya adalah pendidikan, dan pantangan makanan.

Selain hal tersebut, upaya untuk mencapai target skor PPH, Kabupaten Tanah Laut melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yaitu sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangannya secara intensif untuk di manfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat dengan Pelaku utama kelompok P2L yaitu kelompok wanita sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan.
2. Dukungan Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan dibidang mutu dan keamanan pangan.
3. Dukungan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan untuk mengetahui titik pemantapan ketersediaan pangan beragam, bergizi dan berimbang, dan pangan rawan beragam, bergizi dan berimbang.
4. Dukungan Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman gizi berimbang dan keamanannya.
5. Dukungan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan untuk mengetahui ketersediaan dan ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu
6. Dukungan ketersediaan informasi distribusi, harga, dan akses pangan di daerah merupakan salah satu indikator yang bisa menjelaskan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah pengamatan terhadap kondisi ketersediaan informasi distribusi, dan harga berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, daya beli masyarakat dan akses pangan beragam, bergizi dan berimbang di daerah.

Dalam mencapai sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 65 ASN pada DKPP, 110 ASN pada DISTANHORBUN dan di dukung oleh 16 Program dengan Pagu Rp. 192,576,592,852,00 dan terealisasi Rp. 173,882,624,321.00 atau sebesar 90,29%.

Tabel 3.5.52
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	3,195,754,898,00	2.982.983.893,00
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	442,791,918,00	316.034.856,00
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	51,918,551,00	32.191.000,00
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	83,279,858,00	69.968.427,00
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,596,082,342,00	1.522.116.405,00
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	166,049,979,298,00	149.406.509.404,00
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,505,537,697,00	1.469.524.052,00
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14,598,659,882,00	13.599.572.850,00
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	619,160,328,00	483.425.992,00
10	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	154,509,542,00	133.855.500,00
11	Program Perizinan Usaha Pertanian	16,721,679,00	16.594.000,00
12	Program Penyuluhan Pertanian	1,634,699,687,00	1.462.796.852,00
13	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2,066,309,223,00	1.963.768.082,00
14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	328,306,687,00	285.096.540,00
15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	99,898,026,00	13.055.000,00
16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	132,983,236,00	125.131.468,00
		192,576,592,852,00	173,882,624,321.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 19

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.53
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	60,584	69,82	115,24%	60,960	68,70	112,7%	71,27	67,78	95,10 %
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	%	78,00	82,66	105,97%	87,00	87,00	100%	92	97	105,43 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											100,26%

Tabel 3.5.54
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	71,27	67,78	95,10 %	61,712	109,83%
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	%	92	97	105,43 %	98	98,97%

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah 67,78 mengacu pada IKLH secara nasional termasuk dalam kategori sedang. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 71,27 dengan tingkat capaian 95,10%. Nilai ini mengalami penurunan 0,92 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 68,70 (sedang).

Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2022, nilai Indeks kualitas lingkungan hidup selama tahun 2016 – 2022 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.5.55
IKLH Kabupaten Tanah Laut tahun data 2016 – 2022

Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	IKLH	Kategori
2016	88,63	45,56	41,14	56,71	Kurang
2017	95,81	50	40,40	59,90	Kurang
2018	90,88	51	39,78	58,48	Kurang
2019	90,68	50	39,65	58,06	Kurang
2020	91,29	60,67	45,83	69,82	Sedang
2021	91,85	58,42	43,54	68,70	Sedang
2022	92,10	55,38	44,08	67,78	Sedang

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Laut dan hasil analisis tahun 2022

Berdasarkan Tabel tersebut menunjukkan bahwa kondisi IKLH mengalami fluktuatif yakni pada tahun 2018 menjadi 58,42 yang sebelumnya tahun 2017 sebesar 59,90, sedangkan tahun 2016 lebih rendah yakni 56,71 dan secara keseluruhan dalam kategori kurang.

Perubahan tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh nilai IKU yang cukup baik yakni sebesar 90,88 (meskipun menurun dibandingkan tahun 2017) dan IKA naik sebesar 1 poin, sedangkan IKL menurun sebesar -0,62.

Untuk periode pemantauan 2019 untuk IKLH mengalami penurunan sebesar -0,42 poin. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka IKLH yaitu sebesar 69,82 atau meningkat sebesar 11,76 poin. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan IKA sebesar -2,25 point dan penurunan IKL sebesar -2,29 poin. Namun terjadi peningkatan IKU sebesar 0,56 poin. Sehingga angka IKLH mengalami penurunan 1,12 poin. Pada tahun 2022, terjadi penurunan capaian IKLH yaitu menurun sebesar -0,92 poin dari capaian tahun 2021. Penurunan disebabkan oleh nilai Indeks

Kualitas Air (IKA) yang mengalami penurunan cukup besar yaitu -3,04 poin. Walaupun Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan sebesar 0,2 poin dan Indeks Kualitas Lahan juga meningkat sebesar 0,54 poin.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat ukur sederhana untuk mengetahui pencapaian dari upaya pemulihan lingkungan serta sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator dan standar yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualitas Air

Air khususnya air sungai mempunyai peran yang sangat strategis dalam perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air sungai bagi sebagian besar masyarakat merupakan sumber air minum rumah tangga. Selain itu air sungai menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian dan pembangkit listrik. Di sisi lain sungai juga menjadi tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka kualitas air sungai menjadi salah satu penting yang menjadi indikator kualitas lingkungan hidup.

Pemantauan kualitas air permukaan periode I dilakukan pada 12 titik sample air yang terdiri 6 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana aliran air permukaan tersebut merupakan titik – titik yang telah dianggap mewakili gambaran kualitas air permukaan di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil pengujian sample yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan dan UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut maka didapatkan data – data sebagai berikut :

Dari hasil analisa kualitas parameter air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui dominasi parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada semua titik pantau adalah Total Coliform, TSS, BOD, Fecal Coliform, TDS, COD.

Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode indeks pencemar pada 12 (dua belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui terdapat 7 (tujuh) dengan status memenuhi dan 19 (sembilan belas) titik pantau dengan status cemar ringan.

Tabel 3.5.56

Analisa kualitas parameter air Daerah Aliran Sungai (DAS) Periode I Tahun 2022 berdasarkan Baku Mutu yang telah ditetapkan

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	DAS KINTAP		DAS ASAM ASAM		DAS TABANIO		DAS MALUKA		DAS SABUHUR		DAS SWARANGAN	
				HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR
1	Temperature	oC	Dev 3	27,65	27,10	27,40	26,75	26,60	28,50	27,20	31,10	27,10	28	28,50	28,50
2	pH	-	6 - 9	8,11	7,83	7,62	7,82	8,72	8,43	8,51	7,36	8,47	8,61	8,48	8,10
3	TSS (Total Padatan Tersuspensi)	mg/L	50	8,50	61	18,67	82	86,7	86,67	62	6,15	15,64	8,55	18,33	11,50
4	TDS (Total Padatan Terlarut)	mg/L	1000	104	152	83	96	94	92	68	50	58	50	78	3128
5	DHL (Daya Hantar Listrik)	ms/cm	-	135,50	158,70	97,70	103,70	109,70	85,20	99,90	63,80	102,70	52	71,10	5060
6	Salinitas*	mg/L	-	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	DO (Oksigen Terlarut) Laboratorium	mg/L	4	8,05	7,70	7,20	8,05	8,50	7,50	7,90	6,50	10,30	9,30	7,5	10
8	BOD (Biological Oxygen Demand)	mg/L	3	2,19	2,68	2,60	2,44	3,17	2,84	2,27	2,03	4,80	4,80	4,63	4,88
9	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	25	7,55	12,97	15,92	11,98	22,82	16,42	14,45	8,52	16,91	15,43	22,33	27,75
10	Kekeruhan	NTU	-	8,71	126	16,90	41,30	38,80	134	85,40	3,99	28,40	22,20	36,10	20,30
11	Fe (Besi) Terlarut	mg/L	-	0,030	0,388	0,273	0,385	0,565	0,359	1,037	0,579	0,705	0,690	1,054	0,553
12	Cd (Kadmium) Terlarut*	mg/L	0,01	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013
13	Hg (Raksa) Terlarut*	mg/L	0,002	0,000967	0,000822	0,000936	0,00102	0,000539	0,000809	0,000598	0,000303	0,00104	<5X10 ⁻⁷	0,000588	<5X10 ⁻⁷
14	Amoniak (NH ₃ -N)*	mg/L	0,2	0,2	<0,1*	0,1	<0,1*	<0,1*	<0,1*	<0,1*	<0,1*	<0,1*	<0,1*	<0,1*	<0,1*
15	Nitrat Sebagai N (NO ₃ -N)*	mg/L	10	3,8	1,9	2,7	3,9	3,8	4,3	2,4	1,5	1,8	2,3	2,5	2,4
16	Total Fosfat Sebagai P	mg/L	0,2	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,40	<0,20
17	Fecal Coliform*	MPN/100 ml	1000	1046	591	199	613	712	521	1664	528	231	2909	459	609
18	Total Coliform*	MPN/100 ml	5000	24196	24196	>24196	24196	>24196	>24196	>24196	>24196	>24196	>24196	>24196	24196
19	Kecepatan Arus	m ² /s	-	0,60	0	0	0	6,30	0,30	1,40	1,50	0,30	0,30	0,40	0,10

Tabel 3.5.57

Analisa Kualitas Parameter Air Daerah Aliran Sungai (DAS) Periode II Tahun 2022 berdasarkan Baku Mutu yang telah ditetapkan

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	DAS KINTAP		DAS ASAM ASAM		DAS TABANIO		DAS MALUKA		DAS SABUHUR		DAS SWARANGAN	
				HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR
1	Temperature	oC	Dev 3	26,30	26,90	25,70	27,30	25,30	23,40	27,20	24,20	27,40	27,90	27,00	28,30
2	pH	-	6 - 9	7,15	6,81	5,82	6,83	7,41	7,01	7,34	4,22	6,83	6,43	6,74	6,74



3	TSS (Total Padatan Tersuspensi)	mg/L	50	4,00	88,00	2,068,00	32,40	139,00	47,00	32,00	4,73	22,57	8,00	6,00	42,67
4	TDS (Total Padatan Terlarut)	mg/L	1000	102,00	160,00	74,00	116,00	738,00	96,00	72,00	166,00	102,00	74,00	60,00	6.206,00
5	DHL (Daya Hantar Listrik)	ms/cm	-	145,20	146,20	173,40	113,10	126,90	65,40	96,10	26,60	85,50	43,60	54,50	10,47
6	Salinitas*	mg/L	-	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,02	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	5,90
7	DO (Oksigen Terlarut) Laboratorium	mg/L	4	5,20	4,60	3,60	3,75	8,30	7,40	7,50	6,60	4,10	3,80	4,50	5,10
8	BOD (Biological Oxygen Demand)	mg/L	3	<0,77	<0,77	<0,77	<0,77	<0,77	<0,77	<0,77	<0,77	<0,77	<0,77	<0,77	<0,77
9	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	25	5,74	19,12	73,67	12,43	5,22	7,80	<4,75	<4,75	27,35	17,58	23,24	31,99
10	Kekeruhan	NTU	-	5,12	88,80	3,210,00	37,10	274,00	75,50	43,10	7,19	38,20	23,40	18,60	35,50
11	Fe (Besi) Terlarut	mg/L	-	0,109	1,145	7,545	0,761	0,505	0,380	0,497	0,404	0,870	0,646	0,314	1,106
12	Cd (Kadmium) Terlarut*	mg/L	0,01	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013
13	Hg (Raksa) Terlarut*	mg/L	0,002	<0,000325	<0,000325	<0,000325	<0,000325	0,000588	0,000903	0,001462	0,001067	<0,000325	<0,000325	0,0007934	<0,000325
14	Amoniak (NH ₃ -N)*	mg/L	0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
15	Nitrat Sebagai N (NO ₃)*	mg/L	10	0,5	1,4	1,8	2,0	1,4	0,8	4,9	3,1	2,1	2,2	1,8	1,3
16	Total Fosfat sebagai P	mg/L	0,2	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
17	Fecal Coliform*	MPN/100 ml	1000	262	121	121	85	5475	197	8164	1553	1467	156	1291	345
18	Total Coliform*	MPN/100 ml	5000	>24196	3076	3076	2603	>24196	11199,0	>24196	15591,0	>24196	12997	19863	4106
19	Kecepatan Arus	m ² /s	-												

Pemantauan kualitas air permukaan dilakukan pada 12 titik sample air yang terdiri 6 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana aliran air permukaan tersebut merupakan titik – titik yang telah dianggap mewakili gambaran kualitas air permukaan di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil pengujian sample yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan dan UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut maka didapatkan data – data sebagai berikut :

Dari hasil pemantauan pada 12 (dua belas) titik pantau air permukaan dan analisa berdasarkan baku mutu air sungai kelas II sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Sungai Kelas II diketahui bahwa jumlah parameter yang memenuhi baku mutu sebanyak 227 parameter dan jumlah parameter yang tidak melebihi baku mutu sebanyak 118 parameter sehingga didapatkan persentase parameter yang memenuhi baku mutu adalah sebesar dengan 65,8 % dari total parameter sebanyak 345 parameter

Dari hasil analisa pada setiap titik pantau diketahui bahwa pada periode I & II terdapat 12 jenis parameter yang tidak memenuhi baku mutu yang terdiri dari TSS pada 7 titik pantau, DO pada 2 titik pantau, COD pada 3 titik pantau, Fe (Besi) Terlarut pada 23 titik pantau, Fecal Coliform pada 8 titik pantau, Total Coliform pada 20 titik pantau, BOD pada 5 titik pantau, Total Fosfat pada 2 titik pantau, TDS pada 1 titik pantau, Amoniak pada 1 titik pantau, Cd pada 23 titik pantau dan temperatur pada 23 titik pantau.

Dari hasil perhitungan pada aplikasi IKLH nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahap I dan Tahap II untuk 12 (dua belas) titik pantau dengan kategori sungai kelas II Tahun 2022 didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) kategori sungai kelas II Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sebesar 55,38

Dari hasil evaluasi Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas II diketahui bahwa nilai IKA pada Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 3,04 dari 58,42 menjadi 55,38 dimana hal ini dipengaruhi perubahan status mutu air dari setiap pemantauan.

Indeks Kualitas Udara

Berdasarkan deskripsi, analisis data hasil perhitungan dan pemantauan kualitas udara ambien dan kebisingan pada 4 kawasan Titik pengambilan sampel di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kualitas udara ambien di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar masih memenuhi Baku Mutu yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Status Mutu udara ambien berdasarkan metode perhitungan analisa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kabupaten Tanah Laut semua memenuhi baku mutu.

Tingkat kebisingan di Kabupaten Tanah Laut pada 4 (Empat) titik pengukuran pada periode I sebagian besar masih memenuhi Baku Mutu dan hanya 1 (satu) titik pengambilan sampel yang melebihi baku mutu tingkat kebisingan yaitu di depan kantor Bupati Tanah Laut Kawasan Padat Transportasi.

Tingkat kebisingan di Kabupaten Tanah Laut pada 4 (Empat) titik pengukuran pada periode II sebagian besar masih memenuhi Baku Mutu dan hanya 2 (dua) titik pengambilan sampel yang melebihi baku mutu tingkat kebisingan yaitu di depan kantor Bupati Tanah Laut dan Kawasan Padat Transportasi Jl. A.Yani KM 123 Simp.4 Asam Asam

Tingginya nilai tingkat kebisingan dapat berdampak terhadap masyarakat yaitu pada gangguan psikologis tahap ringan yaitu terhadap gangguan tidur.

Tabel 3.5.58

Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Periode I Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Padat Transportasi Jl. A. Yani KM. 123 Simpang Empat Asam Asam	Pemukiman Depan Mesjid Al- Ikhlas Jl. Komplek Kijang Mas	Perkantoran Depan Kantor Bupati Tanah Laut	Perindustrian Depan PT. Indofood Tbk	Keterangan
1.	Suhu	°C	-	24	24,50	27,10	31,10	
2.	Kecepatan Angin	m/s	-	0,069	2,78	0,17	0,50	
3.	Arah Angin	dari	-	Barat-Timur	Barat Daya – Timur Laut	Timur-Barat	Timur-Barat	
4.	Kelembaban	% RH	-	84,00	80,00	80,00	71,00	
5.	TSP	µg/Nm ³	230 (24 Jam)	1,12	0,59	0,61	0,85	
6.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	200 (1 Jam)	122,22	81,90	80,22	111,71	
7.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	150 (1 Jam)	63,89	44,98	45,46	62,22	
8.	Oksidan sebagai Ozon (O ₃)	µg/Nm ³	150 (1 Jam)	25,77	9,01	6,28	19,15	
9.	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	10000 (1 Jam)	286,30	171,78	148,88	240,49	
10.	Kebisingan	Db(A)		67,10	53,00	64,70	65,20	

Tabel 3.5.59

Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Periode II Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Padat Transportasi Jl. A. Yani KM. 123 Simpang Empat Asam Asam	Pemukiman Depan Mesjid Al- Ikhlas Jl. Komplek Kijang Mas	Perkantoran Depan Kantor Bupati Tanah Laut	Perindustrian Depan PT. Indofood Tbk	Keterangan
1.	Suhu	°C	-	34	33,30	33,40	28,30	
2.	Kecepatan Angin	m/s	-	0,0002	0,0004	0,0005	0,0002	
3.	Arah Angin	dari	-	Selatan – Utara	Timur Laut – Barat Daya	Timur Laut – Barat Daya	Barat Daya – Barat	
4.	Kelembaban	% RH	-	58,00	66,00	67,00	80,00	
6.	TSP	µg/Nm ³	230 (24 Jam)	0,60	0,11	0,12	0,20	

8	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	200 (1 Jam)	48,00	16,67	21,88	39,43	
9	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	150 (1 Jam)	30,76	13,11	15,07	21,54	
10	Oksidan sebagai Ozon (O ₃)	µg/Nm ³	150 (1 Jam)	15,08	3,52	3,52	10,55	
11	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	10000 (1 Jam)	263,39	91,62	125,97	183,23	
12	Kebisingan	Db(A)		71,30	54,50	62,40	67,50	

Hasil Uji Tingkat Kebisingan Periode I Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Baku Mutu Sesuai Lokasi Pengambilan Sampel (db)	Hasil Analisa (dB)	Ket
1	Depan Kantor Bupati Tanah Laut	60	64,70	
2	Depan Mesjid Al Ikhlas Jl.Komplek Kijang Mas	55	53,00	
3	Depan PT. Indofood Raya Tbk	70	65,20	
4	Jl.A.Yani KM.123 Simpang 4 Asam Asam	70	67,10	

Hasil Uji Tingkat Kebisingan Periode II Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Baku Mutu Sesuai Lokasi Pengambilan Sampel (db)	Hasil Analisa (dB)	Ket
1	Depan Kantor Bupati Tanah Laut	60	62,40	
2	Depan Mesjid Al Ikhlas Jl.Komplek Kijang Mas	55	54,50	
3	Depan PT. Indofood Raya Tbk	70	67,50	
4	Jl.A.Yani KM.123 Simpang 4 Asam Asam	70	71,30	

Tutupan Lahan

Hutan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pengendalian daur air, erosi dan longsor lahan. Harapan ini perlu didukung bersama untuk diwujudkan, karena banyak kelebihan ekosistem hutan untuk mewujudkan harapan tersebut. Nilai peran hutan ditentukan oleh luas, jenis, watak pertumbuhan, keadaan pertumbuhan dan struktur hutannya. Ekosistem hutan juga dipengaruhi oleh keadaan iklim, geologi,

watak tanah dan geomorfologi, sehingga di dalam membangun hutan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan masalah kependudukannya. Angka kualitas lahan mengalami peningkatan yang semula 43,54 menjadi 44,08 yaitu sebesar 0,54 poin. Luas Tutupan Lahan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.60
 Hasil perhitungan indeks kualitas lahan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Tutupan	Luas (Ha)
Luas Tutupan Hutan	58743,94
Luas Belukar dalam Kawasan Hutan	36140,73
Luas Belukar pada Kawasan berfungsi Lindung	2844,12
Luas RTH	14247,39
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3519,21
IKL	44,08

Sumber: KLHK, 2022

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Penanaman pohon mahoni dan trambesi sebanyak 400 batang pohon.
2. Pemantauan kualitas air dan udara berkala.
3. Melaksanakan pengawasan kepada 102 pelaku usaha/kegiatan.

Tabel 3.5.61
 Daftar pelaksanaan pengawasan kepada pelaku usaha

No	Lokasi	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
1	Kec. Bati-Bati Ds Bentok	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	17 Januari 2022	Tidak Taat
	Kec. Bati-Bati Ds Bentok	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	22 Juni 2022	Tidak Taat
2	Kec. Bati-Bati Ds Nusa Indah	PT. Karimata Timur	18 Januari 2022	Tidak Taat
3	Kec. Tambang Ulang Ds. Pulau Sari	PT. Sariguna Primatirta	19 Januari 2022	Tidak Taat
4	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	PT. Sukses Wijaya Adiwijaya	20 Januari 2022	Tidak Taat
5	Kec. Bati-Bati Ds. Liang Anggang	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk	26 Januari 2022	Tidak Taat
6	Kec. Pelaihari Ds. Pemuda	PT. Perkebunan Nusantara XIII Pelaihari	3 Februari 2022	Tidak Taat
7	Kec. Batu Ampar Ds. Tajau Mulya	Koperasi Sawit Makmur	10 Februari 2022	Tidak Taat



8	Kec. Pelaihari Kel Sarang Halang	Rumah Potong Hewan	21 Februari 2022	Tidak Taat
9	Kec. Kintap	PT. Pola Kahuripan Inti Sawit	22 Februari 2022	Tidak Taat
10	Kec. Bajuin Ds. Tebing Siring	PT. Kintap Jaya Wattindo (Tebing Siring)	23 Februari 2022	Tidak Taat
11	Kec. Bati-Bati Ds. Liang Anggang	PT. Kintap Jaya Wattindo (PKR)	24 Februari 2022	Tidak Taat
12	Kec. Bati-Bati Ds. Liang Anggang	PT. Sinar Nusantara Industries	7 Maret 2022	Tidak Taat
	Kec. Bati-Bati Ds. Liang Anggang	PT. Sinar Nusantara Industries	23 Mei 2022	Tidak Taat
13	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	PT. Tirta Sukses Perkasa	8 Maret 2022	Tidak Taat
14	Kec. Bati-Bati Ds. Bentok	PT. Panen Embun Kemakmuran	9 Maret 2022	Tidak Taat
15	Kec. Jorong	PT. Semeru Surya Steel	10 Maret 2022	Taat
16	Kec. Kintap Ds. Sungai Cuka	PT. Megah Mulia Persada Jaya	14 Maret 2022	Tidak Taat
17	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	PT. Bintang Jasa Abadi	15 Maret 2022	Tidak Taat
18	Kec. Jorong	PT. Indoraya Everlatex	21 Maret 2022	Tidak Taat
19	Kec. Takisung Ds. Ranggung Luar	PT. Kintap Jaya Wattindo (Pelaihari)	22 Maret 2022	Tidak Taat
20	Kec. Kintap Ds. Bukit Mulia	PT. Smart, Tbk	23 Maret 2022	Tidak Taat
21	Kec. Kintap Ds. Bukit Mulia	PT. Smart, Tbk (Air Strip)	23 Maret 2022	Tidak Taat
22	Kec. Kintap Ds. Pandansari	PT. Kintap Jaya Wattindo (Kintap)	30 Maret 2022	Tidak Taat
23	Kec. Pelaihari	Laboratorium Lingkungan	20 April 2022	Tidak Taat
24	Kec. Pelaihari	Azka Medical Centre	20 April 2022	Tidak Taat
25	Kec. Batu Ampar Ds. Tajau Pecah	Puskesmas Tajau Pecah	27 April 2022	Tidak Taat
26	Kec. Pelaihari	Hotel Tuntung Pandang	28 April 2022	Tidak Taat
27	Kec. Pelaihari	Hotel Sinar	28 April 2022	Tidak Taat
28	Kec. Bajuin	PDAM IPA Bajuin	12 Mei 2022	Tidak Taat
29	Kec. Jorong	PDAM IPA Jorong	17 Mei 2022	Tidak Taat
30	Kec. Jorong Ds. Asam-Asam	PDAM IPA Asam-Asam	18 Mei 2022	Tidak Taat
31	Kec. Pelaihari	PDAM IPA PTPN XIII	24 Mei 2022	Tidak Taat
32	Kec. Kurau Ds. Kurau	Puskesmas Kurau	25 Mei 2022	Tidak Taat
33	Kec. Tambang Ulang Ds. Bingkulu	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (Bingkulu)	14 Juni 2022	Tidak Taat
34	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (Nusa Indah)	14 Juni 2022	Tidak Taat
35	Kec. Bati-Bati Ds. Sambangan	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (Sambangan)	14 Juni 2022	Tidak Taat
36	Kec. Tambang Ulang	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit 30	15 Juni 2022	Tidak Taat
37	Kec. Tambang Ulang	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit 38	15 Juni 2022	Tidak Taat
38	Kec. Bati-Bati- Ds. Liang Anggang	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit 22	15 Juni 2022	Tidak Taat
39	Kec. Pelaihari	RSUD H. Boejasin	17 Juni 2022	Tidak Taat
40	Kec. Pelaihari	Politeknik Negeri Tanah Laut	23 Juni 2022	Tidak Taat
41	Kec. Tambang Ulang Ds. Pulau Sari	PT. Patriot Intan Abadi (Pulau Sari)	27 Juni 2022	Tidak Taat



42	Kec. Bati-Bati Ds. Bentok Kampung	PT. Patriot Intan Abadi (Barlian Farm)	27 Juni 2022	Tidak Taat
43	Kec. Bati-Bati Ds. Liang Anggang	PT. Patriot Intan Abadi (Sinar Farm)	27 Juni 2022	Tidak Taat
44	Kec. Bati-Bati Ds. Bentok Kampung	PT. Hasrat Jaya Utama	29 Juni 2022	Tidak Taat
45	Kec. Bati-Bati Ds. Bentok Kampung	PT. Salamandra Petramuya	29 Juni 2022	Tidak Taat
46	Kec. Bati-Bati Ds. Bentok Kampung	PT. Tanjung Raya Bersama	29 Juni 2022	Tidak Taat
47	Kec. Tambang Ulang Ds. Martadah	Waluyo	29 Juni 2022	Tidak Taat
48	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	PT. Lidy's Artha Borneo	30 Juni 2022	Tidak Taat
49	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	PT. Vanaga Utama	30 Juni 2022	Tidak Taat
50	Kec. Bati-Bati Ds. Bentok Kampung	PT. Maju Perkasa Indonesia	30 Juni 2022	Tidak Taat
51	Kec. Pelaihari	Rumah Sakit Ammariz	18 Juli 2022	Tidak Taat
52	Kec. Pelaihari	Rumah Sakit Bersalin Ibunda	18 Juli 2022	Tidak Taat
53	Kec. Pelaihari	PT. Mitra Sehat Borneo	18 Juli 2022	Taat
54	Kec. Jorong Ds. Jorong	PT. Citra Putra Kebun Asri (PKS)	20 Juli 2022	Tidak Taat
55	Kec. Jorong Ds. Swarangan	PT. Citra Putra Kebun Asri (Kebun)	20 Juli 2022	Tidak Taat
56	Kec. Pelaihari Ds. Pemuda	PT. Citra Putra Kebun Asri (Kebun)	20 Juli 2022	Tidak Taat
57	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	PT. Tri Industri Alami	26 Juli 2022	Tidak Taat
58	Kec. Bati-Bati Ds. Liang Anggang	PT. Penguin Indonesia	26 Juli 2022	Tidak Taat
59	Kec. Bati-Bati Ds. Bentok	PT. Tuju Kuda Hitam Sakti	4 Agustus 2022	Tidak Taat
60	Kec. Kintap Ds. Kintapura	Endik Medical Clinic	10 Agustus 2022	Tidak Taat
61	Kec. Kintap Ds. Muara Kintap	PT. Jati Baru	10 Agustus 2022	Tidak Taat
62	Kec. Kintap Ds. Kintap	RSUD KH. Mansyur	16 Agustus 2022	Tidak Taat
63	Kec. Bati-Bati Ds. Ujung	PT. Ciomas Adisatwa Farm 1	06 September 2022	Tidak Taat
64	Kec. Bati-Bati Ds. Ujung	PT. Ciomas Adisatwa Farm 2	06 September 2022	Tidak Taat
65	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	CV. Bintang Banua Abadi	07 September 2022	Tidak Taat
66	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	PT. Hepi Borneo	07 September 2022	Tidak Taat
67	Kec. Jorong Ds. Jorong	PT. Sarana Subur Agrindotama	08 September 2022	Tidak Taat
68	Kec. Jorong Ds. Simpang Empat Sungai Baru	PT. Mandiri Perkasa Plant	08 September 2022	Tidak Taat
69	Kec. Kurau Ds. Maluka Baulin	UD. Surya Baru	15 September 2022	Tidak Taat
70	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	PT. A'Dhom Farm Indonesia	4 Oktober 2022	Tidak Taat
71	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	UD. Kandang Biru	4 Oktober 2022	Tidak Taat
72	Kec. Bati-Bati Ds. Liang Anggang	Lihin Rustafa	6 Oktober 2022	Tidak Taat
73	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	CV. Saprotan Utama	9 Oktober 2022	Tidak Taat
74	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	CV. Bumi Nusantara Food	11 Oktober 2022	Tidak Taat
75	Kec. Bati-Bati Ds. Ujung Baru	PT. Nelayan Bakti Nusantara	11 Oktober 2022	Tidak Taat
76	Kec. Bati-Bati Ds. Liang Anggang	PT. Sapta Jasa Kontruksi	13 Oktober 2022	Tidak Taat
77	Kec. Bati-Bati Ds. Liang Anggang	PT. Berkat Rahmat Sejati	13 Oktober 2022	Tidak Taat
78	Kec. Tambang Ulang Ds. Pulau Sari	Sie, Iwan Gunawan	18 Oktober 2022	Tidak Taat
79	Kec. Tambang Ulang Ds. Bingkulu	PT. Neo Citra Mandiri	18 Oktober 2022	Tidak Taat
80	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	PT. Kelana Multi Kontruksi	20 Oktober 2022	Tidak Taat
81	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	PT. Pugung Raya Blok A1	20 Oktober 2022	Tidak Taat
82	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	PT. Pugung Raya Blok A2	20 Oktober 2022	Tidak Taat

83	Kec. Bati-Bati Ds Banyu Irang	PT. Pugung Raya Blok A3	20 Oktober 2022	Tidak Taat
84	Kec. Kintap Ds. Pandansari	PT. Duta Tujuh Bersaudara Sejati	21 Oktober 2022	Tidak Taat
85	Kec. Pelaihari	CV. Trio Motor Pelaihari	02 November 2022	Tidak Taat
86	Kec. Bati-Bati Ds Liang Anggang	UD. Sumber Mulya Rubber	03 November 2022	Tidak Taat
87	Kec. Bati-Bati Ds Ujung	PT. Mitra Sinar Jaya	03 November 2022	Tidak Taat
88	Kec. Bati-Bati Ds Ujung baru	PT. Mitra Sinar Jaya	03 November 2022	Tidak Taat
89	Kec. Jorong Ds. Asam-Asam	PT. Sentosa Suksesutama	08 November 2022	Tidak Taat
90	Kec. Jorong Ds. Jorong	PT. Sentosa Suksesutama	08 November 2022	Tidak Taat
91	Kec. Jorong Ds. Swarangan	PT. Lunik Anugerah	14 November 2022	Tidak Taat
92	Kec. Batu Ampar Ds. Tajau Pecah	PT. Candi Artha	15 November 2022	Taat
93	Kec. Kintap Ds Salaman	PT. Citra Putra Kebun Asri	17 November 2022	Tidak Taat
94	Kec. Kintap Ds Riam Adungan I	PT. Citra Putra Kebun Asri	17 November 2022	Tidak Taat
95	Kec. Kintap Ds Riam Adungan II	PT. Citra Putra Kebun Asri	17 November 2022	Tidak Taat
96	Kec. Kintap Ds Pandan Sari	PT. Indoraya Everlatex	24 November 2022	Tidak Taat
97	Kec. Kintap Ds Kintap Kecil	PT. Indoraya Everlatex	24 November 2022	Tidak Taat
98	Kec. Jorong Ds Swarangan	PT. Indoraya Everlatex	24 November 2022	Tidak Taat
99	Kec. Jorong Ds. Jorong dan Batalang	PT. Indoraya Everlatex	24 November 2022	Tidak Taat
100	Kec. Batu Ampar Ds. Damit Hulu	PT. Indoraya Everlatex	24 November 2022	Tidak Taat
101	Kec. Batu Ampar Ds. Damit Hulu	CV. Nurul Hijrah	21 Desember 2022	Tidak Taat
102	Kec. Jorong Ds. Jilatan Alur	CV. Rizky Dwi Utama	21 Desember 2022	Tidak Taat

4. Pembentukan bank sampah

Tabel 3.5.62

Pembentukan bank sampah tahun 2022

No	Nama Bank Sampah	Alamat	SK
1	Budi Bakti	Desa Kampung Baru, pelaihari	SK Kades no 26 Tahun 2020
2	Sumber Asri Jaya	Desa Sumber Mulia, Pelaihari	SK Kades 34-35 tahun 2022
3	Angsau Lestari	Kantor Lurah Angsau, Pelaihari	SK Lurah Angsau no. 3a Tahun 2022
4	Bakadut	Kantor Camat Pelaihari, Angsau	SK Camat no 59 Tahun 2022
5	Sambo	Kantor Dinas pendidikan dan Kebudayaan	SK Kadisdik No 323.a /Disdik/2022

5. Legalisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Evaluasi dokumen persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk kegiatan pembuangan/ pemanfaatan air limbah, dan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi bagi usaha/ kegiatan.

Tabel 3.5.63
Evaluasi dokumen persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah

No	Nama Perusahaan	Kegiatan	Jenis Pertek	Desa	Kecamatan	Nomor Persetujuan Teknis	Tanggal
1	Koperasi Sawit Makmur	Pabrik Kelapa Sawit	BMAL-LA	Tajau Mulya	Batu Ampar	660/01-BMAL/TLDPRKP&LH/I/2022	10 Januari 2022
2	Koperasi Sawit Makmur	Pabrik Kelapa Sawit	BMAL-domestik	Tajau Mulya	Batu Ampar	660/02-BMAL/TL/DPRKP&LH/III/2022	22 Maret 2022
3	PT Japfa Comfeed Indonesia	Peternakan Ayam	BME-Emisi	Sungai Pinang	Tambang Ulang	660/03-BME/TL/DPRKP&LH/V/2022	13 Mei 2022
4	PT Japfa Comfeed Indonesia	Peternakan Ayam	BMAL-Limbah Cair produksi	Sungai Pinang	Tambang Ulang	660/04-BMAL/TL/DPRKP&LH/V/2022	13 Mei 2022
5	PT Candi Artha	Perkebunan Kelapa sawit	BMAL-LA	Tajau Pecah	Batu Ampar	660/05-BMAL/TL/DPRKP&LH/V/2022	20 Mei 2022
6	PT Candi Artha	Perkebunan Kelapa sawit	BME-Emisi	Tajau Pecah	Batu Ampar	660/06_BME/TL/DPRKP&LH/V/2022	20 Mei 2022
7	PT Sumber Alfaria Trijaya	Gudang	BMAL-domestik	Nusa Indah	Bati-bati	660/07-BMAL/TL/DPRKP&LH/VI/2022	30 Juni 2022
8	PT Pola Kahuripan Inti Sawit	PKS dan perkebunan kelapa sawit	BMAL-LA	Pasir Putih	Kintap	660/08-BMAL/TL/DPRKP&LH/VII/2022	4 Juli 2022
9	PT Sarana Subur Agrindotama	PKS dan perkebunan kelapa sawit	BME-Emisi	Batalang, Jorong	Jorong	660/09-BME/TL/DPRKP&LH/IX/2022	1 September 2022
10	PT Pola Kahuripan Inti Sawit	PKS dan perkebunan kelapa sawit	BME-Emisi	Pasir Putih	Kintap	660/10-BME/TL/DPRKP&LH/IX/2022	13 September 2022
11	PT Pola Kahuripan Inti Sawit	PKS dan perkebunan kelapa sawit	BMAL-domestik	Pasir Putih	Kintap	660/11-BMAL/TL/DPRKP&LH/IX/2022	13 September 2022
12	PT Asih Medika Inter Nusa	Rumah sakit	BMAL-domestik fasyankes	Jilatan	Batu Ampar	660/12-BMAL/TL/DPRKP&LH/X/2022	17 Oktober 2022
13	PT Sarana Subur Agrindotama	PKS dan perkebunan kelapa sawit	BMAL-LA	Jorong	Jorong	660/13-BMAL/TL/DPRKP&LH/XI/2022	1 November 2022
14	RS KH Mansyur	Rumah sakit	BMAL-domestik/kegiatan	Kintap	Kintap	660/14-BMAL/TL/DPRKP&LH/XII/2022	5 Desember 2022
15	DPRKP&LH	Instansi Pemerintah	BMAL-domestik	Angsau	Pelaihari	660/15-BMAL/TL/DPRKP&LH/XII/2022	30 Desember 2022

b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten

Indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW tahun 2022 adalah sebesar 97%, mencapai target yang ditetapkan yaitu 92%, dengan tingkat capaian



105,43%. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 10% dari tahun 2021 yaitu sebesar 87%.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya untuk dapat meningkatkan persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang wilayah dengan RTRW Kabupaten. Saat ini masih terdapat 3% pemanfaatan tata ruang yang dimohonkan oleh pelaku usaha/masyarakat yang tidak sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR dikarenakan pembangunan dilaksanakan sebelum Perda RTRW dan Perbub RDTR ditetapkan yaitu sebelum tahun 2016.

Berdasarkan indikasi pola ruang diatas, yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting terindikasi seluas 2,91% dari luas permohonan pemanfaatan ruang yang di mohonkan atau seluas $\pm 927,64$ Ha, dan terindikasi pemanfaatan ruang yang telah berkesesuaian dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR mencapai $\pm 97,09$ % atau seluas $\pm 30.938,52$ Ha.



No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kegiatan	Kawasan Peruntukan	Luas	Tanggal Pertimbangan Teknis	Nomor	Keterangan	
								Sesuai/ber syarat (Ha)	Tidak Sesuai (Ha)
1	Fariad Yogi Diansyah	Jalan Teluk Paku Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati	peternakan ayam broiler Farid Yogi Diansyah Pada Lokasi 3	Kawasan Pertanian Lahan Kering.	± 2,98 Ha	10 Januari 2022	591.1/013-TR/DPUPRP	2.98	
2	PT. Mitra Sinar Jaya	Desa Maluika Baulin Kecamatan Kurau	Peternakan ayam ras pedaging (Broiler) PT.Mitra Sinar Jaya	Kawasan Perkebunan	± 4,5 Ha	17 Januari 2022	591.1/037-TR/DPUPRP	4.5	
3	CV.Punca Sari Jaya	Desa Batakan Kecamatan Panyipatan	Penginapan	Kawasan Peruntukan Pariwisata	± 3.127 M2	17 Januari 2022	591.1/036-TR/DPUPRP	0,3127	
4	PT. Cahaya Embun Persada Utama	di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari	Pembangunan Perumahan	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 3,9 Ha	17 Januari 2022	591.1/034-TR/DPUPRP	3,9	
5	PT. Global Widya Energi	di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari	Pembangunan Perumahan	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 8.506 m ²	17 Januari 2022	591.1/035-TR/DPUPRP	0,8506	
6	PT. Emida	Desa Jorong Kecamatan Jorong	Perkebunan Kelapa Sawit Ad dendum UKL dan UPL	Hutan Produksi seluas ± 44,60 Ha, Kawasan Peruntukan Permukiman seluas ± 125,73 Ha dan Perkebunan seluas ± 506,33 Ha	± 676.66 Ha	03 Februari 2022	050.13/300-TR/DPUPRP	550.93	125.73
7	CV. Jaya Perkasa (Penegasan)	Desa Damit Hulu Kecamatan batu Ampar	WIUP Batubara	Kawasan Perkebunan	± 335,28 Ha	25 Januari 2022	600/064-TR/DPUPRP	335.28	
8	PT. Sarana Subur Agrindotama	Desa Jorong Kecamatan Jorong	Wilayah Ijin Usaha Industri (WIUI) Kelapa Sawit	Kawasan Peruntukan Industri	± 15 Ha	08 Februari 2022	050.13/339-TR/DPUPRP	15.00	
9	PT. Pelaihari Cipta Laksana	Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari	Pembangunan Pelaihari City Mall	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 2,66 Ha	/02/2022	050.13/ - TR/DPUPRP	2.66	
10	PT. Ziva Damai Persada	Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari	Rencana Pembangunan Perumahan	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 5.550 m ²	16 Februari 2022	591.1/120-TR/DPUPRP	0.56	
11	PT. Ziva Damai Persada	Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari	Rencana Pembangunan Perumahan	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 7.350 m ²	16 Februari 2022	591.1/120-TR/DPUPRP	0.74	
12	PT. Tower Bersama	Desa Pantai Linuh RT.04 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Menara Telekomunikasi	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Tinggi: 62 M, Jumlah Kaki: 4, Rencana Tower Bangunan 120 M, Rencana	16 Februari 2022	591.1/123-TR/DPUPRP	0.00	



					Tower Jalan 190 M Jalan Kabupaten				
13	DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut	Desa Bajuin Kecamatan Bajuin, Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Desa Pelaihari Kecamatan Pelaihari dan Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari	Pembangunan Pelindung Alat Onlimo, Pembangunan Median Jalan Ruas A.Yani, Pembangunan RTH Hasan Basri Kelurahan Angsau dan Pembangunan Pedestrian Pada Ruas Jalan KH.Mansyur	sempadan sungai seluas ± 5 M2, sistem jaringan transportasi darat dengan panjang ± 502 M, kawasan ruang terbuka hijau seluas ± 1,9 Ha dan sistem jaringan transportasi darat seluas ± 1.488 M²	± 5 M2, ± 502 M, ± 1,9 Ha dan 1.488 M²	05 April 2022	591.1/266- TR/DPUPRP	2.05	
14	DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut	Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau dan Desa Ujung Kecamatan Bati - Bati	Pembangunan TPST Kurau dan TPST Bati – Bati	Kawasan Perkebunan seluas ±25.771 m2 dan Kawasan Peruntukan Permukiman seluas ± 1,34 Ha dan Kawasan Peruntukan Industri seluas ± 0,08 Ha	±25.771 m², ±1,34 Ha dan ± 0,08 Ha	16 Februari 2022	591.1/118- TR/DPUPRP	2569.15	
15	PT. Sukses Wijaya Adimakmur	Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati	Penegasan SKTR	Kawasan Peruntukan Industri	± 9,42 Ha	13 Februari 2022	600/166-TR/DPUPRP	9.42	
16	PT. Indoraya Everlatex	Desa Kintapura, Desa Kintap Kecil, Desa Pasir Putih, Desa Pandansari di Kecamatan Kintap, dan di Desa Swarangan, Desa Jorong dan Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.	Perkebunan Kelapa Sawit	Kawasan Hutan Produksi=393,87, Hutan Produksi Tetap=1.679,87, Kawasan Peruntukan Industri=361,31, Kawasan Perkebunan=2.620,85, Pertanian Lahan Basah=3,05, Kawasan Peruntukan Permukiman=78,51 dan Sempadan Pantai=4,48	± 5.142,94 Ha	18 Maret 2022	050.13/712/DPUPRP	5058.87	83.07
17	PT. Pola Kahuripan Inti Sawit	Desa Kintapura, Desa Pandan Sari, dan Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kawasan Hutan Produksi=60,67, Hutan Produksi Konversi=859,29, Kawasan Perkebunan=4.203,75 dan Sempadan Sungai 172,22	± 2.295,93 Ha	18 Maret 2022	050.13/711/DPUPRP	5123.71	172.22
18	PT. Sumber Rezeki Migas	Desa Ranggung Kecamatan Takisung	Kegiatan Agen Gas LPG	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 2.340,375 M2	11 Maret 2022	591.1/201- TR/DPUPRP	0.23	



19	CV. Fajar Timur Harapan	Desa Swarangan Kecamatan Jorong	Pertambangan Pasir Kuarsa/Silika	Kawasan Perkebunan=44,07 dan Kawasan Peruntukan Industri=5,61	± 49,68 Ha	24 Maret 2022	050.13/779-TR/DPUPRP		49.68
20	CV. Jorong Silika Utama	Desa Swarangan Kecamatan Jorong	Pertambangan Pasir Kuarsa/Silika	Kawasan Perkebunan=22,29, Kawasan Peruntukan Industri=26,89 dan Sempadan Sungai=0,30	± 49,48 Ha	24 Maret 2022	050.13/781-TR/DPUPRP		49.48
21	CV. Borneo Mining Abadi	Desa Swarangan Kecamatan Jorong	Pertambangan Pasir Kuarsa/Silika	Kawasan Peruntukan Industri=47,44, Sempadan Pantai=1,65 dan Sempadan Sungai=0,79	± 49,88 Ha	24 Maret 2022	050.13/778-TR/DPUPRP		
22	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut	Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	Pembuatan Lapangan Sepakbola	Kawasan Peruntukan Permukiman=890 M2, Pesisir dan pulau-pulau kecil=10.573 M2	± 11.463 M2	24 Maret 2022	050.13/780/DPUPRP	1.15	
23	Dinas PUPRP Provinsi Kalimantan Selatan	Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan DED Embung Asam-Asam	Kawasan Peruntukan Permukiman=7,908 dan Sempadan Sungai=3,359	± 11,267 Ha	29 Maret 2022	591.1/252-TR/DPUPRP	11.27	
24	Dinas PUPRP Provinsi Kalimantan Selatan	Desa Riam Adungan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan DED Embung Riam Adungan	Kawasan Perkebunan=6,683 dan Sempadan Sungai=4,071	± 10,764 Ha	29 Maret 2022	591.1/253-TR/DPUPRP	10.76	
25	PT. Wahyu Putra Ramadhan	Desa swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.	Kawasan Industri Jorong	Kawasan Peruntukan Industri	± 2.181 Ha	04 April 2022	050.13/899/DPUPRP	2181.00	
26	PT. Sarana Subur Agrindotama	Desa Jorong di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Perkebunan Kelapa Sawit	Kawasan Hutan Produksi=298,56, Kawasan Peruntukan Industri=407,77, Kawasan Perkebunan=894,08 dan Kawasan Peruntukan Permukiman=149,59	± 1.750 Ha	18 April 2022	050.13/1009/DPUPRP	1750.00	
27	Akh. Saukani	Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati - Bati.	Peternakan Ayam	Kawasan Peruntukan Industri	± 5.792 M ²	05 April 2022	591.1/279-TR/DPUPRP		0.58
28	CV. Berkah Karunia Ilahi	Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar	Pertashop	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 608 M ²	05 April 2022	591.1/265-TR/DPUPRP	0.06	
29	PT. Teknomadani Limbah Kalimantan	Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-bati	Pembangunan Kantor dan TPS Limbah B3	Kawasan Peruntukan Permukiman.	± 920 M ²	20 April 2022	591.1/323-TR/DPUPRP	0.09	
30	PT. Sinar Nusantara Industries	Desa Liang Anggang di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Lokasi Industri	Kawasan Peruntukan Industri=26,02 dan Kawasan Peruntukan Permukiman=1,72	± 27,74 Ha	25 April 2022	050.13/1080/DPUPRP	27.74	



31	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Desa Nusa Indah di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Perluasan Pabrik Pakan Ternak	Kawasan Peruntukan industri	± 5,2 Ha	27 April 2022	050.13/1095/DPUPRP	5.20	
32	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.	Pembibitan Ayam Ras	Kawasan Perkebunan	± 7,9 Ha	27 April 2022	050.13/1096/DPUPRP	7.90	
33	PT. Multazam Berkah Mandiri	Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.	Pembangunan Perumahan	Kawasan Peruntukan Permukiman=0,71 dan Kawasan Pertanian Lahan Kering=0,71	± 1,42 Ha	27 April 2022	591.1/341-TR/DPUPRP	1.42	
34	PT. Fastha Jaya Properti	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	± 2,5 Ha	27 April 2022	591.1/342-TR/DPUPRP	2.50	
35	Darul Muttaqin	Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut	Rehab Musholla dan Pembangunan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) Rehab Musholla dan Pembangunan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)	Sub Zona SPU Skala RW	± 296 M ²	09 Mei 2022	591.1/351-TR/DPUPRP	0.03	
36	PT. Berkah Anggara Putri	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	± 0,87 Ha	12 Mei 2022	591.1/358-TR/DPUPRP	0.87	
37	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Mansyur	Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 4 Ha	12 Mei 2022	591.1/357-TR/DPUPRP	4.00	
38	M. Nuruddin Muchtar	Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Kandang Ayam	Kawasan Peeruntukan Industri	± 2,859 Ha	15 Juni 2022	591.1/436-TR/DPUPRP	2.86	
39	Yayasan Udiansyah Muhammad Kasi	Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.	Pendirian Kampus Akademi Komunitas Peternakan Jorong	Kawasan Perkebunan	± 1 Ha	15 Juni 2022	591.1/437-TR/DPUPRP	1.00	
40	PT. Perkebunan Nusantara XIII Pelaihari	Desa Panggung, Desa Ambungan, Desa Pemuda, Desa Ujung Batu, Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari dan di Desa Tambang Ulang, Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang serta di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut	Perubahan Luasan IUP-B/IUP	Kawasan Perkebunan=3.424,74, Kawasan Peruntukan Permukiman=115,05, Kawasan Hutan Lindung=126,37, Sempadan Sungai=38,28 dan Ruas jalan=88,89	± 3.793,33 Ha	14 Juli 2022	050.13/1708/DPUPRP	3424.74	279.70



41	CV. Artha Fadillah	Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan dan Operasional Pengumpulan Limbah B3	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 3.379 M ²	17 Juni 2022	591.1/442-TR/DPUPRP	0.34	
42	PT. Alam Meratus Persada	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	± 7.288 M ²	17 Juni 2022	591.1/443-TR/DPUPRP	0.73	
43	PT. Teknomadani Limbah Kalimantan	Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut.	Pembangunan Kantor, TPS Limbah B3 dan Non B3, IPAL, Gudang Farmasi dan Alat Kesehatan, Laboratorium	Kawasan Peruntukan Industri	± 5.600 M ²	17 Juni 2022	591.1/444-TR/DPUPRP		
44	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut	Desa Tanjung Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut.	Revisi Pertimbangan Teknis Tata Ruang Untuk Pembuatan Dokumen Lingkungan Embung Riam Pinang Laboratorium	Kawasan Perkebunan=3,02 dan Kawasan Taman Hutan Raya=4,98	± 8 Ha	27 Juni 2022	591.1/476-TR/DPUPRP	8.00	
45	PT. Indofood CBP Sukses Makmur. Tbk.	Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pembuatan Persetujuan Andalalin PT. Indofood	Kawasan Peruntukan Industri	± 7,041 Ha	13 Juli 2022	591.1/517-TR/DPUPRP		
46	PT. Tower Bersama	Jl. Krasik Rt.01 Rw.02 Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Menara Telekomunikasi	Kawasan Peruntukan Permukiman.		13 Juli 2022	591.1/515-TR/DPUPRP		
47	PT. Naga Sukses Tractors	Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap di Kabupaten Tanah Laut.	Kegiatan Perkantoran, Workshop dan Mess Karyawan	Kawasan Peruntukan Industri.	± 1,24 Ha	13 Juli 2022	591.1/516-TR/DPUPRP	1.24	
48	Petrus Gunawan Widjaja	Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Kandang Ayam	Kawasan Peruntukan Permukiman=0,06 dan Kawasan Perkebunan=1,94	± 2 Ha	21 Juli 2022	591.1/545-TR/DPUPRP	1.94	0.06
49	PT. PLN (Persero) UIKL Kalimantan UPK Asam-Asam	Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pemakaian Lahan Acces Road PLTU Asam-Asam	Kawasan Peruntukan permukiman=0,46 dan Kawasan Perkebunan=4,58	± 5,04 Ha	21 Juli 2022	050.13/546/DPUPRP	5.04	
50	Antonius PurbaAntonius Purba	Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari dan Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Loading Ramp/Penimbunan Sementara TBS Kelapa Sawit	Kawasan Perkebunan=357 M ² dan Kawasan Peruntukan Permukiman=600 M ²	± 957 M ²	29 Juli 2022	591.1/555-TR/DPUPRP	0.09	
51	PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk.	Jl. Dusun Suka Maju Rt.10 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Menara Telekomunikasi	Kawasan Peruntukan Permukiman		29 Juli 2022	591.1/557-TR/DPUPRP		



52	Nur Syamsu Kamariah	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Sarang Burung Walet	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	± 50 M ²	29 Juli 2022	591.1/556-TR/DPUPRP		0.005
53	PT. Sahabat Borneo Maju Bersama	Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.	Pembangunan Perumahan	Kawasan Peruntukan Industri	± 7,2 Ha	29 Juli 2022	591.1/554-TR/DPUPRP		
54	DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut	Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Rumah khusus Untuk Masyarakat Korban Bencana Abrasi	Kawasan Peruntukan Pariwisata=1,099 dan Kawasan Pertanian Lahan Basah=0,942	± 2,04 Ha	02 Agustus 2022	591.1/580-TR/DPUPRP	2.04	
55	PT. Alam Meratus Persada	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	± 3.000 M ²	09 Agustus 2022	591.1/590-TR/DPUPRP	0.03	
56	PT. Buana Manira Prakarsa	Desa Sungai Riam di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Pencucian dan Pemurnian	Kawasan Peruntukan Permukiman=4,2 dan Kawasan Perkebunan=0,3	± 4,5 Ha	18 Agustus 2022	591.1/608-TR/DPUPRP		
57	PT. Sumber Cahaya Citra Utama	Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perkebunan	± 8.026 M ²	18 Agustus 2022	591.1/606-TR/DPUPRP	0.08	
58	PT. Makmur Nur Kausar	Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.	Pembangunan dan Operasional Pertashop	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 4.534 M ²	18 Agustus 2022	591.1/607-TR/DPUPRP	0.45	
59	CV. Sinar Pyramid	Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.	Pembangunan Gudang	Kawasan Pertanian Lahan Kering	± 1,38 Ha	30 Agustus 2022	591.1/636-TR/DPUPRP	1.38	
60	PT. Aura Megah Property	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.	Pembangunan Perumahan Subsidi MBR	Kawasan Pertanian Lahan Kering	± 18.210 M ²	30 Agustus 2022	591.1/637-TR/DPUPRP	1.82	
61	PT. Puri Aman Bersaudara	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	± 14.236 M ²	30 Agustus 2022	591.1/639-TR/DPUPRP	1.42	
62	PT. Samara Arafah Firdaus	Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bat Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Kawasan Peruntukan Permukiman=0,43 dan Kawasan Pertanian Lahan Kering=0,54	± 0,97 Ha	02 September 2022	591.1/664-TR/DPUPRP	0.97	
63	PT. Patriot Intan Abadi	Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.	Penegasan SKTR Peternakan Ayam	Kawasan Peruntukan Permukiman=0,15 dan Pertanian lahan Kering=14,45	± 14,6 Ha	16 September 2022	600/685-TR/DPUPRP	14.45	0.15
64	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah	Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT)	Zona Perkantoran	± 336 M ²	23 September 2022	600/700-TR/DPUPRP	0.003	



	Laut								
65	PT. Sentosa Suksesutama	Desa Tanjung Kecamatan Bajuin dan Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut	Perkebunan Kelapa Sawit	Kawasan Hutan Produksi=41,08, Kawasan Hutan Lindung=170,15 dan KSA/KPA=46,50	± 257,73 Ha	30 September 2022	050.13/2379/DPUPRP	257.73	
66	Koperasi Produsen Daya Mitra Sejahtera	Desa Asam-Asam, Desa Swarangan, Desa Asam jaya di Kecamatan Jorong, Desa Bingkulu, Desa Tambang Ulang di Kecamatan Tambang Ulang dan Desa Tanjung, Desa Bajuin di Kecamatan Bajuin serta Desa Kuala Tambangan di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut	Perkebunan Kelapa Sawit	Kawasan Peruntukan Industri=15,21, Kawasan Perkebunan=170,81, Kawasan Pertanian Lahan Basah=39,21, Sempadan sungai=15,44 dan Konservasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil=21,83	± 262,50 Ha	30 September 2022	050.13/2378/DPUPRP	210.02	52.48
67	PT. Shore	Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Kantor dan Mess Karyawan	Kawasan Peruntukan Permukiman=6.754 dan Kawasan Pertanian Lahan Kering=4.148	± 10.902 M ²	10 Oktober 2022	591.1/764-TR/DPUPRP	1.09	
68	PT. Alam Meratus Persada	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	± 13.775 M ²	10 Oktober 2022	591.1/765-TR/DPUPRP		
69	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPRP kabupaten Tanah Laut	Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Kantor Lurah Angsau	Zona Perkantoran	± 700 M ²	10 Oktober 2022	591.1/762-TR/DPUPRP	0.007	
70	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPRP kabupaten Tanah Laut	Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Puskesmas Panggung	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	± 2.470 M ²	10 Oktober 2022	591.1/763-TR/DPUPRP	0.25	
71	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPRP kabupaten Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Kantor Lurah Pelaihari	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	± 675 M ²	11 Oktober 2022	591.1/781-TR/DPUPRP	0.007	
72	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPRP	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Kantor Lurah Karang Taruna	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	± 700 M ²	11 Oktober 2022	591.1/782-TR/DPUPRP	0.007	



	kabupaten Tanah Laut								
73	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPRP kabupaten Tanah Laut	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	pengoptimalan Jaringan Perpipaan IKK Bajuin (DDUB NUWSP)	Kawasan Peruntukan Permukiman=2.139 M dan Kawasan Pertanian Lahan Kering=308	± 2.447 M	12 Oktober 2022	591.1/787-TR/DPUPRP	0.02	
74	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPRP kabupaten Tanah Laut	Desa Raden, Desa Maluka Baulin, Desa Tambak Karya dan Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan kurau/Kecamatan Bumi Makmur SPAM Regional Banjarbakula	Kawasan Peruntukan Permukiman=6.955 M dan Kawasan Pertanian Lahan Kering=185	± 7.140 M	12 Oktober 2022	591.1/786-TR/DPUPRP	0.07	
75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan kabupaten tanah Laut	Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Pabrik Karet	KawasanPertanian Lahan Kering	± 5.000 M ²	21 Oktober 2022	591.1/815-TR/DPUPRP	0.05	
76	PT. Gota Mulya Banjar	Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati dan di Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Rencana Kegiatan Pembangunan Komplek Perindustrian dan Perdagangan	Kawasan Peruntukan Industri=5.015, Kawasan Peruntukan Permukiman=14.534, Kawasan Pertanian Lahan Kering=19.856 dan Kawasan Peruntukan Permukiman=18.834	± 58.239 M ²	21 Oktober 2022	591.1/816-TR/DPUPRP	5.82	
77	Bidang SDA DPUPRP Kabupaten Tanah Laut	Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Rehabilitasi Waduk Takisung Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung	Kawasan Peruntukan Permukiman=0,88, Kawasan Pertanian Lahan Kering=15,16 dan Kawasan Perkebunan=4,98	± 20,98 Ha	04 November 2022	591.1/862-TR/DPUPRP	20.98	
78	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut	Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pengelolaan Kolam renang Tirta Kencana	Zona Pariwisata	± 9.477 M ²	31 Oktober 2022	591.1/843-TR/DPUPRP	0.95	
79	Bidang SDA DPUPRP Kabupaten Tanah Laut	Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten tanah laut	Pembuatan Desain Bangunan Pelindung Pantai Desa Tabanio	Kawasan Sempadan Pantai=174 M, dan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil=276 M	± 450 M	04 November 2022	591.1/862-TR/DPUPRP	0.005	
80	Bidang SDA DPUPRP Kabupaten Tanah Laut	Desa muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut	Pembuatan Dokumen Lingkungan Pengaman Pantai Desa Muara Kintap	Kawasan Peruntukan Pariwisata	± 200 M	04 November 2022	591.1/861-TR/DPUPRP	0.002	



81	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut	Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten tanah laut	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Bumu Makmur	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 434 M ²	04 November 2022	591.1/863-TR/DPUPRP	0.004	
82	PT. Kintap jaya Wattindo	Desa Liang Anggang Kecamatan Bat--Bati Kabupaten Tanah Laut	Pabrik Karet Remeh	Kawasan Peruntukan Permukiman=13,51, Kawasan Peruntukan industri=3,36, Kawasan Pertanian Lahan Kering=8,74, Kawasan pertanian lahan basah=3,76 dan Sempadan Sungai=0,60	± 29,97 Ha	16 November 2022	050.13/2877/DPUPRP	29.97	
83	PT. Murah Rezeki Putra Putri Suryanata	Desa Batakan dan Desa Kandungan Lama Kecamatan Panyipatan, Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Desa Pandan Sari, Desa Kintap dan Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap dan Desa Mekar Raya dan Desa Sebambaru Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.	WIUP Pasir Kuarsa	Hutan Produksi (HP)=2.149, Pelabuhan=13, Perikanan budidaya=50, perkebunan=365, Pertanian lahan Basah=209, Hutan Produksi=700, Perikanan Budidaya=2, Perkebunan=8, sempadan pantai=6, Pertanian lahan basah=7, Perikanan Budidaya=384, Pariwisata=6, Sempadan sungai=24 dan masuk wilayah kab.tanah bumbu=21	± 3.944 Ha	28 November 2022	050.13/3026/DPUPRP	3835.00	57.00
84	YPI Daarul Qur'an Istiqomah Tanah Laut	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	± 8.627 M ²	28 November 2022	591.1/910-TR/DPUPRP	0.86	
85	Yayasan Raudhatul Muhibbin	Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 5.025 M ²	28 November 2022	591.1/911-TR/DPUPRP		
86	CV. Jaya Perkasa	Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut.	Penegasan WIUP Batubara	Kawasan Perkebunan	± 335,28 Ha	30 November 2022	600/921/ DPUPRP	335.28	
87	PT. Pribumi Maju Jaya	Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Penegasan WIUP Batubara	Kawasan Pertanian Lahan Kering	± 599,21 Ha	30 November 2022	600/922/ DPUPRP	599.21	
88	PT. Borneo	Desa Bentok Kampung	Kegiatan Industri	Sub Zona Perkebunan	± 4.984 M ²	06 Desember	591.1/927-	0.50	



	Feedmiil Raya	Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Ransum Makanan Hewan			2022	TR/DPUPRP		
89	PT. Dutasatrya Adhipersada	Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Konstruksi Gedung Industri (Asphalt Mixing Plant, Batching Plant, Stone Crusher dan Generator)	Zona Kawasan Peruntukan Industri	± 5,88 Ha	08 Desember 2022	050.13/3138/DPUPRP	5.88	
90	PT. Majuperkasa Indonesia	Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya Yang tahan Api	Zona Kawasan Peruntukan Industri=9,6 dan Sub Zona Perkebunan=7	± 16,6 Ha	07 Desember 2022	050.13/3129/DPUPRP	16.60	
91	PT. Alfa Sinergia Sejahtera	Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	KKawasan Peruntukan Permukiman=12.694,85 dan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah=596,60, Sub Zona Perkebunan=6.377,55	± 19.669 M ²	07 Desember 2022	591.1/933-TR/DPUPRP	1.97	
92	CV. Nurul Hijrah	Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar dan Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Perluasan WIUP Batubara	Kawasan Perkebunan=399 dan Sempadan sungai=3	± 402 Ha	12 Desember 2022	050.13/3164/DPUPRP	399.00	3.00
93	CV. Rizky Dwi Utama	Desa Jilatan Alur, Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar dan Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Perluasan WIUP Batubara	Kawasan Peruntukan Permukiman=0,25 dan Kawasan Pertanian Lahan Kering=466,40	± 466,75 Ha	12 Desember 2022	050.13/3136/DPUPRP	466.40	0.25
94	CV. Berkah Bersama Mulia	Desa Alur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Pertashop	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 375 M ²	19 Desember 2022	591.1/955-TR/DPUPRP	0.004	
95	YPI Daarul Qur'an Istiqomah Tanah Laut	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Pondok Pesantren Tahfiz Daarul Qur'an Istiqomah	Kawasan Pertanian Lahan Kering	± 15.580 M ²	19 Desember 2022	591.1/957-TR/DPUPRP	1.56	
96	Yayasan Berkah Satui Mengaji	Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Sarana Pendidikan Keagamaan	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 2.245 M ²	19 Desember 2022	591.1/956-TR/DPUPRP	0.02	
97	PT. Alam Meratus Persada	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	± 2.000 M ²	26 Desember 2022	591.1/1005-TR/DPUPRP	0.02	
98	PT. Citra Putra Kebun Asri	Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Perkebunan Kelapa Sawit	Kawasan pertanian lahan kering=193,623 dan Kawasan Peruntukan Permukiman=89,771	± 283,394Ha	26 Desember 2022	050.13/3345/DPUPRP	283.39	



99	PT. Citra Putra Kebun Asri	Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Perkebunan Kelapa Sawit	Kawasan Peruntukan Permukiman=54,230 dan Kawasan Pertanian Lahan Kering=73,98	± 127,230 Ha	26 Desember 2022	050.13/3346/DPUPRP	73.40	54.23
100	PT. Tala Alam Baru	desa Sungai Riam, Desa Kampung Baru, Desa Batu Mulya di Kecamatan pelaihari dan Desa Panyipatan, Desa Kandangan Baru, Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut serta Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Kawasan Hutan Lindung=345,52, Kawasan Peruntukan Industri=87,45, Kawasan Perkebunan=1.008,90, Kawasan Pertanian Lahan Kering=575,15, Pertanian lahan basah=25,60 dan Kawasan Peruntukan Permukiman=242,15	± 2.284,76 Ha	26 Desember 2022	050.13/3347/DPUPRP	2284.76	
101	PT. Wahyu Putra Ramadhan	Desa swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.	Revisi Pertimbangan Teknis Tata Ruang Untuk Rencana Kegiatan Kawasan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	± 958 Ha	26 Desember 2022	050.13/3149/DPUPRP	958.00	
							TOTAL	30937.52	927.64
							TOTAL SELURUHNYA	31.865,16	

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016- 2036 dan direncanakan pada tahun 2023 akan dilakukan proses legalisasi revisi Peraturan Daerah tersebut. Pada tahun 2022 juga telah ditetapkan 3 Peraturan Bupati yaitu:

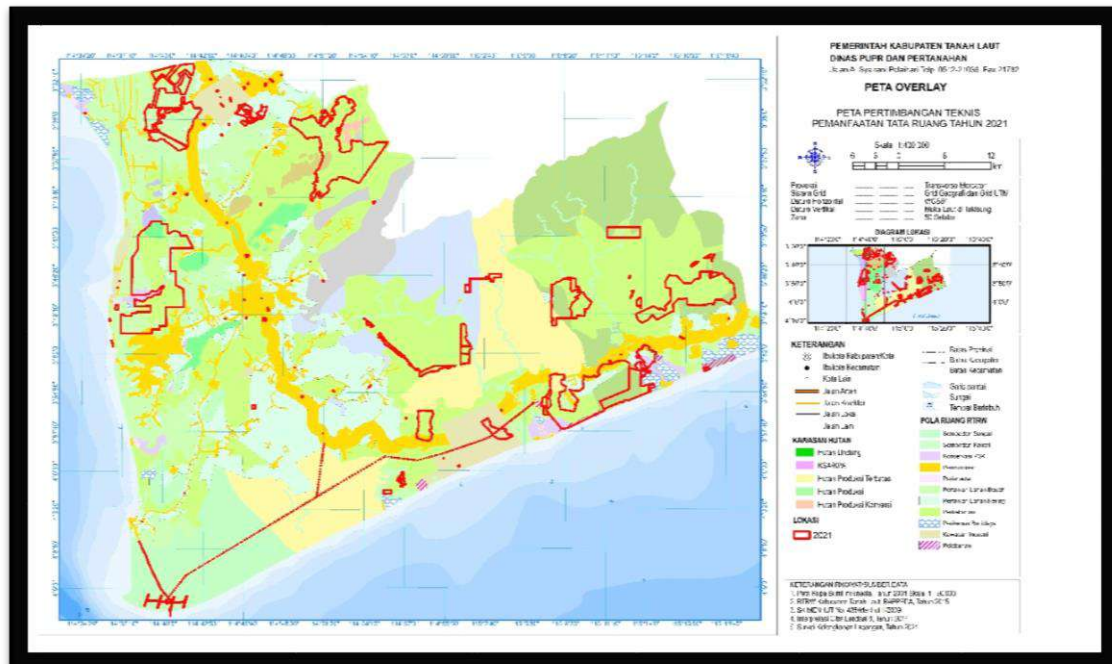
1. Peraturan Bupati Nomor No 23 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022-2042.
2. Peraturan Bupati Nomor No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042, dan Perbup No 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042.
3. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022.

Dengan dasar Perda dan Perbup tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah laut melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melakukan upaya-upaya agar tata ruang wilayah sesuai dengan Perda RTRW dan perbub RDTR minimal 92% yaitu :

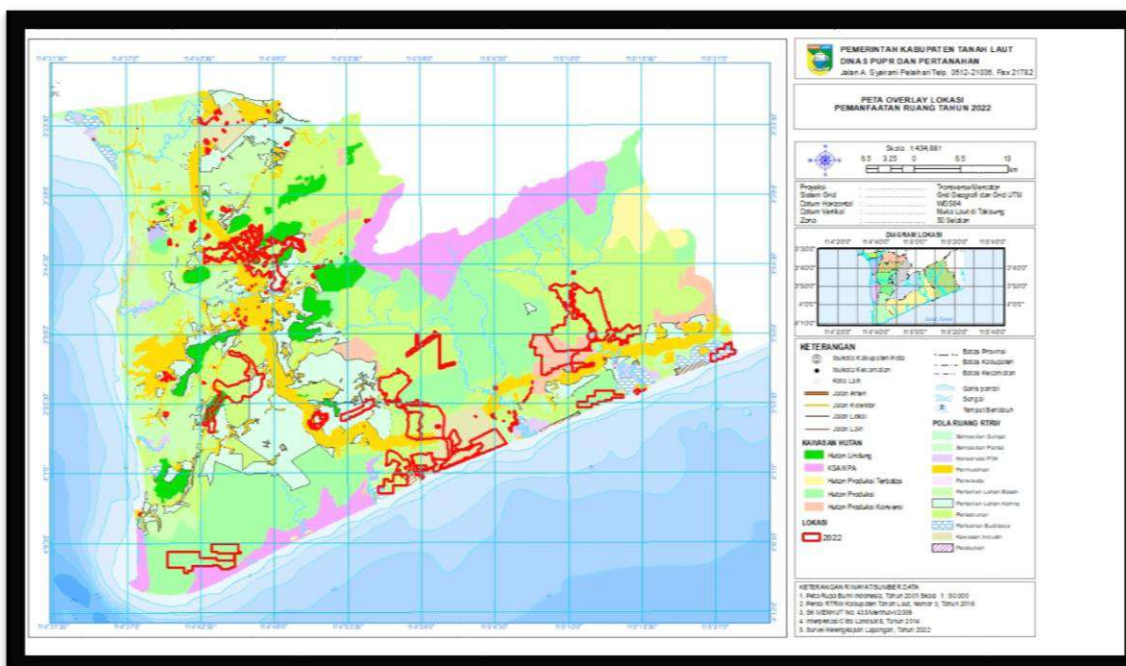
- 1) Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan Tata Ruang sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR.
- 2) Mewajibkan setiap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu sehingga setiap izin pemanfaatan sudah dapat dipastikan sesuai peruntukannya.
- 3) Mewajibkan setiap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu, sehingga peruntukan dapat dipastikan sesuai.

- 4) Melaksanakan pengecekan lapangan, apakah pembangunan dilapangan sudah sesuai dengan perda RTRW dan Perbub RDTR.
- 5) Pendampingan Proses Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tanah Laut.
- 6) Validasi KLHS RTRW Kabupaten Tanah Laut.
- 7) Penyusunan RDTR BWP Panyipatan, Tambang Ulang dan Jorong
- 8) Penyusunan Database RDTR
- 9) Pelaksanaan GCP dan Pembuatan Data dan Peta Dasar Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Kurau.
- 10) Pelaksanaan GCP dan Pembuatan Data dan Peta Dasar Kecamatan Kurau.
- 11) Penyusunan KLHS RDTR Jorong, Panyipatan dan Tambang Ulang.

Peta overlay lokasi pemanfaatan ruang tahun 2021



Peta overlay lokasi pemanfaatan ruang tahun 2022



Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 691 ASN pada DPUPRP, 107 ASN pada DPRKPLH dan di dukung oleh 7 Program dengan Pagu Rp. 23,545,117,975,00 dan terealisasi Rp. 21,252,797,608.00 atau sebesar 90.26%.

Tabel 3.1.64
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	69,936,000,00	65.505.300,00
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2,797,675,167,00	2,643,323,984.00
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	11,596,474,919,00	11.275.609.156,00
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	81,789,669,00	78.844.600,00
5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19,999,619,00	18.793.000,00



6	Program Pengelolaan Persampahan	5,479,243,172,00	4.351.192.796,00
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,499,999,429,00	2.819.528.772,00
Jumlah		23,545,117,975,00	21,252,797,608,00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 20

Meningkatnya pembinaan desa

Meningkatnya pembinaan desa diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.65
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Desa Kategori Maju	%	22	21.54	97.91	24	33.08	137.83	26	46,15	177,5 %
2	Jumlah Desa di bina berciri khas	Desa	5	5	100.00	5	6	120.00	5	7	140 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											158,75 %

Tabel 3.5.66
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Persentase Desa Kategori Maju	%	26	46,15	177,5 %	28	164,82%
2	Jumlah Desa di bina berciri khas	Desa	5	7	140 %	5	140%

a. Persentase Desa Kategori Maju

Untuk menghitung persentase desa kategori maju adalah dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa.

Realisasi indikator persentase desa kategori maju tahun 2022 adalah 46,15 %, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 26% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 177,5%. Mengalami peningkatan sebesar 13,42% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 33,08%.

Perhitungan persentase desa kategori maju diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Persentase desa kategori maju

$$= \frac{\text{Jumlah desa kategori maju (Maju dan Mandiri)}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$$

Jumlah desa

$$= \frac{60 \text{ Desa} \times 100\%}{130 \text{ Desa}}$$

130 Desa

$$= 46,15\%$$

Tabel 3.5.67

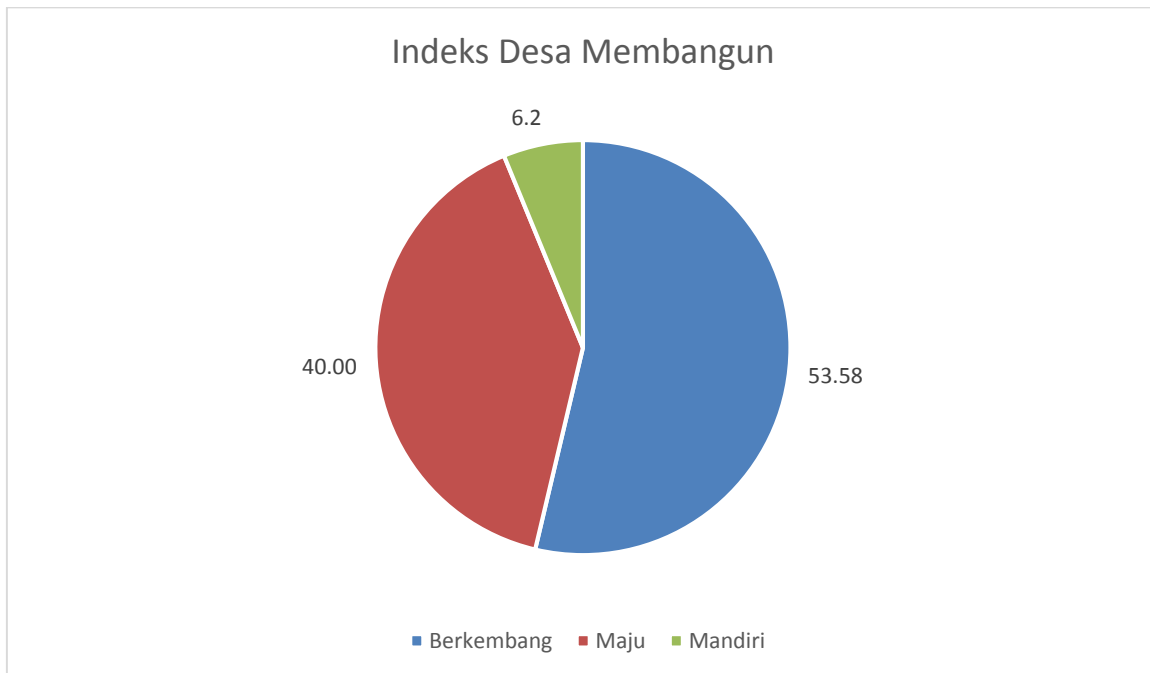
Klasifikasi Status Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	STATUS IDM				
			SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	TAKISUNG	12	-	-	6	6	-
2	JORONG	11	-	-	5	4	2
3	PELAIHARI	15	-	-	10	4	1
4	KURAU	11	-	-	7	4	-
5	BATI-BATI	14	-	-	4	8	2
6	PANYIPATAN	10	-	-	5	4	1
7	KINTAP	14	-	-	6	7	1
8	TAMBANG ULANG	9	-	-	8	1	-
9	BATU AMPAR	14	-	-	5	8	1
10	BAJUIN	9	-	-	5	4	-
11	BUMI MAKMUR	11	-	-	9	2	-
JUMLAH		130	-	-	70	52	8

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sudah tidak ada lagi Desa kategori sangat tertinggal dan tertinggal, 70 Desa kategori berkembang, 52 Desa kategori maju dan 8 Desa kategori mandiri dari total 130 desa se Kabupaten Tanah Laut.

Grafik 3.5.20
Indeks Desa Membangun



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Persentase Desa Kategori Maju Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 terealisasi sebesar 46,15%, mengalami peningkatan sebesar 13,07% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 33,08%. Untuk tahun 2021 terdapat 5 desa mandiri dan 2 desa tertinggal sedangkan di tahun 2022 terdapat 8 desa dengan kategori mandiri dan sudah tidak ada lagi desa dengan kategori tertinggal.

Tabel 3.5.68

Kriteria Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2022

No	Kriteria IDM	Jumlah Desa			
		2019	2020	2021	2022
1	Sangat Tertinggal	1	0	0	0
2	Tertinggal	15	4	2	0
3	Berkembang	89	98	85	70
4	Maju	25	26	40	52
5	Mandiri	0	2	3	8

Jumlah	130	130	130	130
--------	-----	-----	-----	-----

Indikator yang digunakan dalam menetapkan status desa dalam indeks desa membangun adalah IKS : Indeks Ketahanan Sosial, IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi, IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi). Sedangkan klasifikasi status desa dibedakan menjadi lima (5) status, yakni : (i) Desa sangat tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.

Tabel 3.5.69
Klasifikasi Desa

No	Status Desa	Nilai Batas
1.	Sangat tertinggal	$\leq 0,4907$
2.	Tertinggal	$> 0,4907$ dan $\leq 0,5989$
3.	Berkembang	$> 0,5989$ dan $\leq 0,7072$
4.	Maju	$> 0,7072$ dan $\leq 0,8155$
5.	Mandiri	$> 0,8155$

Ada 3 pendekatan yang diambil oleh Kementerian Desa PDTT untuk mendorong desa semakin lebih cepat dalam melaksanakan pembangunan. Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbanyak kesempatan dan pilihan masyarakat desa dalam upaya menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva. Sampai saat ini masalah yang dihadapi masyarakat desa adalah ketidakberdayakan dan marjinalisasi. Masalah inilah yang menjadi faktor utama penyebab kemiskinan di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu diharapkan dengan Jaring Komunitas Desa ini mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan Lokal Desa.

Kedua, Lumbung Ekonomi Desa. Desa sebagai jenis entitas wilayah terkecil. Dalam suatu Negara, memiliki potensi sumber daya yang sangat beragam. Ketika potensi tersebut mampu untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa sendiri maka akan menjadi lumbung komoditas ekonomi. Pengembangan lumbung ekonomi tidak akan pernah lepas dengan masalah modal, jaringan dan informasi. Oleh karena itu lembaga ekonomi yang dibentuk di desa harusnya sudah mempunyai kapasitas dan kualitas yang sudah mumpuni. Dalam Konteks ini BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) sebagai penggerak perekonomian harus mampu dan tanggap dengan kesempatan dan peluang ekonomi yang bias dikembangkan. Ketiga, Lingkar Budaya Desa. Budaya desa merupakan ruh keterkaitan emosional warga yang terbentuk dari kebersamaan persaudaraan, kekerabatan dan kolektivitas yang mengakar lama dalam masyarakat. Budaya desa yang seperti ini akan mampu mengarahkan, membimbing secara kolektif untuk tetap pada jalur dan tujuan program pembangunan. Norma dan nilai budaya desa yang telah ada sejak lama secara otomatis akan mengontrol program tersebut hingga menghasilkan kemajuan hingga sampai pada kesejahteraan masyarakat. Tiga pendekatan inilah yang kemudian menghasilkan tiga kategori dalam melakukan penilaian keberhasilan program pembangunan desa atau yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi (Lingkungan).

Tabel 3.5.70
Klasifikasi Status Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO	KRITERIA IDM	JUMLAH DESA
1	Sangat Tertinggal	0
2	Tertinggal	0
3	Berkembang	70
4	Maju	52
5	Mandiri	8
Jumlah		130

Derap pembangunan di wilayah perdesaan di Kabupaten Tanah Laut terus melaju pesat. Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut mulai terus ditingkatkan dari tahun 2020 sampai sekarang, khususnya mengenai perkembangan kemajuan di 130 Desa. Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, maka diperlukan ketersediaan data dasar Pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana ketentuan Permendes PDTT-RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Target kenaikan status Desa selain didasarkan pada capaian prestisius tahun lalu, juga dikarenakan masifnya pembangunan di seluruh Desa di Kabupaten Tanah Laut. Baik yang mempergunakan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) serta berbagai sumber pendapatan lainnya.

Dari 130 desa di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari 11 Kecamatan, pada tahun 2021 di Kabupaten Tanah Laut masih memiliki Desa Tertinggal, yakni sebanyak 2 Desa (1,53 persen) kemudian pada tahun 2022 sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal. Untuk Desa Berkembang pada tahun 2021 sebanyak 85 Desa (65,38 persen) turun menjadi 70 Desa (53,84 persen) pada tahun 2022. Desa Maju pada tahun 2021 sebanyak 40 Desa (30,76 persen) naik menjadi 52 Desa (40 persen) pada tahun 2022. Dan Desa Mandiri pada tahun sebelumnya ada 3 Desa (2,3 persen) sekarang pada tahun 2022 menjadi 8 Desa (6,15 persen).

Dalam upaya menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa di Kabupaten Tanah Laut telah dibuat dan diterbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Dimana perlu dilakukan secara terpadu dan koordinasi, dengan melibatkan berbagai SKPD, terkait sasaran pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil analisa IDM Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dan Keputusan Menteri Desa, PDT & Trans RI Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022, di Kabupaten Tanah Laut terdapat 8 (delapan) Desa Mandiri, 52 (lima puluh dua) Desa Maju dan 70 (tujuh puluh) Desa Berkembang, tidak ada lagi Desa berstatus Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Dan pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Kabupaten terbaik pertama atas prestasi pembangunan dalam peningkatan status dan kemandirian Desa, dalam menolak / tidak ada lagi Desa berstatus Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, dan Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri Tahun 2022 dari Menteri Desa, PDT dan Trans kepada Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar, Desa Kait-Kait Baru dan Desa Padang Kec. Bati-Bati, Desa Jorong dan Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong, Desa Bukit Mulya Kec. Kintap, Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan dan Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari berdasarkan Keputusan Menteri Desa, PDT dan Trans RI Nomor 105 Tahun 2022, dan ada 23 (dua puluh tiga) Desa mendapat piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan atas prestasi dalam pembangunan sebagai Desa dengan Peningkatan Status Desa nya, dari Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang, dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Komitmen dan kesungguhan Pemerintah pada semua tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dan tidak ketinggalan partisipasi para Pendamping Desa serta semua pihak yang terkait. Karena itu, sinergi harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga status Desa Tertinggal tidak ada lagi di Kabupaten Tanah Laut ini, semuanya sudah naik menjadi Desa Berkembang, Maju dan Desa Mandiri.

Pembangunan desa merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga banyak upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Program peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Sebesar 50%, dari tahun 2018 – hingga 2023 nanti. Pada tahun 2021 dan 2022 Desa dapat membangun desa dalam segala dimensi, baik itu pembangunan infrastruktur (jalan desa, saluran irigasi, jalan pertanian) yang memudahkan akses masyarakat

dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan pagelaran budaya di desa, peningkatan kualitas sumberdaya manusia desa melalui kegiatan pelatihan kepada pemuda di desa misalnya tata rias, memasak, perbengkelan dan lain-lain. Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tanah Laut untuk pagu tahun anggaran 2018-2021 adalah sebesar :

- a. Tahun 2018, ADD yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 76.717.987.513,00 atau 10% dari jumlah DAU dan DBH yang diterima, untuk 130 Desa di Kabupaten Tanah Laut.
 - b. Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 132.096.433.930,00 atau mengalami kenaikan 72% dari tahun 2018.
 - c. Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 138,765,257,820,00 atau mengalami kenaikan 81% dari tahun 2018 dan 5% dari tahun 2019.
 - d. Tahun 2021 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%.
 - e. Realisasi bantuan keuangan ADD tahun 2022 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%.
2. Bupati mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten sejak Tahun 2019 untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi keuangan dan kinerja, dan di tahun 2019 telah dilakukan audit kepada 109 Desa dari total 130 Desa dan di tahun 2020 telah dilaksanakan audit kepada 29 Desa, Tahun 2021 dilaksanakan audit penyelenggaraan terhadap desa sebanyak 11 Desa dikarenakan 2 tahun terakhir terjadi adanya pandemi Covid 19, dan pada tahun 2022 dilaksanakan audit penyelenggaraan terhadap desa sebanyak 11 Desa.

Kegiatan-kegiatan pengawasan dalam rangka pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:

- a. Pengawasan kebijakan pengelolaan APBDesa yang lebih mengutamakan pada pemberdayaan tenaga kerja dan potensi lokal secara mandiri dalam pengerjaan kegiatan pembangunan dengan fokus pada aspek efektivitas dan efisiensi yang menggunakan anggaran dana desa.
- b. Pengawasan pengelola administrasi dan pelaporan penyelenggaraan

- pemerintahan dan BPD dalam pengelolaan APBDesa sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara/daerah.
- c. Pemberian sosialisasi dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM Perangkat dan BPD Desa.
 - d. Melakukan Reviu penyaluran dan Penggunaan APBDesa setiap Triwulan.
 - e. Pengawasan pengelola Penatausahaan Aset Desa.
 - f. Pengawasan terhadap efektifitas kinerja Perangkat Desa, Penggunaan tenaga kerja, organisasi desa yang telah dibentuk.
 - g. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
 - h. Melakukan koordinasi terhadap dugaan adanya penyelewengan dana desa dari masyarakat diantaranya dengan meminta hasil laporan audit dari Inspektorat.
3. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan upaya sebagai berikut:
- a. Melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan SKPD lain (Focus Group Discussion/FGD) dalam rangka bersama-sama menjadikan desa-desa yang berkembang menjadi maju dan mandiri yang merupakan sasaran dari forum ini sehingga semua program yang ada di masing-masing SKPD dapat bersinergi yang sudah barang tentu untuk peningkatan status desa tersebut.
 - b. Mengawal penggunaan ADD desa dengan melaksanakan monitoring serta evaluasi penggunaan DD dan ADD yang dikucurkan pemerintah pada desa-desa yang status desanya masih sangat tertinggal dan tertinggal apakah sudah sesuai dan mendukung dalam peningkatan status desanya.
 - c. Melakukan penguatan Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM dll) serta BumDes melalui kegiatan bimtek/pelatihan/pembinaan agar mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk mendukung percepatan peningkatan status desa.
 - d. Melaksanakan pembinaan desa yang memiliki ciri khas untuk terus meningkatkan potensi desa melalui kerjasama dengan SKPD terkait, agar



menumbuhkan usaha-usaha kecil di desa.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain terus melaksanakan kegiatan kegiatan yang baik yang telah dilaksanakan dan perbaikan-perbaikan yang masih dianggap kurang juga akan menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa yaitu meningkatkan keterpaduan, koordinasi, dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, terkait sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan kemandirian Desa di Kabupaten Tanah Laut.

Komitmen dan kesungguhan Pemerintah pada semua tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dan tidak ketinggalan partisipasi para Pendamping Desa serta semua pihak yang terkait. Karena itu, sinergi harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga status Desa Tertinggal tidak ada lagi di Kabupaten Tanah Laut ini, semuanya sudah naik menjadi Desa Berkembang, Maju dan Desa Mandiri.

Pembangunan desa merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga banyak upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Program peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Sebesar 50%, dari tahun 2018 – hingga 2023 nanti. Pada tahun 2020 dan 2021 Desa dapat membangun desa dalam segala dimensi, baik itu pembangunan infrastruktur (jalan desa, saluran irigasi, jalan pertanian) yang memudahkan akses masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan pagelaran budaya di desa, peningkatan kualitas sumberdaya manusia desa melalui kegiatan pelatihan kepada pemuda di desa misalnya tata rias, memasak, perbengkelan dan lain-lain.

Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tanah Laut untuk pagu tahun anggaran 2018-2021 adalah sebesar :

- a. Tahun 2018, ADD yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 76.717.987.513,00 atau 10% dari jumlah DAU dan DBH yang diterima, untuk 130 Desa di Kabupaten Tanah Laut.

- b. Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 132.096.433.930,00 atau mengalami kenaikan 72% dari tahun 2018.
 - c. Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 138,765,257,820,00 atau mengalami kenaikan 81% dari tahun 2018 dan 5% dari tahun 2019.
 - d. Realisasi bantuan keuangan ADD tahun 2021 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%.
2. Bupati mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten sejak Tahun 2019 untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi keuangan dan kinerja, dan di tahun 2019 telah dilakukan audit kepada 109 Desa dari total 130 Desa dan di tahun 2020 telah dilaksanakan audit kepada 29 Desa dan pada Tahun 2021 dilaksanakan audit penyelenggaraan terhadap desa sebanyak 11 Desa dikarenakan 2 tahun terakhir terjadi adanya pandemi Covid 19.

Kegiatan-kegiatan pengawasan dalam rangka pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:

- a. Pengawasan kebijakan pengelolaan APBDesa yang lebih mengutamakan pada pemberdayaan tenaga kerja dan potensi lokal secara mandiri dalam pengerjaan kegiatan pembangunan dengan fokus pada aspek efektivitas dan efisiensi yang menggunakan anggaran dana desa.
- b. Pengawasan pengelola administrasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan BPD dalam pengelolaan APBDesa sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara/daerah.
- c. Pemberian sosialisasi dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM Perangkat dan BPD Desa.
- d. Melakukan Reviu penyaluran dan Penggunaan APBDesa setiap Triwulan.
- e. Pengawasan pengelola Penatausahaan Aset Desa.
- f. Pengawasan terhadap efektifitas kinerja Perangkat Desa, Penggunaan tenaga kerja, organisasi desa yang telah dibentuk.
- g. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
- h. Melakukan koordinasi terhadap dugaan adanya penyelewengan dana desa dari masyarakat diantaranya dengan meminta hasil laporan audit dari

Inspektorat.

3. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan upaya sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan SKPD lain (Forum SKPD) dalam rangka bersama-sama menjadikan desa-desa yang tertinggal menjadi desa berkembang, maju dan mandiri yang merupakan sasaran dari forum ini sehingga semua program yang ada di masing-masing SKPD dapat bersinergi yang sudah barang tentu untuk peningkatan status desa tersebut.
 - b. Mengawal penggunaan ADD desa dengan melaksanakan monitoring serta evaluasi penggunaan DD dan ADD yang dikururkan pemerintah pada desa-desa yang status desanya masih sangat tertinggal dan tertinggal apakah sudah sesuai dan mendukung dalam peningkatan status desanya.
 - c. Melakukan penguatan Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM dll) serta BumDes melalui kegiatan bimtek/pelatihan/pembinaan agar mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk mendukung percepatan peningkatan status desa.
 - d. Melaksanakan pembinaan desa yang memiliki ciri khas untuk terus meningkatkan potensi desa melalui kerjasama dengan SKPD terkait, agar menumbuhkan usaha-usaha kecil di desa.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain terus melaksanakan kegiatan kegiatan yang baik yang telah dilaksanakan dan perbaikan-perbaikan yang masih dianggap kurang juga akan menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa yaitu meningkatkan keterpaduan, koordinasi, dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, terkait sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan kemandirian Desa di Kabupaten Tanah Laut.

b. Jumlah Desa Dibina Berciri Khas

Dalam rangka mempercepat Pembangunan Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa, di Kabupaten Tanah Laut juga telah terbentuk Desa Berciri Khas. Desa Berciri Khas yaitu Desa yang memiliki karakteristik khusus yang dapat ditinjau dari aspek sosial budaya, masyarakat Desa setempat masih mempertahankan tradisi turun temurun dalam kehidupan sosial dan budaya. Sementara pada aspek geografi tergantung dari potensi alam tempat tinggal masyarakat Desa. Kebanyakan masih menggantungkan hidup dengan kondisi alam setempat sesuai potensi alamnya, misalnya daerah pesisir yang rata-rata adalah nelayan.

Sedangkan warga yang hidup dipinggiran hutan akan mengandalkan potensi hutan setempat utk bertahan hidup. Sementara dari aspek SDM yaitu masyarakat Desa setempat memiliki keterampilan khusus sebagai mata pencaharian yang mana mereka hidup dari industri kerajinan atau Desa pengrajin dan rata-rata biasanya bersifat homogen.

Jadi Desa Berciri Khas sesuai karakteristik desa masing-masing tersebut dengan potensi yang ada perlu digali, dipertahankan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa setempat dan sekaligus pelestarian alam dapat terjaga dengan baik.

Realisasi indikator Jumlah Desa di bina berciri khas di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 terealisasi sebanyak 7 desa dari target 7 desa, sehingga capaian kinerja jumlah desa dibina berciri khas adalah sebesar 100%. mengalami peningkatan sebanyak 1 Desa jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 6 Desa. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 5 Desa.

Ke 7 (tujuh) desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur
2. Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati
3. Desa Kali Besar Kecamatan Kurau
4. Desa Damit Kecamatan Batu Ampar
5. Desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari
6. Desa Tabanio Kecamatan Takisung
7. Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap

Jumlah Desa dibina berciri khas tahun 2022 adalah sebanyak 7 Desa. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 6 Desa. Berikut daftar desa di bina berciri khas tahun 2020 dan 2022.

Tabel 3.5.71
Desa dibina berciri khas 2020 – 2022

No	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Desa Bukit Mulya Kecamatan Kintap	Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau	Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur
2	Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong	Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati	Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati
3	Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung	Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan	Desa Kali Besar Kecamatan Kurau
4	Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar	Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang	Desa Damit Kecamatan Batu Ampar
5	Desa Handil Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur	Desa Tanjung Kecamatan Bajuin	Desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari
6		Desa Tungkaran kecamatan Pelaihari	Desa Tabanio Kecamatan Takisung
7			Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap

Pada Tahun 2022 telah dilakukan kegiatan pencaanangan desa berciri khas di Tanah Laut yang kemudian dilakukan pembinaan. Untuk desa yang dibina berciri khas dari 5 desa yang ditargetkan sudah terlaksana semua (bahkan ada penambahan 2 desa berciri khas) yaitu dengan melaksanakan pembinaan terhadap desa yang berciri khas.

Berikut kegiatan koordinasi Desa Berciri Khas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2022 :

1. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas yang dihadiri oleh Kepala SKPD/ yang mewakili, Tujuh Kecamatan yang dtunjuk berciri khas. Kecamatan tersebut memilih Desa yang mempunyai ciri khasnya.
2. Rapat koordinasi dan konsolidasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas yang dihadiri oleh Bupati Tanah Laut, Kepala SKPD/ yang mewakili, Tujuh Kecamatan dan Tujuh Kepala Desa yang ditunjuk berciri khas yaitu Desa Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati, Desa Kali Besar Kec. Kurau, Desa Damit Kec. Batu Ampar, Desa Guntung Besar Kec. Pelaihari ,Desa Tabanio

Kec.Takisung dan Desa Riam Adungan Kec. Kintap. Desa tersebut mempunyai adanya karakteristiknya masing-masing Desa, wisata, Kountur budaya dan alamnya.

3. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur, desa yang memiliki potensi olahan dari Rambai. Yang diputuskan dinamakan Kampung Rambai Bogem. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut,. Penganangan Desa BerciriKhas Sungai Rasau sebagai Kampung Rambai Bogem 21 November 2022 yang di hadiri Bupati Tanah Laut.
4. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati, lokasi yang bertepatan di pinggir jalan menuju arah Pelabuhan – Banjarmasinpotensi yang di miliki desa liang angang yaitu purun banyak olahan purun bisa di buat dengan tas dompet dan topi. Yang diputuskan dinamakan Kampung Purun. Penganangan Desa BerciriKhas Liang Anggang sebagai Kampung Purun tanggal 22 November 2022 yang di hadiri Bupati Tanah Laut/ yang mewakili
5. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Kali Besar Kecamatan Kurau yaitu mengenai ikan pakasam dari olahan ikan sapat, haruan, nila, gabus dan papuyu. Yang diputuskan dinamakan Kampung Pakasam Kali besar. Yang dihadiri oleh.
6. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Damit Kecamatan Bartu Ampar yaitu dengan adanya bending yang ada di Desa Damit. Maka dari itu Yang diputuskan dinamakan TIRTA DAM. Yang dihadiri oleh Bupati Kab. Tanah Laut / yang diwakili, enam Kecamatan dan enam kepala Desa yang ditunjuk berciri khas dan dihadiri Kepala SKPD/ yang mewakili. Penganangan Desa Berciri Khas Damit sebagai TIRTA DAM tanggal 28 November 2022 yang di hadiri Bupati Tanah Laut/ yang mewakili
7. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas di Desa Guntung Besar Kecamatan Pelabuhan dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh

kepala Desa yaitu sebagai Desa berciri khas “Kampung Lahang” yang mempunyai pohon lahang di Desa Guntung Besar. Pencanangan Desa Berciri Khas Guntung Besar sebagai Kampung Lahang tanggal 6 Desember 2022 yang di hadiri Bupati Tanah Laut/ yang mewakili

8. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang berciri khas di Desa Tabanio Kecamatan Takisung dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu dimana masyarakat banyak nelayan dan pengeringan ikan asin di daerah tabanio sehingga dinamakan Desa Pengering ikan asin. Pencanangan Desa Berciri Khas Tabanio sebagai Desa Pengering Ikan Asin tanggal 8 Desember 2022 yang di hadiri Bupati Tanah Laut/ yang mewakili
9. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang berciri khas di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu dimana Desa Riam Adungan memiliki pohon Ulin yang bisa di olah keterampilan dan karya seperti ulekan rumah pohon gelas dan lain lain, Pencanangan Desa Berciri Khas Riam Adungan sebagai Kampung Ulin tanggal 13 Desember 2022 yang di hadiri Bupati Tanah Laut/ yang mewakili.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya pembinaan desa di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 65 ASN pada DPMD dan di dukung oleh 7 Program dengan Pagu Rp. 9,319,528,756,00 dan terealisasi Rp. 9,664,864,303.00 atau sebesar 103,71%.

Tabel 3.1.72
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3,685,636,442,00	4.750.071.065,00
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	57,117,234,00	42.637.500,00
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,446,540,758,00	2.915.472.445,00
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,596,082,342,00	1.522.116.405,00
5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	141,854,554,00	122.188.000,00
6	Program Penataan Desa	300,943,946,00	258.004.000,00
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91,353,480,00	54.374.888,00



	9,319,528,756,00	9,664,864,303.00
--	------------------	------------------

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 21

Meningkatnya cakupan penataan perkotaan

Meningkatnya cakupan penataan perkotaan melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.73
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	69,10	69,45	97,76%	69,30	69,59	87,67%	3	0,21	1428,57 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2022											1428,57 %

Tabel 3.5.74
Capaian Realisasi Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	3	0,21	1428,57%	1	476,19%

Realisasi indikator Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan tahun 2022 adalah 0,21%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,0% dengan tingkat capaian 1428,57%. mengalami kenaikan 0,12% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 0,33%. Indikator Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan merupakan indikator terbalik, dimana apabila tingkat capaian semakin rendah maka kinerja semakin baik.

Tahun 2022 luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah 78,74 Ha, sedangkan luasan kota Pelaihari adalah 37.945 Ha sehingga diperoleh data persentase luasan kumuh di kawasan perkotaan tahun 2022 adalah :

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan =

Luas permukiman kumuh x 100%

Luas perkotaan

$$\frac{78,74 \text{ Ha}}{37.945 \text{ Ha}} \times 100\% = 0,21 \%$$

37.945 Ha

Untuk memperjelas data luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan, berikut disajikan data luasan permukiman kumuh dan kriteria kumuh di Kota Pelaihari.

Tabel 3.5.75
Luasan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan Awal Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas (Ha)
1.	Pelaihari	Karang Taruna	25.33
2.	Pelaihari	Pabahanan	31.18
3.	Pelaihari	Panggung Baru	9.46
4.	Pelaihari	Angsau	17.48
5.	Pelaihari	Panjaratan	4.09
6.	Pelaihari	Sumber Mulia	10.59
7.	Pelaihari	Sungai Riam	13.8
8.	Pelaihari	Pemuda	11.56

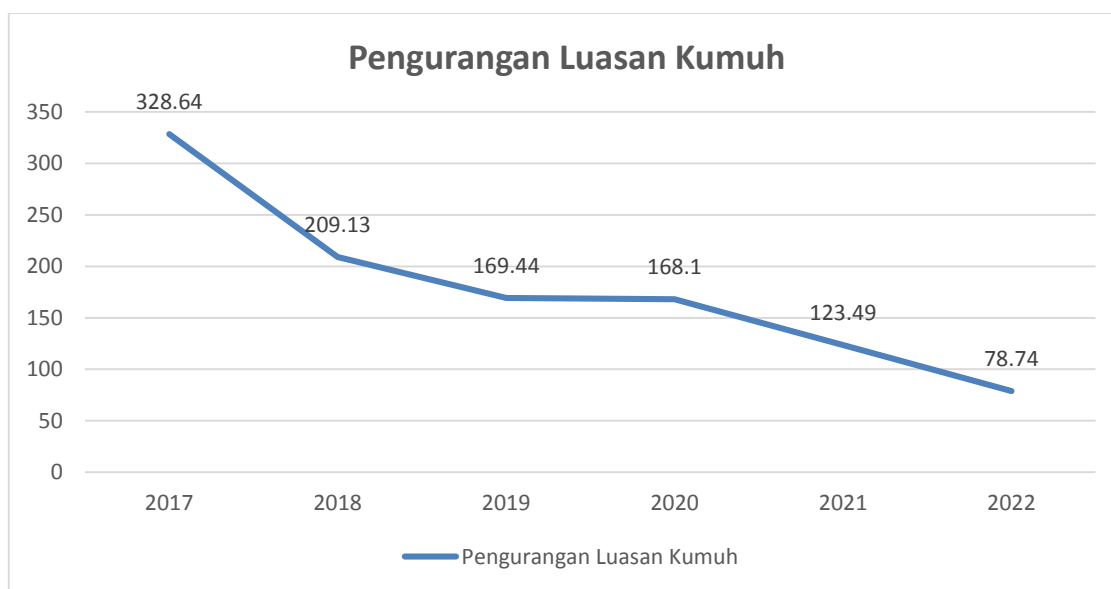
Tabel 3.5.76
Kriteria Kumuh Kota Pelaihari

Pengurangan Kumuh Sampai 2022						
No	Desa / Kelurahan	Jumlah RT	Luasan Kumuh (Ha)	Pengurangan Kumuh 2021 (Ha)	Pengurangan Kumuh 2022 (Ha)	Sisa Kumuh (Ha)
1.	Karang Taruna	3	25.33	-	-	25.33
2.	Pabahanan	9	31.18	-	31.18	-
3.	Panggung Baru	3	9.46	-	-	9.46
4.	Angsau	5	17.48	-	9.48	8

5.	Panjaratan	8	4.09	7,4	4.09	-
6.	Sumber Mulia	2	10.59	-	-	10.59
7.	Sungai Riam	2	13.8	-	-	13.8
8.	Pemuda	2	11.56	-	-	11.56

Grafik 3.5.21

Pengurangan Luasan Kumuh 2017-2022



Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota di Indonesia. Telaah tentang permukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu, pertama, kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Kedua, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Ketiga, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut sering juga

mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berapa langkah diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh yang ada di perkotaan yaitu Kota pelaihari, meskipun Kota Pelaihari yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tanah Laut adalah dalam kategori kota kecil namun masih terdapat titik-titik kawasan kumuh. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
 - Pembangunan jalan lingkungan
 - Penanganan Persampahan
- 1) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pada Bidang Perumahan dan Permukiman kegiatan BSPS yang dilaksanakan, yaitu:

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

Adapun sumber pendanaan dalam kegiatan BSPS ini terbagi menjadi 2 (dua) sumber, yaitu :

a. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bantuan ini bersumber dari dana APBN RI oleh Kementerian Keuangan RI, yang dikelola oleh Kementerian PUPR RI, yang selanjutnya dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut



Bantuan ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanah Laut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan BSPS ini sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa/Kelurahan mengusulkan nama-nama Calon Penerima Bantuan.
2. Nama-nama Calon Penerima Bantuan diverifikasi dengan data base yang berpacu pada data TNP2K.
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial yang mempunyai Kegiatan yang sama.
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) melakukan tinjauan lapangan kondisi sebenarnya rumah Calon Penerima Bantuan.
5. Nama-nama Calon Penerima Bantuan yang sudah diverifikasi dan tinjauan lapangan dan telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan kemudian diusulkan ke TAPD Kabupaten Tanah Laut (untuk alokasi DAK dan APBD Kabupaten).
6. Sosialisasi dengan Penerima Bantuan perihal alur proses pelaksanaan kegiatan.

Pada Tahun 2022 jumlah penerima bantuan BPS ini sebanyak 118 unit rumah, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebagai berikut :

Dana Alokasi Khusus (DAK) (60 unit)

- Kelurahan Angsau	15	Unit
- Kelurahan Pelaihari	15	Unit
- Kelurahan Karang Taruna	18	Unit
- Kelurahan Sarang Halang	15	Unit

APBD Kabupaten Tanah Laut (58 unit)

- Desa Telaga	7	Unit
---------------	---	------

- Kelurahan Pabahanan	3	Unit
- Desa Ambungan	1	Unit
- Desa Panggung	1	Unit
- Kelurahan Pelaihari	10	Unit
- Desa Sungai Riam	9	Unit
- Desa Pemuda	9	Unit
- Desa Sumber Mulia	9	Unit
- Desa Bumi Jaya	9	Unit



Gambar Sebelum direhab



Gambar Setelah direhab

2) Pembangunan Jalan Lingkungan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan ini merupakan jenis kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten. Kegiatan ini berupa pengaspalan / paving block jalan lingkungan perumahan dan jalan lingkungan permukiman. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan Program/Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan dan developer perumahan mengajukan proposal permohonan pengaspalan atau perkerasan jalan lingkungan perumahan atau permukiman, dimana untuk developer perumahan harus menyerahkan sertifikat untuk fasum dan fasos perumahan tersebut.
- b. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan survey lapangan perihal usulan tersebut dan berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut seperti Dinas PUPRP.
- c. Setelah dilakukan survey dan koordinasi, kemudian dapat ditentukan apakah usulan tersebut memang tupoksi kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, apabila telah sesuai maka dapat dilakukan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
- d. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan yang ada.
- e. Perencanaan, peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasarana sarana utilitas umum dilaksanakan untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan.

Peningkatan/pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasannya saja, namun mencakup pula peningkatan/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya. Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasarana sarana utilitas umum pada beberapa lokasi, yaitu :

- Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Sepakat Samping Duta Hotel dan Gang Sederhana Kelurahan Angsau



- Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Belakang Polsek Kota Pelaihari (Eks Lapangan Gantole/Arah depan alfamart) Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Nurrahman dan Gang Rahayu Kelurahan Pabahanan
- Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Rahman dan Gang Rahim RT 10 RW 04 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan RT 7A RW 03, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 8 ke RT. 9 Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Berkah RT.2 Karang Jawa Kelurahan Karang Taruna
- Peningkatan Jalan Lingkungan RT.16 RW.03 Jalan Menuju Alkah Kelurahan Karang Taruna
- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Pesona Alfa Sinergia Kelurahan Sarang Halang
- Peningkatan Jalan Lingkungan RT.6A Gang Keluarga Kelurahan Angsau
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Penerangan 01 Kelurahan Karang Taruna
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Telaga Daim Kelurahan Karang Taruna
- Peningkatan Jalan Lingkungan RT.05 Sungai Riam Kecamatan Pelaihari
- Pembuatan Drainase / Saluran Perumahan Roemah Legenda Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari
- Pembuatan Drainase / Saluran Jalan Bougenvell Perumahan Wengga Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari
- Pembuatan Drainase / Saluran Komplek Karunia Kembar I Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Sakura Residence Kecamatan Pelaihari

- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Pondok Indah 3 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Ziva Pabahanan Kecamatan Pelaihari
- Pemasangan paving blok Jalan A.Syukri Gagas Permai Kel. Angsau Kec. Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Sawahan Gg.Sewarga Kecamatan Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Mangga Permai Residence Kelurahan Sarang Halang
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Baiturrahman RT.04 /1 Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Arah TPS 3R dan Jalan Sederhana Kel. Angsau Kec. Pelaihari
- Peningkatan Bahu jalan arah Sirajul Huda Matah-Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Ratu Graha Asri (Menuju Parit Perumahan Pa Katmo)
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumber Mulya
- Pembuatan Drainase / Saluran Komplek Permata Jingga
- Pembuatan Siring Jalan Lingkungan RT 17 kelurahan sarang halang
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ujung Batu Trans RT. 7 dan RT. 8 kec. Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan griya cahaya asri kel karang taruna
- Pembuatan Drainase / Saluran RT. 10 Desa Ujung Batu Kec. Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Graha Banua Matah

Dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana sarana utilitas umum yang telah ada, perlu adanya suatu penanganan yang segera sebelum kerusakan meluas

/ meningkat. Hal ini dapat dilakukan bila koordinasi antara semua pihak yang terkait dengan masalah pemeliharaan rutin (operasional pemeliharaan) prasarana sarana utilitas umum berjalan secara baik dan lancar. Perlu diperhatikan bahwa dalam mengelola suatu prasarana sarana utilitas umum yang telah ada, program yang telah direncanakan umumnya adalah program pembangunan dan program pemeliharaan. Program pemeliharaan justru merupakan keharusan pada setiap prasarana sarana utilitas umum, setiap prasarana sarana utilitas umum harus dilakukan pemeliharaan rutin dalam setiap periode/waktu dalam setahun, sesuai dengan tujuan pemeliharaan yang telah ditetapkan, yaitu mempertahankan prasarana sarana utilitas umum yang terjaga dan tercapai umur rencana serta tingkat pelayanan.

3) Penanganan Persampahan

Penanganan persampahan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh dilakukan beberapa upaya di tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis daerah Kebersihan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
2. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase Dalam Kota Pelayari
3. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Sewa Tanah Untuk Kontainer Sampah
4. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan

5. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Pemeliharaan Bangunan dan Halaman TPA Bakunci
6. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Pemeliharaan TPS (20 TPS)
7. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Kendaraan Roda 3
8. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Kontainer Penampung Sampah
9. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Pembuatan Halte Sampah
10. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Pembangunan Gedung Komposting TPS3R Angsau dan Komposting TPA Bakunci
11. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
12. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Pemeliharaan Kontener Sampah
13. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Pemeliharaan Berat Kendaraan Roda 6
14. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan, melalui kegiatan:

- Belanja Makan dan Minum Rapat
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan
- Belanja Sepatu Lapangan

Tabel 3.5.77

Rekapitulasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Volume		Pagu	Desa/Kelurahan	Sumber Dana
1	Pembuatan Halte Sampah	23	M2	Rp 131.990.100	Kecamatan Pelaihari	APBD
2	Kontainer Penampung Sampah	3	Unit	Rp 177.000.000	Kota Pelaihari	APBD
3	Kontainer Penampung Sampah	2	Unit	Rp 104.984.994	Sungai Riam	APBD
Total Dana				Rp 413.975.094		

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri 107 ASN pada DPRKPLH dan di dukung oleh 9 Program dengan Pagu Rp. 86,470,356,190,00 dan terealisasi Rp. 79,985,503,496.00 atau sebesar 92,50%.

Tabel 3.5.78

Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	38,221,067,443,00	34.543.639.080,00
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,727,000,000,00	2.658.620.000,00
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,499,999,429,00	2.819.528.772,00
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	25,928,996,288,00	24.114.011.626,00
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	739,301,821,00	622.938.000,00
6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	951,784,433,00	897.482.948,00
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-
8	Program Pengembangan Perumahan	100,000,000,00	99.525.200,00
9	Program Kawasan Permukiman	14,302,206,776,00	14.229.757.870,00



	86,470,356,190,00	79,985,503,496.00
--	-------------------	-------------------

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp 1.740.032.489.864,00 dan anggaran belanja sebesar Rp 2.122.153.778.445,00 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 382.121.288.581,00.

Defisit anggaran tersebut ditutupi dengan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 610.990.188.934,00. Penerimaan pembiayaan juga dipergunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 75.000.000.000,00.

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2022 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 2.480.150.501.955,87 dan belanja sebesar Rp 1.639.622.897.061,92 serta belanja transfer sebesar Rp 224.230.043.540,00 sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp 616.297.561.353,95.

Realisasi Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 611.325.812.033,83 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 75.000.000.000,00 maka sisa Pembiayaan Netto sebesar Rp 536.325.812.033,83.

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 (SILPA) adalah jumlah surplus sebesar Rp 616.297.561.353,95 ditambah sisa atas Pembiayaan Netto sebesar Rp 536.325.812.033,83, maka jumlah akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2022 posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.152.622.633.887,78.

MISI I

Tabel 3,8
Berkarya meningkatkan kualitas SDM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
							Rp	Rp	%	
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8.05	7.9	1	Program Pengelolaan Pendidikan	125,481,965,023,00	101,264,617,202,00	80,70
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	13.19	12.32	2	Program Pembinaan Perpustakaan	844,532,274,00	787,850,632,00	93,29
						3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	179,934,482,00	41,562,000,00	23,10
								126,506,431,779,00	102,094,029,834.00	80.70
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	69.6	69.86	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	34,212,567,449,00	23.360.818.620,00	68,28
						2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	166,049,979,298,00	149.406.509.404,00	89,98
								200,262,546,747.00	172,767,328,024.00	86.27
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	77.5	85.65	1	Program Pendaftaran Penduduk	370,088,205,00	325.228.255,00	87,88
						2	Program Pencatatan Sipil	146,199,310,00	107.936.400,00	73,83
						3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	276,170,566,00	250.335.736,00	90,65
						4	Program Pengendalian Penduduk	215,934,411,00	176.116.434,00	81,56



						5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,723,341,676,00	4.134.166.576,00	87,53
						6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,481,507,100,00	1.294.974.801,00	52,19
								8,213,241,268,00	6,288,758,202,00	76,57
4	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	100	100	1	Program Pengembangan Kebudayaan	45,999,034,00	40.242.900,00	87,49
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	81	381	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1,335,927,973,00	1.243.816.255,00	93,11
						3	Program Pembinaan Sejarah	341,750,110,00	301.913.158,00	88,34
						4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	248,544,967,00	217.435.800,00	87,48
						5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,559,026,019,00	1.414.903.353,00	90,76
						6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12,142,932,655,00	12,616,311,041	92,33
						7	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	675,000,000,00	414,209,000	59,27
								16,349,180,758,00	16,248,831,507,00	99,39
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Presentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	100	1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2,420,881,290,00	2.290.440.245,00	94,61
						2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	49,971,151,00	37.293.750,00	74,63
						3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	49,805,090,00	47.370.000,00	95,11

						4	Program Aplikasi Informatika	2,952,853,600,00	2.850.226.000,00	96,52
								5,473,511,131,00	5,225,329,995.00	95.47

MISI II

Tabel 3,9

Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif

No,	Sasaran Strategis	Indktor Kinerja		Target	Realisasi		Program Prioritas			
							Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
								Rp	Rp	%
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	10	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	987,671,625,670,00	858,101,394,365.92	86,88
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah industri kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	20	134	1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	338,997,997,00	321.420.484,00	94,81
						2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	69,598,532,00	46.514.600,00	66,83
						3	Program Hubungan Industrial	48,085,000,00	43.567.500,00	90,61
								456,681,529,00	411,502,584.00	90.11

MISI III

Tabel 3,10
Membangun tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi		Program Prioritas			
							Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
								Rp	Rp	%
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	A (81)	B(67,28)	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	33,894,807,823,00	32.289.572.000,00	95,26
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	248,473,769,391,00	221.256.118.768,00	89,05
						3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9,588,994,567,00	8.581.056.686,00	89,49
						4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,676,730,461,00	1.044.747.964,00	62,31
						5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	574,979,700,00	454.963.250,00	79,13
						6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	467,737,810,00	417.981.832,00	89,36
						7	Program Kepegawaian Daerah	1,314,990,175,00	951.548.074,00	72,36
						8	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	979,324,244,00	846.592.740,00	86,45
								296,971,334,171,00	265,842,581,314,00	89,52



9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	47.62	58.98	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	33,894,807,823,00	32.289.572.000,00	95,26
						2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,636,958,144,00	1.455.753.288,00	88,93
						3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26,231,786,316,00	16.700.223.024,00	63,66
						4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	660,776,487,00	603.909.494,00	91,39
						5	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	146,476,998,00	98.905.010,00	67,52
						6	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	650,126,753,00	423.886.098,00	65,20
						7	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	44,236,413,00	32.210.600,00	72,81
						8	Program Penatagunaan Tanah	2,582,353,615,00	2.202.371.000,00	85,29
						9	Program Pengelolaan Arsip	21,960,000,00	18.600.000,00	84,70
						10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	41,028,879,00	28.684.000,00	69,91
								65,910,511,428,00	53,854,114,514.00	81.71

MISI IV

Tabel 3,11

Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat

No,	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi		Program Prioritas			
							Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
								Rp	Rp	%
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,587,111,014,00	1.575.021.900,00	99,24
						2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	145,000,000,00	145,000,000,00	100,00
						3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	247,145,879,00	197.735.292,00	80,01
								1,979,256,893,00	1,917,757,192,00	96.89
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	219,458,136,00	160.279.695,00	73,03
						2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas	3,449,997,296,00	3.281.106.610,00	95,10

							Penanganan Konflik Sosial			
						3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7,915,119,392,00	6.068.095.994,00	76,66
								11,584,574,824,00	9,509,482,299.00	82.09

MISI V

Tabel 3,12

Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No,	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi		Program Prioritas			
							Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
								Rp	Rp	%
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	4	5.12	1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	619,160,328,00	483.425.992,00	78,08
		2	IndekGini (skor)	0.254	0.263	2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	154,509,542,00	133.855.500,00	86,63
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	36.81	30.62	3	Program Penyuluhan Pertanian	1,634,699,687,00	1.462.796.852,00	89,48
						4	Program Perizinan Usaha Pertanian	16,721,679,00	16.594.000,00	99,24
						5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,505,537,697,00	1.469.524.052,00	97,61



					6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14,598,659,882,00	13.599.572.850,00	93,16
					7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	7,262,351,324,00	7.071.965.400,00	97,38
					8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	739,301,821,00	622.938.000,00	84,26
					9	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	20,000,000,00	10.781.250,00	53,91
					10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	329,600,268,00	323.832.250,00	98,25
					11	Program Pengembangan Ekspor	-	-	-
					12	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	43,822,408,00	35.957.000,00	82,05
					13	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-
					14	Program Pelayanan Penanaman Modal	115,856,646,00	87.437.750,00	75,47
					15	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	419,903,600,00	297.118.873,00	70,76
					16	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70,543,892,00	68.096.800,00	96,53
					17	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	468,999,456,00	431.631.847,00	92,03



						18	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	424,167,701,00	348.570.500,00	82,18
						19	Program Promosi Penanaman Modal	86,918,315,00	83.640.250,00	96,23
								28,510,754,246,00	26,547,739,166.00	93.11
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,00	87.28	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	157,501,937,00	134.845.030,00	85,61
						2	Program Perlindungan Perempuan	291,711,210,00	97.903.525,00	33,56
						3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	171,170,679,00	108.100.816,00	63,15
						4	Program Perlindungan Khusus Anak	497,807,295,00	230.717.619,00	46,35
								1,118,191,121,00	571,566,990.00	51.12
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.4	4.17	1	Program Penempatan Tenaga Kerja	120,333,024,00	115.749.343,00	96,19
						2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	359,546,040,00	257,126,720.00	71.51
						3	Program Rehabilitasi Sosial	4,712,818,176,00	972.879.755,00	20,64
						4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6,898,821,492,00	6.713.860.206,00	97,32
						5	Program Perencanaan Tenaga Kerja	17,585,433,00	17.542.957,00	99,76
								12,109,104,165,00	8,077,158,981.00	66.70



15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	125 (Sedang)	156.33 (Tinggi)	1	Program Penanggulangan Bencana	682,785,776,00	373.032.325,00	54,63
		2	Presentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	25	13.32	2	Program Penanganan Bencana	195,076,408,00	170.846.500,00	87,58
						3	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	951,784,433,00	897.482.948,00	94,29
						4	Program Rehabilitasi Sosial	4,712,818,176,00	972.879.755,00	20,64
						5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6,898,821,492,00	6.713.860.206,00	97,32
						6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	322,592,700,00	317.544.654,00	98,44
						7	Program Pemberdayaan Sosial	530,011,340,00	471.266.097,00	88,92
						8	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	27,566,450,00	22.418.194,00	81,32
								14,321,456,775,00	9,939,330,679,00	69,40
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks pembangunan infrastruktur	89	58.12	1	Program Penyelenggaraan Jalan	156,636,096,471,00	150.051.466.661,00	95,80
						2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	38,221,067,443,00	34.543.639.080,00	90,38
						3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,727,000,000,00	2.658.620.000,00	97,49
						4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	13,564,829,000,00	12.363.991.100,00	91,15
						5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	34,375,119,354,00	31.606.413.916,00	91,95
						6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14,598,659,882,00	13.599.572.850,00	93,16
						7	Program Penataan Bangunan Gedung	31,548,655,137,00	30.020.728.114,00	95,16



						8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	59,999,400,00	36.397.878,00	60,66
						9	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	562,651,387,00	372.070.300,00	66,13
						10	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	31,939,406,011,00 30.539.418.575,00	29.037.252.094,00	95,08
						11	Program Pengelolaan Pelayaran	59,484,433,00	44.721.784,00	75,18
								324,292,968,518,00	304,334,873,777.00	93.85
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,53	2.70	1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	739,301,821,00	622.938.000,00	84,26
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7.69	3.86	2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	89,892,611,00	89.323.670,00	99,37
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembngkan pemerintah (orang)	300.000	579,878	3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	339,878,035,00	324.870.750,00	95,58
						4	Program Pemasaran Pariwisata	488,761,957,00	250.418.488,00	51,24
						5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	132,983,236,00	125.131.468,00	94,10
						6	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,636,958,144,00	1.455.753.288,00	88,93
						7	Program Pengendalian Izin Usaha Insutri Kabupaten/Kota	11,890,000,00	5.987.500,00	50,36
						8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	7,262,351,324,00	7.071.965.400,00	97,38
								10,702,017,128,00	9,946,388,564.00	92.94
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	90.7	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	3,195,754,898,00	2.982.983.893,00	93,34



							Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan			
						2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	442,791,918,00	316.034.856,00	71,37
						3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	51,918,551,00	32.191.000,00	62,00
						4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	83,279,858,00	69.968.427,00	84,02
						5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,596,082,342,00	1.522.116.405,00	95,37
						6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	166,049,979,298,00	149.406.509.404,00	89,98
						7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,505,537,697,00	1.469.524.052,00	97,61
						8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14,598,659,882,00	13.599.572.850,00	93,16
						9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	619,160,328,00	483.425.992,00	78,08
						10	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	154,509,542,00	133.855.500,00	86,63
						11	Program Perizinan Usaha Pertanian	16,721,679,00	16.594.000,00	99,24
						12	Program Penyuluhan Pertanian	1,634,699,687,00	1.462.796.852,00	89,48
						13	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2,066,309,223,00	1.963.768.082,00	95,04
						14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	328,306,687,00	285.096.540,00	86,84
						15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	99,898,026,00	13.055.000,00	13,07
						16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	132,983,236,00	125.131.468,00	94,10
								192,576,592,852,00	173,882,624,321,00	90,29



19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	71.27	67.78	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	69,936,000,00	65.505.300,00	93,66
		2	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	92,00	97	2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2,797,675,167,00	2,643,323,984,00	94,48
						3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	11,596,474,919,00	11.275.609.156,00	97,23
						4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	81,789,669,00	78.844.600,00	96,40
						5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19,999,619,00	18.793.000,00	93,97
						6	Program Pengelolaan Persampahan	5,479,243,172,00	4.351.192.796,00	79,41
						7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,499,999,429,00	2.819.528.772,00	94,59
								23,545,117,975,00	21,252,797,608,00	90,26
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Presentas Desa Kategori Maju	26	46.15	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3,685,636,442,00	4.750.071.065,00	128,88
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	7	2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	57,117,234,00	42.637.500,00	74,65
						3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,446,540,758,00	2.915.472.445,00	84,59
						4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,596,082,342,00	1.522.116.405,00	95,37
						5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	141,854,554,00	122.188.000,00	86,14



						6	Program Penataan Desa	300,943,946,00	258.004.000,00	85,73
						7	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91,353,480,00	54.374.888,00	59,52
								9,319,528,756,00	9,664,864,303,00	103,71
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Presentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	3,00	0.21	1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	38,221,067,443,00	34.543.639.080,00	90,38
						2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,727,000,000,00	2.658.620.000,00	97,49
						3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,499,999,429,00	2.819.528.772,00	80,56
						4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	25,928,996,288,00	24.114.011.626,00	93,00
						5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	739,301,821,00	622.938.000,00	84,26
						6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	951,784,433,00	897.482.948,00	94,29
						7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	-
						8	Program Pengembangan Perumahan	100,000,000,00	99.525.200,00	99,53
						9	Program Kawasan Permukiman	14,302,206,776,00	14.229.757.870,00	99,49
								86,470,356,190,00	79,985,503,496,00	92,50

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 184,39% dengan realisasi keuangan sebesar 84,90% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

MISI I

Tabel 3,13
Berkarya meningkatkan kualitas SDM

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	80,70 %	95,77%	15,07%
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	86,27 %	100,37%	14,14%
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	76,57 %	110,51%	33,94%
4	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	99,39 %	244,44%	145,05%
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	95,47 %	100%	4,53%

MISI II

Tabel 3,14
Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	86,88 %	500%	413,12%
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	90,11 %	670%	579,89%

MISI III

Tabel 3,15
Membangun tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*)

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	89,52 %	91,53%	2,01%
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	81,71 %	123,86%	42,15%

MISI IV

Tabel 3,16
Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	96,89 %	100%	3,11%
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	82,09 %	100%	17,91%

MISI V

Tabel 3,17
Membangun sinegritas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	93,11 %	102,58%	9,47%
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	51,12 %	98,07%	46,95%

14	Menurunnya tingkat pengangguran	66,70 %	81,53%	14,83%
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	69,40 %	66,61%	-2,79%
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	93,85 %	65,30%	-28,55%
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	92,94 %	106,66%	13,72%
18	Meningkatnya ketahanan pangan	90,29 %	95,47%	5,18%
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	90,26 %	100,26%	10%
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	103,71 %	158,75%	55,04%
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	92,50 %	1428,57%	1336,07%

Tabel 3,18

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1,740,032,489,864.00	2,120,551,129,071.85	121.87	1,522,901,390,516.55
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178,390,127,793.00	178,621,868,704.85	100.13	206,135,630,695.55
4.1.01	Pajak Daerah	41,000,250,000.00	45,159,357,455.80	110.14	43,638,422,656.00
4.1.02	Retribusi Daerah	7,952,619,500.00	6,175,889,020.00	77.66	5,743,153,528.80
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,010,810,370.00	11,010,810,384.00	100.00	9,836,676,685.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118,426,447,923.00	116,275,811,845.05	98.18	146,917,377,825.75
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	178,390,127,793.00	178,621,868,704.85	100.13	206,135,630,695.55



4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,560,894,562,071.00	1,939,810,410,535.00	124.28	1,274,449,541,251.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,450,644,562,071.00	1,758,192,189,782.00	121.20	1,174,467,043,937.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110,250,000,000.00	181,618,220,753.00	164.73	99,982,497,314.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	747,800,000.00	2,118,849,832.00	283.34	42,316,218,570.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	747,800,000.00	2,118,849,832.00	283.34	3,203,438,570.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	39,112,780,000.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	747,800,000.00	2,118,849,832.00	283.34	42,316,218,570.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,740,032,489,864.00	2,120,551,129,071.85	121.87	1,522,901,390,516.55
5	BELANJA DAERAH	2,122,153,778,445.00	1,821,565,866,670.18	85.84	1,894,067,926,592.83
5.1	BELANJA OPERASI	1,439,009,698,746.00	1,207,580,693,015.18	83.92	1,214,778,642,853.00
5.1.01	Belanja Pegawai	761,383,543,055.00	652,485,616,062.00	85.70	639,840,569,796.56
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604,326,333,840.00	494,632,432,853.18	81.85	505,996,286,092.44
5.1.05	Belanja Hibah	47,079,621,851.00	37,935,444,100.00	80.58	53,691,496,964.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26,220,200,000.00	22,527,200,000.00	85.92	15,250,290,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1,439,009,698,746.00	1,207,580,693,015.18	83.92	1,214,778,642,853.00
5.2	BELANJA MODAL	436,247,177,182.00	389,008,704,115.00	89.17	443,098,788,114.83
5.2.01	Belanja Modal Tanah	394,310,000.00	240,492,000.00	60.99	2,897,145,120.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109,403,917,048.00	72,567,584,731.00	66.33	87,589,675,673.00



5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112,572,068,902.00	108,096,084,810.00	96.02	125,469,046,825.83
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	213,225,317,172.00	207,653,888,274.00	97.39	226,307,789,870.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	651,564,060.00	395,678,300.00	60.73	835,130,626.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	54,976,000.00	-	-
	JUMLAH BELANJA MODAL	436,247,177,182.00	389,008,704,115.00	89.17	443,098,788,114.83
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22,426,879,377.00	746,426,000.00	3.33	6,471,571,965.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22,426,879,377.00	746,426,000.00	3.33	6,471,571,965.00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	22,426,879,377.00	746,426,000.00	3.33	6,471,571,965.00
5.4	BELANJA TRANSFER	224,470,023,140.00	224,230,043,540.00	99.89	229,718,923,660.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,895,286,950.00	4,895,286,950.00	100.00	5,183,544,470.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219,574,736,190.00	219,334,756,590.00	99.89	224,535,379,190.00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	224,470,023,140.00	224,230,043,540.00	99.89	229,718,923,660.00
	JUMLAH BELANJA	2,122,153,778,445.00	1,821,565,866,670.18	85.84	1,894,059,192,592.83
	SURPLUS/DEFISIT	(382,121,288,581.00)	298,985,262,401.67	(78.24)	(371,166,536,076.28)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	535,990,188,934.00	(74,904,713,200.00)	(13.98)	976,156,725,010.11
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	610,990,188,934.00	95,286,800.00	0.02	996,156,725,010.11
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	604,990,188,934.00	-	-	990,302,466,610.11
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6,000,000,000.00	95,286,800.00	1.59	5,854,258,400.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	610,990,188,934.00	95,286,800.00	0.02	996,156,725,010.11
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	100.00	20,000,000,000.00



6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	100.00	15,000,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	100.00	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100.00	5,000,000,000.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	100.00	20,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	535,990,188,934.00	(74,904,713,200.00)	(13.98)	976,156,725,010.11
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	153,868,900,353.00	224,080,549,201.67	145.63	604,990,188,933.83

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3,19

Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2021	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2,120,551,129,071.85	1,522,901,390,516.55	39.24
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178,621,868,704.85	206,135,630,695.55	(13.35)
4.1.01	Pajak Daerah	45,159,357,455.80	43,638,422,656.00	3.49
4.1.02	Retribusi Daerah	6,175,889,020.00	5,743,153,528.80	7.53
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,010,810,384.00	9,836,676,685.00	11.94
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	116,275,811,845.05	146,917,377,825.75	(20.86)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	178,621,868,704.85	206,135,630,695.55	(13.35)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,939,810,410,535.00	1,274,449,541,251.00	52.21
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,758,192,189,782.00	1,174,467,043,937.00	49.70
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181,618,220,753.00	99,982,497,314.00	81.65



4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2,118,849,832.00	42,316,218,570.00	(94.99)
4.3.01	Pendapatan Hibah	2,118,849,832.00	3,203,438,570.00	(33.86)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	39,112,780,000.00	(100.00)
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2,118,849,832.00	42,316,218,570.00	(94.99)
	JUMLAH PENDAPATAN	2,120,551,129,071.85	1,522,901,390,516.55	39.24
5	BELANJA DAERAH	1,821,565,866,670.18	1,894,067,926,592.83	(3.83)
5.1	BELANJA OPERASI	1,207,580,693,015.18	1,214,778,642,853.00	(0.59)
5.1.01	Belanja Pegawai	652,485,616,062.00	639,840,569,796.56	1.98
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494,632,432,853.18	505,996,286,092.44	(2.25)
5.1.05	Belanja Hibah	37,935,444,100.00	53,691,496,964.00	(29.35)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22,527,200,000.00	15,250,290,000.00	47.72
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1,207,580,693,015.18	1,214,778,642,853.00	(0.59)
5.2	BELANJA MODAL	389,008,704,115.00	443,098,788,114.83	(12.21)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	240,492,000.00	2,897,145,120.00	(91.70)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72,567,584,731.00	87,589,675,673.00	(17.15)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108,096,084,810.00	125,469,046,825.83	(13.85)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	207,653,888,274.00	226,307,789,870.00	(8.24)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	395,678,300.00	835,130,626.00	(52.62)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	54,976,000.00	-	100.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	389,008,704,115.00	443,098,788,114.83	(12.21)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	746,426,000.00	6,471,571,965.00	(88.47)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	746,426,000.00	6,471,571,965.00	(88.47)



	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	746,426,000.00	6,471,571,965.00	(88.47)
5.4	BELANJA TRANSFER	224,230,043,540.00	229,718,923,660.00	(2.39)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,895,286,950.00	5,183,544,470.00	(5.56)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219,334,756,590.00	224,535,379,190.00	(2.32)
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	224,230,043,540.00	229,718,923,660.00	(2.39)
	JUMLAH BELANJA	1,821,565,866,670.18	1,894,059,192,592.83	(3.83)
	SURPLUS/DEFISIT	298,985,262,401.67	(371,166,536,076.28)	(180.55)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(74,904,713,200.00)	976,156,725,010.11	(107.67)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	95,286,800.00	996,156,725,010.11	(99.99)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	990,302,466,610.11	(100.00)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	95,286,800.00	5,854,258,400.00	(98.37)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	95,286,800.00	996,156,725,010.11	(99.99)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75,000,000,000.00	20,000,000,000.00	275.00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40,000,000,000.00	15,000,000,000.00	166.67
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25,000,000,000.00	-	100.00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75,000,000,000.00	20,000,000,000.00	275.00
	PEMBIAYAAN NETTO	(74,904,713,200.00)	976,156,725,010.11	(1,303.20)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	224,080,549,201.67	604,990,188,933.83	269.99

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun keempat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **21 Sasaran 31 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 184,39% dengan rincian **23 (dua puluh tiga)** indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan** dengan rentang capaian lebih dari 90%, **3 (tiga)** indikator dengan tingkat capaian **Memuaskan** dengan rentang capaian di atas 80% s.d 90%, **2 (dua)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Sangat Baik** dengan rentang capaian di atas 70% s.d 80%, **1 (baik)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Baik** dengan rentang capaian di atas 60% s.d 70%, dan **2 (dua)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Cukup** dengan rentang capaian di atas 50% s.d 60%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh kepala SKPD dalam meningkatkan penerapan SAKIP di masing-masing SKPD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengintegrasikan system berbasis elektronik tentang Perjanjian Kinerja kedalam aplikasi penilaian kinerja seluruh PNS sehingga lebih memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar menghasilkan kinerja yang telah diperjanjikan.
3. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.

4. Melakukan perencanaan kinerja tahunan SKPD yang selaras dengan RPJMD.
5. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level Eselon III, Eselon IV dan individu pegawai.
6. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;
7. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerjanya;
8. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja yang dihasilkan.
9. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap *outcome* dan *output* secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja (tujuan dan sasaran) organisasi;
10. Meningkatkan kualitas indikator kinerja sasaran strategis pada SKPD sehingga lebih berorientasi hasil dan relevan dengan sasaran yang dicapai;
11. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegritasi mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja hingga pelaporan agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerjanya;
12. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
13. Mendorong APIP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD, sehingga menciptakan pemahaman yang merata antar SKPD, serta mendorong secara khusus kepada SKPD pengampu bidang perencanaan dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran;



14. memberikan *reward* dan *punishment* kepada SKPD sesuai dengan kinerja organisasi.

Pelaihari, Maret 2023
Bupati Tanah Laut,

H. SUKAMTA



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 126 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Laut.
7. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 54 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Di tetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Rumus Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1 Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Minimum 0 tahun, maksimal 15 tahun (sesuai standar global) $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun telah bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun yang mendapatkan ijazah}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2 Harapan lama sekolah (tahun)	$HSL_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan :</p> HSL_a = Harapan Lama Sekolah Pada Umur a di tahun t E_i^t = Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	Rata-rata harapan hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	1. Sumber Data Badan Pusat Statistik 2. Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah IKM SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	1. Bagian Organisasi 2. Seluruh SKPD

	masyarakat lainnya				
4	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	$\frac{\text{Jumlah budaya daerah yang dikembangkan dan dilestarikan}}{\text{Jumlah budaya daerah}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	Jumlah Atlet yang berprestasi dalam kompetisi minimal kompetisi tingkat provinsi	Dinas Keperumudaan dan Olah Raga
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	$\frac{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang masuk}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	Inovasi Pelayanan Publik yang masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan Publik minimal tingkat provinsi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7	Meningkatnya kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

			dan Kesehatan Hewan 3. Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan 4. Diskopdag
	2	Indeks Gini (skor)	$G = 1 - \sum_{i=1}^i P_i(Q_i + Q_{i+:-})$ <p>Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi = Persentase kumulatif total pendapat atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika :</p> <p>G < 0,3 = Ketimpangan rendah</p> <p>0,3 ≤ G = Ketimpangan Sedang</p> <p>≤0,5</p> <p>G > 0,5 = Ketimpangan tinggi</p> <p>1. Sumber Data Badan Pusat Statistik</p> <p>2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>4. Diskopdag</p>
	3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	<p>PDRB</p> <p><u>Penduduk Pertengahan Tahun</u></p> <p>1. Sumber Data Badan Pusat Statistik</p> <p>2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan</p>

8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian SAKIP Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun n	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Inspektorat 3. Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Inspektorat
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	Hasil evaluasi keterbukaan informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	Diharapkan tidak ada konflik antar umat maupun seagama	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Bagian Kesejahteraan Masyarakat
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	Diharapkan tidak ada konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB \text{ tahun ke } n - PDRB \text{ tahun } (n-1)}{PDRB \text{ tahun } (n-1)} \times 100\%$	1. Sumber Data Badan Pusat Statistik 2. Dinas Peternakan

				Perkebunan 4. Diskopdag
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	1. Sumber data BPS 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian
			<ul style="list-style-type: none"> - Angkatan kerja = penduduk usia kerja (15+) yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran - Pengangguran = mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa, sudah ada pekerjaan tapi belum mulai bekerja $TPPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$	
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	Badan Penanggulangan Bencana daerah
		3	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	Dinas Sosial
			$\frac{\text{PMKS tahun } n - \text{PMKS tahun } n-1}{\text{PMKS tahun } n-1} \times 100\%$	

16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur		1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Petanian	Growth Pertanian= $= \frac{\text{PDRD ADHK Per laianan tahun } n - \text{PDRD ADHK Per laianan tahun } (n-1)}{\text{PDRB ADHK Pertanian tahun } (n-1)} \times 100\%$	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan 4. Dinas Pariwisata 5. Dinas Kopdag
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	Pertumbuhan sector industry olahan dalam PDRB Growth Industri Olahan (GIO) $\text{GIO} = \frac{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } n - \text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)}{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)} \times 100\%$	1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

					3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun n	Dinas Pariwisata
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) × bobot masing-masing kelompok pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	30 % indeks pencemaran air + 30% indeks pencemaran udara + indeks cakupan lahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	$\frac{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa Kategori Maju	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4	Jumlah Desa di bina berciri khas	Desa di bina berciri khas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	$\frac{\text{Luasan permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRYAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

H. SUKAMTA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 21384 Pelaihari

PERNYATAAN TELAH DIREVIU APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pelaihari, 15 Februari 2023



Drs. Joko Wuryanto, M. Si
Kepala Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650116 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 21384

Pelaihari, 15 Februari 2023

Nomor : 700/ 49 /LHR-SAKIP/Insp/ 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Kepada Yth.
Bupati Tanah Laut
di-
Pelaihari

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap perundang undangan serta untuk menjamin kualitas terkait penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu dilaksanakan Reviu dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan prinsip sebagai berikut :

1. Memastikan kesesuaian Visi dan Misi Tujuan dan sasaran dan target antara LKjIP dengan RPJMD;
2. Memastikan sasaran, indikator sasaran dan target dalam LKjIP telah sesuai dokumen IKU;
3. Memastikan sumber data yang sajikan dalam LKjIP telah andal dan sesuai dengan data OPD penanggungjawab;
4. Memastikan PK yang telah dibuat, diformalkan, ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sasaran, indikator dan target sesuai dengan program, kegiatan dan anggaran;
5. Memastikan penyajian pengukuran keberhasilan/ kegagalan di setiap pencapaian terget kinerja;
6. Membandingkan antara realisasi target kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan target jangka menengah/ RPJMD;

7. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
8. Memastikan penyajian analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan dan pendukung target kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan serta analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. Reviu dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah.

II. Simpulan Reviu

Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, tidak terdapat hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan, sebagaimana telah kami tuangkan dalam lembar pernyataan telah direviu oleh APIP.

Substansi informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sepenuhnya menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Hal-hal yang bersifat perbaikan dan penyempurnaan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut, kami tuangkan dalam saran.

III. Uraian Hasil Reviu.

1. Data Umum

a. Dasar Pelaksanaan Reviu.

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 4) Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 08 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022;

- 5) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 065/0363/ORG tanggal 1 Februari 2023 tentang Permohonan Reviu LKjIP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
- 6) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 094/118 /Insp/2023 Tanggal 1 Februari 2023.

b. Waktu Pelaksanaan Reviu.

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dilaksanakan mulai tanggal 1 s/d 15 Februari 2023 (11 hari)

c. Tujuan Reviu

- 1) Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- 2) Memberikan keyakinan terbatas dan saran mengenai akurasi, kendalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut yang berkualitas.

d. Ruang Lingkup Reviu.

- 1) Pengumpulan data/ informasi yang akan digunakan untuk pengujian terhadap keandalan dan akurasi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
- 2) Penelaahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) secara ringkas untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan;

IV. Catatan Hasil Reviu.

Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Memastikan kesesuaian Visi dan Misi Tujuan dan sasaran dan target antara LKjIP dengan RPJMD, sebagai berikut :
 - a. Visi, Misi dan Tujuan pada LKjIP telah sesuai dengan RPJMD;
 - b. Indikator tujuan dan indikator sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan RPJMD;
 - c. Target yang tercantum pada LKjIP telah sesuai dengan RPJMD.

2. Memastikan sasaran, indikator sasaran dan target dalam LKjIP sesuai dokumen IKU, sebagai berikut :
 - a. Sasaran, Indikator Sasaran dan Target dalam LKjIP telah sesuai dokumen IKU;
3. Memastikan sumber data yang sajikan dalam LKjIP telah andal dan sesuai dengan data OPD penanggungjawab :
 - a. Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) belum menunjukkan data terkait kualitas pendidikan.
 - b. Indikator Harapan Lama Sekolah (tahun) capaian target belum menunjukkan kualitas data untuk indikator (andal, absah, akurat);
 - 1) Data jumlah tenaga pendidik dan Kependidikan, yang bersertifikasi,
 - 2) Pemanfaatan BOS (sarparas yang berstandar);
 - 3) Sekolah yang terakreditasi;
 - c. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (kenaikan 1,12 poin):

Belum adanya data aplikasi yang memudahkan layanan masyarakat di SKPD yang ditampilkan, hal ini untuk meyakinkan bahwa data hasil survey memang andal;
 - b. Indikator Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah tercapai 100%:
 - 1) Belum menyajikan data perolehan pelestarian budaya daerah yang dilakukan tahun sekarang (bentuknya apa), berapa jumlah budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - 2) Data yang disajikan hanya 2 (dua) Kecamatan, untuk Kecamatan yang lain belum tersaji;
 - 3) Data pengembangan budaya daerah belum ada, (budaya yang dikembangkan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui berapa budaya daerah yang dapat dikembangkan.
 - c. Indikator Jumlah Atlit Berprestasi :

Belum terdapat data untuk mengetahui perolehan atlit berprestasi di Tingkat Daerah/ Regional, Nasional dan Internasional, (akan diketahui dan untuk memudahkan dalam melakukan pembinaan selanjutnya).
 - d. Indeks Keterbukaan Informasi Publik :
 - 1) Data KIM Desa belum disajikan;
 - 2) Data 12 (jenis) jenis dokumen yang wajib dipublis oleh SKPD (untuk meningkatkan capaian di SKPD);

- e. Indikator persentase permohonan layanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti (100%) :
- Belum ada data untuk pelayanan pada SKPD lainnya, sehingga belum bisa menghitung data untuk level Kabupaten (data andal, absah, akurat) dan perhitungan indikatornya.
- f. Indikator Jumlah konflik intern dan antar umat beragama (kasus) Tagret 0:
- 1) Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target tidak mendukung capaian indikator;
- g. Indikator Jumlah konflik sosial (kasus) Tagret 0:
- 1) Data kegiatan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 belum andal, absah, akurat.
- 2) Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target tidak mendukung capaian indikator.
4. Memastikan PK yang telah dibuat, diformalkan, ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sasaran, indikator dan target sesuai dengan program, kegiatan dan anggaran :
- Sasaran, indikator dan target pada PK telah sesuai dengan program, kegiatan dan anggaran;
5. Memastikan penyajian pengukuran keberhasilan/ kegagalan di setiap pencapaian target kinerja :
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Skor);**
- Nilai ini mengalami penurunan 0,92 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 68,70
6. Membandingkan antara realisasi target kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan target jangka menengah/ RPJMD;
- Indikator Jumlah Atlet Berprestasi :**
- Belum disajikan data capaian target tahun sebelumnya, hal ini untuk memudahkan menghitung kenaikan/ penurunan capaian.
7. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada). Telah tersaji realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, yaitu pada target Indikator .
8. Memastikan penyajian analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan yang pendukung target kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan serta analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

- a. Semua Sasaran yang telah disajikan belum ada Informasi terkait Efektivitas dan Efisiensi penggunaan Sumber Daya (SDM),
- b. Penyajian analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan dan pendukung target kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - 1) **Indikator Angka rata-rata lama sekolah (tahun)**, belum terdapat data dan analisa yang menggambarkan kualitas pendidikan (berdasarkan SPM pada Permendikbudristek 32 tahun 2022 tentang SPM pendidikan Bab III tentang Mutu Pelayanan Dasar);
 - 2) **Indikator Harapan lama sekolah (tahun)**, belum terdapat data dan analisa terkait.
 - 3) **Indikator Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)**, belum adanya data dan analisa terkait pelestarian budaya daerah yang dilakukan tahun sekarang (bentuknya apa), berapa jumlah budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (SK penetapan budaya daerah), kegiatan Nanang dan Galuh. (seleksi nanang dan galuh);
 - 4) **Indikator Jumlah Atlet yang berprestasi**, belum adanya data dan analisa terkait perolehan atlit yang berprestasi di Tingkat Internasional/ Nasional/ Regional.

V. Saran :

Dari beberapa catatan hasil reuiu disarankan kepada Tim penyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut untuk segera menidaklanjuti :

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait data yang belum disajikan sesuai capaian kinerja RPJMD :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk capaian indikator Angka rata-rata lama sekolah (tahun);
 - b. Dinas Pemuda olah Raga untuk data capaian Jumlah atlit berprestasi di Tingkat Internasional/Nasional/ Regional;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika terkait data Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
2. Melakukan perbaikan dan pemenuhan data serta analisa disetiap capaian target sebagaimana yang disampaikan pada **Catatan Hasil Reviu**.

VI. Status tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya.

Dari beberapa rekomendasi hasil revid Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (LKjIP) Tanah Laut tahun sebelumnya, Tim Penyusun laporan telah melakukan tindak lanjut atas hasil revid dengan melakukan perbaikan sesuai hasil rekomendasi.

VII. Penutup.

Demikian Laporan Hasil Revid atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, disampaikan untuk menjadi perhatian dan bahan perbaikan selanjutnya.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menyampaikan ucapan terimakasih kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, sehingga revid dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Inspektur,

Drs. Joko Wuryanto, M. Si
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650116 199203 1 008

Ar I

- udk.





PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022



BUPATI TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pelaihari, Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)		Indikator Kinerja Utama	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8.05	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	13.19	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	69.6	Sumber Data Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks kepuasan masyarakat	77.5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DP2KBP3A Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung Bagian Organisasi Seluruh SKPD
4	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	81	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Sekretariat Daerah Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	20 Unit Usaha	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	A (81)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Daerah Inspektorat

9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	47.62	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Kesejahteraan Masyarakat
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	Badan kesatuan Bangsa dan Politik
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	4	Suber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		2	Indeks Gini (skor)	0.254	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	36.81	Suber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,00	Sumber data BPS Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.4	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Dinas Sosial
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	125 (Sedang)	Badan Penanggulangan Bencana daerah Dinas Sosial
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	25	Dinas Sosial Sekretariat Daerah
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	89	DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3.53	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kopdag Seluruh Kecamatan
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7.69	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	300,000	Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	71.27	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	92	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa kategori Maju	26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	837,154,586,623.00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	78,038,972,966.00
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64,566,699,533.00
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	20,546,007,459.00
5	Program Pengembangan Perumahan	100,000,000.00
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	441,784,433.00
7	Program Pemberdayaan Sosial	530,011,340.00
8	Program Perencanaan Tenaga Kerja	17,585,433.00
9	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	82,680,026.00
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	474,977,332.00
11	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	69,936,000.00
12	Program Pendaftaran Penduduk	371,856,582.00
13	Program Penataan Desa	300,943,946.00
14	Program Pengendalian Penduduk	95,360,624.00
15	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLaj)	22,724,891,456.00
16	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2,153,605,704.00
17	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,294,999,721.00
19	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	49,805,090.00
20	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	49,971,151.00
21	Program Pengembangan Kebudayaan	59,999,034.00
22	Program Pembinaan Perpustakaan	184,845,811.00
23	Program Pengelolaan Arsip	15,000,000.00
24	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	339,878,035.00
25	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	355,130,716.00
26	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	20,000,000.00
27	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	338,998,722.00
28	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	31,269,578,237.00
29	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	25,866,341,086.00
30	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	677,911,641.00
31	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	247,672,029,964.00
32	Program Kepegawaian Daerah	1,108,692,851.00

33	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	788,440,244.00
34	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	135,905,488.00
35	Program Penyelenggaraan Pengawasan	540,005,000.00
36	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	41,028,879.00
37	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	230,075,647.00
38	Program Pengembangan Kurikulum	-
39	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	30,227,270,572.00
40	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	24,924,413,988.00
41	Program Kawasan Permukiman	8,325,190,000.00
42	Program Penanggulangan Bencana	715,482,685.00
43	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	359,546,040.00
44	Program Perlindungan Perempuan	112,308,449.00
45	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	390,233,333.00
46	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	917,702,137.00
47	Program Pencatatan Sipil	159,959,150.00
48	Program Peningkatan Kerjasama Desa	141,854,554.00
49	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB	1,968,262,366.00
50	Program Pengelolaan Pelayanan	73,264,433.00
51	Program Aplikasi Informatika	2,846,394,139.00
52	Program Promosi Penanaman Modal	120,539,315.00
53	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	11,091,846,557.00
54	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	815,937,323.00
55	Program Perlindungan Penyelamatan Arsip	-
56	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	196,509,453.00
57	Program Pemasaran Pariwisata	139,917,543.00
58	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4,253,456,940.00
59	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	375,452,549.00
60	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	19,800,000.00
61	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,130,299,668.00
62	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	116,141,641.00
63	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5,889,194,761.00
64	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	350,912,566.00
65	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3,788,913,141.00
66	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,587,136,645.00

67	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	179,934,482.00
68	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	-
69	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-
70	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakar	274,896,000.00
71	Program Rehabilitasi Sosial	4,529,999,995.00
72	Program Penempatan Tenaga Kerja	120,333,024.00
73	Program Penanganan Kerawanan Pangan	51,918,551.00
74	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	60,830,000.00
75	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	10,159,050,169.00
76	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	276,170,566.00
77	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,630,009,071.00
78	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	466,506,891.00
79	Program Pelayanan Penanaman Modal	153,485,946.00
80	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	675,000,000.00
81	Program Pembinaan Sejarah	341,840,110.00
82	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	229,361,421.00
83	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	302,269,430.00
84	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	169,969,656.00
85	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	69,598,532.00
86	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,136,490,174.00
87	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	57,117,234.00
88	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	145,000,000.00
89	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	-
90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	777,000,000.00
91	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	6,028,996,288.00
92	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	796,156,492.00
93	Program Hubungan Industrial	55,391,471.00
94	Program Pengawasan Keamanan Pangan	78,564,102.00
95	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,156,132,951.00
96	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19,968,667.00
97	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	56,000,000.00
98	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	248,544,967.00
99	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	99,898,026.00
100	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	89,898,149.00
101	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	29,557,397.00
102	Program Pengembangan Ekspor	-

103	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7,923,998,188.00
104	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	124,389,879.00
105	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6,924,829,000.00
106	Program Penanganan Bencana	195,076,408.00
107	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	171,170,679.00
108	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	81,789,669.00
109	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70,543,892.00
110	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	119,983,236.00
111	Program Perizinan Usaha Pertanian	16,721,679.00
112	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	43,827,588.00
113	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	137,757,363.00
114	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	249,999,688.00
115	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	27,566,450.00
116	Program Perlindungan Khusus Anak	229,356,724.00
117	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	548,221,556.00
118	Program Penyuluhan Pertanian	157,949,739.00
119	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	50,000,000.00
120	Program Penataan Bangunan Gedung	26,394,112,137.00
121	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	99,999,345.00
122	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-
123	Program Penyelenggaraan Jalan	110,021,258,779.00
124	Program Penatagunaan Tanah	2,582,377,078.00
125	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19,999,619.00
126	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	545,739,440.00
127	Program Pengelolaan Persampahan	3,098,743,447.00
128	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,499,999,429.00
TOTAL		1,635,547,777,496.00

Pelaihari, Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA



PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022



BUPATI TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pelaihari, November 2022

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)		Indikator Kinerja Utama	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8.05	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	13.19	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	69.6	Sumber Data Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks kepuasan masyarakat	77.5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DP2KBP3A Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung Bagian Organisasi Seluruh SKPD
4	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	81	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Sekretariat Daerah Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	20 Unit Usaha	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	A (81)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Inspektorat

9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	47.62	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	Badan kesatuan Bangsa dan Politik
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	4	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		2	Indeks Gini (skor)	0.254	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	36.81	Suber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,00	Sumber data BPS Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.4	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Dinas Sosial
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	125 (Sedang)	Badan Penanggulangan Bencana daerah Dinas Sosial
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	25	Dinas Sosial Sekretariat Daerah
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	89	DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3.53	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kopdag Seluruh Kecamatan
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7.69	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (ribu orang)	300,000	Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	71.27	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	92	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa kategori Maju	26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	125,481,965,023.00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	179,934,482.00
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	166,049,979,298.00
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	34,212,567,449.00
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34,375,119,354.00
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	38,221,067,443.00
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2,727,000,000.00
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	13,564,829,000.00
13	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	31,548,655,137.00
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	59,999,400.00
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	156,636,096,471.00
16	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	562,651,387.00
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3,499,999,429.00
18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100,000,000.00
19	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	14,302,206,776.00
20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	25,928,996,288.00
21	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	951,784,433.00
22	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	682,785,776.00
23	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	322,592,700.00
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	530,011,340.00
25	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4,712,818,176.00
26	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6,898,821,492.00
27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	195,076,408.00
28	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	27,566,450.00
29	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	17,585,433.00
30	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	359,546,040.00
31	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	120,333,024.00
32	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	48,085,000.00

33	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	157,501,937.00
34	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	291,711,210.00
35	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	171,170,679.00
36	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	497,807,295.00
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3,195,754,898.00
38	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	442,791,918.00
39	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	51,918,551.00
40	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	83,279,858.00
41	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	660,776,487.00
42	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2,582,353,615.00
43	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	69,936,000.00
44	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,797,675,167.00
45	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	11,596,474,919.00
46	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	81,789,669.00
47	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-
48	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19,999,619.00
49	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5,479,243,172.00
50	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	370,088,205.00
51	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	146,199,310.00
52	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	276,170,566.00
53	PROGRAM PENATAAN DESA	300,943,946.00
54	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	141,854,554.00
55	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,446,540,758.00
56	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,596,082,342.00
57	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	215,934,411.00
58	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4,723,341,676.00
59	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,481,507,100.00
60	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	31,939,406,011.00
61	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	59,484,433.00
62	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,420,881,290.00
63	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2,952,853,600.00
64	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	424,167,701.00
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7,262,351,324.00
66	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-

67	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	86,918,315.00
68	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	115,856,646.00
69	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	419,903,600.00
70	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	70,543,892.00
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,559,026,019.00
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12,142,932,655.00
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	675,000,000.00
74	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	49,805,090.00
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	49,971,151.00
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	45,999,034.00
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1,335,927,973.00
78	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	341,750,110.00
79	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	248,544,967.00
80	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	844,532,274.00
81	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	21,960,000.00
82	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-
83	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2,066,309,223.00
84	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	328,306,687.00
85	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	99,898,026.00
86	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	132,983,236.00
87	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	339,878,035.00
88	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	488,761,957.00
89	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	89,892,611.00
90	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,505,537,697.00
91	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14,598,659,882.00
92	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	619,160,328.00
93	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	154,509,542.00
94	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	16,721,679.00
95	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,634,699,687.00
96	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	20,000,000.00
97	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	739,301,821.00
98	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	329,600,268.00
99	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-
100	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	43,822,408.00
101	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	468,999,456.00
102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	338,997,997.00

103	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	11,890,000.00
104	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	69,598,532.00
105	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	33,894,807,823.00
106	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,636,958,144.00
107	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26,231,786,316.00
108	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	650,126,753.00
109	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	146,476,998.00
110	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	248,473,769,391.00
111	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9,588,994,567.00
112	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,676,730,461.00
113	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,314,990,175.00
114	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	979,324,244.00
115	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	44,236,413.00
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	574,979,700.00
117	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	467,737,810.00
118	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41,028,879.00
119	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,685,636,442.00
120	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57,117,234.00
121	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,915,119,392.00
122	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	91,353,480.00
123	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	219,458,136.00
124	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,587,111,014.00
125	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	145,000,000.00
126	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	247,145,879.00
127	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3,449,997,296.00
128	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	987,671,625,670.00
TOTAL		2,122,153,778,445.00

Pelaihari, November 2022

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU Kabupaten Tanah Laut
2. Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2022
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Daftar Penghargaan Tahun 2022
5. Foto Penerimaan Penghargaan Tahun 2022